

Dedi Irwanto
Dudy Oskandar

Sejarah DPRD Sumatera Selatan

Tiga Masa Menjaga Pembangunan di Bumi Sriwijaya



**Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta**

Pasal 2 :

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan pidana

Pasal 72 :

Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan pembuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000.,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hak Cipta, Desember 2022

PENERBIT AKSARA PENA

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku dengan cara apapun, termasuk dengan menggunakan mesin fotocopi dan Peralatan elektronik lainnya, tanpa seizin dari penerbit.

Sejarah DPRD Sumatera Selatan: Tiga Masa Menjaga Pembangunan di Bumi Sriwijaya

Penulis

Dedi Irwanto dan
Dudy Oskandar

**Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan
2022**



SEJARAH DPRD SUMATERA SELATAN: **Tiga Masa Menjaga Pembangunan di Bumi Sriwijaya**

@F-P-AKSPEN

Cetakan Pertama, Desember 2022

Halaman xxviii + 255 ukuran: 14,5 x 21 cm

Penulis

Dedi Irwanto dan Dudy Oskandar

Editor

Saudi Berlian

Perancang Sampul dan Penata Letak :

Tim Aksara Pena

Sumber Sampul:

Facebook humas & protocol Sekretariat DPRD Prov. Sumsel

Didistribusikan Oleh :

PENERBIT AKSARA PENA

Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)

Provinsi Sumatera Selatan

No: 016/SMS/19

SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

Jalan Kapten A. Rivai Telp. 0711-313184, 311537, 360587

Fax. 0711-320121, 0711-360578 Palembang 30137

ISBN: 978-623-9945-57-2

Jalan KH. Azhari nomor 789, Palembang,
Sumatera Selatan.

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Nomor : 000344671

Sesuai dengan Pasal 72 Undang- Undang

Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Telp/Fakx. 0711-5742322-082269300672

Aksarapena *online Bookstore*:

www.aksarapena.com

Email: keranjangaksarapena@gmail.com

Instagram @penerbitaksarapena

Facebook @aksarapena

iv | *Sejarah DPRD Sumatera Selatan*: Tiga Masa Menjaga Pembangunan di Bumi Sriwijaya



H. Herman Deru, S.H., MM.
Gubernur Provinsi Sumatera Selatan



Ir. H. Mawardi Yahya
Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan



Hj. R.A. Anita Noeringhati, S.H., M.H.
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan



H. M. Giri Ramanda N. Kiemas, S.E., MM.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan



Hj. Kartika Sandra Dewi, S.H., MM.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan



H. Muchendi Mahzareki, S.E.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan



Ramadhan S. Basyeban, S.H., M.H.
Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Sambutan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan



*Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh
Salam sejahtera untuk kita semua*

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sudah ada dan telah eksis di Sumatera Selatan, jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi ini membuktikan bahwa sejak dahulu penadbiran pemerintahan daerah dengan berasaskan demokratisasi serta menghadirkan prinsip berdemokrasi berdasarkan musyawarah dan mufakat telah tercipta dan berkembang di Sumatera Selatan. Pada perjalanan sejarah pemerintahan di Sumatera Selatan, keberadaan DPRD sebagai representasi lembaga perwakilan rakyat berkembang sejak zaman penjajahan Belanda, baik *gemeenteraad* dan *Groepsgemeenschap Palembangraad* dan berlanjut pada zaman penjajahan Jepang dengan *Shu Sangi Kai*. Pada era pasca kemerdekaan, pembentukan lembaga perwakilan rakyat di Sumatera Selatan terus menyesuaikan dari lembaga perwakilan rakyat yang telah ada mulai Komite Nasional Indonesia Daerah Sumatera Selatan (KNID Sumsel), DPR Sumatera Selatan, DPRD-S (Sementara) Sumatera Selatan, DPRD-GR (Gotong Royong) Sumatera Selatan hingga DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Keberadaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan tidak saja melambangkan hadirnya demokratisasi musyawarah dan mufakat.

Namun berjuang mengawal, turut serta dan menjaga roda dan jalannya pembangunan di Bumi Sriwijaya. Sriwijaya bukti kebesaran dan jejak Provinsi Sumatera Selatan sejak masa lalu, sebuah kerajaan maritime yang gilang gemilang berhasil menguasai jalur pelayaran dan perdagangan di dunia sekaligus poros perdagangan Nusantara ke seluruh dunia.

Provinsi Sumatera Selatan sebagai pewaris dari Sriwijaya dari buminya mengalir berbagai sumber daya kekayaan, baik alam yang menyediakan hasil bumi pertanian, perkebunan dan pertambangan. Maupun sumber daya manusia dari beragam entitas suku seperti Melayu Palembang, Komerling, Ogan, Pasemah, Musi, Semendo, dll serta para pendatang seperti Jawa, Minangkabau dll. Semuanya dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat daerah Sumatera Selatan dan Nusantara dengan tanpa konflik antar suku satu dengan yang lain di Provinsi Sumatera Selatan. Keadaan yang sama juga berkelindan dalam pembangunan politik di Sumatera Selatan. Di mana, DPRD Provinsi Sumatera Selatan walau hadir dari berbagai suku tersebut, kekompakkan dalam menjaga pembangunan dan mensejahterakan Bumi Sriwijaya sangat terasa hadir di antara para anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Menurut hemat saya, Tuhan memberi dan menganugerahkan rahmatnya di Bumi Sriwijaya yang harus terus kita jaga dan berdayakan untuk kesejahteraan semuanya.

DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang saya pimpin dengan bangga mempersembahkan buku berjudul *Sejarah DPRD Sumatera Selatan: Tiga Masa Menjaga Pembangunan di Bumi Sriwijaya*. Buku ini merupakan bagian dari pelestarian *institutional memory* sebuah lembaga perwakilan rakyat di Sumatera Selatan, yang kental dengan narasi sejarah politik perkembangan konstitusi dan institusi lembaga perwakilan rakyat di Sumatera Selatan dengan warna aliran cerita kekompakan tanpa konflik berarti di antara anggota dewan di DPRD Sumatera Selatan dalam menjaga kemakmuran dan pembangunan untuk kesejahteraan wilayah ini sejak masa silam.

Buku *Sejarah DPRD Sumatera Selatan: Tiga Masa Menjaga Pembangunan di Bumi Sriwijaya* ini selain sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas yang telah dikerjakan DPRD Provinsi Sumatera Selatan selama ini, juga merupakan dokumen dan rekaman sejarah dalam bentuk informasi mengenai kegiatan kedewanan sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Buku ini perlu diketahui tidak hanya oleh internal anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan saja, tetapi lebih jauh lagi harus

diketahui oleh masyarakat Sumatera Selatan, masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia. Isi Lintas Sejarah DPRD Provinsi Sumatera Selatan, bagi kami merupakan evaluasi untuk mengukur kinerja dan bobot pengabdian kami selama ini dan ke depan dengan bercermin dari perjalanan DPRD Provinsi Sumatera Selatan sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tentunya, kami berharap mudah-mudahan buku *Sejarah DPRD Sumatera Selatan: Tiga Masa Menjaga Pembangunan di Bumi Sriwijaya* ini akan menjadi salah satu masukan atau informasi bagi masyarakat Sumatera Selatan dan masyarakat Indonesia, baik sebagai upaya mengenang pengabdian para pendahulu di DPRD Provinsi Sumatera Selatan maupun sebagai cermin kehidupan menuju lebih baik dalam pengabdianannya dalam berjuang di masyarakat.

Sepanjang perjalanan Lembaga Wakil Rakyat Provinsi Sumatera Selatan, banyak hal yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu perjuangan sebagaimana tugas dan fungsi wakil rakyat pada zamannya. Namun demikian, kita sadari ada kesempurnaan ada juga kekurangan dalam setiap pelaksanaan tugas. Hal itu tentu sebagai hal yang biasa. Namun kita yakin bahwa apa yang dilakukan wakil rakyat pada zamannya insya Allah adalah yang terbaik yang dapat diberikan kepada masyarakat Sumatera Selatan dan sumbangsih serta darma bakti kepada Ibu Pertiwi.

Terimakasih dan apresiasi kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan, editing, hingga proses penerbitan buku *Sejarah DPRD Sumatera Selatan: Tiga Masa Menjaga Pembangunan di Bumi Sriwijaya*. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan pahala bagi kita semua. Aaamiiiiin. Kehadiran buku *Sejarah DPRD Sumatera Selatan: Tiga Masa Menjaga Pembangunan di Bumi Sriwijaya* ini semoga bisa memberikan manfaat keilmuan sebagai sebuah media belajar bagi akademisi, para pembuat kebijakan khususnya politik di regional, dan tak lupa semakin menambah kecintaan masyarakat terhadap daerahnya. Penyematan kata Bumi Sriwijaya sebagai julukan lain Provinsi Sumatera Selatan kiranya dapat menjadi penyemangat dalam melanjutkan pembangunan politik, ekonomi, social dan budaya, tidak saja dari Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dan DPRD Provinsi Sumatera, namun juga dukungan seluruh lapisan masyarakat di seluruh Provinsi Sumatra Selatan.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh
Palembang, Desember 2022

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera
Selatan

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'ANITA NOERINGHATI', with a long, sweeping flourish extending upwards and to the right.

Hj. R.A. Anita Noeringhati, S.H., M.H.

Pengantar Penulis

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena buku *Sejarah DPRD Sumatera Selatan: Tiga Masa Menjaga Pembangunan di Bumi Sriwijaya* ini selesai disusun. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas anggota partai politik peserta pemilihan umum yang dipilih melalui pemilihan umum. DPRD Provinsi Sumatera Selatan merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Provinsi Sumatera Selatan.

Melalui buku ini, kita mampu memetik berbagai pelajaran berharga guna meningkatkan ikhtiar kita dalam menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan, terutama dalam kaitan fungsi utama DPRD Provinsi Sumatera Selatan, yaitu fungsi pengaturan, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan.

Buku *Sejarah DPRD Sumatera Selatan: Tiga Masa Menjaga Pembangunan di Bumi Sriwijaya* hadir di tangan pembaca saat ini merupakan wujud keinginan besar ketua dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2019-2024. Keinginan ini dilatarbelakangi belum adanya buku khusus sejarah DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang berbicara tentang sejarah dari mulai masa awal kehadiran DPRD Provinsi Sumatera Selatan di tengah masyarakat hingga masa sekarang dengan sebuah kajian akademik. Sehingga buku *Sejarah DPRD Sumatera Selatan: Tiga Masa Menjaga Pembangunan di Bumi Sriwijaya* ini diharapkan dapat lebih mendekatkan lagi hubungan emosional antara anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan masyarakat.

Buku ini bertujuan untuk mendokumentasikan memori institusi DPRD Provinsi Sumatera Selatan sekaligus memperkaya kehadiran referensi pengetahuan tentang sejarah politik yang kaya dengan muatan lokal atau kedaerahan. Sebagai karya akademik, buku ini dapat menjadi referensi maupun pengantar penelitian bagi praktisi, akademisi, mahasiswa maupun masyarakat yang ingin mendalami topik-topik tentang sejarah politik lokal Sumatera Selatan. Meskipun fokus kajian dalam buku ini tentang sejarah kehadiran DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Sumatera Selatan, namun pembahasannya kaya dengan dinamika politik, hingga perkembangan ekonomi, sosial, dan

budaya dari hasil kerja yang dicapai DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang mewarnai peradaban di Sumatera Selatan.

Sistematika penulisan buku ini menggunakan pendekatan struktural berdasarkan periodisasi yang lekat dengan kejadian-kejadian penting dalam sejarah DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Tidak saja tiga zaman pasca kemerdekaan yakni Orde Lama, Orde Baru dan Orde Baru. Namun juga dilihat perkembangan lembaga perwakilan rakyat pada masa kolonial, pendudukan Jepang dan Revolusi Fisik untuk menggambarkan perjuangan pembentukan dewan di Sumatera Selatan. Target pembaca buku ini tidak hanya kalangan akademis, pembuat kebijakan, namun juga masyarakat luas penikmat sejarah. Oleh karena itu, Tim Penulis berusaha menyusun untuk memenuhi empat unsur ideal sebuah buku, yaitu keunikan, kebaruan, menarik, dan aksesibilitas. Isi buku ini berusaha mengisi ruang-ruang kosong yang belum dituliskan oleh buku-buku lainnya. Salah satu contohnya adalah dengan memanfaatkan sumber referensi dari arsip yang tersimpan di Arsip dan Perpustakaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang belum banyak dituliskan. Adapun untuk memperluas jangkauan pembaca, penulisan buku ini sengaja menggunakan gaya penulisan semi populer sehingga tidak menjadi bacaan yang membosankan. Memahami sejarah yang baik adalah bagaimana kita dapat mengambil manfaat dari cerita tentang kejayaan maupun kegelapan masa lalu. Kami berharap buku ini tidak sekadar menambah wawasan dan pengetahuan, namun juga memberikan pelajaran berharga yang mampu menginspirasi pembacanya.

Tak lupa atas terbitnya buku ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah aktif terlibat dalam proses penelitian dan penulisan. Kami berharap informasi yang terkandung di dalam buku ini dapat memberikan gambaran utuh mengenai perkembangan struktur dan peranan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dan lembaga ini dapat melanjutkan perannya dalam mendukung roda jalannya pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan.

Pepatah mengatakan, tidak ada gading yang tidak retak. Penulis memohon maaf atas kesalahan dan ketidaksempurnaan buku ini. Penulis pun menyadari jika didalam penyusunan buku ini mempunyai kekurangan, namun penulis meyakini sepenuhnya bahwa sekecil apapun buku ini tetap akan memberikan sebuah manfaat bagi pembaca. Akhir kata untuk penyempurnaan buku ini, maka kritik dan saran dari pembaca sangatlah berguna untuk penulis kedepannya. Semoga setiap usaha kita semua dalam berkhidmat bagi kemajuan

dan kesejahteraan umat, bangsa dan negara mendapatkan rahmat dan ridho Allah Swt. Besar harapan kami semoga buku ini bermanfaat bagi pembaca. Aamiin. Selamat membaca.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Palembang, Desember 2022

Dr. Dedi Irwanto dan Dudy Oskandar, S.H.

DAFTAR ISI

Sambutan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan.....	xiii
Pengantar Penulis.....	xvii
Daftar Isi	xx
Daftar Istilah.....	xxi
Daftar Singkatan	xxiv
Daftar Gambar	xxvii
Prolog.....	1
Bab 1 Geografi, Parlemen Masa Kolonial, Parlemen Masa Revolusi Fisik dan Dapil Sumatera Selatan.....	8
Bab 2 DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan Periode 1950-1956	39
Bab 3 DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1956-1960	63
Bab 4 DPRD Gotong Royong Provinsi Sumatera Selatan Periode 1961-1966	76
Bab 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1966-1972	88
Bab 6 DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1972-1977	95
Bab 7 DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1977-1982	106
Bab 8 DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1982-1987	112
Bab 9 DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1987-1992	122
Bab 10 DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1992-1997.....	130
Bab 11 DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1997-1999.....	143
Bab 12 DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1999-2004.....	149
Bab 13 DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2004-2009.....	172
Bab 14 DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2009-2014.....	186
Bab 15 DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2014-2019.....	194
Bab 16 DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024.....	206
Epilog	223
Daftar Pustaka.....	229

DAFTAR ISTILAH

<i>Amandemen</i>	Perubahan yang mengacu pada undang-undang
<i>Black campaign</i>	Kampanye hitam yang tidak didasarkan pada fakta dan cenderung berupa fitnah yang berpotensi mengarah pada tindak pidana
<i>Badan Legislatif</i>	Cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif dengan kuasa menetapkan hukum (peraturan) dan menaikkan pajak serta menerapkan anggaran pengeluaran uang lainnya. Dikenal dengan beberapa nama, seperti <i>parlemen</i> , <i>kongres</i> , atau <i>majelis nasional</i> .
Daerah Pemilihan (<i>Dapil</i>)	Batas wilayah atau jumlah penduduk dalam suatu wilayah pada Pemilihan Umum yang menjadi dasar penentuan jumlah kursi yang diperebutkan dan penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih
<i>Daerah Tingkat I (Dati I)</i>	Pembagian administratif di Indonesia di bawah tingkat nasional. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, istilah tersebut tidak dipergunakan lagi, diganti dengan istilah Provinsi
<i>Daerah Tingkat II (Dati II)</i>	Pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Daerah Tingkat I dapat berupa <i>Kabupaten Dati II</i> atau <i>Kotamadya Dati II</i> .
<i>Elektabilitas</i>	kemampuan atau kecakapan untuk dipilih menduduki suatu jabatan dalam pemerintahan.
<i>Fraksi</i>	kelompok dalam badan legislatif yang terdiri atas beberapa anggota yang sepaham dan sependirian.
<i>Gemeenteraad</i> <i>Groepsgemeenschap</i>	Dewan Perwakilan Kota pada masa kolonial Hindia Belanda Himpunan gabungan beberapa kepala gemeente (kota) masa kolonial Hindia Belanda
<i>Gunsyebu</i> <i>kekuasaan politik</i>	Pemerintah Balatentara Jepang tingkat Keresidenan Kewenangan (<i>authority</i>), kemampuan untuk membuat orang lain melakukan suatu hal dengan dasar hukum atau mandat yang diperoleh dari suatu kuasa.
<i>Keresidenan</i>	Wilayah administratif setingkat provinsi di Sumatera Selatan masa kolonial Hindia Belanda yang terdiri dari beberapa <i>afdeeling</i> dan <i>onderafdeeling</i> sampai ke tingkat marga, dusun dan kampung
<i>Kebijakan publik</i>	Segala sesuatu yang dinyatakan oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan atau rancangan yang dilembagakan untuk memecahkan masalah yang relevan di dunia nyata, dipandu oleh konsepsi dan diimplementasikan oleh program sebagai rangkaian tindakan yang dibuat dan/atau ditetapkan, khususnya oleh pemerintah, dalam menanggapi masalah sosial.
<i>Koalisi</i>	Kerja sama antara beberapa partai untuk memperoleh kelebihan suara dalam parlemen.

<i>Konstitusi</i>	Segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan (undang-undang dasar dan sebagainya) atau undang-undang dasar suatu negara
<i>Legitimasi</i>	Penerimaan dan pengakuan atas kewenangan yang diberikan oleh masyarakat kepada pimpinan yang telah diberikan kekuasaan
<i>Marga</i>	Unit pemerintahan supra-lokal di Palembang yang membawahi beberapa dusun
<i>Margaraaden</i> <i>Onderafdeeling</i>	dewan perwakilan marga masa kolonial Hindia Belanda Wilayah administratif di Sumatra Selatan setingkat kabupaten pada masa kolonial Hindia Belanda
<i>Oposisi</i>	Partai penentang di dewan perwakilan dan sebagainya yang menentang dan mengkritik pendapat atau kebijaksanaan politik golongan yang berkuasa. Bisa dibidang, berlawanan dengan pemerintah.
<i>Palembang Hokokai</i> <i>Parlemen</i>	Badan Kebaktian yang diciptakan Jepang di Palembang Sebuah badan legislatif yang dilaksanakan oleh sebuah pemerintah dengan sistem parlementer di mana eksekutif secara konstitusional bertanggungjawab kepada parlemen.
<i>Parliamentary threshold</i> <i>Partai Politik</i>	Ambang batas parlemen Organisasi yang mengkoordinasikan calon untuk bersaing dalam pemilihan umum di negara tertentu. Anggota partai umumnya memiliki gagasan yang sama tentang politik dan partai dapat mempromosikan tujuan ideologi atau kebijakan partainya tertentu
<i>Partisipasi politik</i>	Keikutsertaan dalam konteks politik hal ini mengacu pada pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik
<i>Pemilihan umum (Pemilu)</i>	Proses memilih seseorang untuk mengisi jabatan politik di Indonesia tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari jabatan presiden/eksekutif, wakil rakyat/Lembaga legislatif di berbagai tingkat pemerintahan, sampai kepala desa.
<i>Pemilu serentak</i>	Proses pemilihan umum, baik pemilihan presiden dan wakilnya dan pemilihan anggota legislatif yang dilakukan secara bersamaan.
<i>Petahana</i>	pemegang suatu jabatan politik tertentu (yang sedang atau masih menjabat).
<i>Politikus</i>	seseorang yang terlibat dalam politik atau termasuk juga para ahli politik. Politisi juga termasuk figur politik yang ikut serta dalam pemerintahan.
<i>Politik identitas</i>	Perasaan "kekitaan" yang menjadi basis utama perekat dalam kolektivitas kelompok yang merasa "sama" dalam beberapa hal, misal ras, etnisitas, dan agama.
<i>Proporsional</i> <i>Sistem politik</i>	Sistem perwakilan berimbang subsistem dari sistem sosial dengan perspektif melihat keseluruhan interaksi yang ada dalam suatu sistem yakni suatu unit yang relatif terpisah dari lingkungannya dan

Shu Sangi Kai

memiliki hubungan yang relatif tetap di antara elemen-elemen pembentuknya dalam kehidupan politik.

Dewan Penasehat Keresidenan Palembang Zaman Pendudukan Jepang, semacam dewan kota (*gemeenteraad*) masa Belanda

Volksraad

Dewan Rakyat semacam DPR yang berkedudukan di pusat Batavia masa Hindia Belanda

DAFTAR SINGKATAN

ABRI	Angkatan Bersenjata Republik Indonesia
A-45	Angkatan 1945
Bawaslu	Badan Pengawas Pemilihan Umum
BP	Badan Pekerja
BPD	Badan Pertimbangan Daerah
BPH	Badan Pekerja Harian
BPP	Bilangan Pembagi Pemilih
BOI	Barisan Oemmat Islam
BTI	Buruh Tani Indonesia
DCS	Daftar Calon Sementara
Caleg	Calon Legislatif
DPD	Dewan Perwakilan Daerah
DPR	Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRD-GR	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong
DPRD-S	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara
DMSS	Daerah Militer Sumatera Selatan
e-KTP	Kartu Tanda Penduduk Elektronik
Gakari	Gerakan Karya Rakyat Indonesia
Gerindo	Gerakan Rakyat Indonesia
Gerindra	Partai Gerakan Indonesia Raya
GPII	Gerakan Pemuda Islam Indonesia
GPPS	Gerakan Pembela Panca Sila
Golkar	Golongan Karya
Hankam	Pertahanan dan Keamanan
Hanura	Hati Nurani Rakyat
HAM	Hak Asazi Manusia
IPKI	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
ISG	Islamic Solidarity Games
KAMI	Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia
KIH	Koalisi Indonesia Hebat
Kino	Kelompok Organisasi Induk
KNID	Komite Nasional Indonesia Daerah
KMB	Konferensi Meja Bundar
KMP	Koalisi Merah Putih
Kotif	Kota Administratif
Kosgoro	Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong
KPPS	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
KPU	Komisi Pemilihan Umum
KRISNA	Partai Kristen Nasional Indonesia
LMD	Lembaga Musyawarah Desa
Nasdem	Nasional Demokrat
NSS	Negara Sumatera Selatan
NU	Nahdlatul Ulama
Masjumi	Majelis Syuro Muslimin Indonesia
MKGR	Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong

Munas	Musyawahar Nasional
Murba	Musyawahar Rakyat Banyak
Ormas	Organisasi Masyarakat
OPP	Organisasi Peserta Pemilu
PALI	Penukal Abab Lematang Ilir
Pantarlih	Panitia Pendaftaran Pemilih
Parindra	Partai Indonesia Raya
Parkindo	Partai Kristen Indonesia
Parnita	Partai Nasional Indonesia Turunan Arab
Parmusi	Partai Muslimin Indonesia
Partai Garuda	Partai Gerakan Perubahan Indonesia
PAN	Partai Amanat Nasional
PAW	Pengganti Antar Waktu
PBB	Partai Bulan Bintang
PDI	Partai Demokrasi Indonesia
PDIP	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Pemda	Pemerintahan Daerah
PERTI	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah
Perda	Peraturan Daerah
Perindo	Partai Persatuan Indonesia
Perpu	Peraturan Pengganti Undang-undang
Perwari	Partai Wanita Indonesia
Pileg	Pemilihan Umum Legislatif
PII	Partai Islam Indonesia
Pilkada	Pemilihan Kepala Daerah
Pilpres	Pemilihan Umum Presiden
PIR	Partai Indonesia Raya
PKB	Partai Kebangkitan Bangsa
PKI	Partai Komunis Indonesia
PKPI	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
PKS	Partai Keadilan Sejahtera
PNI	Partai Nasional Indonesia
PP	Peraturan Permerintah
PPD	Panitia Pemilihan Daerah
PPP	Partai Persatuan Pembangunan
PPS	Panitia Pemungutan Suara
PRN	Partai Rakyat Nasional
PRI	Partai Rakyat Indonesia
PSII	Partai Syarekat Islam Indonesia
PSI	Partai Sosialis Indonesia
PSI	Partai Solidaritas Indonesia
PTUN	Pengadilan Tata Usaha Negara
RIS	Republik Indonesia Serikat
Sekber	Sekretariat Bersama
SK	Surat Keputusan

Soksi
STOVIA
Supersemar
Tritura
TT II
UUDS

Sentra Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia
School Tot Opleiding Van Indische Arts
Surat Perintah Sebelas Maret
Tri Tuntutan Rakyat
Tentara dan Teritorium II
Undang-Undang Dasar Sementara

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Peta Provinsi Sumatera Selatan
- Gambar 2. Foto bersama Anggota DPRD-S 1948-1950 didepan Gedung Dewan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Gedung Nasional) di Curup, tanggal 20-23 Oktober 1948
- Gambar 3. Pembagian Dapil Pemilu 2019 di Sumatera Selatan
- Gambar 4. Foto bersama Anggota DPRDS dengan Gubernur Dr. M. Isa
- Gambar 5. Suasana Rapat DPRD-S 1950-1955
- Gambar 6. Anggota DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan Utusan Keresidenan Palembang
- Gambar 7. Anggota DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan Utusan Keresidenan Lampung (tidak ada dalam gambar Saleh Achmad)
- Gambar 8. Anggota DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan Utusan Keresidenan Bengkulu
- Gambar 9. Anggota DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan Utusan Keresidenan Bangka Belitung (tidak ada dalam gambar Rusydi Zen)
- Gambar 10. Gubernur Sumatera Selatan menguraikan keadaan daerah di rapat pleno DPRD-S 1950-1955
- Gambar 11. DPRD-S 1950-1955 Mendengarkan uraian keadaan daerah dari Gubernur Sumatera Selatan dalam rapat pleno VI
- Gambar 12. Suasana rapat pleno VI DPRD-S 27 Februari 1953.
- Gambar 13. Sebagian Anggota DPRD-S 1950-1955 bersama gubernur dari kiri ke kanan: M. Ali Hanafiah, Adjis Tjindarbumi, Daud Badaruddin, Gubernur Dr. M. Isa, Nungtjik AR, dan R. Sutardjo
- Gambar 14. Ketua DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan, Ali Gathmyr (sebelah kiri berkopiah) bersama Sekretaris Dewan, Patih R. Ahmad
- Gambar 15. Iklan Pemilu 1955
- Gambar 16. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 1955
- Gambar 17. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 1971
- Gambar 18. Pelantikan Anggota DPRD Sumsel hasil Pemilihan Umum 1971
- Gambar 19. Gambar 19. Foto Bersama Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1971-1977 di depan gedung lama DPRD Sumsel
- Gambar 20. Suasana Pemilihan Gubernur Sumsel 1973 di DPRD SS
- Gambar 21. Pelantikan Periode Kedua Gubernur Sumsel 1973-1978, H. Asnawi Mangkualam di sidang Paripurna DPRD Sumsel 1971-1977
- Gambar 22. Organisasi Peserta Pemilihan Umum 1977
- Gambar 23. Pembacaan SK nama-nama Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan hasil Pemilihan Umum 1982 oleh Sekretaris Dewan HA. Hamid Wantjik, S.H.

- Gambar 24. Penutupan Sidang Paripurna Istimewa DPRD Sumatera Selatan oleh Ketua Periode sebelumnya, M. Umar RA sebelum diserahkan palu pimpinan kepada K.H. Yusuf Umar pimpinan sementara DPRD Sumatera Selatan Hasil Pemilu 1982
- Gambar 25. Penandatanganan Berita Acara Pelantikan Pimpinan DPRD Sumatera Selatan hasil Pemilu 1982 oleh Gubernur H. Sainan Sagiman
- Gambar 26. Pengambilan Sumpah BPD oleh Gubernur H. Sainan Sagiman
- Gambar 27. Pelantikan Periode Kedua H. Sainan Sagiman sebagai Gubernur Sumatera Selatan 1983-1988 dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sumatera Selatan 1982-1987 oleh Menteri Dalam Negeri RI
- Gambar 28. Makam Sultan Mahmud Badaruddin II di Kampung Palembang, Ternate tahun 1983
- Gambar 29. Gedung Baru DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan ciri arsitektur Rumah Limas Sumatera Selatan yang anggun
- Gambar 30. Organisasi Peserta Pemilihan Umum 1987
- Gambar 31. Jurkam Golkar dalam Kampanye Pemilu 1987 di Lapangan Hatta Palembang
- Gambar 32. Peresmian Pembangunan Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera) tahun 1988 masa DPRD Sumatera Selatan Periode 1988-1993
- Gambar 33. Ketua Umum PPP dalam Kampanye Pemilu 1992 di Lapangan Nigata Plaju
- Gambar 34. Partai-Partai Peserta Pemilihan Umum 1999
- Gambar 35. Peresmian Keanggotaan dan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera 1999-2004
- Gambar 36. Orientasi tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1999-2004 di Jatinangor, Jawa Barat.
- Gambar 37. Program Peningkatan Kompetensi Kelegislatifan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan 1999-2004
- Gambar 38. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2004
- Gambar 39. Partai Peserta Pemilihan Umum 2014
- Gambar 40. Partai Peserta Pemilu 2019
- Gambar 41. Sidang rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan Masa Jabatan 2019-2024
- Gambar 42. Hj. R.A. Anita Noeringshati, S.H., M.H. terpilih sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Masa Jabatan 2019-2024
- Gambar 43. Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam Peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan Ke-76. Dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Hj. R.A. Anita Noeringshati, S.H., M.H. bersama Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, S.H., M.M.
- Gambar 44. Peresmian Pembahasan Sembilan Raperda di DPRD Provinsi Sumatera Selatan

PROLOG

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Provinsi Sumatera Selatan sudah sangat panjang. Mulai dari masa kolonial Belanda hingga saat ini. Cikal bakal DPRD Provinsi Sumatera Selatan sudah dimulai sejak proklamasi dengan dibentuknya KNID (Komite Nasional Indonesia Daerah) di Keresidenan Palembang. Sejak 1946, ketika menjadi Subprovinsi Sumatera Selatan, KNID mulai berubah nama menjadi DPRD Sumatera Selatan lewat kongres Rakyat Sumatera Selatan Desember 1945. Terlebih ketika dibentuk Daerah Militer Sumatera Selatan (DMSS) tahun 1948 dibentuklah DPRD Sumatera Selatan. Pada masa revolusi ini kinerja DPRD Sumatera Selatan tidak maksimal. Secara kelembagaan, peranan DPRD Provinsi Sumatera Selatan mulai tumbuh sejak tahun 1950. Setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda dalam Konferensi Meja Bundar.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (disingkat DPRD Sumatera Selatan atau DPRD Sumsel) Provinsi Sumatera Selatan memainkan sejarah panjang dalam ketatanegaraan Indonesia, khususnya di Sumatera Selatan. Mulai dari posisi para anggotanya diangkat langsung hingga ke sistem pemilihan, lewat Pemilihan Umum. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan direposisi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Reposisi ini ditegaskan dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Bahwa DPRD Provinsi Sumatera Selatan, seperti halnya provinsi lain di Indonesia, merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pergeseran kedudukan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Badan Legislatif Daerah menjadi unsur penyelenggara pemerintahan daerah didasarkan. Pertama, sistem negara kesatuan di Indonesia yang tidak mengenal badan legislatif di tingkat daerah, di mana badan legislatif hanya berada di tingkat nasional (pusat). Kedua, DPRD Provinsi Sumatera Selatan harus didudukkan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah bersama-sama pemerintah provinsi. DPRD Provinsi Sumatera Selatan berada dalam ranah yang sama dengan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam struktur hubungan dengan pemerintah pusat. Berdasarkan hal tersebut DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan ketimbang sebagai lembaga perwakilan rakyat membuat DPRD Provinsi Sumatera Selatan lebih kuat secara institusional dari perspektif tata pemerintahan, tidak dari perspektif politik. DPRD Provinsi Sumatera Selatan diposisikan sebagai lembaga perwakilan politik yang terlibat dalam proses politik pemerintahan.

Berdasarkan hal tersebut, posisi dan kedudukan DPRD Provinsi Sumatera Selatan merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan perangkat daerah, termasuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Oleh sebabnya, ada dua peran dalam kedudukannya yang dimainkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan, yakni sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah sekaligus berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Kedudukan DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, menempatkan DPRD sebagai institusi yang sejajar dengan pemerintah daerah. Dalam kedudukan yang sejajar itu, DPRD Provinsi Sumatera Selatan bersama-sama dengan Gubernur Sumatera Selatan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang meliputi segala urusan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Berdasarkan fungsi dan kedudukan "baru" ini DPRD Provinsi Sumatera Selatan mengalami perubahan sangat mendasar, karena memberikan kewenangan dan hak yang wajar kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan fungsi pemerintahan daerah.

DPRD Provinsi Sumatera Selatan kini beranggotakan 75 orang yang dipilih melalui pemilihan umum setiap lima tahun sekali. Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 1 Ketua dan 3 Wakil Ketua yang berasal dari partai politik pemilik jumlah kursi dan suara terbanyak. DPRD Provinsi Sumatera Selatan memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam kehidupan bernegara karena merupakan representasi dari kedaulatan rakyat.

Di Indonesia lembaga perwakilan atau parlemen dibedakan ke dalam tiga fungsi, yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Berdasarkan ketiga fungsi tersebut yang dijalankan secara kelembagaan, maka setiap anggota DPRD Sumsel mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak

imunitas. Kedudukan DPRD Sumsel harus dipahami dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Lebih dari itu, fungsi pengawasan DPRD Provinsi Sumatera Selatan menuntut DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk senantiasa mengawasi produk peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan. Maka dari itu, *legislative review* dapat diartikan sebagai proses peninjauan ulang Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebelum disahkan menjadi Perda (Peraturan Daerah). Pengujian Perda melalui *legislative review* ini menunjukkan bahwa DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam fungsi legislasinya melakukan pengawasan terhadap Perda sehingga sebelum sebuah Raperda di-perda-kan seharusnya terlebih dahulu melewati proses kajian legislasi.

Selanjutnya, sebagai lembaga yang mempunyai fungsi representasi, maka setiap anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan diwajibkan untuk menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Fungsi representasi ini tidak kalah pentingnya dengan fungsi-fungsi lain yang diemban DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Fungsi representasi sesungguhnya merupakan parameter pertanggungjawaban politik anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dihadapan konstituennya atau publik secara luas

Untuk itu, buku ini membahas sejumlah isu terkait sejarah panjang DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam menjaga pembangunan di Bumi Sriwijaya, dalam hal ini: (i) Situasi, kondisi dan suasana pengangkatan atau pemilihan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari masa ke masa, (ii) Kondisi Pemilihan Umum pada setiap pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, (iii) Struktur dan kedudukan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari masa ke masa, (iii) hasil-hasil yang dicapai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan sejalan fungsi, tugas dan wewenangnya.

Tujuan dan Genre Penulisan. Penyusunan buku *sejarah DPRD Sumatera Selatan: Tiga Masa Menjaga Pembangunan di Bumi Sriwijaya* untuk memberikan informasi tentang perkembangan DPRD Sumatera Selatan dari awal berdiri hingga saat ini, baik berupa fakta, peristiwa, pendapat, pandangan dan data kepada pembaca. Sehingga pembaca bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan baru dari tulisan tersebut. Buku yang hadir dihadapan pembaca ini bertujuan untuk melestarikan nilai-nilai luhur penyelenggara pemerintahan

sebagai warisan para pendahulu, agar kelak kemudian hari dapat dihayati dan dikembangkan oleh generasi penerus demi kelangsungan hidup berbangsa dan negara. Sedangkan genre buku *Sejarah DPRD Sumatera Selatan: Tiga Masa Menjaga Pembangunan di Bumi Sriwijaya* lebih bersifat sejarah politik.

Penulisan sejarah di Indonesia dikenal tiga jenis atau genre penulisan sejarah. Pertama, adalah sejarah ideologi, suatu istilah yang dipergunakan karena tidak ada yang lebih baik dari itu. Titik tolak yang paling penting dalam jenis sejarah macam ini adalah pencaharian arti subyektif dari peristiwa sejarah. Masa lampau dipelajari bukan demi pengetahuan mengenai masa lampau, tetapi demi lambang yang bisa diadakannya untuk masa kini. Kedua, suatu jenis penulisan sejarah yang untuk mudahnya saja dapat dinamakan sejarah pewarisan. Ciri-ciri utama penulisan sejarah semacam ini adalah kisah kepahlawanan perjuangan kemerdekaan. Pelajaran yang dapat diambil dari karya-karya semacam ini adalah betapa para patriot Indonesia berjuang menentang hambatan hambatan serta menderita kesulitan fisik dan psikis demi mencapai kemerdekaan. Sebagian besar dari sejarah daerah yang disponsori pemerintahan daerah termasuk jenis ini. Ketiga, sekali lagi karena tiada istilah yang lebih tepat, suatu jenis yang dapat dinamakan sejarah akademik. Jenis penulisan sejarah semacam ini dapat dinamakan tidak bersifat ideologis atau bersifat filosofis, dari segi positifnya, penulisan sejarah semacam ini mencoba untuk memberi gambaran yang jelas mengenai masa silam yang ditopang dengan tradisi akademik. Penulisan jenis ini lebih bersifat struktural. Beberapa diantaranya sangat bersifat sosiologis dalam pendekatannya, sementara yang lainnya lebih banyak mengambil ilmu politik, dan beberapa diantaranya bersifat antropologis dalam pendekatannya.

Ketiga macam jenis tersebut diatas, tentunya tidak dapat dipisah-pisahkan secara ketat satu sama lainnya. Namun penggolongan tersebut didukung oleh pandangan dari segi masing-masing sejarawan yang mempraktekkannya. Dilihat secara geografis, maka penulisan buku *Sejarah DPRD Sumatera Selatan: Tiga Masa Menjaga Pembangunan di Bumi Sriwijaya* termasuk bidang sejarah lokal. Sejarah lokal senantiasa merupakan persoalan di Indonesia. Salah satu persoalan yang paling penting adalah tumpang tindih antara batas-batas etnik kultural dan batas batas pemerintahan (daerah). Pada teorinya, ada empat macam sejarah lokal dapat dibedakan disini.

Pertama, sejarah sebagai peristiwa (*evenemental history*) yang melukiskan peristiwa-peristiwa tertentu dari masa silam.

Kedua, penelitian struktural yang lebih menekankan struktur daripada proses. Ketiga, membahas aspek-aspek tertentu mengenai sejarah lokal (studi tematis). Keempat, pembahasan sejarah lokal umum tentang daerah-daerah tertentu (propinsi, kota, kabupaten) dari masa kuno sampai masa kini. Sebagian besar penulisan atau bukunya bersifat sejarah populer. Sebagian tidak menyebut sumber-sumber sejarahnya dan sering buku-buku itu sangat dipengaruhi oleh asumsi-asumsi tradisional "tentang masa lampau yang gemilang". Berdasarkan keempat teoritis ini buku *Sejarah DPRD Sumatera Selatan: Tiga Masa Menjaga Pembangunan di Bumi Sriwijaya* termasuk sejarah lokal yang bersifat administratif, tidak ada hubungan peristiwa dari konteks etnis kultural.

Metodologi. Kajian ini *Sejarah DPRD Sumatera Selatan: Tiga Masa Menjaga Pembangunan di Bumi Sriwijaya* menggunakan metode sejarah. Pengumpulan data atau heuristik dilakukan dengan menggabungkan teknik riset kepustakaan, dokumentasi dan arsip, artefact berupa bangunan fisik DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Teknik pengumpulan data dilakukan baik observasi penelitian lapangan maupun wawancara dengan para mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan maupun mereka yang dianggap mengetahui perkembangan DPRD Provinsi Sumatera Selatan seperti wartawan, keluarga dan para kolega mantan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Bahan kepustakaan, selain diambil dari buku dan artikel tulisan ahli, juga digunakan koleksi surat kabar sezaman seperti Surat kabar tahun 1950-1960-an di Palembang seperti *Soeara Rakjat*, *Fikiran Rakjat*, *Kesatoean Indonesia*, *Soeasana*, *Obor Rakjat*, *Suara Rakyat Sumatra*, *Batang Hari Sembilan*, dan lain-lain. Kemudian Surat kabar tahun 1970-1980-an di Palembang seperti *Suara Rakyat Semesta*, *Sumatera Ekspres*, dan *Garuda Post*. Serta Surat kabar tahun 1980-an sampai sekarang di Palembang seperti *Tribun Sumsel*, *Sriwijaya Post*, *Sumatera Ekspres*, *Palembang Post*, *Palembang Ekspres*, *Harian Berita Pagi*, *Transparan*, dan lain-lainnya. Selain itu, tim peneliti mengunjungi beberapa perpustakaan di Palembang seperti Perpustakaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Perpustakaan Al-Wastiyah, Perpustakaan Masjid Agung, dan Perpustakaan Wilayah Sumatra Selatan.

Periodesasi. Sesuai subjudul, buku ini membahas sejarah DPRD Provinsi Sumatera dalam tiga masa. Ketiga masa ini adalah bagian pertama masa Orde Lama, Masa Orde Baru, dan Masa Reformasi. Titik berat masa tersebut pada masa orde lama melihat jalannya masa transisi awal pembentukan DPRD di Sumatera Selatan yang sangat dipengaruhi oleh peristiwa nasional, mulai dari Pemilu 1955 sampai ke Dekrit Presiden 1959 serta Pemberontakan G-30-S/PKI. Masa Orde Baru ditandai dengan keluarnya Supersemar, turunnya Bung Karno sebagai presiden, dan mulai naik dan berkuasanya Presiden Soeharto. Masa ini kemudian diakhiri dengan terjadinya Krisis Moneter sejak tahun 1997 dan turunnya Presiden Soeharto di pertengahan 1998 serta naiknya B.J. Habibie sebagai penggantinya.

Periode Orde Reformasi. Di mulai dengan Pemilihan Umum 1999 dan terpilihnya Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 1999-2004. Periode reformasi masih berlanjut hingga sekarang. Namun buku ini ditutup dengan masa periode DPRD Provinsi Sumatera Selatan 2019-2024.

Isi Buku. Buku ini diawali dengan Prolog untuk mengantar pembaca tentang latar belakang penulisan, tujuan dan genre sejarah lokal, metodologi, periodesasi dan sistematika penulisan. Bab I merupakan jalan masuk ke pembahasan utama, berisi uraian geografis Sumatera Selatan, perjalanan DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebelum tahun 1950, dan persoalan perkembangan daerah pemilih (dapil) di Sumatera Selatan.

Buku ditulis dalam tiga bagian. Bagian Kesatu Masa Orde Lama. Berisi tiga bab, yakni Bab 2 tentang pembentukan DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan Periode 1950-1956 yang merupakan DPRD Sementara di Provinsi Sumatera Selatan. Bab 3 pembentukan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1956-1960 hasil Pemilihan Umum 1955. Sedangkan Bab 4 tentang pembentukan DPRD-GR Provinsi Sumatera Selatan Periode 1961-1966. Keanggotaan DPRD-GR ini diambil dari berbagai perwakilan partai politik dan organisasi kemasyarakatan di Sumatera Selatan. Perwakilan dalam DPRD-GR ini sebagai hasil dari keluarnya Dekrit Presiden 1959.

Bagian Kedua buku ini tentang DPRD Provinsi Sumatera Selatan Masa Orde Baru ditulis agak lebih panjang. Sebanyak 6 (Enam) Bab khusus membahas DPRD Provinsi Sumatera Selatan periodesasi ini. Dimulai dari Bab 5 tentang DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1966-1972 sebagai DPRD transisi untuk menuju pemilihan Umum 1971.

Bab 6 tentang DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1972-1977 hasil Pemilihan Umum 1971. Bab 7 tentang DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1977-1982 hasil Pemilihan Umum 1977. Bab 8 tentang DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1982-1987 hasil Pemilihan Umum 1982. Bab 9 tentang DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1987-1992 hasil Pemilihan Umum 1987. Bab 10 tentang DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1992-1997 hasil Pemilihan Umum 1992. Bab 11 tentang DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1997-1999 hasil Pemilihan Umum 1977. DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1997-1999 semula masa bhaktinya berakhir di tahun 2002. Namun karena muncul reformasi, maka masa jabatannya hanya 2 tahun saja.

Bagian Ketiga buku *Sejarah DPRD Sumatera Selatan: Tiga Masa Menjaga Pembangunan di Bumi Sriwijaya* tentang DPRD Provinsi Sumatera Selatan Masa Orde Reformasi. Ditulis sebanyak 5 (Enam) Bab khusus membahas DPRD Provinsi Sumatera Selatan perodesasi reformasi. Bab 12 tentang DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1999-2004 hasil Pemilihan Umum 1999. Bab 13 tentang DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2004-2009 hasil Pemilihan Umum 2004. Bab 14 tentang DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2009-2014 hasil Pemilihan Umum 2009. Bab 15 tentang DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2014-2019 hasil Pemilihan Umum 2014. Dan Bab 16 tentang DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024 hasil Pemilihan Umum 2019.

Bagian akhir, epilog, sebagai penutup berupa kesimpulan reflektif dari keseluruhan buku *Sejarah DPRD Sumatera Selatan: Tiga Masa Menjaga Pembangunan di Bumi Sriwijaya*. Refleksi ini dirangkum dalam bentuk apa yang sudah dilakukan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari masa lalu sampai sekarang sehingga dapat disumbangkan pemikiran apa yang diperlukan untuk menghadapi tantangan masa berikutnya.

BAB 1

Geografi, Parlemen Masa Kolonial, Parlemen Masa Revolusi Fisik dan Dapil Sumatera Selatan

Bab ini memberi penjelasan tentang geografi Provinsi Sumatera Selatan, sejarah terbentuknya parlemen di Sumatera Selatan sebelum pengakuan kedaulatan tahun 1950, dan perkembangan Daerah Pemilihan (Dapil) sejak Pemilu 2004. Penjelasan pada bab awal ini menjadi penting sebagai pendahuluan untuk masuk ke tiga masa perkembangan DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Geografi Sumatera Selatan

Provinsi Sumatera Selatan terletak antara $1^{\circ} 37' 27''$ sampai $4^{\circ} 55' 17''$ Lintang Selatan dan antara $102^{\circ} 3' 54''$ dan $106^{\circ} 13' 26''$ Bujur Timur. Provinsi Sumatera Selatan memiliki Luas wilayah daratan sebesar 91.806,36 KM². Luas tersebut menempatkan Sumatera Selatan sebagai provinsi urutan luas kelima di Indonesia atau total 5% dari luas total wilayah Indonesia. Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi kabupaten terluas 16.905,32 ha.

Daerah Provinsi Sumatera Selatan berbatasan:

- Sebelah Utara dengan Provinsi Jambi
- Sebelah Selatan dengan Provinsi Lampung
- Sebelah Timur dengan Provinsi Bangka Belitung
- Sebelah Barat dengan Provinsi Bengkulu

Sama seperti umumnya daerah di Indonesia, Provinsi Sumatera Selatan mempunyai iklim tropis yang dipengaruhi oleh dua musim disepanjang tahun. Kedua musim tersebut adalah musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terjadi antara bulan Desember – Maret. Sedangkan musim kemarau terjadi antara bulan Juni – September. Keadaan ini terjadi setiap setengah setahun setelah melewati masa peralihan pada bulan Oktober-November dan April-Mei. Rata-rata suhu bulanan di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 menunjukkan

variasi antara 25,9 – 28,6°C. Kelembaban di Provinsi Sumatera Selatan bervariasi antara 74 – 89%.

Provinsi Sumatera Selatan memiliki topografi yang bervariasi mulai dari daerah pantai, dataran rendah, dataran tinggi, dan pegunungan. Wilayah Sumatera Selatan memiliki bentangan wilayah dari Barat ke Timur dengan ketinggian antara 400 - 1.700 meter di atas permukaan laut (mdpl). Wilayah dengan ketinggian rata-rata antara 900 – 1.200 mdpl berada pada bagian Barat yang merupakan pegunungan Bukit Barisan. Pegunungan Bukit Barisan ini memiliki puncak-puncak dengan ketinggian tertinggi berada di Gunung Dempo (3.159 mdpl), Gunung Bungkok (2.125 mdpl), Gunung Seminung (1.964 mdpl), dan Gunung Patah (1.107 mdpl). Daerah ini tersusun dari bentukan lembah, dataran tinggi plateau dan kerucut vulkanik. Wilayah pegunungan dan bukit-bukit maupun dataran rendah sebagian besar ditutupi hutan lebat dan tebal. Dilereng Gunung Seminung terlintang daratan seluas 128 KM². Terdapat Danau Ranau yang memiliki panorama keindahan alam luar biasa.



Gambar 1. Peta Provinsi Sumatera Selatan

Bagian penting wilayah ini adalah lembahan yang merupakan lahan budidaya pertanian. Daerah pegunungan dan daerah dataran rendah di Sumatera Selatan sangat berpotensi untuk perkebunan, pertanian dan hortikultura. Di sepanjang wilayah ini terdapat

perkebunan karet, kelapa sawit, kopi, the, padi, sayur mayor dan berbagai jenis buah.

Bagian Timur merupakan daerah pantai dengan tanah terdiri dari rawa-rawa dan tanah payau yang dipengaruhi oleh pasang surut dan dibatasi garis pantai. Vegetasinya merupakan tumbuhan *Palmase*, nyiur dan tanaman bakau. Wilayah pesisir Provinsi Sumatera Selatan sepanjang kurang lebih 450 km dari Sungai Benu yang berbatasan dengan Provinsi Jambi di utara sampai Sungai Mesuji yang berbatasan dengan Provinsi Lampung di selatan. Sedangkan di bagian tengah merupakan wilayah dengan dataran rendah yang luas Wilayah pesisir merupakan daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

Kedadaan tanah di Provinsi Sumatera Selatan digolongkan dalam 11 jenis. Kesebelas jenis ini adalah tanah organosol (terdapat disepanjang pantai Timur dan dataran rendah). Tanah Litosol (pada bentang terjal Danau Ranau dan sepanjang patahan Bukit Barisan). Tanah Aluvial (disepanjang Sungai Musi, Sungai Lematang, Sungai Ogan, Sungai Komering dan Punggung Bukit Barisan). Tanah Hidromorf Kelabu (didataran Kelabu Musi Rawas dan Muara Enim). Tanah Klei Humus (penyebaran mengikuti tanah organosol). Tanah Regosol (disekeliling Pantai Timur, bentang terjal Danau Ranau dan Kerucut Vulkan Bukit Barisan). Tanah Andosol (disemua Kerucut Vulkan muda dan tua dengan ketinggian lebih 100 M mdpl). Tanah Rendzina (disekitar kota Baturaja). Tanah Latosol (diwilayah tanpa bulan kering). Tanah Lateritik (disekitar Martapura). Serta Tanah Podzolik (didataran rendah Bukit Barisan). Pembentukan struktur lipatan, sesar dan kekar di cekungan wilayah Sumatera Selatan memberikan implikasi terhadap akumulasi kekayaan sumber daya minyak bumi, gas alam, batubara dan panas bumi.

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan memiliki sungai-sungai besar yang dapat dilayari. Kebanyakan sungai-sungai itu bermata air dari Bukit Barisan, kecuali Sungai Mesuji, Sungai Lalan dan Sungai Banyuasin. Sedangkan yang bermata air dari Bukit Barisan dan bermuara ke Selat Bangka adalah Sungai Musi. Sungai Musi merupakan sungai terpanjang di Pulau Sumatera dengan panjang sekitar 750 km menjadi tempat yang subur bagi budi daya pertanian dan perikanan, dan penghubung bagi perdagangan antardaerah sejak jaman kerajaan Sriwijaya. Sedangkan Sungai Ogan, Sungai Komering, Sungai Lematang, Sungai Kelingi, Sungai Lakitan, Sungai Rupit dan Sungai

Rawas merupakan anak Sungai Musi. Dengan letak geografis yang strategis, Sumatera Selatan menjadi salah satu pusat pertemuan dan interaksi para pedagang-pedagang asing terutama dari Arab, India dan Cina. Letak geografis ini memberikan peluang bagi Sumatera Selatan untuk cepat maju dan berkembang.

Jumlah penduduk di Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Juni 2022 mencapai 8.652.635 jiwa (8,65 juta jiwa). Kepadatan penduduk mencapai 100 jiwa per km persegi. Jumlah penduduk tersebut menempatkan Provinsi Sumatera Selatan sebagai peringkat kesembilan dari seluruh provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Jumlah ini melonjak sebesar 5,12 persen dari jumlah penduduk tahun 2010 yang sebesar 7.450.394. Persebaran penduduk menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk terbesar berada di Kota Palembang.

Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan dibagi menjadi 13 (sebelas) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota. Sejak tahun 2013, dibentuk kabupaten baru yakni Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) berdasar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013. tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI). Pembentukan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas Utara berdasar Undang-undang Nomor 16 Tahun 2013. Pada Provinsi Sumatera Selatan terdapat jumlah desa sebanyak 2.823 desa, 363 kelurahan dan 231 kecamatan. Secara total dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Nama	Jumlah Kecamatan	Luas (KM ²)
1	Kabupaten Ogan Komering Ilir	18	18,359.04
2	Kabupaten Musi Banyuasin	14	14,266.26
3	Kabupaten Banyuasin	19	11,832.99
4	Kabupaten Muara Enim	20	7,383.90
5	Kabupaten Musi Rawas	14	6,350.00
6	Kabupaten Musi Rawas Utara	7	6,008.65
7	Kabupaten OKU Selatan	19	5,493.94
8	Kabupaten Lahat	22	5,311.74
9	Kabupaten Ogan Komering Ulu	12	4,797.06
10	Kabupaten OKU Timur	20	3,370.00
11	Kabupaten Ogan Ilir	16	2,666.07
12	Kabupaten Empat Lawang	10	2,256.44
13	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	5	1,840.00
14	Kota Pagar Alam	5	633.66

15	Kota Prabumulih	6	434.50
16	Kota Lubuk Linggau	8	401.50
17	Kota Palembang	16	400.61
	Total	231	91,806.3

Parlemen di Masa Kolonial Belanda

Cikal bakal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Sumatera Selatan dapat dilacak dari masa Kolonial. Ada dua cikal bakal dewan daerah di Sumatera Selatan pada masa kolonial ini. Pertama, apa yang disebut *Gemeenteraad* (Dewan Kota) yang sudah ada sejak tahun 1906. Namun lingkup kerjanya hanya berlaku di Kota Palembang. Kedua, *Groepsgemeenschap Palembang* (atau *Palembang Raad*) yang dibentuk sejak tahun 1940 yang lingkup kerjanya meliputi seluruh Keresidenan Palembang (atau Provinsi Sumatera Selatan, sekarang ini). Selain itu ada satu tambahan, semacam anggota DPR (yang disebut *Volksraad* yang berkedudukan di Batavia) dari Sumatera Selatan sekarang ini. Namun, pada zaman Belanda anggota DPR (*Volksraad*) perwakilan dari Sumatera Selatan ini yang dipilih tidak banyak. Setiap periode hanya ada satu orang perwakilan saja.

Meskipun Belanda sudah menduduki Sumatera Selatan (dulu Keresidenan Palembang) sejak tahun 1821. Namun pembentukan dewan baru dimulai sejak tahun 1906. Pada masa Keresidenan Palembang yang dipimpin oleh Residen. Seorang Residen Palembang memegang tiga macam hak kekuasaan sekaligus yakni kekuasaan eksekutif (hak pemerintah), kekuasaan legislatif (hak perundangan) dan kekuasaan yudikatif (hak peradilan). Artinya pada masa ini seorang Residen Palembang, selain menjalankan pemerintahan, juga berhak membuat peraturan dan mengadakan hukuman (*strafsanctie*). Residen dalam melakukan tugas kewajibannya hanya tunduk dan mendapat pengawasan dari Gubernur Jenderal di Batavia.

Pembagian kekuasaan dengan hak legislative, justru di mulai di Kota Palembang. Sejak Kota Palembang dijadikan *Stadsgemeente* berdasarkan *Staadblad* tahun 1906 Nomor 126. Palembang memiliki *Gemeenteraad* Palembang namun sampai dengan tahun 1919 Palembang belum mempunyai *Burgermeester* (Walikota) sendiri.

Gemeenteraad Palembang tahun 1906 terdiri dari 13 anggota yang diangkat berdasarkan pemilihan: 8 anggota dari orang Eropa. 3

anggota dari orang Bumiputera dan 2 anggota dari orang Timur Asing. Anggota *Gemeenteraad* Palembang Periode 1906-1919, berikut ini:

No	Nama	Jabatan
1	W. N. A. F. K. H. van Nassau	Asisten Residen sekaligus ketua <i>Gemeenteraad</i> Kota Palembang
2	W. F. J. Kroon	Sekretaris <i>Afdeeling</i> Palembang <i>Binnenlandsche</i> sekaligus menjabat sekretaris <i>Gemeenteraad</i>
3	Dr. T. S. van Hettinga Tromp	kepala bagian dinas kesehatan pemerintahan militer Keresidenan Palembang, anggota
4	Mr. F. A. Versteegh	ketua <i>Landraad</i> Palembang, anggota
5	E. D. W. Paber	administrator <i>Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maatschappij</i> , anggota
6	W. J. Guise	<i>Industrieel Maatschappij</i> Palembang, anggota
7	Mr. H. C. Beijerman	<i>Petroleummaatschappij Moesi-Iilir</i> , anggota
8	M. Rubens	<i>Borneo-Sumatra Maatschappij</i> , anggota
9	Raden Mohamad Arpa Iten	<i>hoofddjaksa</i> di <i>Landraad</i> , anggota
10	Hadji Abdoerhaman	<i>hoofdpanghoeloe</i> di <i>Landraad</i> , anggota
11	Raden Mohamad Hassir bin Raden Mohamad Ali	demang di Seberang Iilir, anggota
12	Tjoa Ham Hien	Kapiten Cina Palembang, anggota
13	Said Djafar bin Syech Alsagaff	kepala Arab Palembang, anggota

Gemeenteraad cukup lama bertahan dengan keanggotaan lama. Baru pada tahun 1919 berdasarkan Staatsblad Nomor 138 tahun 1919 terjadi pergantian anggota *Gemeenteraad* Palembang.



Raden Mohamad Arpa Iten. salah satu anggota *Gemeenteraad* Palembang pertama dari golongan pribumi yang menjabat sebagai *hoofddjaksa* (Jaksa Kepala) di *Landraad* Palembang

Pergantian ini sejalan dengan penunjukan *Burgemeester* (Walikota) pertama Kota Palembang, J. G. Lavire tanggal 25 Mei 1919. Masa kerja anggota *Gemeenteraad* Palembang untuk pertama kali dibatasi hanya 5 (lima) tahun. Dengan anggota bertambah menjadi 15 orang. Adapun susunan anggota *Gemeenteraad* Palembang periode 1919-1923 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	J. G. Lavire	Walikota Palembang sekaligus Ketua Gemeenteraad Palembang
2	F. Heavside	Sekretaris Gemeenteraad Palembang
3	Dr. E. M. G. Ahn	Wakil Walikota
4	Mr. F. A. Versteegh	Direktur Balaikota
5	K. Appel	Anggota Perwakilan Eropa
6	M. W. J. den Berger	Anggota Perwakilan Eropa
7	W. Cremer	Anggota Perwakilan Eropa
8	J. A. Gerritsen	Anggota Perwakilan Eropa
9	M. W. Scheltema de Heere	Anggota Perwakilan Eropa
10	J. W. J. Wellan	Anggota Perwakilan Eropa
11	Raden Mohamad Arpa Iten	Anggota perwakilan Bumiputera
12	Raden Mohamad Hassir bin Raden Mohamad Ali	Anggota perwakilan Bumiputera
13	Kemas Haji Akip bin Kemas Abdoelhalik	Anggota perwakilan Bumiputera
14	Tjoa Ham Hien	Kapiten Cina Palembang
15	Said Djafar bin Syech Alsagaff	Kepala Arab Palembang

Baru pada tahun 1924, berdasarkan *Staadblad* Nomor 543 keanggotaan *Gemeenteraad* mengalami perubahan. Masa kerja anggota *Gemeenteraad* Palembang dibatasi 5 (lima) tahun. Keanggotaan *Gemeenteraad* Palembang Periode tahun 1923-1927 mengalami perubahan menjadi 19 anggota yang diangkat berdasarkan pemilihan: 12 anggota dari orang Eropa. 5 anggota dari orang Bumiputera dan 2 anggota dari orang Timur Asing. Anggota *Gemeenteraad* Palembang Periode 1923-1927, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	P. E. E. J. le Coq d'Armanville	Walikota Palembang sekaligus Ketua Gemeenteraad Palembang
2	Mr. H. Toxopeus	Wakil Walikota
3	G. Posma	Direktur Balaikota
4	G. van Laar	Sekretaris Gemeenteraad
5	G. J. Heijmering	Anggota Perwakilan Eropa
6	H. W. Horsting	Anggota Perwakilan Eropa
7	J. Hulshoff	Anggota Perwakilan Eropa
8	G. R. Lucardie	Anggota Perwakilan Eropa
9	E. L. Masthoff	Anggota Perwakilan Eropa
10	J. Oostenbroek	Anggota Perwakilan Eropa
11	A. Ridder	Anggota Perwakilan Eropa
12	A. F. G. Smit	Anggota Perwakilan Eropa
13	Raden Achmad Djauhari	Anggota perwakilan Bumiputera

14	Raden Mohamad Akil	Anggota perwakilan Bumiputera
15	Mas Goenawan Mangoenkoesoema	Anggota perwakilan Bumiputera
16	Mohamad Rasid Soetan Maharaja Besar	Anggota perwakilan Bumiputera
17	Mas Soeparman	Anggota perwakilan Bumiputera
18	Oen Soey Liang	Anggota perwakilan Timur Asing
19	Se Siong Men	Anggota perwakilan Timur Asing



Mas Goenawan Mangoenkoesoemo

adalah tokoh Boedi Oetomo. Dilahirkan di Pecangakan, Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1888. Ia menikahi adik dr. Soetomo, R.A. Srijati. Mas Goenawan Mangoenkoesoemo atau dr. Goenawan Mangoenkoesoemo putra ketiga dari sembilan bersaudara keluarga Mangoenkoesoemo. Semua anaknya laki-laki orang yang ternama dalam kalangan politik di Hindia Belanda, yakni dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, dr. Samsoe Maarif Mangoenkoesoemo, dr. Goenawan Mangoenkoesoemo, dan

dr. Boediardjo Mangoenkoesoemo dan Ir. Darmawan Mangoenkoesoemo. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya, Goenawan melanjutkan ke Sekolah Dokter Jawa atau School Tot Opleiding Van Indische Arts (STOVIA) dari 10 Januari 1903 dan selesai 11 April 1911. Selama dua tahun antara 1915-1916 dia menjadi asisten pengajar di STOVIA. Kemudian melanjutkan pendidikan kedokteran di Belanda sampai lulus pada 1920. Belakangan, setelah mengabdikan diri di Tanah Air, dia sempat sekali lagi ke Belanda untuk mengambil spesialisasi sebagai dokter ahli penyakit paru-paru. Sepulang dari Belanda tahun 1924, Beliau ditugaskan di Palembang. Selain menjadi dokter, Mas Goenawan Mangoenkoesoemo bergerak menjadi politisi. Tidak lama dari bertugas Beliau diangkat sebagai anggota Gemeenteraad Palembang perwakilan dari Pribumi untuk Periode 1924-1928. Setelah menjabat sebagai anggota Gemeenteraad Palembang, Mas Goenawan Mangoenkoesoemo kembali ke Jawa pada awal tahun 1929. Pada akhir Bulan Mei 1929, Beliau meninggal dunia di Semarang. (Hanpo, 31 Mei 1929)

Tahun 1927 Masa kerja anggota *Gemeenteraad* Palembang kembali dibatasi hanya 3 (yigaa) tahun. Keanggotaan *Gemeenteraad* Palembang Periode tahun 1927-1929 masih terdiri dari 19 anggota yang diangkat berdasarkan pemilihan: 12 anggota dari orang Eropa, 5 anggota dari orang Bumiputera dan 2 anggota dari orang Timur Asing. Adapun anggota *Gemeenteraad* Palembang Periode 1927-1929, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	P. E. E. J. le Cocq d'Armanville	Walikota Palembang sekaligus Ketua Gemeenteraad Palembang
2	E. Dhomen	Sekretaris <i>Gemeenteraad</i>

3	W. F. Amiabel	Anggota Perwakilan Eropa
4	M. L. F. Bajetto	Anggota Perwakilan Eropa
5	J. Hansen	Anggota Perwakilan Eropa
6	Mr. N. Koers	Anggota Perwakilan Eropa
7	Mr. G. E. F. Manuel	Anggota Perwakilan Eropa
8	Ir. F. J. R. Bakker	Anggota Perwakilan Eropa
9	W. V. Doop	Anggota Perwakilan Eropa
10	G. F. Rauwerda	Anggota Perwakilan Eropa
11	Mr. F. C. L. Meyer	Anggota Perwakilan Eropa
12	J. Ph. Schrauwen	Anggota Perwakilan Eropa
13	Raden Mohamad Akil	Anggota perwakilan Bumiputera
14	Raden S. Hasannoessie	Anggota perwakilan Bumiputera
15	Raden Ibrahim	Anggota perwakilan Bumiputera
16	Kiagoes Mohamad Hoesin	Anggota perwakilan Bumiputera
17	Mohamad Kasim	Anggota perwakilan Bumiputera
18	Liem Kim Siang	Anggota perwakilan Timur Asing
19	Tan Tiauw Ie	Anggota perwakilan Timur Asing

Pada tahun 1929 anggota *Gemeenteraad* Palembang kembali mengalami pergantian untuk periode tahun 1929-1930. Masa kerja anggota *Gemeenteraad* Palembang kembali mengalami perubahan dibatasi hanya 2 (dua) tahun. Keanggotaan tetap sama terdiri dari 19 anggota yang diangkat berdasarkan pemilihan: 12 anggota dari orang Eropa, 5 anggota dari orang Bumiputera dan 2 anggota dari orang Timur Asing. Adapun anggota *Gemeenteraad* Palembang Periode 1929-1930, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Ir. Richard Carl. A. F. J. Lissa van Nessel	Walikota Palembang sekaligus Ketua Gemeenteraad Palembang
2	W. V. Doop	Wakil Walikota
3	Ir. W. H. Oosten	Direktur Balaikota
4	W. van Vianen	Sekretaris Gemeenteraad
5	L. M. C. Ancion	Anggota Perwakilan Eropa
6	A. J. Beversluis	Anggota Perwakilan Eropa
7	Mr. P. N. Jansen	Anggota Perwakilan Eropa
8	J. W. van de Kastele	Anggota Perwakilan Eropa
9	J. A. J. M. Meijssen	Anggota Perwakilan Eropa
10	C. J. van Soest	Anggota Perwakilan Eropa
11	J. C. van der Swaagh	Anggota Perwakilan Eropa
12	W. Thierry	Anggota Perwakilan Eropa
13	Raden Mohamad Akil bin Raden Mohamad Hasir	Anggota perwakilan Bumiputera
14	Raden Ibrahim	Anggota perwakilan Bumiputera
15	Raden Achmad Soleman	Anggota perwakilan Bumiputera

16	Ir. R. Soetoto	Anggota perwakilan Bumiputera
17	Kadarisman	Anggota perwakilan Bumiputera
18	Lim Kim Siang	Anggota perwakilan Timur Asing
19	Go Biauw Tjoan	Anggota perwakilan Timur Asing



Richard Carl A. F. J. van Lissa Nessel. Lahir di Johannesburg (Afrika Selatan) tanggal 19 Mei 1891. Insinyur teknik jebolan perguruan tinggi ternama di Belanda, Technische Universiteit Delft. Pendidikan Walikota Palembang (1929-1934) sekaligus Ketua Gemeenteraad. Sebelum pernah duduk sebagai anggota Gemeenteraad di Surabaya dan Batavia. Setelah menjadi walikota Palembang, menjabat sebagai Walikota Magelang (1935-1942). Pada periode 1953-1958, duduk sebagai anggota parlemen (gemeenteraad) di Den Haag, Belanda dari Partai Nasional Katholik. Pada tahun 1956 menjabat sebagai ketua umum Unie Nationale di Tweede Kamer (Parlemen Belanda).

Setelah tahun 1931, masa kerja *Gemeenteraad* Palembang dibatasi hanya 1 (satu) sekali. Pada dasarnya *Gemeenteraad* melakukan pengolahan terhadap penghasilan kota yang didapat dari beberapa hal:

1. penghasilan yang didapat oleh Pemerintah *Gemeente* Palembang dari pemungutan pajak (*accres*).
2. Penghasilan (sumbangan dana) dari pusat yang didapat oleh Pemerintah *Gemeente* Palembang
3. Pajak negara dari penghasilan pribadi dan verponding yang didapat Pemerintah *Gemeente* Palembang dari penduduk (*opcenten*).
4. Pajak dan retribusi Pemerintah *Gemeente* Palembang dari jalan, jembatan, pajak hiburan, pajak kendaraan, pajak perizininan, pajak bangunan, pajak hewan peliharaan dan sebagainya, serta redistribusi dari jasa -jasa, uang rooi, leges dan sebagainya).
5. Penghasilan dari perusahaan milik Pemerintah *Gemeente* Palembang seperti perusahaan perumahan, perusahaan air bersih, perusahaan pasar, perusahaan pemotongan hewan dan perusahaan penyeberangan sungai.

Gemeenteraad Palembang dari pendapatan kota ini mengembalikannya untuk pembangunan kota, seperti pembuatan, perbaikan dan pembangunan jalan untuk lalu lintas kota, perbaikan penerangan kota dengan listrik, pembuatan saluran air leding untuk pemukiman kumuh, perbaikan urusan los-los dan fonds pasar, pengaturan tempat kuburan, penjagaan kebakaran, dan sebagainya.

Sejak 16 Desember 1916 dibentuk *Volksraad* (Dewan Rakyat) ditingkat Pusat yang berkedudukan di Batavia. Pada awal berdiri, *Volksraad* sebagai dewan penasehat ini beranggotakan 38 orang yang ditunjuk, di mana 15 orang anggota berasal dari bumi putra. Pada tahun 1927, *Volksraad* mengalami perubahan karena memiliki kewenangan sebagai ko-legislatif bersama Gubernur Jenderal. Selanjutnya, mekanisme pemilihan anggota *Volksraad* dilakukan dengan pemilihan tidak langsung. Keresidenan Palembang sejak tahun 1927 memiliki perwakilan di *Volksraad*.

Wakil pertama Keresidenan Palembang di *Volksraad* ditunjuk Raden Mochtar Praboe Mangkoenegara. Salah satu hasil kerja *Volksraad* adalah usul pembentukan Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 1927. Namun usul ini ditarik kembali. Pada tahun 1931, rencana pembentukan Provinsi Sumatera Selatan kembali dirilis oleh *Volksraad*. Namun pembentukan ini kembali gagal dilaksanakan dengan alasan jumlah penduduk yang tidak dapat dipenuhi Sumatera Selatan untuk menjadi sebuah provinsi. Akhirnya yang dapat dilakukan hanya pembentukan *Groepsgemeenschap* yang dijadikan *raad* atau *Groepsgemeenschapsraad* (Dewan Keresidenan Palembang).



Raden Mochtar Praboe Mangkoenegara.

Kelahiran Ogan Komerling Ulu tanggal 19 November 1892. Anggota Pengurus Serikat Sumatera (1916-1921), Pegawai di Kantor Lalu Lintas dan Pengelolaan Air (Verkeer en Waterstaat) di Palembang (1921-1927), Anggota *Volksraad* Perwakilan Palembang (1927-1935), Anggota Gemeenteraad Bandung (1935-1937). Pada tahun 1937-1939 ditunjuk sebagai Direktur Kantor Regentschaps di Batavia.

Pada tahun 1939-1942 menjadi Direktur Pelabuhan Tanjung Priok di Batavia. Pada masa Jepang kembali menjadi anggota parlemen, Kootubu-Sanyo mewakili Palembang. Karier di pemerintahan dimulai dengan menjadi Walikota Blitar (1945-1947), Bupati Nganjuk (1947-1950 dan Bupati Tulungagung (1950-1955) semuanya di Jawa Timur. Pada waktu Pemilihan Umum 1955 ditempatkan Masjumi sebagai Calon Anggota DPR dari Sumatera Selatan. Beliau memperoleh suara terbanyak dan duduk sebagai anggota Konstituante (1956-1958). Selanjutnya ditunjuk sebagai Gubernur Sumatera Selatan pada tahun 1958-1959.

Dewan Keresidenan Palembang (Sumatera Selatan) baru terwujud sejak tahun 1940. Dewan Keresidenan ini dibentuk berdasarkan *Staatsblad* tahun 1940. Terhitung sejak 1 Januari 1941

berdiri apa yang dinamai *Groepsgemeenschapsraad* Palembang atau Palembang *Raad*. Secara administrasi, *Groepsgemeenschappen* Palembang *Raad* ini meliputi seluruh *gewest* dalam Keresidenan Palembang yang berada dibawah kekuasaan seorang Residen.

Groepsgemeenschappen Palembang *Raad* memiliki hak dalam mengatur dan mengurus rumah tangga dari persatuan segolongan, sepanjang kewenangan itu sesuai dengan peraturan yang ada di Keresidenan Palembang atau *Groepsgemeenschaps ordonnantie*. *Groepsgemeenschappenraad* Palembang (Dewan Keresidenan Palembang) ini langsung diketuai oleh Residen Palembang, A. Orange. Keanggotaan *Groepsgemeenschappenraad* Palembang terdiri dari 39 anggota. Adapun komposisi anggota *Groepsgemeenschappenraad* Palembang, terdiri dari:

No	Perwakilan	Yang dipilih	Yang Diangkat	Jumlah
1	Belanda (Eropa)	6	3	9
2	Bumiputera	22	5	27
3	Asing	-	3	3
Jumlah				39

Berdasarkan hal tersebut anggota *Groepsgemeenschappenraad* Palembang terdiri dari 9 orang Eropa (Belanda) dengan 3 orang ditunjuk dan 6 orang dipilih. 27 orang dari Bumiputera dengan 16 orang ditunjuk dari kepala marga dan 6 orang ditunjuk oleh kalangan kepala marga. 3 orang perwakilan (bukan Eropa, bukan Bumiputera). Adapun susunan Dewan Keresidenan Palembang (*Groepsgemeenschappenraad* Palembang), adalah:

No	Nama	Jabatan
Perwakilan Belanda yang dipilih		
1	A. Orange	Residen Palembang
2	Ir. J. A. W. in de Betouw	Administratur BPM Plaju
3	H. J. Faber	Direktur Moluksche Handels Vennotschap NV
4	L. van Galen	Kepala ZSS Palembang
5	J. Schenk	Direktur Nederlandsche Maatchaapij NV Palembang
6	Mr. J. Cleyndezt	Kepala bagian hukum NKPM NV Palembang
Perwakilan Belanda yang diangkat		
7	W. V. Doop	Pegawai urusan Pertanian Palembang
8	A. Stuurman	Asisten Residen Palembangsche Bovenlanden di Lahat
9	Mr. P. J. Tromp	Inspektur Keuangan di Palembang

Perwakilan Asing yang diangkat		
10	Mr. Dr. K. H. Jauw	Advokat di Palembang
11	Joe Tiauw Kie	Pedagang di Muara Enim
12	Said Ahmad bin Alwi Almoenawar	Kepala Arab di Palembang
Perwakilan Bumiputera yang dipilih		
13	Depati Abdullahsanie bin Pangeran Haji Mohamad Said gelar Kemala Sakti	Pasirah Marga Sungai Rengas, Onderafdeeling Banyuasin en Koeboestrecken
14	Depati Mohamad Anwar bin Pangeran Haji Mohamad Zahri Gelar Sampoerna Djaja III	Pasirah Marga Meranjat, Onderafdeeling Ogan Ilir
15	Pangeran Sapei bin Hanapi gelar Djajadiningrat	Pasirah Marga Sakatiga, Onderafdeeling Ogan Ilir
16	Depati Abdoellamab bin Pangeran Haji Baka gelar Natadiradja	Pasirah Marga Kayuagung, Onderafdeeling Komering Ilir
17	Pangeran Basari bin Sapak gelar Putera Jaya	Pasirah Marga Danau, Onderafdeeling Komering Ilir
18	Depati Tjik Mat bin H. Mohamad Zen bin gelar Djaja Sempoerna	Pasirah Marga Punjung, Onderafdeeling Banyuasin en Koeboestrecken
19	Depati Moehamad Noeh bin Moehamad Mansoer gelar Putra Djaja Setia	Pasirah Marga Puntang Suku Merapi, Onderafdeeling Lematang Ulu
20	Depati Abdoelhamid bin Krio Lontok gelar Djaja Sempoerna	Pasirah Marga Tembelang Penanggiran, Onderafdeeling Lematang Ilir
21	Depati Alibah bin Haji Abdoellah gelar Sindang Merdika II Pandji Anam	Pasirah Marga Semendo Darat, Onderafdeeling Lematang Ilir
22	Pangeran Mahroef bin Haji Semaoen gelar Temanggoeng IV	Pasirah Marga Sumbay Ulu Lurah Pajar Bulan, Onderafdeeling Pasemahlanden
23	Pangeran Abdoelhalik bin Depati Anang gelar Poespa Khoesoema	Pasirah Marga Lintang Kiri Suku Muara Pinang, Onderafdeeling Tebing Tinggi
24	Pangeran Roes bin Ajib Dolah gelar Pringgojoeda	Pasirah Marga Sikap Dalam Musi, Onderafdeeling Musi Ulu
25	Pangeran Mohamad Asir bin Haji Achmad gelar Mangkoe Marga	Pasirah Marga Muara Rupit, Onderafdeeling Rawas
26	Pangeran Bakrie bin Pangeran Mohamad Diah gelar Silo Indrapati	Pasirah Marga Lubuk Batang, Onderafdeeling Ogan Ulu
27	Pangeran Djainil bin Kadoel gelar Martabaja VII	Pasirah Marga Aji, Onderafdeeling Muara Dua

28	Depati Mohamad bin gelar	Pasirah Marga Paku Sengkunyit, Onderafdeeling Komering Ulu
29	Abdoelrozak bin Pangeran Mohamad Ali	Kepala Distrik Muara Enim
30	Mohamad Noer bin Pangeran Haji Mohamad Zahir	Pedagang Tanjung Raja, Ogan Ilir
31	Kemas Haji Mastjik Azharie	Pedagang Tebing Tinggi
32	Raden Mohamad Azahari	Kepala Distrik Tanjung Raja
33	Achmad bin Matjan	Kepala Distrik Baturaja
34	Abdoellah Nawawi Hoesien	Kepala HIS Baturaja
Perwakilan Bumi Putera yang diangkat		
35	Mohamad Tohir	Stadsgemeenteraad Palembang
36	Mohamad Joesoef Soeod	Commisioner di Palembang
37	Kiai Haji Tjik Wan	Guru Agama di Palembang
38	Mr. Abdoellah Siddik	Advokat dan Sekretaris Persatuan Dagang Palembang
39	Raden Mohamad Dzoeboer	Pegawai Klas 1 Kantor Walikota Palembang



Kiai Haji Tjik Wan. Kelahiran Palembang, 7 Agustus 1909. Tamatan Perguruan Tinggi Islam di Madjidil Haram, Makkah. Pengalaman dimulai ketika menjabat Pekerja pada secretariat ibadah Haji Indonesia di Makkah selama kuliha (1926-1931). Selanjutnya, pulang ke Palembang bekerja sebagai guru agama (1931-1933). Menjadi kepala sekolah di Sekolah Menengah Islam di Kota Palembang (1933-1940). Tahun 1941-1942, duduk sebagai anggota *Groepsgemeenschappenraad* Palembang

(Dewan Keresidenan Palembang). Pada masa Jepang menjadi anggota parlemen Syu-Sangi-Kai Palembang dan juga anggota Sumatera Tjuo-Sangi-In. Selama masa revolusi fisik aktif dalam dewan KNID Palembang dan Badan Pekerja serta Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera di Bukit Tinggi. Pada waktu Republik Indonesia Serikat (duduk sebagai anggota Parlemen RIS, 1949-1950), sebagai anggota Parlemen RI (1953) dan anggota DPR/Konstituante (1955-1959)

Pada sidang yang pertama tanggal 27 Januari 1941, *Palembang Raad* telah menetapkan beberapa peraturan tata tertib untuk sidang-sidang *Palembang Raad*. Sedangkan, untuk urusan-urusan dalam lapangan pemerintahan yang diserahkan kepada *Groepsgemeenschap* masing-masing berdasarkan *overdrachts ordonnantie* (Peraturan penyerahan) yang telah berlaku sebelumnya *Staatsblad* Nomor 509 Tahun 1937. Demikian juga untuk beberapa pekerjaan umum di Palembang disesuaikan dengan aturan bagi Tanah Seberang *Staatsblad* Nomor 510 Tahun 1937. Aturan penerangan pertanian di Palembang juga disesuaikan seperti *Staatsblad* Nomor 511 Tahun 1937 bagi Tanah

Seberang. Pengajaran sesuai dengan *Staatsblad* Nomor 512 Tahun 1937 dan kesehatan rakyat disesuaikan dengan *Staatsblad* Nomor 520 Tahun 1937.

Dewan Rakyat di Masa Jepang (Su-sangi-kai)

Pecah perang dunia ke II. Jepang mengadakan perluasan serangan dan menguasai Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Setelah di Tarakan, Kalimantan Utara. Jepang menyerbu Kota Palembang. Pada 15 Februari 1942 Angkatan Laut Jepang menguasai Selat Bangka dilanjutkan dengan serangan udara melalui pasukan payung untuk menguasai Plaju dan Sungai Gerong. Setelah menguasai Palembang, disusul pasukan angkatan darat Jepang yang mengadakan perburu pasukan Belanda hingga ke Pulau Jawa. Belanda menyerah tanpa syarat pada tanggal 8 Maret 1942. Menyerahkan Indonesia kepada Jepang.

Pada awalnya, masyarakat Indonesia menyambut gembira kedatangan Jepang. Jepang dianggap saudara tua untuk membebaskan Indonesia. Namun pemerintahan militer Jepang tidak berbeda dengan Belanda. Sejak September 1942, Jepang melakukan administrasi pemerintahan militer di Indonesia. Seluruh Pulau Jawa dikuasai tentara (*riku-gun*) ke-16 yang berkedudukan di Jakarta. Indonesia Timur dikuasai Angkatan Laut (*kai-gun*) Armada Selatan ke-2 berkedudukan di Makassar. Sementara, Indonesia Barat di seluruh Pulau Sumatera dibawah kuasa Tentara (*riku-gun*) ke-25 yang berkedudukan di Bukittinggi, Sumatera Barat. Semua jenis pemerintah tidak diakui lagi, termasuk *Volksraad*. Kegiatan-kegiatan politik mulai dilarang.

Keresidenan Palembang dijadikan *Shu* (provinsi) Palembang terdiri dari *Shi* (kota) Palembang dan 12 *bun-shu* (kabupaten). *Shu* Palembang dipimpin oleh *Bun-shu-tjo* Letnan Jenderal H. Kasai. Sejak akhir tahun 1943, tatkala pasukan Sekutu mulai mengambil tindakan ofensif, pemerintah Jepang mulai berusaha melunak. Pada tingkat pusat, Jepang pada tanggal 5 September 1942 mengizinkan dibentuknya parlemen yang disebut *Tjuo Sangi-In* sebagai badan perwakilan. Pada 8 November 1943, di wilayah Sumatera Selatan, Jepang membentuk dewan *Shu Sangi-Kai* yang mirip dengan *Palembang raad* zaman Belanda.

Shu Sangi-Kai Sumatera Selatan diketuai gubernur militer (*Bun-shu-tjo*) Sumatera Selatan, Letnan Jenderal H. Kasai. Anggota *Shu Sangi-Kai* Palembang berjumlah 26 orang. Anggota *Shu Sangi Kai*

Palembang diambil dari tokoh masyarakat kalangan Bumi Putera dan pejabat Jepang periode 1943-1945, yakni:

No	Nama	Jabatan
1	Letjen H. Kasai	Gubernur militer Sumatera Selatan/Ketua
2	<i>Tjo-kan</i> Miaji	Residen Palembang/Wakil Ketua
3	dr. Adnan Kapau Gani	Wakil ketua <i>Shu Sangi-Kai</i> /Politisi Gerindo
4	dr. Mohamad Isa	Politisi Parindra
5	Abdul Rozak	Wedana Palembang
6	Raden Hanan	Wedana Muara Enim
7	Raden Bakrie	Demang
8	Asy'ari,	Kepala Jaksa Pengadilan Palembang
9	Raden Mohamad Mursodo	Inspektur Polisi
10	Noengtjik AR	Politisi Gerindo
11	M. J. Soe'oad	Politisi Parindra
12	Salam Astrokusumo	Politisi Parindra
13	M. Sidik	Pegawai pengadilan
14	Kiai Haji Tjik Wan	Ulama
15	Raden Z. Fanani	Guru
16	Ongko G	-
17	Ir. Ibrahim Zahir	Sekretaris Palembang Syi
18	Raden Mutoro	Komisaris Polisi
19	Pangeran Tjik Mat	-
20	Yap Tiang Ho	perwakilan masyarakat Cina Palembang
21	Liliram	perwakilan masyarakat India Palembang

Pada bulan Maret 1944, Pemerintah militer Jepang juga membentuk Palembang *Hokokai* (Badan Kebaktian Rakyat Palembang) untuk menghimpun semua pimpinan golongan masyarakat. Palembang Hokokai diketuai oleh Jaksa Asy'arie yang juga anggota *Shu Sangi-Kai*. Palembang *Hokokai* lebih memiliki kekuatan tekanan politik kepada pemerintah militer karena selain dari anggota Shu Sangi Kai, perwakilan masyarakat Cina, India, dan Arab, juga merekrut anggota yang ditarik dari luar struktur birokrasi Jepang, seperti jurnalis A. S. Mattjik dan politikus pergerakan A. K. Gani. Hokokai Palembang Syuu dibuat berstruktur pada setiap daerah *bunshu* dengan dibentuk Badan Kebaktian Rakyat yang sepenuhnya dipegang oleh perwakilan dari pribumi di Sumatera Selatan.

Kembali ke *Shu Sangi-Kai* Palembang sebagai sebuah parlemen untuk menjadi badan penasehat pejabat Jepang di Palembang *Shu*. Tugas utamanya berkewajiban menjawab pertanyaan-pertanyaan dan mengajukan usul-usul ke pejabat Jepang di Palembang. Namun dalam prakteknya, *Shu Sangi-Kai* Palembang tidak dapat berfungsi sebagai

yang dimaksud diatas. Karena pada umumnya anggota *Shu Sangi-Kai* Palembang tidak sanggup menyatakan pendapat yang sesungguhnya disebabkan keadaan pada masa itu.

Selain itu, untuk pada 24 Maret 1945 untuk Pulau Sumatera dibentuk Sumatera *Tjo Sangi-in* yang diketuai oleh Mohamad Syafei (Perwakilan Sumatera Barat) dengan wakil-wakil ketua Teuku Nyak Arif (Perwakilan Aceh) dan Mr. Abdul Abbas (Perwakilan Lampung). Anggota Sumatera *Tjo Sangi-in* berjumlah 40 orang. Palembang *Shu* diwakili dr. A. K. Gani dan Abdul Rozak. Sejalan dengan perkembangan di Pusat, ketika akhir pendudukan Jepang, lahir *Dokuritsu Junbi Chosakai* atau Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) pada 1 Maret 1945. Selanjutnya pada 7 Agustus 1945 berganti menjadi *Dokuritsu Junbi Iin-kai* Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada wilayah Sumatera Selatan juga muncul Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia Palembang yang dipimpin dr. A. K. Gani.

KNID Keresidenan Palembang, 1945-1947

Setelah proklamasi 17 Agustus 1945 dibacakan oleh Soekarno dan Hatta di Jakarta. Palembang sudah mendapatkan kabar Proklamasi pada tanggal 18 Agustus 1945. Keesok hari, dr. A. K. Gani memimpin pertemuan dengan para tokoh Sumatera Selatan membahas langkah-langkah yang akan diambil. Para pimpinan Sumatera Selatan tanggal 22 Agustus 1945 bertemu para pemimpin Jepang di Palembang. Tokoh Sumatera Selatan yang hadir adalah dr. A. K. Gani, Abdul Rozak, Noengtjik AR, Raden Hanan, M. Asaari, Ir. Ibrahim, Bay Salim, K. H. Tjikwan, Salam Paiman, Parmono dan Yap Tiang Ho. Pimpinan Jepang yang hadir antara lain Matsubara, Syumobuco, Tokkokaco dan lain-lain. Serta tuan rumah *Tjokan* Myako Tasio. Para pemimpin Jepang di Palembang mengakui penghentian perlawanan katrena adanya pengeboman atom di Hiroshima dan Nagasaki.

Tanggal 24 Agustus 1945, tiga utusan Pusat, dr. M. Amir, Mr. T. M. Hasan, dan Mr. Abbas ke Palembang. Mengadakan pertemuan dengan tokoh-tokoh Sumatera Selatan dalam pembentukan pemerintahan sipil. Dr. A. K. Gani ditunjuk sebagai kepala pemerintahan Keresidenan Palembang (Sumatera Selatan) dan diberi hak membentuk pemerintahan sipil, Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) dan menyusun kekuatan militer Badan di Sumatera Selatan.

Pada tanggal tanggal 3 September 1945 A. K. Gani membentuk KNID Sumatera Selatan sebagai badan perwakilan rakyat daerah sementara. KNID ini sambal menunggu akan dilakukannya pemilihan wakil-wakil rakyat pada bulan Desember 1945. Anggota KNID Sumatera Selatan diambil dari *Shu Sangi-Kai* Palembang dan Palembang *Hokokai*. Anggota KNID Sumatera Selatan berjumlah 45 orang. 45 orang anggota Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Sumatera Selatan tersebut, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	dr. Mohamad Isa	Ketua KNID/Parindra
2	A. S. Mattjik	Wakil Ketua KNID/ PSII
3	Hamid Hoesien	Sekretaris KNID
4	Agoes Rahman	Bendahara KNID/ Partai Sosialis Indonesia
5	M. J. Soe'oed	
6	Raden Z.Fanani	Masjumi
7	R. Ibnu Sutowo	
8	Ny. M. Isa	
9	R.M. Utojo	Parindra
10	R. Sugiharto	Parindra
11	Josodipuro	Parindra
12	K. H. Masyhur Azhari Sjaropie	PSII
13	A. Najamuddin Hadi	PSII
14	K. H. Achmad Azahari Umar	Masjumi
15	K. H. Tjikwan	Masjumi
16	KI. H. Daud Roesjdi	
17	KI. H. Sarbini	
18	Abdullah Nawawi	
19	KH Ahmad Azhari Umar	Masjumi
20	Chodewi Amin	
21.	Suroto	
22	Salam Astrokusumo Thalib	
23	Kiagus H. Muhamad Sjadjari bin Saleh	
24	K.H. Malian Djaman Masawa	
25	M. Amin Fauzi	
26	Noengtjiek A.R.	Partai Sosialis Indonesia
27	N. Zailani	
28	M. Yunus Sjamsuddin	
29	KI. H. Mursal	
30	Nurhasjim	
31	Abdoel Roni	
32	Basuni	
33	H. Anang	
34	Abdullah	

35	Pangeran Tjikmat	Barisan Pemimpin Adat
36	Ny. Siti Rahajoe Noordeen	Partai Wanita Indonesia (Parwari)
37	Yap Tiang Ho	Perwakilan masyarakat Cina di Palembang
38	Lauw Goean	Perwakilan masyarakat Cina di Palembang
39	Tan Ban San	Perwakilan masyarakat Cina di Palembang
40	Liem Djie Lan	Perwakilan masyarakat Cina di Palembang
41	Tjia Ting Kim	Perwakilan masyarakat Cina di Palembang
42	Lilaram	Perwakilan masyarakat India di Palembang
43	S. A. Kitcher Maricar	Perwakilan masyarakat India di Palembang
44	S. A. Almenoar	Perwakilan masyarakat Arab di Palembang
45	A. Racham Assegaf	Perwakilan masyarakat Arab di Palembang

Pada saat itu, awalnya KNID Sumatera Selatan dipersiapkan dan ditugaskan untuk membantu tugas-tugas Residen Palembang dalam legislatif sekaligus wadah dalam menghimpun perjuangan diplomasi para pemimpin terkemuka dari pelbagai kalangan partai politik di Sumatera Selatan. Pembentukan KNID yang akan diikuti rencana Pemilihan Umum tahun 1946 di Sumatera Selatan ikut mendorong tumbuh kembalinya kehidupan partai-partai politik di Sumatera Selatan sebagai wadah perjuangan. Beberapa partai politik kembali tumbuh, Partai Nasional Indonesia (PNI) di Sumatera Selatan disokong oleh para tokoh Partai Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) dan Partai Indonesia Raya (Parindra). Antara lain, dr. A. K. Gani, Dr. M. Isa, R. M. Utojo, R. Sugiharto, Josodipuro, dan sebagainya.

Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masjumi) jelmaan dari Barisan Oemmat Islam (BOI) serta beberapa organisasi pemuda berbasis Islam seperti Hizbullah dan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) serta dari Partai Islam Indonesia (PII), Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, seperti R. Z. Fanani, K. H. Tjikwan, K. H. Masjhur Azhary, K. H. Achmad Azahari, dan lainnya.

Pertumbuhan juga terjadi pada Partai Syarekat Islam Indonesia (PSII) dengan tokoh utama A. S. Mattjik, Suhardjo dan sebagainya. Kemudian Partai Sosialis Indonesia (PSI) muncul dengan tokoh-tokoh seperti Noengtjik AR, Basri, M. Ali Chanafiah, A. Hamid Kemang, Zaikadir, A. S. Sumadi, Agus Rahman dan lain-lain. Serta Partai-partai lainnya seperti Partai Wanita Indonesia (Perwari) dengan tokoh Rahajoe Nordeen. Partai Nasional Indonesia Turunan Arab (Parnita) dengan tokoh Ali Gathmyr, Abdullah Gathmyr dan Siechan Sjahab.

Pada tanggal 23 Nopember 1945 keluar pengumuman dari pemerintah pusat dalam rangka menstrukturisasi KNID di Sumatera Selatan. Isinya daerah diinstruksikan untuk membentuk partai-partai

dan lasykar guna menciptakan wakil-wakil yang lebih representatif dalam KNID Sumatera Selatan yang sifatnya akan dirubah. KNID akan berubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Artinya KNID Sumatera Selatan tidak lagi ditempatkan bekerja membantu Residen Palembang, namun bersama kepala daerah melaksanakan pemerintahan. Menyambut itu masyarakat Sumatera Selatan melakukan Kongres Rakyat Daerah Seluruh Palembang pada bulan Desember 1945.

Kongres Rakyat Seluruh Palembang ini dihadiri 1100 orang perwakilan seluruh Komite Nasional Daerah di Kewedanaan Sumatera Selatan. Konggres ini melakukan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan. Pelaksanaan pemilihan secara langsung dan rahasia yang pertama kali dilakukan dalam masa revolusi. Pemilihan ini dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1946. Kongres Rakyat di Palembang ini menghasilkan dan memilih 60 anggota yang duduk sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan. Dengan komposisi, sebagai berikut:

No	Partai	Pimpinan	Jumlah Wakil
1	Partai Sosialis Indonesia (termasuk Pesindo, Barisan Pemuda Republik Sumatera, Persatuan Buru Sumatera, Persatuan Pegawai Kereta Api)	Noengtjik AR	20
2	Partai Nasional Indonesia (termasuk Group Dr. Soepa'at, Persatuan Guru, Polisi, Perwari)	dr. A. K. Gani	13
3.	Masjumi (termasuk Partai Islam Indonesia, PSII, BOI K. H. Abubakar B)	K. H. Achmad Azahari	13
4.	Barisan Pemimpin Adat Sumatera Selatan	Pangeran Tjikmat	5
5	Partai Nasional Indonesia Turunan Arab (Parnita)	Sjech Abdullah Gatmir	1
6	Persatuan India-Indonesia (Persindo)	M. G. Noordeen	1
7	Persatuan Nasional Indonesia Timur (Penimur)	Rahman Thalib	1
8	Golongan Cina	-	1
9	Perwakilan Kelompok Etnis Cina	-	1
10	Perwakilan Kelompok Kolonisasi (Jawa)	-	1
11	Perwakilan Persatuan Masehi Indonesia (Permai)	-	1
12	Perwakilan Perusahaan Tambang Bukit Asam	-	1
13	Perwakilan Kelompok Islam Ortodok	-	1
	Jumlah	-	60

Selanjutnya, dari 60 anggota DPRD Sumatera Selatan berdasar Kongres Rakyat Palembang Desember 1945 tersebut, diantaranya: dr. A. K. Gani, dr. M. Isa, Noengtjik AR, R. Z. Fanani, R. M. Utoyo, dr. Slamet, N. S. Effendy, M. Zailani, R. Ibnu Sutowo, Ny. M. Isa, Basri, A. K. Saropi, K. Hutabarat, R. Humam, Josodipuro, K. H. Achmad Azahari. Kemudian ada tokoh-tokoh Masjumi seperti K. H. Masyhur Azhari, A. Najamuddin Hadi, M. J. Soe'oad, A. S. Mattjik. Tokoh-tokoh etnisitas, seperti Aly Gathmir, C. Lilaram, Pangeran Tjikmat, Sjech Abdullah Gatmir, M. G. Noordeen, Rahman Thalib, Liem Djie Lan, dan lain-lainnya.

Pada sidang pertama bulan Januari 1946, KNI-Daerah yang sudah bernama DPRD Sumatera Selatan dibuka dan dipimpin langsung oleh Residen dr. A. K. Gani. Hasil siding ini menghasilkan susunan Badan Pekerja Harian (BPH) DPRD Sumatera Selatan, terdiri dari: dr. M. Isa, R. Z. Fanani, R. M. Utoyo, Noengtjik A. R. dan satu nama baru N. S. Effendy. Keadaan politik yang tidak menentu waktu itu, menyebabkan BPH DPRD Sumatera Selatan kurang bekerja secara maksimal. Sejak bulan Mei 1946, dr. M. Isa diangkat menjadi Gubernur Muda menggantikan dr. A. K. Gani. R. M. Utojo diangkat menjadi wakil Residen Djambi, N. S. Effendi dari Tentara harus lebih aktif di ketentaraan. Demikian juga R. Z. Fanani yang diminta Provinsi Sumatera menjadi Kepala Djawatan Sosial di Bukit Tinggi.

Kondisi dan keadaan secara umum setelah tahun 1946 di Palembang waktu itu mengalami beberapa penggantian pimpinan. dr. A. K. Gani ditarik ke Pusat menjadi Menteri Kemakmuran R. I. Sehingga, posisi kunci kepemimpinan revolusi di Palembang dipegang oleh dr. M. Isa sebagai Gubernur Muda Sumatera Selatan menggantikan kedudukan dr. A. K. Gani. Sementara, Abdul Rozak naik Residen Palembang menggantikan kedudukan dr. M. Isa. Raden Hanan sebagai Walikota Palembang. Selain itu tokoh-tokoh yang memegang departemen yang masih aktif tercatat Baay Salim sebagai Departemen Urusan Pekerjaan Umum dan Noengtjik AR sebagai Departemen Urusan Penerangan Sumatera Selatan.

Menjelang tiga hari ulang tahun pertama Kemerdekaan RI, tanggal 14 Agustus 1946. Dilakukan pelantikan Hasil pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan yang dilaksanakan oleh Kongres Rakyat di Bulan Desember 1945. Berdasarkan kondisi tersebut, maka DPRD Sumatera Selatan melakukan

sidang kedua. Hasilnya mengubah susunan Badan Pekerja Harian (BPH), yang terdiri dari K. H. Ahmad Azhari, Basyuni Saropie, A. S. Mattjik, dan R. Sugiharto.

Setelah tahun 1947, situasi dan kondisi pemerintahan di Sumatera Selatan juga semakin kurang menentu. Akibat beberapa hal, seperti akibat Perang Lima Hari Lima Malam pada bulan Januari 1947, Agresi Militer Belanda ke-I dan ke-II. Menyebabkan banyaknya gugur hak keanggotaan beberapa orang anggota DPRD Sumatera Selatan. Selain itu, Badan Pekerja Harian DPRD Sumatera Selatan juga berkali-kali mengalami mutasi. Mereka yang pernah menjadi anggota Badan Pekerja (BP) DPRD Sumatera Selatan tidak kunjung dapat menjalankan seluruh kegiatan-kegiatan ini.

Pada sisi lain ditengah situasi yang tidak menguntungkan tersebut. Di mana sejak tahun 1947 akibat pemerintahan berpindah ke daerah-daerah uluan setelah peristiwa Perang Lima Hari Lima Malam pada bulan Januari 1947. Dalam menjalankan roda pemerintahan dibentuk baru lagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan. Pada 12 April 1947, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan dibentuk dengan para anggota-anggotanya diambil dari setiap kabupaten-kabupaten di Sumatera Selatan. Mereka harus dipilih oleh DPRD daerahnya masing-masing.

Selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan yang baru ini terdiri dari: 15 orang anggota perwakilan daerah Palembang, 7 orang anggota perwakilan daerah Lampung, 7 orang anggota perwakilan daerah Bengkulu dan 3 orang anggota perwakilan daerah Bangka-Belitung. Dengan demikian, sejak tahun 1947 terdapatlah 30 orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari daerah Sumatera Selatan. Dalam sidang pertama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan ini tidak semua anggota hadir, karena sulitnya perhubungan, tetapi telah dapat dilangsungkan, yang antara keputusannya membentuk Badan Pekerja (BP) DPRD Sumatera Selatan.

DPRD Provinsi Sumatera Selatan, 1948-1950

Setelah terjadi Agresi Militer Belanda ke-I, keadaan bertambah sulit lagi. Dalam mengatasi masalah ini, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 Provinsi Sumatera selanjutnya dipisah menjadi tiga Propinsi. Pada pertengahan 7 Juni 1948 berdiri

Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya dr. M. Isa diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Gubernur Sumatera Selatan yang pertama dilantik di Bengkulu dengan berkedudukan di Curup.

Disamping penetapan Gubernur Sumatera Selatan dalam meningkatkan pemerintahan juga dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan. Pada pemerintahan baru Provinsi Sumatera Selatan ini, dipimpin secara kolegal akan dijalankan oleh sebuah dewan gabungan antara Gubernur Sumatera Selatan bersama Badan Pekerja (BP) DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Pada tanggal 20 Oktober 1948, dilakukan pelantikan terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan. Secara resmi, pada tanggal 23 Oktober 1948 Dewan Perwakilan Rakyat Derah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan melakukan sidang pertama di Curup.

Sidang ini memilih Badan Pekerja (BP) DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan hasil anggota BP terdiri dari R. Abdullah (PNI), Azis Tjindarbumi (anggota BP DPRD Lampung, dari BTI), M. Ali Chanafiah (anggota BP DPRD Bengkulu dari Partai Sosialis), A. Wahab (dari kalangan dagang) dan Noengtjik AR (anggota BP DPRD Palembang). Karena wakil-wakil Islam dan PSI tidak ada yang terpilih, maka mereka memajukan sanggahan dan mengusulkan agar diadakan pemilihan secara berimbang berdasarkan keterwakilan anggota DPRD.

Gubernur dr. M. Isa mempergunakan kebijaksanaan diluar kebiasaan dengan melakukan perundingan di luar sidang. Akhirnya berdasar pemilihan ulang dengan azas perimbangan dihasilkan anggota Badan Pekerja (BP) DPRD Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari Azis Tjindarbumi, M. Ali Chanafiah, Noengtjik AR ditambah Basri (dari PSI, juga anggota BP DPRD Palembang) dan K. H. Masyhur Azhary (dari Masyumi, juga anggota BP DPRD Palembang). Keduanya, menggantikan posisi R. Abdullah dan A. Wahab.



Gambar 2. Foto bersama Anggota DPRD-S 1948-1950 didepan Gedung Dewan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan (Gedung Nasional) di Curup, tanggal 20-23 Oktober 1948

Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan Badan Pekerja DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang baru saja memulai pengaturan otonomi pemerintahan di Sumatera Selatan. Kembali kurang menentu, karena Belanda menjalankan Agresi Militer Ke-II pada bulan Desember 1948. Menghadapi situasi ini pada tanggal 23 Desember 1948, Gubernur Sumatera Selatan bersama Badan Pekerja DPRD dan para pimpinan Tentara mengadakan perundingan di Curup.

Kedadaan kembali berubah pemerintahan otonom Provinsi Sumatera Selatan yang baru lahir diganti menjadi Provinsi Daerah Militer Sumatera Selatan (DMSS). Gubernur sipil yang dijabat dr. M. Isa diganti dr. A. K. Gani menjadi gubernur militer dalam mengadakan perlawanan total terhadap Belanda. Gubernur dr. A. K. Gani memegang seluruh kekuasaan, baik sipil maupun militer. Disamping perlawanan secara militer, kekuasaan sipil juga dikerahkan sebagai perjuangan di lapangan propaganda dalam menangkalkan politik dari pihak Belanda.

Sejalan dengan itu, maka diadakan rapat pada tanggal 15 Januari 1949 dengan menetapkan semua anggota BP dan anggota adan DPRD Provinsi Sumatera Selatan diangkat menjadi koordinator politik, disamping sebagai pimpinan militer. Tugas ini dijalankan berdasarkan pembagian daerah perlawanan.

Anggota BP DPRD Provinsi Sumatera Selatan Azis Tjindarbumi berangkat ke Lampung. K. H. Masjhur Azhary ditempatkan dan berada di daerah Palembang Selatan. Basri ke daerah Lintang Empat Lawang dan Lubuk Linggau. Noengtijk AR ditempatkan dan bertugas di daerah Musi Rawas. M. Ali Chanafiah di daerah Bengkulu. Sementara dr. M. Isa bersama Kolonel Simbolon berangkat ke daerah uluan Jambi. Sedangkan dr. A. K. Gani dari Muara Aman mundur dan bermarkas di tambang emas Lebong Tandai, Bengkulu.

Selanjutnya, sejak bulan Agustus 1949, berhubung akan dilangsungnya Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda. Gubernur militer Sumatera Selatan dr. A. K. Gani masuk ke daerah pendudukan. Kemudian disusul oleh dr. M. Isa yang kembali ke Sumatera Selatan dan diangkat sebagai Komisaris Pemerintah Pusat di Sumatera Selatan.

Pada waktu pengakuan kedaulatan, Provinsi Sumatera Selatan masih dibawah kekuasaan Gubernur Militer Dr. A. K. Gani yang sebenarnya berkedudukan di Kota Palembang. Namun karena di Kota Palembang masih terdapat negara boneka, Negara Sumatera Selatan (NSS) yang didirikan Belanda. Sekembali dari Negeri Belanda dalam menghadiri Konferensi Meja Bundar, Komisaris Pemerintah Pusat, dr. M. Isa masih mengambil kedudukan di Kota Bengkulu sebagai pusat pemerintahan sipil Sumatera Selatan. Setelah itu, fungsi gubernur militer yang dipegang oleh dr. A. K. Gani dihapuskan di Sumatera Selatan.

Gubernur Provinsi Sumatera Selatan kembali dijabat oleh dr. M. Isa. Pada tanggal 17 Februari 1950 diadakan timbang terima dan sejak saat itu, kekuasaan pemerintah sipil kembali dijalankan secara kolegal dengan gubernur bersama Badan Pekerja DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Kondisi ini juga dalam menghadapi gerakan menentang negara boneka, Negara Sumatera Selatan (NSS). Sejak penyerahan kedaulatan, meningkat gerakan menentang Negara Sumatera Selatan yang berjalan sedemikian sengit. Front Republikan mengadakan penentangan baik di kota maupun di luar Kota Palembang lewat aksi pemuda dan masyarakat. Kondisi ini menyebabkan dr. M. Isa bersama Badan Pekerja DPRD Provinsi berangkat ke Palembang pada tanggal 17 Maret 1950 dalam melaksanakan pengoperan kekuasaan dari Negara Sumatera Selatan. Disaksikan oleh wakil Pemerintah Republik Indonesia Serikat (RIS) dan pembesar Republik Indonesia (RI) serta para

pemimpin Negara Sumatera Selatan dengan wali negara boneka Sumatera Selatan A. Malik. Pada tanggal 18 Maret 1950 dilakukan penyerahan eks Negara Sumatera Selatan dengan segala alat kekuasaannya serta segala inventarisnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka daerah eks Negara Sumatera Selatan dimasukkan kembali menjadi daerah Provinsi Sumatera Selatan. Segala tugas dari seluruh jawatan kementerian eks Negara Sumatera Selatan dioper kedalam anggota Badan Pekerja dan Kepala Jawatan Provinsi Sumatera Selatan. Pada bulan April 1950 daerah istimewa Bangka Belitung juga telah didaulat oleh gerakan masyarakat dan terpaksa dibubarkan. Pada 22 April 1950, seluruh kekuasaan di daerah istimewa Bangka Belitung dioper ke dalam Provinsi Sumatera Selatan oleh Gubernur M. Isa dan Badan Pekerja DPRD Provinsi. Pengoperan tersebut dilakukan oleh Perdana Menteri Daerah Istimewa Bangka Belitung, A. Halim dan rombongannya ke Gubernur Sumatera Selatan dengan upacara khusus di Pangkal Pinang.

Pada pertengahan bulan Agustus 1950, karena terdapat kekurangan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan beberapa anggota DPRD di Kabupaten. Diadakan Sidang Pleno Kedua DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk melengkapi kembali anggotanya. Sejak bulan Agustus 1950 anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan beranggota 21 orang. Ke-21 anggota tersebut adalah: 10 orang anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan perwakilan daerah Palembang yakni Noengtjik AR, Basri, H. Masjhur Azhary, R. Human, A. Wahab, H. Malian Djaman, R. S. Josodipuro, Ali Gathmyr dan Pangku. 5 orang anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan perwakilan daerah Lampung yakni Azis Tjindarbumi, A. Halim, M. Tahir Hasan, W.A. Rahman dan R.A. Basjid. 3 orang anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan perwakilan daerah Bengkulu yakni M. Ali Chanafiah, M. Djafri dan Rasjid Thalib. Dan 3 orang anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan perwakilan daerah Bangka Belitung yakni Rusjdi Zen, Abang Arifin dan Njonja Chamsiah.

Perkembangan Dapil Pemilu di Sumatera Selatan

Daerah Pemilihan atau disingkat Dapil diperkenalkan sejak Pemilihan Umum 2004. Pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003. Daerah Pemilihan (Dapil) dalam Pemilihan Umum di

Indonesia merujuk kepada batas wilayah atau jumlah penduduk dalam suatu wilayah yang menjadi dasar penentuan alokasi jumlah kursi yang diperebutkan. Dapil menjadi dasar penentuan jumlah suara untuk menentukan calon terpilih dalam Pemilihan Umum. Para pemilih yang tinggal di daerah pemilihan tersebut disebut konstituen.

Pada pemilihan umum legislatif dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan, Dapil merupakan kota/kabupaten atau gabungan wilayah kota/kabupaten maupun bagian wilayah administrasi pemerintahan yang dibentuk sebagai kesatuan wilayah/daerah berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik, dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Provinsi. Penamaan Daerah Pemilihan (Dapil) di Provinsi Sumatera Selatan biasanya menggunakan kode angka romawi, semisal Dapil Sumsel I, Dapil Sumsel II, dan seterusnya.

Dapil merupakan unsur penting dalam pemilu karena menentukan sistem pemilihan dan mempengaruhi stabilitas pemerintahan hasil pemilu. Unsur penting Dapil lainnya, para calon legislatif (caleg) berebut suara atau berkonstentasi dibagi berdasarkan Dapil itu. Sehingga, Dapil sangat vital untuk pemilu dan demokrasi. Penataan Dapil Anggota DPRD di Provinsi Sumatera Selatan, sama seperti daerah lain dengan memperhatikan 7 (tujuh) prinsip kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, berada dalam satu wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan.

Dapil merupakan arena kompetisi beserta jumlah kursi yang diperebutkan untuk mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat dalam sebuah penyelenggaraan Pemilu. Pembentukan Daerah Pemilihan (Dapil) tidak dilakukan sembarangan, sebab jika dibuat secara serampangan bisa menyebabkan suatu penduduk merasa tidak memiliki wakil di lembaga perwakilan nantinya. Sehingga aspirasi dari masyarakat pada wilayah tersebut tidak tertampung yang bisa berakibat munculnya ketimpangan-ketimpangan pembangunan yang tidak merata.

Berdasarkan perkembangan Pemilihan Umum sejak 2004. Daerah Pemilihan (Dapil) untuk menentukan suara dan alokasi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan mengalami beberapa perubahan.

Pada Pemilihan Umum 2004 untuk menentukan alokasi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan periode 2004-2009 ditetapkan 6 dapil dengan alokasi kursi sebanyak 65 kursi sebagai berikut:

Dapil	Wilayah Dapil	Jumlah Kursi
Sumsel I	Kota Palembang	13
Sumsel II	Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin	13
Sumsel III	Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir	10
Sumsel IV	Kota Prabumulih dan Kabupaten Muara Enim	6
Sumsel V	Kabupaten Ogan Komering Ulu	10
Sumsel VI	Kabupaten Lahat dan Kota Pagaram	7
Sumsel VII	Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuk Linggau	6

Pada Pemilihan Umum 2009 penentuan dapil untuk alokasi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan periode 2009-2014 tidak berubah tetap 7 dapil. Namun alokasi jumlah kursi mengalami perubahan sebanyak 75 kursi. Wilayah Dapil juga mengalami beberapa perubahan sejalan pemekaran kota/kabupaten baru di Sumatera Selatan, sebagai berikut:

Dapil	Wilayah Dapil	Jumlah Kursi
Sumsel I	Kota Palembang	16
Sumsel II	Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin	16
Sumsel III	Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir	11
Sumsel IV	Kota Prabumulih dan Kabupaten Muara Enim	8
Sumsel V	Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten OKU Timur dan Kabupaten OKU Selatan	12
Sumsel VI	Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang dan Kota Pagaram	6
Sumsel VII	Kabupaten Musi Rawas dan Kota Lubuk Linggau	6

Pada Pemilihan Umum 2014 penentuan dapil untuk alokasi kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan periode 2014-2019 mengalami perubahan yang sangat signifikan karena membengkak menjai 9 dapil dengan jumlah kursi tetap sebanyak 75 kursi. Wilayah Dapil yang mengalami beberapa sebagai berikut:

Dapil	Wilayah Dapil	Jumlah Kursi
Sumsel I	Kota Palembang: Kecamatan IB I, Kecamatan IB II, Kecamatan Bukit Kecil, Kecamatan Gandus, Kecamatan SU I, Kecamatan SU II, Kecamatan Kertapati, dan Kecamatan Plaju	6
Sumsel II	Kota Palembang: Kecamatan IT I, Kecamatan IT II, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Sako, Kecamatan Kemuning, Kecamatan Kalidoni, Kecamatan Alang-Alang Lebar, dan Kecamatan Sematang Borang	7
Sumsel III	Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir	12
Sumsel IV	Kabupaten OKU Timur	6
Sumsel V	Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten OKU Selatan	7
Sumsel VI	Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten PALI	8
Sumsel VII	Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang dan Kota Pagaralam	6
Sumsel VIII	Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten MURATARA dan Kota Lubuk Linggau	7
Sumsel IX	Kabupaten Banyuasin dan Kabupaten Musi Banyuasin	7

Pada Pemilihan Umum 2019 terdapat 10 dapil dengan jumlah kursi tetap sebanyak 75 kursi. Wilayah Dapil dalam memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan periode 2019-2024 sebagai berikut:

Dapil	Wilayah Dapil	Jumlah Kursi
Sumsel I	Kota Palembang: Kecamatan IB I, Kecamatan IB II, Kecamatan Bukit Kecil, Kecamatan Gandus, Kecamatan SU I, Kecamatan SU II, Kecamatan Kertapati, dan Kecamatan Plaju	6
Sumsel II	Kota Palembang: Kecamatan IT I, Kecamatan IT II, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Sako, Kecamatan Kemuning, Kecamatan Kalidoni, Kecamatan Alang-Alang Lebar, dan Kecamatan Sematang Borang	7
Sumsel III	Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Kabupaten Ogan Ilir	12
Sumsel IV	Kabupaten OKU Timur	6
Sumsel V	Kabupaten Ogan Komering Ulu dan Kabupaten OKU Selatan	7
Sumsel VI	Kota Prabumulih, Kabupaten Muara Enim dan Kabupaten PALI	8
Sumsel VII	Kabupaten Lahat, Kabupaten Empat Lawang dan Kota Pagaralam	8
Sumsel VIII	Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten MURATARA dan Kota Lubuk Linggau	7

Sumsel IX	Kabupaten Musi Banyuasin	7
Sumsel X	Kabupaten Banyuasin	8



Gambar 3. Pembagian Dapil Pemilu 2019 di Sumatera Selatan

BAGIAN I
DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN
MASA ORDE LAMA

BAB 2

DPRD-S PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 1950-1956

Bab ini membahas DPRD Provinsi Sumatera pada masa Orde Lama sebelum Pemilihan Umum Pertama tahun 1955. Dimulai dengan terbentuknya DPRD Sementara tahun 1950-1951. Selanjutnya diteruskan lagi pada periode 1952-1956. Sampai terpilihnya anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan hasil Pemilihan Umum 1955.

Keadaan Politik Menjelang Pengangkatan Anggota DPRD-S Sumatera Selatan Periode 1950-1955

Sejak pertengahan tahun 1950, tepatnya 17 Agustus, negara kesatuan Republik Indonesia secara resmi dikembalikan dengan menghapus Republik Indonesia Serikat (RIS). Pergantian bentuk pemerintahan membutuhkan penataan kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) tahun 1950 dijadikan acuan konstitusi. Pemerintah melaksanakan sistem liberal yang bersifat multipartai. Pelaksanaan politik liberalisme ini menyebabkan keadaan tidak stabil. Karena kabinet mengalami masa jatuh bangun dengan cepat.

Ketidakstabilan politik di tanah air saat itu. Juga memiliki dampak pada relasi pusat dan daerah. Beberapa daerah, terutama di Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi melampiaskan kekecewaan akibat lambannya pembangunan daerah. Akibatnya, terjadi pergolakan di berbagai daerah. Salah satunya di Sumatera Selatan yang berdampak pada pembentukan Dewan Garuda. Dewan Garuda mencoba menuntut kepada pemerintah Pusat, agar di Sumatera Selatan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Kondisi ini menyebabkan Panglima Tentara dan Teritorium II/Sriwijaya dengan tegas menyatakan bahwa gerakan Dewan Garuda ini sebagai tindakan yang sangat membahayakan keutuhan negara. Selanjutnya, untuk mengatasi gerak Dewan Garuda ini dilakukan Musyawarah Nasional (Munas) antara tokoh-tokoh di Pusat dan di Daerah Sumatera Selatan sejak tanggal 10 hingga 14 September 1957. Pemerintahan pusat diwakili mantan Wakil Presiden Mohammad Hatta.

Pada intinya Munas ini mencoba mencari solusi terbaik dari perbedaan antara Pusat dan daerah, dengan mengambil beberapa langkah, antara lain masalah perimbangan ekonomi dan keuangan daerah dan pemerintahan daerah. Musyawarah Nasional yang berjalan damai dan penuh pengertian ini selanjutnya mengeluarkan nota kesepahaman pusat dan daerah yang langsung ditandatangani oleh Presiden Soekarno tanggal 14 September 1957.

Sejak awal tahun 1950, berdasar Peraturan Pemerintah (PP) dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 3/1950, di Sumatera Selatan dibentuk Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan ini sebagai gabungan dari Keresidenan Palembang, Keresidenan Bengkulu, Keresidenan Lampung dan Keresidenan Bangka Belitung. Provinsi Sumatera Selatan beribukota dan berkedudukan di Kota Palembang. Selanjutnya juga diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1950, di mana Provinsi Sumatera Selatan dibagi atas 1 (satu) Kota Besar yakni Kota Palembang, 1 (satu) calon Kota Besar yakni Tanjung Karang atau Teluk Betung, dan 14 (empat belas) Kabupaten.

Peraturan Pemerintah UU No.3/1950 ini juga merealisasikan perubahan Badan Pekerja yang semula membantu Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRD-S) Provinsi Sumatera Selatan. Namun DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk ini masih bersifat sebagai perwakilan daerah-daerah di dalam Provinsi Sumatera Selatan. DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan semula sesuai PP UU No. 3/1950, direncanakan sebanyak 35 orang anggota. Tetapi pada kenyataannya, akhirnya hanya terdiri dari 30 orang anggota saja. Ditunjuk 1 orang ketua dan 1 orang wakil ketua DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan.

Pada awalnya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1950 sebagai pelaksanaannya rencananya terlebih dahulu dibentuk dewan-dewan daerah di setiap kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Dewan-dewan daerah di kabupaten ini sebagai representasi yang nanti akan ditunjuk untuk mengganti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRD-S) Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk dari UU Nomor 3 Tahun 1950.

Namun pelaksanaan dan realisasi pembentukan dewan-dewan di semua kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan mengalami hambatan. Sebanyak 16 daerah kota dan kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan, baru terbentuk di 4 (empat) dewan kabupaten saja. Keempat dewan kabupaten ini tiga terdapat di

Lampung dan satu di Bengkulu. Kondisi ini disebabkan munculnya berbagai instrik-instrik dari anggota partai-partai politik di berbagai kabupaten di Sumatera Selatan yang ada. Di mana kondisinya mengikuti seperti apa yang terjadi di pusat.

Oleh sebabnya, DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk dari jelmaan Badan Pekerja, yang semula hanya dipertahankan untuk satu tahun saja periode 1950-1951. Tetap mengalami pergantian, namun tetap saja belum bisa memasukkan orang-orang dari partai politik. Tegasnya, pada saat itu partai-partai politik di Sumatera Selatan tetap mempertahankan suhu panas seperti yang ada di Pusat. Pemertahankan DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari perwakilan-perwakilan daerah ini sambil menunggu dilaksanakannya Pemilihan Umum I yang baru akan dilaksanakan pada 29 September 1955.

Sistem Pengangkatan Anggota DPRD-S Sumatera Selatan 1950-1955

Pengangkatan anggota DPRDS Sumsel 1950-1955, awalnya diangkat gubernur Sumatera Selatan. Namun pengangkatan tersebut sifatnya sementara menunggu hasil pemilu. Parlemen daerah hasil Pemilu dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, sebagai contoh keanggotaan anggota DPRD Sumsel hasil pemilu 1955 dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Sanusi Hardjadinata pada tanggal 9 Juni 1958.

Karena disebabkan dalam suasana darurat. Dibulan Agustus 1949, berhubung dengan akan berlangsungnya Konperensi Meja Bundar, Dr. A.K. Gani masuk ke daerah pendudukan, kemudian disusul oleh Dr. M. Isa, yang sementara itu telah diangkat menjadi Komisaris Pemerintah Pusat di Sumatera Selatan. Pada waktu pengakuan kedaulatan, Sumatera Selatan masih dibawah kekuasaan Gubernur Militer Dr. A.K. Gani yang berkedudukan di Kota Palembang. Tetapi karena setelah Agresi Militer Belanda Pertama, negara boneka Sumatera Selatan didirikan Belanda, maka Komisaris Pemerintah Dr. M. Isa mengambil kedudukan dikota Bengkulu sebagai Pusat Pemerintahan sipil, sekembalinya dari negeri Belanda menghadiri Meja Bundar. Setelah fungsi Gubernur Militer dihapuskan di Sumatera Selatan dan Dr. M. Isa merangkap menjadi Gubernur kembali, maka pada tanggal 17 Pebruari 1950 diadakan timbang terima dan sejak itu kekuasaan

Pemerintah sipil dijalankan kembali secara colligial Gubernur bersama Badan Pekerja Propinsi.

Gerakan menentang negara boneka Sumatera Selatan sejak penyerahan kedaulatan telah meningkat sedemikian sengit, baik dikota oleh aksi pemuda dan masyarakat, maupun diluar kota Palembang yang digerakkan oleh Front Republikien, maka pada tanggal 17 Maret 1950 Dr. M. Isa bersama Badan Pekerja DPR Propinsi berangkat ke Palembang untuk mengoper kekuasaan dari negara Sumatera Selatan.

Pada tanggal 18 Maret 1950 dengan disaksikan oleh wakil Pemerintah RIS, dan pembesar RI dan negara Sumatera Selatan, wali negara boneka Sumatera Selatan A. Malik telah menjerahkan bekas negara Sumatera Selatan dengan segala alat kekuasaannya dan segala inventarisnya. Dengan ini, maka daerah bekas negara Sumatera Selatan dimasukkan kembali menjadi daerahnya Propinsi Sumatera Selatan. Segala tugas dari apa jang dinamakan Jawatan atau Kementerian dari bekas negara boneka Sumatera Selatan dioper oleh anggota Badan Pekerja dan Kepala Jawatan Propinsi.

Di bulan April 1950 daerah istimewa Bangka Belitung juga telah didaulat oleh gerakan masyarakat dan terpaksa dibubarkan pula. Pada tanggal 22 bulan itu, kekuasaan didaerah istimewa Bangka Belitung dioper pula oleh Gubernur Isa dengan Badan Pekerja DPR Propinsi. Kebetulan pengoperan ini bersamaan dengan kedatangannya Perdana Menteri A. Halim dan rombongannya yang mengadakan perjalanan ke Sumatera Selatan, sehingga rombongan inipun menyaksikan upacara pengoperan itu di Pangkal Pinang.

Setelah bubarnya daerah istimewa Bangka - Belitung dan kembali menjadi daerah Republik Indonesia, maka Propinsi Sumatera Selatan kembali utuh, meliputi Keresidenan Palembang, Lampung, Bengkulu dan Bangka Belitung. Tibalah saatnya untuk kembali menyusun kekuasaan RI dengan segala bahagiannya. Sebagai pedoman pertama untuk memulihkan kekuasaan RI kembali di seluruh Sumatera Selatan, dikeluarkan Maklumat Kebijaksanaan Politik dari Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan, beberapa hari setelah negara boneka Sumatera Selatan dipulihkan semula kedalam kekuasaan R.I. Antara lain dalam kebijaksanaan politik ini adalah membersihkan Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Sumatera Selatan (dan dewan bawahannya) dari segala anasir yang bertentangan dengan semangat perjuangan dan cita-cita demokrasi.

Tegasnya, maka segala anggota yang pernah menyeberang atau yang bekerja sama dengan pihak musuh dan bonekanya, ataupun yang menerima sokongan dan bantuan pihak musuh dan kaki tangannya, digugurkan haknya. Akibat tindakan itu, maka jumlah anggota DPR Propinsi berkurang yang karenanya harus dilengkapi kembali. Untuk mengisi lowongan itu, maka dengan perantaraan anggota DPR Keresidenan masing-masing akan diadakan pemilihan untuk menggantikan mereka yang gugur haknya dari bahagian Keresidenan masing-masing.

Dari tanggal 24 Agustus 1950, sidang pleno yang kedua, atau sidang pleno pertama sejak RI pulih kembali diseluruh Sumatera Selatan dan tatkala itu baru pula terjelma kembali Negara Kesatuan, diadakanlah dikota Palembang yang telah menjadi ibu kota Propinsi Sumatera Selatan kembali. Badan Pekerja D.P.R. Propinsi tinggal utuh, meskipun seorang anataranya merangkap menjadi anggota Parlemen yaitu Basri. Sedang anggotanya setelah dibersihkan, tinggal 21 orang yaitu wakil dari daerah Palembang 10 orang (Nungtijk Ar, Basri, H. Masjhur Azhary, R. Human, A. Wahab, H. Malian Djaman, R.S. Josodipuro, Ali Gathmyr dan Pangku), dari daerah Lampung tinggal 5 orang (Azis Tjindarbumi, A. Halim, M. Tahir Hasan, W.A. Rahman dan R.A. Basjid), dari daerah Bengkulu tinggal 3 orang (M. Ali Chanafiah, M. Djafri dan Rasjid Thalib), dari Bangka Belitung tetap utuh 3 orang (Rusjdi Zen, Abang Arifin dan Nyonya Chamsiah).

Untuk melengkapi kembali jumlah 30 orang, maka pleno tersebut, menetapkan bahwa pencalonan dilakukan oleh partai politik, sedang pemilihan dilakukan oleh anggota Dewan Keresidenan yang berkepentingan. Dengan demikian, maka ketika diadakan sidang pleno dari 17 Maret sampai permulaan April 1951, anggota DPRD Propinsi Sumatera Selatan lengkap kembali 30 orang. Tambahan baru adalah Zaikadir, S. Panhar, R. Sutardjo, Nyonya Sjarkowi Mustafa dan Usman Hamid (5 orang dari daerah Palembang), A. Jasin dan Rauf Ali (2 orang dari Lampung), Zamhari Abidin dan Daud Badaruddin (2 orang dari daerah Bengkulu).

Oleh karena pada pertengahan Agustus 1950, sebelum terbentuknya Negara Kesatuan, Pemerintah R.I. telah mengeluarkan Undang pengesahan otonomi Propinsi, maka didalam sidang bulan Agustus 1950 itu, DPRD Propinsi Sumatera Selatan atas usul mosi Tjikwan menetapkan keputusan yang selanjutnya bahwa pedoman azas DPRD Propinsi adalah Undang No. 22/1948 (bukan lagi Undang No. 10

tahun 1948 (sedang Badan Pekerjaanya disahkan menjadi Dewan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan. Dewan Propinsi seterusnya tidak lagi diketuai oleh Gubernur, melainkan akan memilih ketuanya sendiri. Pemilihan ketua dan wakil ketua DPR Propinsi dilakukan, berkesudahan W.A. Rahman terpilih sebagai Ketua dan Ali Gathmyr sebagai Wakil Ketua.

Dalam sidang pleno ketiga, susunan Dewan Pemerintah Daerah diperbaharui. Basri (yang terus aktif sebagai anggota Parlemen) praktis tidak dapat melaksanakan tugasnya, sedang K.H. Masjhur Azhary sebagai Kepala Jawatan Agama tidak mungkin merangkap. Maka dalam pembaharuan tersebut keduanya diganti oleh Daud Badaruddin dan R. Sutardjo. Kemudian dalam sidangnya yang ke VI, bulan April 1953, susunan Dewan Pemerintah Daerah ini diperbaharui lagi, disebabkan anggota Azis Tjindarbumi mengundurkan diri atas permintaan sendiri, dan digantikan oleh M. Tahir Hasan.

Struktur dan Anggota DPRD-S Sumatera Selatan, 1950-1955

Sejak munculnya pemerintahan Sub-Provinsi Sumatera Selatan sudah dibentuk Badan Pekerja (BP) Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 12 April 1946. Ketika pada pertengahan Agustus 1950, sebelum terbentuknja Negara Kesatuan. Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang pengesahan otonomi Propinsi, Salah satunya Provinsi Sumatera Selatan berdasar Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. Salah satunya adanya kelengkapan kekuasaan legislative yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun karena kesulitan secara politis saat itu, sambil membenahi kondisi politik, maka dilakukan rapat pleno Badan Pekerja Provinsi Sumatera Selatan pada bulan Agustus 1950. Rapat pleno ini selanjutnya mengambil keputusan sementara untuk membentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan yang sifatnya sementara. Masa tugas DPRD-Sementara (DPR-S) Provinsi Sumatera Selatan hanya diberi setengah tahun Agustus 1950 sampai dengan Desember 1951. Rencananya setelah setengah tahun DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan ini akan diisi

sesuai fungsinya oleh anggota-anggota dari partai politik yang ada di Sumatera Selatan.



Gambar 4. Foto bersama Anggota DPRDS dengan Gubernur Dr. M. Isa

Berdasarkan hal tersebut, maka bulan Agustus 1950, dilakukan siding pleno I untuk menentukan keanggotaan DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan. Sidang ini mengalami perdebatan untuk menentukan keanggotaan DPRD-S tentang membentuk keanggotaan baru atau mengambil dari DPRD tahun 1948. Selanjutnya K. H. Tjikwan melakukan usul mosi, bahwa keanggotaan DPRD-S yang sifatnya sementara itu, harus tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dan tidak lagi pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948. Demikian juga tentang Badan Pekerja DPRD yang disahkan menjadi Dewan Pemerintah Daerah Sumatera Selatan dianggap kurang relevan. Menurut K. H. Tjikwan, dewan propinsi harusnya tidak lagi diketuai oleh gubernur, melainkan harus memilih ketuanya sendiri.

Pada pandangan K. H. Tjikwan menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948 tersebut pemerintah daerah terdiri dari DPRD dan Dewan Pemerintah Daerah yang terpisah. Keanggota Dewan Pemerintah Daerah dipilih oleh dan dari anggota-anggota DPRD atas dasar perwakilan berimbang dan juga dapat diberhentikan oleh DPRD. Gubernur sebagai Kepala Daerah diangkat oleh instansi atasan yang berwenang dari luar DPRD berdasarkan calon-calon yang diajukan oleh DPRD. Pada prakteknya berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 pengangkatan gubernur sebagai Kepala Daerah masih

berdasarkan pengangkatan oleh instansi atasan yang berwenang tanpa melalui pencalonan oleh DPRD Provinsi yang bersangkutan.



Gambar 5. Suasana Rapat DPRD-S 1950-1955

Selain itu, Ketua dan Wakil Ketua DPRD juga tidak boleh menjadi Anggota Dewan Pemerintah Daerah sekaligus Kepala Daerah tidak boleh menjadi Ketua DPRD. Artinya, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, badan legislatif dan badan eksekutif di daerah harus terpisah satu sama lain.

Pemerintahan sehari-hari dijalankan oleh Dewan Pemerintah Daerah baik secara kolegal maupun masing-masing anggotanya bertanggung jawab secara individual terhadap DPRD. DPRD juga dapat memberhentikannya berdasarkan pertanggung jawaban tersebut. Gubernur sebagai kepala daerah hanya mempunyai kewenangan khusus menandatangani keputusan-keputusan DPRD atau Dewan Pemerintah Daerah yang bersangkutan untuk diumumkan agar dapat berlaku. Gubernur selaku Kepala Daerah dalam hal ini dapat menahan berlakunya surat keputusan daerah yang bersangkutan bila dianggap bertentangan dengan kepentingan umum atau dengan peraturan perundangan dari daerah yang lebih tinggi tingkatnya. Berdasarkan usul mosi dari K. H. Tjikwan tersebut, anggota DPRD-S Provinsi Sumatera

Selatan masih kelanjutan dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang sudah ada sejak tahun 1948.

Pada Sidang Pleno Kedua DPRD-S tersebut dilakukan pemilihan ketua dan wakil ketua oleh anggota DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan sendiri. Hasil pemilihan ketua dan wakil ketua DPRD-S Provinsi ini menetapkan W. A. Rahman terpilih sebagai ketua DPRD-S Periode 1950-1951 dan Ali Gathmyr sebagai Wakil Ketua.

Pada Sidang Pleno Ketiga, dilakukan perbaharuan terhadap susunan Dewan Pemerintah Daerah. Anggota DPRD-S atas nama Basri tidak mungkin menjadi anggota DPRD-S lagi sebab yang bersangkutan sudah aktif sebagai anggota Parlemen di tingkat pusat, sehingga kedudukannya di DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan diusulkan untuk diganti. Akhirnya sebagai pengganti Basri adalah Daud Badaruddin. Demikian juga dengan K. H. Masjhur Azhary yang pada saat bersamaan menjabat sebagai Kepala Jawatan Agama Provinsi Sumatera Selatan tidak mungkin merangkap sehingga digantikan oleh R. Sutardjo.

Selain itu, untuk melengkapi kembali jumlah 30 orang, maka dalam Sidang Pleno ini juga menetapkan bahwa pencalonan akan dilakukan oleh partai politik, sedang pemilihan dilakukan oleh anggota Dewan Keresidenan yang berkepentingan. Oleh sebabnya, Pada Sidang Pleno berikutnya pada tanggal 17 Maret sampai permulaan April 1951, anggota DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan menjadi lengkap kembali 30 orang. Tambahan baru adalah saudara Zaikadir, S. Panhar, R. Sutardjo, Njonja Sjarkowi Mustafa dan Usman Hamid (5 orang dari daerah Palembang), A. Jasin dan Rauf Ali (2 orang dari Lampung), Zamhari Abidin dan Daud Badaruddin (2 orang dari daerah Bengkulu).



Ali Gathmir



Noengtjik AR



R. S. Josodipoero



Daud Badaruddin



R. Sutardjo



R. Humam



Pangkoe Bin Oemar



Zaikadir



Njonja Sjarkowi Mustafa



Usman Hamid



Basri



Kiagus H. Muhamad
Sjajdari

Gambar 6. Anggota DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan Utusan Keresidenan Palembang (tidak ada dalam gambar: R. Achmad, Abdoel Wahab, H. Masyhur Azhary, H. Malian Jaman, S. Panhar dan Pangeran Tjikmat)



W. A. Rachman



Adjiz Tjindarbumi



R. A. Basjid



A. Jasin



H. A. Halim



Rauf Ali



M. Tahir Hasan

Gambar 7. Anggota DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan Utusan Keresidenan Lampung (tidak ada dalam gambar Saleh Achmad)



M. Ali Chanafiah



M. Jafri



M. Rasjid Thalib



Zamhari Abidin

Gambar 8. Anggota DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan Utusan Keresidenan Bengkulu



Abang Arifin



Nyonya Chamsiah

Gambar 9. Anggota DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan Utusan Keresidenan Bangka Belitung (tidak ada dalam gambar Rusydi Zen)

Sejalan dengan itu, kemudian ditunjuk susunan anggota DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan (Periode Agustus 1950-Desember 1951).

Adapun anggota anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRD-S) Provinsi Sumatera Selatan (1950-1951) ini, sebagai berikut:

No	Nama	Perwakilan
1.	W. A. Rachman	Wakil Daerah Lampung sekaligus Ketua DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan Periode 1950-1951
2.	Ali Gathmir	Wakil Daerah Palembang sekaligus Wakil Ketua (1950-1951)
3.	Noengtjik AR	Wakil Daerah Palembang
4.	Daud Badaruddin	Wakil Daerah Palembang
5.	R. Sutardjo	Wakil Daerah Palembang
6.	R. Humam	Wakil Daerah Palembang
7.	Abdoel Wahab	Wakil Daerah Palembang
8.	H. Malian Jaman	Wakil Daerah Palembang
9.	R. S. Josodipoero	Wakil Daerah Palembang
10.	Pangkoe	Wakil Daerah Palembang
11.	Zaikadir	Wakil Daerah Palembang
12.	S. Panhar	Wakil Daerah Palembang
13.	Njonja Sjarkowi Mustafa	Wakil Daerah Palembang
14.	Usman Hamid	Wakil Daerah Palembang
15.	Pangeran Tjikmat	Wakil Daerah Palembang
16.	R. Achmad	Wakil Daerah Palembang
17.	Adjiz Tjindarbumi	Wakil Daerah Lampung
18.	H. A. Halim	Wakil Daerah Lampung
19.	M. Tahir Hasan	Wakil Daerah Lampung
20.	R. A. Basjid	Wakil Daerah Lampung
21.	A. Jasin	Wakil Daerah Lampung
22.	Rauf Ali	Wakil Daerah Lampung
23.	Saleh Achmad	Wakil Daerah Lampung
24.	M. Ali Chanafiah	Wakil Daerah Bengkulu
25.	M. Jafri	Wakil Daerah Bengkulu
26.	M. Rasjid Thalib	Wakil Daerah Bengkulu
27.	Zamhari Abidin	Wakil Daerah Bengkulu
28.	Rusydi Zen	Wakil Daerah Bangka Belitung
29.	Abang Arifin	Wakil Daerah Bangka Belitung
30.	Nyonya Chamsiah	Wakil Daerah Bangka Belitung

DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan tidak diketuai lagi oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Oleh sebabnya, diadakan Sidang Pleno II dalam bulan Agustus 1950 untuk memilih ketua dan wakil ketuanya sendiri. Berdasar pemilihan dan kesepakatan para anggota DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan terpilih W. A. Rahman sebagai Ketua dan Ali Gathmir sebagai Wakil Ketua DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan.

Sesuai dengan PP Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950, masa kerja DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan ini bersifat

sementara. DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan hanya memiliki masa kerja setengah tahun saja. Selanjutnya setelah setengah tahun, anggotanya tidak lagi dipilih berdasarkan perwakilan daerah. Namun dipilih berdasarkan utusan yang dipilih dan ditetapkan oleh anggota dewan-dewan di Kota dan Kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan. Dewan-dewan kota dan kabupaten tersebut nantinya akan diisi oleh para anggota-anggota dari partai politik. Jika DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan hanya beranggotakan 20 orang saja, maka DPRD Provinsi Sumatera Selatan hasil pemilihan di dewan-dewan kota dan kabupaten nanti direncanakan akan berjumlah 30 orang. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pengganti UU Nomor 3 Tahun 1950. Namun seperti yang dijelaskan di depan, munculnya berbagai mosi tidak percaya di tingkat kota dan kabupaten dalam Provinsi Sumatera Selatan. Akhirnya, sampai dengan setengah tahun dewan-dewan yang diharapkan lahir dan terbentuk, gagal dilaksanakan.

Berhubung masa kerja DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan telah berakhir. Sementara rencana memilih anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang akan dipilih dari anggota-anggota partai politik di dewan-dewan Kota dan Kabupaten belum terlaksana. Selanjut masa kerja DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan ini diperpanjang lagi periodenya. Jika pada tahap awal hanya setengah tahun, maka untuk periode kedua ini masa kerjakan lebih panjang sampai 5 (lima) tahun, yakni Desember 1951-Juli 1956. Mereka akan digantikan oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan hasil Pemilihan Umum 1956.

Adapun susunan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRD-S) Provinsi Sumatera Selatan Periode 1951-1956 ini. Jumlahnya tetap sama, namun mengalami sedikit perubahan, yakni:

No	Nama	Perwakilan
1.	Ali Gathmir	Wakil Daerah Lampung sekaligus Ketua DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan Periode 1951-1956
2.	A. Jasin	Wakil Daerah Palembang sekaligus Wakil Ketua (1951-1956)
3.	Noengtjik AR	Wakil Daerah Palembang
4.	Daud Badaruddin	Wakil Daerah Palembang
5.	R. Sutardjo	Wakil Daerah Palembang
6.	R. Humam	Wakil Daerah Palembang
7.	Abdoel Wahab	Wakil Daerah Palembang
8.	H. Malian Jaman	Wakil Daerah Palembang
9.	R. S. Josodipoero	Wakil Daerah Palembang
10.	Pangkoe	Wakil Daerah Palembang
11.	Zaikadir	Wakil Daerah Palembang

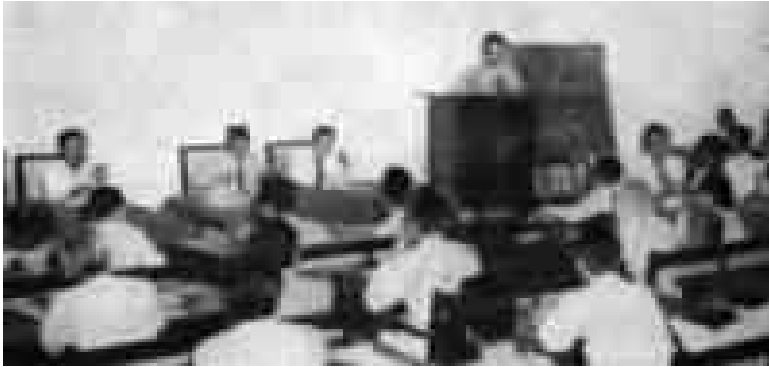
12.	S. Panhar	Wakil Daerah Palembang
13.	Njonja Sjarkowi Mustafa	Wakil Daerah Palembang
14.	Usman Hamid	Wakil Daerah Palembang
15.	Rauf Ali	Wakil Daerah Palembang
16.	Adjiz Tjindarbumi	Wakil Daerah Lampung
17.	H. A. Halim	Wakil Daerah Lampung
18.	M. Tahir Hasan	Wakil Daerah Lampung
19.	R. A. Basjid	Wakil Daerah Lampung
20.	W. A. Rachman	Wakil Daerah Lampung
21.	-	Wakil Daerah Lampung
22.	M. Ali Chanafiah	Wakil Daerah Bengkulu
23.	M. Jafri	Wakil Daerah Bengkulu
24.	M. Rasjid Thalib	Wakil Daerah Bengkulu
25.	Zamhari Abidin	Wakil Daerah Bengkulu
26.	Rusydi Zen	Wakil Daerah Bangka Belitung
27.	Abang Arifin	Wakil Daerah Bangka Belitung
28.	Nyonya Chamsiah	Wakil Daerah Bangka Belitung

Pada Sidang Pleno IV tanggal 17 Desember 1951 DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan ini memilih dan menetapkan Ali Gathmir sebagai Ketua dan A. Jasin sebagai Wakil Ketua DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan Periode 1951-1956. Pada Sidang Pleno VI, bulan April 1953, susunan Dewan Pemerintah Daerah ini diperbaharui lagi, disebabkan anggota Azis Tjindarbumi.

Keberadaan DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan ini diakibatkan lumpuhnya kinerja dewan oleh Agresi Militer Belanda ke-I dan ke-II, sehingga anggotanya ada yang menyeberang ke partai lain. Berdasarkan kebijaksanaan politik pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, setelah pengambil alihan dari Negara Sumatera Selatan, mereka dapat bekerja lagi sebagai anggota dewan.

Hasil-Hasil Kinerja DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan 1950-1956

Kerja dihadapan mata yang dihadapi oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRD-S) Provinsi Sumatera Selatan periode ini adalah pengaturan wilayah administrasi Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 dan Peraturan Penggantinya untuk melakukan pembagian wilayah otonomi tingkat II, kota dan kabupaten Provinsi Sumatera Selatan.



Gambar 10. Gubernur Sumatera Selatan menguraikan keadaan daerah di rapat pleno DPRD-S 1950-1955

DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan mengambil inisiatif dengan membentuk Panitia Khusus yang diketuai oleh R. A. Basyid. Konsep Panitia Khusus DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan cukup menarik. Gagasan konsep ini dinamai Usul Rencana Pembentukan Kabupaten Otonom didalam Propinsi Sumatera Selatan. Pokok pemikiran pembagian wilayah tersebut, oleh karena pembagian wilayah di Sumatera Selatan sejak dulu berdasarkan tradisi yaitu Kewedanaan sebagai lanjutan dari *Onderafdeeling* yang telah ada sejak masa Kolonial Belanda. Sementara *gemeente* (kota), termasuk marga-marga yang tergolong dalam sebagai *adatrechtsgemeenschap*, maka didalam menjadi penentuan daerah-daerah yang harus digabungkan menjadi kabupaten otonom di dalam Provinsi Sumatera Selatan.

Penentuan pembentukan tiap-tiap kabupaten dilakukan, berdasarkan:

1. Jumlah penduduknya ada sekitar 300.000 jiwa.
2. Daerah kabupaten tersebut sebagai penghasil pertanian (bahan makanan) dan hasil bumi untuk ekspor ataupun pertambangan.
3. Pada daerah kabupaten tersebut terdapat pusat-pusat perdagangan atau pelabuhan-pelabuhan untuk ekspor impor.
4. Pada daerah kabupaten tersebut ada perhubungan yang sederhana, baik jalan darat maupun jalan air.
5. Pada daerah kabupaten tersebut terdapat hubungan sejarah dan tali darah diantara penduduk setempat.

Atas dasar pertimbangan diatas, pada tahun 1950, maka diusulkan untuk kabupaten otonom dalam Provinsi Sumatera Selatan oleh Panitia Khusus DPRD-S tersebut, adalah:

No	Kabupaten	Ibu Kota	Gabungan Kewedanaan
1.	Palembang Selatan	Baturaja	1. Ogan Ulu 2. Komerling Ulu 3. Muara Dua 4. Kaur (Bengkulu Sit) 5. Kewedanaan Krui
2.	Palembang Timur	Kayu Agung	1. Komerling Ilir 2. Ogan Ilir
3.	Palembang Ilir	Sekayu	1. Banyuasin 2. Musi Ilir 3. Lematang Ogan Tengah 4. Rawas
4.	Palembang Darat	Lahat	1. Lematang Ilir 2. Lematang Ulu 3. Tanah Pasemah 4. Tebing Tinggi 5. Musi Ulu
5.	Lampung Pesisir	Teluk Betung / Tanjung Karang	1. Kalianda 2. Teluk Betung 3. Kota Kecil 4. Tataan 5. Kota Agung 6. Krui Marga Ngares 7. Krui Marga Bangkumat 8. Krui Marga Blimbing
6.	Lampung Darat	Kotabumi	1. Metro 2. Sukadana 3. Way Seputih 4. Kotabumi 5. Way Kanan 6. Menggala 7. Krui Marga Way Tenong
7.	Bengkulu	Curup	1. Mana 2. Seluma 3. Bengkulu 4. Kota Kecil Bengkulu 5. Lais 6. Muko-muko 7. Rejang 8. Lebong 9. Marga SDM Ulu 10. Marga Tetajin 11. Marga P. Air Keruh

			12. Marga S. T. Lakitan Ulu 13. Marga B. K. Lakitan 14. Marga S. Kelingi Ilir
8.	Bangka	Pangkalpinang	1. Bangka Tengah 2. Sungai Liat 3. Bangka Utara 4. Bangka Barat 5. Bangka Selatan
9.	Belitung	Belitung	1. Belitung Barat 2. Belitung Timur

Pembagian Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan digodok oleh Panitia khusus DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan yang dibuat pada tanggal 20 Mei 1952 di Palembang. Panitia khusus DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan ini diketua oleh R. A. Basyid. Anggotanya terdiri dari: Djafri, Zaikadir, R. S. Josodipuro, R. Achmad, Saleh Achmad dan Pangeran Tjikmat.

Usul pembentukan kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan ini prinsipnya dapat disetujui oleh Dewan Pemerintah Daerah (DPD) Propinsi Sumatera. Namun usul pembentukan kabupaten otonomi oleh DPRD-S Provinsi dan disepakati oleh Dewan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya usul tersebut dibawah ke DPR Pusat. Namun nampaknya, dalam beberapa hal mengalami perubahan oleh Pemerintah Pusat. Adapun pemerintah pusat akhirnya mengeluarkan kabupaten otonomi di Provinsi Sumatera Selatan dengan persetujuan DPR atas usul pembentukkan kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan oleh DPRD-S, sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Ibu Kota	Nama Usulan DPRD-S
1.	Ogan Komering Ulu	Baturaja	Palembang Selatan
2.	Ogan Komering Ilir	Kayu Agung	Palembang Timur
3.	Musi Banyuasin	Palembang	Palembang Ilir
4.	Lahat	Lahat	Palembang Darat
5.	Muara Enim	Muara Enim	-
6.	Musi Rawas	Lubuk Linggau	-
7.	Lampung Utara	Kotabumi	Lampung Darat
8.	Lampung Tengah	Metro	-
9.	Lampung Selatan	Teluk Betung	Lampung Pesisir
10.	Bengkulu Utara	Bengkulu	-
11.	Rejang Lebong	Curup	-
12.	Bengkulu Selatan	Manna	-
13.	Bangka	Pangkalpinang	Bangka

14.	Belitung	Tanjung Pandan	Belitung
15.	Kota Palembang	Palembang	-
16.	Kota Tanjung Karang – Teluk Betung	Teluk Betung	-
17.	Kota Bengkulu	Bengkulu	-
18.	Kota Pangkalpinang	Pangkalpinang	-

Dasar batas wilayah kabupaten yang dibentuk ini adalah Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan Nomor Gb/100/1950 tanggal 20 Maret 1950 untuk kabupaten yang berada di eks Keresidenan Palembang. Sedangkan untuk kabupaten-kabupaten di wilayah eks Keresidenan Lampung atas dasar Ketetapan Residen Lampung Nomor 304 Tahun 1946 tertanggal 15 Juni 1946. Sementara untuk eks wilayah di Keresidenan Bengkulu berdasar Ketetapan Gubernur Militer DMISS Nomor Gb/30/1950 tertanggal 2 Februari 1950. Sementara untuk wilayah Bangka dan Belitung berdasarkan Staatsblad Nomor 123 Tahun 1947. Kota Palembang berdasarkan Staatsblad Nomor 27, 34 dan 37 Tahun 1949.

Selain itu, hasil penting kerja DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan pada periode ini adalah mewujudkan berbagai Peraturan Daerah. Salah satunya, Peraturan Daerah atau Perda Nomor Gb/53/1951 mengenai Pemilihan dan Pembaharuan Dewan Marga. Perda Nomor Gb/54/ 1951 tentang Pemilihan, Pengakuan, Pengesahan dan Pemecatan Pamong Marga.

Selanjutnya kinerja DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan dalam hal menyalurkan para mantan pejuang ke dalam masyarakat. Provinsi Sumatera Selatan mengambil peranan penting dalam menghadapi perjuangan kemerdekaan. Sampai akhir tahun 1952, terdapat kurang lebih 15.000 jiwa tenaga tenaga pejuang yang datang Sumatera Selatan. Mereka terpencar di daerah Keresidenan Palembang, Keresidenan Lampung, dan Keresidenan Bengkulu. Oleh sebabnya, mereka disalurkan untuk membuka hutan-hutan baru serta meneruskan usaha-usaha yang telah ada.



Gambar 11. DPRD-S 1950-1955 Mendengarkan uraian keadaan daerah dari Gubernur Sumatera Selatan dalam rapat pleno VI.

Pemerintah telah membeli *onderneming* dari tangan asing seperti *onderneming* Weskust, *onderneming* Sindang dan Dataran di Kabupaten Rejang Lebong. Para pejuang dipekerjakan dan membuat usaha di *onderneming-onderneming* tersebut kurang lebih sekitar 1.000 orang mantan pejuang, baik yang berasal dari Jawa maupun Sumatera Selatan.

Setelah 14 hari sejak tanggal 21 Februari hingga 4 Maret 1952 berada di Jakarta untuk mengadakan pembicaraan-pembicaraan dengan pemerintah pusat mengenai hasil-hasil sidang lengkap DPRD Sumsel, ketua DPRD Sumsel Ali Gathmir menerangkan kepada wartawan bahwa pada prinsipnya hasil-hasil pleno di DPRD Sumsel itu disetujui Pemerintah Pusat. Tetapi sementara itu ada juga beberapa soal yang belum di bicarakan atau ketegasan ialah disebabkan krisisnya kabinet.



Gambar 12. Suasana rapat pleno VI DPRD-S 27 Februari 1953.

Mengenai anggaran belanja yang di sodorkan sebagai hasil sidang lengkap DPRD Sumsel prinsipnya telah disetujui oleh pemerintah pusat terutama mengenai anggaran belanja Dewan Perwakilan Rakyat sejumlah Rp 2.726.000. Untuk itu dalam bulan ini juga akan datang ke Palembang Kepala Keuangan Kementerian Dalam Negeri yang khusus membicarakan soal-soal keuangan yang menjadi kesulitan di daerah Sumatera Selatan ini.

Mengenai Pemilihan Umum, Ali Gathmir menerangkan bahwa pemilihan umum menurutnya mosi yang diambil DPRD Sumsel dalam sidang ke IV juga prinsipnya setelah di setujui dengan terlebih dahulu akan diadakan pendaftaran penduduk dan pendaftaran pemilih umum. Biaya mengenai pemilihan ini akan disediakan oleh pemerintah pusat setelah menerima anggaran belanja pendaftaran pemilihan penduduk ini dari Provinsi Sumatera Selatan. Ini sangat penting sekali gunanya, bukan saja untuk provinsi memperkuat daerah bahkan untuk konstituante. Bila selesainya pendaftaran penduduk dan pemilih seluruh Sumatera Selatan kelak, maka dapatlah digunakan untuk melaksanakan pemilihan umum menurut undang-undang yang sedang disiapkan oleh pemerintah pusat.



Gambar 13. Sebagian Anggota DPRD-S 1950-1955 bersama gubernur dari kiri ke kanan: M. Ali Hanafiah, Adjis Tjindarbumi, Daud Badaruddin, Gubernur Dr. M. Isa, Nungtjik AR, dan R. Sutardjo

Selain itu Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ali Gathmyr dalam sebuah percakapan dengan wartawan menyatakan kritiknya yang tajam dan pedasnya atas *bleid* (aturan) Pemerintah Pusat, berhubung dengan caranya pusat sesungguhnya praktis menghalangi-menghalangi pembangunan di daerah yang aman dan kaya seperti Sumatera Selatan ini. Kritis pedas Ali Gathmyr diterbitkan dalam Suara Rakyat Sumatera, Rabu, 23 Januari 1952.

Oleh Ali Gathmyr ditandaskan bahwa Pemerintah Pusat mendasarkan pembangunan tiap-tiap daerah, terlebih dahulu membereskan segala sesuatu yang bersangkutan-paut dengan soal keamanan. Ini jadi dasar utama dari pemerintah pusat. Tetapi mengenai daerah Sumatera Selatan yang terkenal sebagai daerah yang teraman dan kaya raya yang menghasilkan *devizen* yang besar sekali untuk kepentingan negara, sebagai mana biasanya menjadi buah bibir tamu-tamu dari pusat tak dapat disaksikan dalam praktek perhatian Pemerintah Pusat atas pembangunann di Sumatera Selatan sama sekali nihil.



Gambar 14. Ketua DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan, Ali Gathmyr (sebelah kiri berkopiah) bersama Sekretaris Dewan, Patih R. Ahmad

Kenyataan ini dapat dibuktikan baik yang berkenaan dengan menyerahkan kekuasaan (*Overdrag Besluit Otonomi*) provinsi ini dari Jawatan-Jawatan yang ada dalam Ketetapan PP No 3 /1950 dengan konsekuensi keuangannya baru diserahkan Jawatan yang sesungguhnya kurang penting. Padahal mengenai pemerintah umum yang sebenarnya harus didahulukan tetapi ternyata sungguhpun sudah berkali-kali didesak dan dituntut hasilnya sampai sekarang belum juga diserahkan. Dengan begini tegas bahwa soal pembangunan di daerah yang betul-betul aman sesungguhnya dikesampingkan oleh pusat, seolah apa yang di katakan membangun dengan keamanan itu hanya ucapan saja. Apa yang sesungguhnya dikehendaki rakyat di Sumsel menurut Ali Gathmyr bukan pembentukan dewan-dewan bukan pemilihan pasirah-pasirah dan lain-lain pekerjaan politis tetapi yang betul-betul dikehendaki rakyat kita disini ialah jalannya bagus, jembatannya bagus, pengairannya bagus, perumahannya bagus dan sebagainya.

Akhirnya Ali Gathmyr mengatakan, sebagai diketahui daerah kekayaan *deviezen* negara kita diluar negeri dengan ekspor bahan-bahan mentahnya dan sudah memiliki faktor yang terpenting untuk pembangunan yaitu keamanan pusat di tahun ini hanya memberikan kriditnya Rp84 juta yang artinya kira hanya paling tinggi 29 persen dari *texasi begroting* yang minimal disusun untuk tahun 1951 ini. Sebagai

Ketua DPRD Sumatera Selatan yang merasa turut bertanggungjawab di daerah ini mengetahui keluh kesah rakyat yang nyata-nyata meminta pimpinan dengan kenyataan. Oleh Ali Gatmyr akhirnya diharapkan supaya pusat dapat mengerti hasrat daerah-daerah dan supaya janji-janjinya itu betul-betul ditempati.

BAB 3

DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 1956-1960

Bab ini membahas DPRD Provinsi Sumatera Selatan hasil Pemilihan Umum 1955 sampai keluarnya Dekrit Presiden 1959. DPRD Provinsi Sumatera Selatan hasil pemilihan umum 1955 menjadi pengganti DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan yang diangkat sebelumnya.

Keadaan Politik menjelang Pengangkatan Anggota DPRD Sumatera Selatan 1956-1960

Pergolakan politik terjadi di tahun-tahun 1956-1960, di mana pergolakan politik dan singgungan politik antara Islam dan Negara, yang akhirnya berujung pada kemenangan Komunisme di hati presiden Soekarno. Setelah dilaksanakan pemilihan umum pada tahun 1955 dibawah Kabinet Burhanuddin Hararap, dari 45 tanda gambar yang ikut, hanya sepuluh yang berhasil memperoleh kursi. Diantara sepuluh partai itu, muncul empat partai pemenang, yakni PNI dan Masyumi, masing-masing mendapat 57 kursi di parlemen, NU 45 kursi, dan PKI mendapat 39 kursi.

Walaupun sudah keluar partai pemenang, presiden memiliki hak penuh untuk menunjuk formatur Kabinet. Pada waktu itu dari pihak PNI mencalonkan Ali Sastroamijoyo dan Wilopo, namun presiden lebih senang kepada Ali. Dengan tokoh ini Soekarno ingin mewujudkan mimpinya pada tahun 1920-an yaitu bersatunya tiga aliran, yakni Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme. Kabinet yang dicita-citakan oleh Soekarno itu ialah "Kabinet Kaki Empat" yang terdiri dari PNI, Masyumi, NU, dan PKI.

Namun rupa-rupanya kedua partai Islam, Masyumi dan NU menolak untuk berkoalisi dengan PKI. Melihat kondisi yang demikian terpaksa Ali membangun koalisi nasionalisme-Islam sambil mengajak partai-partai kecil lainnya untuk memperkuat sokongan parlemen.

Di Sumatera Selatan, Pemilihan umum untuk Konstituante diadakan pada tanggal 15 Desember 1955. Suasana dalam menghadapi pemilihan ini lebih tenang daripada ketika menghadapi

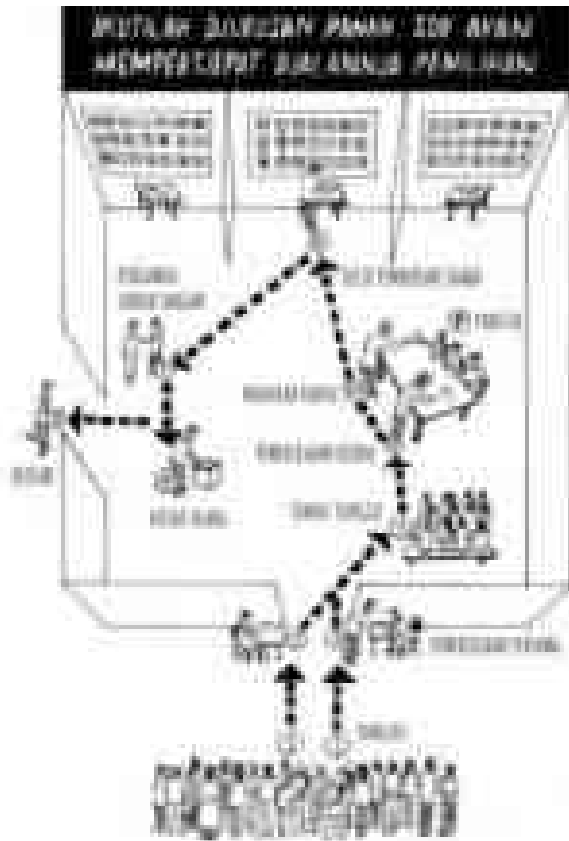
pemilihan untuk DPR. Rupanya rakyat sudah lebih berpengalaman dan ketegangan dapat diatasi.

Hasil-hasil pemilihan proses perhitungannya amat lamban, baru dapat diumumkan pada 16 Juli 1956. Untuk menghindari kekosongan demokrasi, dimana DPRD yang dibentuk berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 1950 telah harus meletakkan jabatannya pada tanggal 1 Juli 1956, maka diterbitkan Undang-undang No. 14 tahun 1956 tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan, diundangkan pada tanggal 17 Juli 1956.

Dalam penetapan jumlah anggota DPRD Peralihan ini dapat dipakai sebagai dasar hasil Pemilu yang telah dilaksanakan. Anggota DPRD Peralihan, diangkat oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Panitia Pemerintah Propinsi, yaitu panitia didaerah yang bertugas menentukan perimbangan dalam hasil hasil Pemilu untuk DPR. DPRD Peralihan ini dibubarkan setelah DPRD hasil Pemilu dilantik, selambat-lambatnya satu tahun setelah UU ini diundangkan.

Pemilihan Umum I Tahun 1955

Selanjutnya, di masa akhir jabatan DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan ini diselenggarakan Pemilihan umum 1955. Pada saat itu, secara ekonomi, keadaan sedang kritis karena harga barang-barang ekspor Indonesia seperti karet, timah, dan kopra sedang jatuh. Sementara kecenderungan impor terus meningkat. Salah satu dipicu masalah menurunnya panen beras, sehingga devisa negara lebih ditujukan untuk impor beras. Oleh sebabnya, penerimaan negara mengalami penurunan dan defisit walau sudah dilakukan berbagai penghematan.



Gambar 15. Iklan Pemilu 1955

Di tengah kesulitan ekonomi, pemerintah Indonesia, termasuk pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dihadapkan pada ajatan besar, yakni Pemilihan Umum (Pemilu) 1955. Pemilihan Umum ini akan dilaksanakan dalam dua tahap. Pada tanggal 29 September 1955 direncanakan Pemilu serentak dalam memilih anggota-anggota dewan. Sementara pada tahap kedua dilakukan pemilihan untuk konstituante yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 1955.

Pemilihan Umum 1955 di Sumatera Selatan diikuti oleh banyak partai politik, antara lain:

1. Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
2. Partai Nasional Indonesia (PNI)

3. Partai Komunis Indonesia (PKI)
4. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
5. Partai Nahdlatul Ulama (NU)
6. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)
7. Partai Sosialis Indonesia (PSI)
8. Tani Makmur (GTI)
9. Partai Buruh
10. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)
11. Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia (Baperki)
12. Persatuan Pegawai Polisi RI (PPPRI)
13. Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)
14. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
15. Persatuan Kaum Tani (PKT)
16. Partai Rakyat Nasional (PRN)
17. Partai Katholik
18. Kumpulan Pemilih Bulan Bintang
19. Persatuan Rakyat Indonesia (PARI)
20. Partai Kebangsaan Indonesia (PARKI)
21. Gerakan Pembela Pancasila (GPPS)
22. Persatuan Indonesia Raya (PIR)
23. Partai Wanita Rakyat
24. Angkatan Baru Indonesia
25. Parindra

Pada Pemilihan Umum 1955, cukup banyak perseorang yang maju. Beberapa perseorang ini mengusung nama daerah masing-masing di Indonesia. Pada Pemilihan Umum 1955, di Sumatera Selatan tercatat hanya ada tiga yang maju, seperti:

26. K. H. Daud Rusydi
27. Partai Indonesia Raya (PIR) Hazairin
28. Ali Gathmyr
29. K. H. Makmun Sulaiman
30. Halimah Ishak
31. Lawi Hanafiah

1
Badan Permusyawaratan
Kewarganegaraan
Indonesia (Baperki)

2
Parindra

3
Partai Katholik



4

Mr. Makmun Sulaiman



5

Ikatan Pendukung
Kemerdekaan Indonesia
(IPKI)



6

Partai Syarikat Islam
Indonesia (PSII)



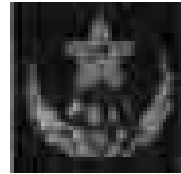
7

Majelis Syuro Muslimin
Indonesia (Masyumi)



8

Partai Nasional Indonesia
(PNI)



9

Angkatan Baru Indonesia



10

Persatuan Kaum Tani
(PKT)



11

Partai Kebangsaan
Indonesia (PARKI)



12

Kumpulan Pemilih Bulan
Bintang



13

Partai Wanita Rakyat



14

Partai Rakyat Nasional
(PRN)



15

Partai Buruh



16

Gerakan Pembela
Pancasila (GPPS)



17

Partai Komunis Indonesia
(PKI)



18

Persatuan Pegawai Polisi
RI (PPPRI)



19
Tani Makmur (GTI)



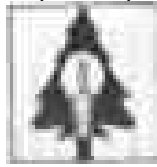
20
Partai Kristen Indonesia
(Parkindo)



21
Ali Gathmyr



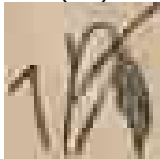
22
Persatuan Indonesia Raya
(PIR)



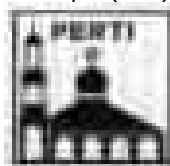
23
Pergerakan Tarbiyah
Islamiyah (Perti)



24
Lawi Hanafiah



25
Partai Sosialis Indonesia
(PSI)



26
Partai Nahdlatul Ulama
(NU)



27
Partai Politik Tarikat
Islam (PPTI)



28
K. H. Daud Rusydi



29
Partai Rakyat Indonesia
(PARI)



30
Partai Indonesia Raya
(PIR) Hazairin



31



Halimah Ishak



Gambar 16. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 1955

Pada tahap pertama tanggal 29 September 1955 hasil Pemilihan Umum dimenangkan oleh 5 (lima) partai utama, yaitu Partai Nasional Indonesia (PNI), Majelis Syuro Musliman Indonesia (Masyumi), Nahdlatul Ulama (NU) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) serta Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Sementara partai-partai lainnya mendapat suara jauh lebih kecil dari kelima partai tersebut.

Pemilihan umum untuk Konstituante diadakan pada tanggal 15 Desember 1955. Suasana dalam menghadapi pemilihan ini lebih tenang daripada ketika menghadapi pemilihan untuk DPR. Rupanya rakyat sudah lebih berpengalaman dan ketegangan dapat diatasi. Hasil-hasil pemilihan proses perhitungannya amat lamban, baru dapat diumumkan pada 16 Juli 1956. Untuk menghindarkan kekosongan demokrasi, dimana dibentuk DPRD-Peralihan di Provinsi Sumatera Selatan.

Dibentuknya DPRD-Peralihan Provinsi Sumatera Selatan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1950. DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan Periode 1951-1956 harus meletakkan jabatannya pada tanggal 1 Juli 1956. Oleh sebabnya, kemudian diterbitkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1956 tanggal 17 Juli 1956 tentang Pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah Peralihan.

Pada penetapan tersebut jumlah anggota DPRD-Peralihan Provinsi Sumatera Selatan dapat dipakai sebagai dasar hasil Pemilihan Umum 1955 yang telah dilaksanakan. Anggota DPRD Peralihan ini diangkat langsung oleh Menteri Dalam Negeri atas usul Panitia Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Panitia daerah ini ditugaskan dan bertugas menentukan perimbangan dalam hasil hasil Pemilihan Umum 1955 untuk DPR.

DPRD-Peralihan Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk 1 Juli 1956 ini bersifat sementara. Keanggotaannya akan dibubarkan setelah DPRD hasil Pemilihan Umum 1955 dilantik, selambat-lambatnya satu tahun setelah Undang-Undang tersebut diundangkan.

Selanjutnya, pada tanggal 24 September 1956, bertempat di Balai Pertemuan Sekanak Palembang, dilangsungkan upacara pelantikan DPRD-Peralihan Provinsi Sumatera Selatan. Pada tanggal tersebut sekaligus digunakan untuk pembubaran DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan periode 1951-1956. Upacara pelantikan DPRD-Peralihan Provinsi Sumatera Selatan tersebut dihadiri oleh Djanuismadi dan Manoppo sebagai wakil Menteri Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri. Pelantikan dilakukan oleh Pejabat Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, Daudsyah, selaku wakil Pemerintah Pusat.

Susunan DPRD-Peralihan Provinsi Sumatera Selatan 1956-1958, sebagai berikut:

No	Nama	Partai
1.	H. Uthi	Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
2.	H. Z. Arifin	Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
3.	M. Syazali	Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
4.	Mahdani Caropeboka	Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
5.	A. Najamuddin Hd	Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
6.	A. R. Djalili	Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
7.	Syamsuddin	Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
8.	Zamhari Abidin	Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
9.	H. Mursal Azis	Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
10.	Ny. Djawanis Umar	Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
11.	M. Jahja Agoes	Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
12.	M. P. Abubakar	Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
13.	Siradj S. Ishak	Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
14.	M. Diah	Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
15.	Umar Abdoel Hamid	Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
16.	Husin	Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
17.	Siddieq Adiem	Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
18.	Jatim Muntjar	Partai Nasional Indonesia (PNI)
19.	S. Panhar	Partai Nasional Indonesia (PNI)
20.	A. Nawawi Saleh	Partai Nasional Indonesia (PNI)
21.	A. Mohd. Ali	Partai Nasional Indonesia (PNI)
22.	Mohpian Caropeboka	Partai Nasional Indonesia (PNI)
23.	Rahim Kasim	Partai Nasional Indonesia (PNI)
24.	Zaikadir	Partai Komunis Indonesia (PKI)
25.	Busjari Latief	Partai Komunis Indonesia (PKI)
26.	Abdullah	Partai Komunis Indonesia (PKI)
27.	Pieter Simanjuntak	Partai Komunis Indonesia (PKI)
28.	Murod Aidit	Partai Komunis Indonesia (PKI)
29.	Rauf Ali	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
30.	Idris Baksin	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
31.	Harunur Rasyid	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
32.	Julia Usman Gani	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)

33.	M. Husin Gani	Partai Nahdlatul Ulama (NU)
34.	Siti Aminah Mustofa	Partai Nahdlatul Ulama (NU)
35.	Jusuf Umar	Partai Nahdlatul Ulama (NU)
36.	Zainal Abidin Ning	IPKI
37.	Amir Husin	Partai Sosialis Indonesia (PSI)
38.	Jusuf Temenggung	GTI
39.	R. A. Adjmi	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)
40.	Artani Bachtiar	Partai Buruh

Beranggotakan 40 orang. Pada Sidang Pleno 1956, DPRD-Peralihan Provinsi Sumatera Selatan ini juga memiliki Siddieq Adiem sebagai ketua dan Jatim Muntjar sebagai wakil DPRD Peralihan. Selain itu, DPRD-Peralihan Provinsi Sumatera Selatan juga membentuk Dewan Pemerintahan Daerah Peralihan dengan anggota, yakni: 1. Zamhari Abidin (Masyumi), 2. Umar Abdoel Hamid (Masyumi), 3. S. Panhar (PNI), 4. Zaikadir (PKI), dan 5. Rauf Ali (PSII).

Adapun hasil-hasil Pemilu 1955, anggota parlemen DPR dari Provinsi Sumatera Selatan, baik untuk Dewan Perwakilan Rakyat maupun Konstituante adalah sebagai berikut:

No	Nama	Partai
1.	K. H. Tjikwan	Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
2.	Djadil Abdullah	Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
3.	K. H. Masyhur Azhari	Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
4.	Raden Abdul Basjid	Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
5.	Abdul Rozak	Partai Nasional Indonesia (PNI)
6.	Mohammad Isa	Partai Nasional Indonesia (PNI)
7.	Abdullah Gathmyr	Partai Nahdlatul Ulama (NU)
8.	Anwar Tjokroaminoto	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
9.	Noengtijk AR	Partai Komunis Indonesia (PKI)

Berdasarkan laporan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 1955 jumlah pemilih aktif untuk pemilihan DPR terdaftar sebanyak 1.731.332 orang. Mata pilih yang datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang tersebar di Sumatera Selatan sebesar 1.527.876 orang hak pilih untuk DPR. Sementara pada waktu perhitungan suara, tercatat suara sah sebanyak 1.417.104 berbanding suara tidak sah hanya sebanyak 70.772. Selanjutnya terdapat jumlah kursi untuk DPR perwakilan Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 10 kursi. Jumlah 10 kursi merupakan pembagian *kiesquotient* untuk Sumatera Selatan yang termasuk pemilihan daerah V dengan pembagian 1 kursi tiap 145.710 penduduk Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk pemilihan anggota Konstituante pada wilayah Sumatera Selatan saat Pemilihan Umum 1955 dengan hasil sebagai berikut, sebagai berikut:

No	Nama	Daerah Pemilihan	Partai
1.	K. H. Abubakar Bastari	<u>Palembang</u>	Masyumi
2.	Ny. <u>Sjarkawi Mustafa</u> binti Sajid M. Taib	<u>Palembang</u>	Masyumi
3.	<u>Usman Hamid</u>	<u>Muara Enim</u>	Masyumi
4.	<u>Abdul Basjid</u>	<u>Kota Metro</u>	Masyumi
5.	<u>Zainoel Abidin Sjo'e'uib</u>	<u>Bengkulu</u>	Masyumi
6.	<u>Abdullah Addary</u>	<u>Pangkal Pinang</u>	Masyumi
7.	<u>Achmad Nawawi Saleh</u>	<u>Palembang</u>	Partai Nasional Indonesia
8.	<u>Winarno Danuatmodjo</u>	<u>Palembang</u>	Partai Nasional Indonesia
9.	<u>Gele Harun Nasution</u>	<u>Bandar Lampung</u>	Partai Nasional Indonesia
10.	<u>Dalam Iboe</u> <u>Sjamsoeddin</u>	<u>Lampung Selatan</u>	Partai Nasional Indonesia
11.	<u>Mohamad Zaelani</u>	<u>Palembang</u>	PKI
12.	<u>Djafri</u>	<u>Palembang</u>	PKI
13.	<u>M.A. Chanafiah</u>	<u>Palembang</u>	PKI
14.	<u>Ismail Dachlan Djuru</u> <u>Alam</u>	<u>Ogan Komering Ilir</u>	Nahdlatul Ulama
15.	<u>Pangku bin Oemar</u>	<u>Palembang</u>	PSII
16.	<u>Kiagus H. Moh. Sjadjari</u>	<u>Palembang</u>	<u>Nahdlatul Ulama</u>
17.	<u>Asjmawi</u>	<u>Palembang</u>	<u>Persatuan Tarbiyah Islamiyah</u>
18.	<u>Oen Poo Djiang</u>	<u>Palembang</u>	Partai Lima Orang

Berdasarkan rekapitulasi perhitungan suara, jumlah kursi yang didapat Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 1955 sebanyak 9 kursi. Masing-masing pembagian kursi untuk: Masyumi 4 kursi, Partai Nasional Indonesia mendapat 2 kursi. Sedangkan Partai Nahdlatul Ulama (NU), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) masing-masing 1 kursi.

Pemilihan Umum 1955 telah mengantarkan 9 orang legislator dari Sumatera Selatan, yakni: K. H. Tjikwan, K. H. Masyhur Azhari, Djadil Abdullah dan Raden Abdul Basjid dari Masyumi, Dr. M. Isa dan Abdul Rozak dari PNI, Noengtjik AR dari PKI, Anwar Tjokroaminoto dari PSII, dan Abdullah Gathmyr dari NU.

Hasil perolehan suara partai peserta Pemilihan Umum 1955 di Sumatera Selatan, sebagai berikut:

No	Nama	Partai	Partai
		DPK	Konstituante

1.	Baperki	10.178	8.495
2.	Parindra	458	408
3.	Partai Katholik	3.817	3.885
4.	Mr. Makmun Sulaiman (Perorangan)	395	-
5.	IPKI	13.560	10.965
6.	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	149.234	132.434
7.	Masyumi	628.384	594.450
8.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	213.766	257.379
9.	Angkatan Baru Indonesia	1.049	-
10.	Persatuan Kaum Tani (PKT)	4.492	4.474
11.	Partai Kebangsaan Indonesia (PARKI)	1.390	758
12.	Kumpulan Pemilih Bulan Bintang	2.824	-
13.	Partai Wanita Rakyat	1.096	1.097
14.	Partai Rakyat Nasional (PRN)	3.890	4.190
15.	Partai Buruh	17.111	18.583
16.	Gerakan Pembela Pancasila (GPPS)	1.334	1.012
17.	Partai Komunis Indonesia (PKI)	176.900	168.063
18.	Persatuan Pegawai Polisi RI (PPPRI)	9.956	10.055
19.	Tani Makmur (GTI)	20.562	16.833
20.	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	4.696	3.846
21.	Ali Gathmyr (Perorangan)	637	252
22.	Persatuan Indonesia Raya (PIR)	1.179	1.514
23.	PERTI	42.912	41.317
24.	Lawi Hanafiah (Perorangan)	217	-
25.	Partai Sosialis Indonesia (PSI)	21.873	19.869
26.	Partai Nahdlatul Ulama (NU)	115.938	135.984
27.	Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)	5.220	5.080
28.	K. H. Daud Rusydi (Perorangan)	1.525	1.097
29.	Persatuan Rakyat Indonesia (PARI)	1.598	-
30.	PIR Hazairin (Perorangan)	716	1.514
31.	Halimah Ishak (Perorangan)	197	230
	Jumlah	1.457.104	1.443.079

Setelah Pemilihan Umum 1955, pada tahun 1957 Gubernur Winarno Danuatmodjo digantikan oleh H. M. Husein. Karena berdasarkan hasil Pemilihan Umum 1955, Gubernur Winarno Danuatmodjo terpilih sebagai anggota konstituante dari Provinsi Sumatera Selatan. Gubernur H. M. Husein hanya menjabat sementara selama 1 tahun lebih 1957 sampai 1958. Selanjutnya digantikan oleh mantan parlementer dari Palembang yang sudah sangat berpengalaman, salah satu anggota Volksraad masa kolonial, Moechtar Praboe Mangkoenegara selama tahun 1958 sampai 1959. Berdasar hasil Pemilihan Umum 1955 juga dibentuk Dewan Pemerintah Daerah (DPD) Provinsi Sumatera Selatan yang terdiri dari: 1. M. Ali Chanafiah dari

Bengkulu, 2. R. Sutarjo dari Palembang, 3. M. Taher Hasan dari Lampung, 4. Zamhari Abidin dari Palembang, dan 5. Zaikadir dari Palembang.

Hasil-Hasil yang Dicapai Anggota DPRD Sumatera Selatan 1956-1960

Pada tanggal 24 September 1956, bertempat di Balai Pertemuan Sekanak Palembang, dilangsungkan upacara pelantikan DPRD Peralihan dan pembubaran DPRDS Propinsi Sumatera Selatan. Upacara ini dihadiri oleh Djanuismadi dan Manoppo masing-masing Gubernur dan Residen yang diperbantukan pada Kementerian Dalam Negeri sebagai wakil Menteri Dalam Negeri. Pelantikan dilakukan oleh Pejabat Gubernur Sumatera Selatan, Daudsyah, selaku wakil Pemerintah Pusat.

Susunan DPRD Peralihan tersebut adalah Masyumi 17 Kursi: 1. H. Utih, 2. H. Z. Arifin, 3. M. Syazali, 4. Mahdani Caropeboka, 5. A. Najamuddin HD, 6. A. R. Djalili, 7. Syamsuddin, 8. Zamhari Abidin, 9. H. Mursal Azis, 10. Ny. Djawanis Umar, 11. M. Jahja Agus, 12. M. P. Abubakar, 13. Siradj S. Ishak, 14. M. Diah, 15. Umar-Abd Hamid, 16. Husin, dan 17. Siddiq Adim.

PNI 6 Kursi yakni 1. Jatim Muntjar, 2. S. Panhar, 3. A. Nawawi Saleh, 4. Am. Ali, 5. Mohpian Caropeboka, 6. Rahim Kasim. PKI 5 Kursi yaitu 1. Zaikadir, 2. Busjari Latief, 3. Abdullah, 4. P. Simanjuntak, 5. Murod Aidit.

PSII 4 kursi yakni 1. Rauf Ali, 2. Idris Baksin, 3. Harunur Rasyid, 4. Julia Usman Gani. NU 3 kursi yakni 1. M. Husin Gani, 2. Siti Aminah Mustofa, dan 3. Jusuf Umar. Semntara IPKI 1 kursi Zainal Abidin Ning dan PSI 1 kursi Amir Husin. Demikian juga GTI 1 kursi Yusuf Temenggung. Perti 1 kursi R. A. Adjmi. Partai Buruh 1 kursi Arfani Bachtiar.

Total ada 40 orang. Ketua DPRD Peralihan adalah Siddiq Adim (Masyumi) dengan wakil Ketua Jatim Muntjar (PNI). Duduk sebagai Dewan Pemerintahan Daerah Peralihan yakni 1. Zamhari Abidin (Masyumi), 2. Umar Abd Hamid (Masyumi), 3. S. Panhar (PNI), 4. Zaikadir (PKI) dan 5. Rauf Ali (PSII).

Sebagai catatan dari pelaksanaan Pemilu 1955 untuk DPR tersebut jumlah pemilih yang terdaftar sebesar 1.731.332 orang, yang

melaksanakan hak pilihnya untuk DPR 1.527 .876 orang. Suara yang sah 1.417.104 dan suara yang tidak sah sebanyak 70.772. Kiesquotient Daerah V Sumsel 145.710, jumlah kursi yang harus dibagi untuk DPR sebanyak 10 kursi.

Jumlah kursi yang dapat dibagi menurut hasil Pemilu 1955, adalah 7 kursi, masing-masing untuk: PNI 1 kursi, PSII 1 kursi, PKI 1 kursi dan Masyumi 4 kursi. Sisa kursi 3 buah dan kelebihan suara 437.134. Untuk anggota Parlemen yang mewakili Sumatera Selatan sebelum Pemilu 1955 adalah dari Masyumi yakni K. H. Tjikwan, K. H. Masyhur Azhari, dan Djadil Abdullah. Dari PNI yakni Dr. M. Isa dan Abdul Rozak. Dari PKI Nungtjik AR. Dari PSII Anwar Tjokroaminoto dan dari NU Abdullah Gathmyr.

BAB 4

DPRD GOTONG ROYONG PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 1961-1966

Bab ini membahas DPRD-GR di Provinsi Sumatera Selatan setelah keluarnya Dekrit Presiden 1959 sampai dengan berdirinya Orde Baru. Dekrit Presiden 1959 membawah kondisi politik ke Demokrasi Terpimpin juga berpengaruh besar pada perkembangan DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Keadaan politik menjelang Pengangkatan Anggota DPRD-GR Sumatera Selatan, 1961-1966

Masa ini ditandai dengan perubahan keadaan politik ditengah air dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Dengan berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dimulailah retooling aparatur negara. Berdasarkan penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959, tentang Pemerintahan Daerah, telah timbul reaksi hebat, terutama kalangan partai-partai politik. Pada tataran daerah, dalam mengatur berlakunya Dekrit Presiden ditetapkan Penetapan Presiden Nomor 5 Tahun 1960 tentang pembentukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR).

Seperti dijelaskan pada bab sebelumnya masa kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan (DPRD-P) Provinsi Sumatera Selatan berjalan terus sampai terbentuknya DPRD hasil pemilihan umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1956. Undang-undang ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 1/1957. Namun keluarnya peraturan baru tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD -GR) di selurteh Indonesia, termasuk Provinsi Sumatera Selatan. Maka sebagai sebagai tindakan lanjutnya, diadakan usaha penyesuaian terhadap ketatanegaraan yang baru sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden RI tanggal 5 Juli 1959.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR), termasuk di Provinsi Sumatera Selatan, dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960. Anggota DPRD-GR, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan diambil dari anggota-anggota yang terdiri atas wakil-wakil golongan-golongan politik

ditambah golongan-golongan karya dengan komponen-komponennya dari golongan ABRI, veteran, para alim ulama, tokoh pembangunan spiritual dan pembangunan materiil. Oleh sebabnya, semua DPRD-DPRD yang sudah dibentuk, baik, DPRD-Sementara, DPRD-Peralihan, maupun DPRD hasil Pemilihan Umum 1955 harus disesuaikan dengan Penetapan Presiden Nomor 5 tahun 1960 sehingga menjelma menjadi DPRD -GR.

Berlakunya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, dimulailah retooling aparatur negara, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan. Dekrit Presiden ini diikuti dengan Penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959 tentang Pemerintahan Daerah. Walau Dekrit Presiden menimbulkan berbagai reaksi hebat, terutama dari kalangan partai-partai politik. Namun akhirnya disempurnakan lagi dalam Penetapan Presiden Nomor 5 tahun 1960. Pada Penetapan Presiden Nomor 5/1960, mengatur hak legislatif daerah dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR), termasuk di Provinsi Sumatera Selatan.

Pada dasarnya tujuan utama dari keluarnya Dekrit 5 Juli 1959 pada pokoknya mengembalikan marwah Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun dalam realitanya, Dekrit ini membawa pada suatu sistem otokratis, demokrasi terpimpin. Pada sistem demokrasi terpimpin ini ternyata rentan disusupi dan didominasi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Bahkan, seluruh lembaga negara, baik pemerintahan maupun politik disusupi oleh PKI. Dominasi PKI ini terlebih ketika Presiden Soekarno dengan Demokrasi Terpimpinnya mengeluarkan konsep Nasakom (Nasional, Agama dan Komunis).

Konsekuensi ini disusul dengan keluarnya Penetapan Presiden Nomor 3 tahun 1960 yang membubarkan DPR dan DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 1955 yang sah. Sebagai lanjutannya tanggal 24 Juni 1960 dibentuk dan disusun DPR baru yang diberi nama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPR-GR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPR-GR) diberbagai daerah, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan. Perubahan ke DPR-GR dan DPRD-GR ini menyebabkan kedudukan Partai Komunis Indonesia (PKI) kian kuat.

Semakin kuatnya Partai Komunis Indonesia (PKI) membuat munculnya berbagai reaksi anti komunis, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan. Panglima Harun Sohar melakukan penertiban dan pembekuan terhadap kegiatan PKI di Sumatera Selatan. Tindakan Panglima Harun Sohar ini, didukung oleh Gubernur Sumatera Selatan, Ahmad Bastari. Akibatnya kedudukan Gubernur Ahmad Bastari dan Panglima Harun

Sohar digoyang oleh para pendukung Nasakom. Puncaknya pada pengujung tahun 1963, Gubernur Ahmad Bastari dengan pelbagai alasan beliau diberhentikan sebagai Gubernur Sumatera Selatan.

Peristiwa-peristiwa Nasional di tingkat Pusat, secara otomatis membawa pengaruh ke daerah. Demikian pula peristiwa seteah G-30-S/PKI, dimana aparat dan pimpinan daerah ini harus menghadapinya. Menurut Drs. H. M. Arma, "H. Abujazid Boestomi ditarik ke Jakarta digantikan oleh M. Ali Amin, S.H. Sampai mengakhiri tugas, beliau tetap melaksanakan tugas dengan predikat Wakil Gubernur. Pengangkatan beliau sebagai Pj. gubernur terhitung sejak serah terima dengan Bapak H. Abujazid Boestomi, baru diketahui pada waktu pelantikan Gubernur Kepala Daerah Asnawi Mangku Alam.

Tugas M. Ali Amin, S.H. sebagai Pj. Gubernur Kepala Daerah cukup berat, menata kembali pemerintahan sebagai akibat G-30-S/PKI. Aksi-aksi Front Pancasila dan aksi-aksi dari KAMI, KAPPI, KAGI dan lain-lain masih berlangsung, sebagai kelanjutan dari aksi Tritura yang dicetuskan oleh Kesatuan Aksi tanggal 10 Januari 1966 di Jakarta. Pejabat-pejabat yang dianggap antek-antek PKI dan PNI Asu dituntut oleh Kesatuan Aksi untuk turun. Disamping itu tugas yang pelik ialah menyusun kembali DPRD-GR dan melaksanakan pencalonan dan pemilihan Gubernur Kepala Daerah.

Pelaksanaan pencalonan Gubernur dalam kepemimpinan M. Ali Amin SH diwarnai oleh demonstrasi-demonstrasi KAMI, KAPPI, KAGI dll. Dalam demonstrasi tersebut terjadi insiden, dimana sejumlah anggota KAPPI cidera dan seorang diantaranya yang bernama Nuraini tangannya harus dipotong.

Struktur DPRD-GR Sumatera Selatan 1961-1966

DPRD-GR Sumatera Selatan dimana pemimpinnya yang baru ditetapkan pada tanggal 15 September 1966 yaitu yang terdiri dari M Nurdin, sebagai Ketua dan masing-masing sebagai Wakil Ketua adalah Hamdani Said dan N. J. Messakh. Pada tanggal 2 Maret 1967 terjadi penyempurnaan DPRD-GR yang sangat mendasar, berdasarkan kepada surat kawat Mendagri No Pemda 5/3/15 tanggal 2 Maret 1967.

Nama-Nama Anggota DPRD-GR tersebut adalah 5 orang dari Nahdlatul Ulama yakni 1. Ir. Tabrani Ismail (NU), 2. H. A. Rahim Karim (NU), 3. Hamdani Said (NU), 3. Ir. Bakri Hamid (NU), 4. Bas M. Amin (NU), 5. Tabrani Hanany (NU). 6 orang dari Partai Syarikat Islam

Indonesia yakni 1. M. Chidiryuddin (PSII), 2. Ir. Arbai Naya (PSII), 3. Nurhadji Hasan (PSII), 4. A. Mangku Alam (PSII), 5. Arasman Karim (PSII), dan 6. Ramly Nurhapy (PSII). 1 orang dari Partai Komunis Indonesia yakni 1. M. Adenan Ibrahim (PKI). 2 orang dari Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia yakni 1. Syahabudin Zainuddin (IPKI) dan 2. R.A Arifai Tjek Jan (IPKI). 2 orang dari Partai Kristen yakni 1. Johannes Hoekman (Katolik) dan 2. Elisa Sitorus (Parkindo). 2 orang dari Perti yakni 1. Bahar Tantuah (Perti) dan 2. Usman Diah (Perti). Sementara Letkol Usman (ABRI/AD), Mayor Makmun Rasyid (ABRI/AD), Letkol Nuh Matjan (ABRI/AD), H.M Amin (ABRI/AD). M. Nurdin (Veteran), Muhar Madjid (Muhammadiyah), Drs. Alhady Haq (Muhammadiyah), Jahari (Cendekiawan), Ir. K. Madani Idrus (Cendekiawan), Aidil Fitriyah (Cendekiawan), Drs. Zaidan Djauhari (Pemuda), Nursidin (Pemuda), Ny. Siti Musiani Roni (Wanita), H. M. Junus (A-45), R. A. Rozak (Seniman), dan K. Syafarudin (Buruh).

Kemudian lowong lain dilengkapi dengan nama-nama berikut (kesemuanya dari Sekber Golkar), yakni A. Natar, Jahudin Sehat, Drs. Ismail Djalili, Marhami Ali, Bachrie, Drs. Mustafa Umar, Drs. Idris Halim. Pimpinan DPRD-GR diatas diketuai oleh Drs. A. Zaidan Djauhari dengan Wakil-wakil ketua adalah Aidil Fitriyah, BA. dan Jahudin Sehat.

Berdasarkan hasil Pemilihan Umum 1955, keanggotaan DPRD-Peralihan (DPRD-P) Sumatera Selatan diganti oleh anggota pemenang Pemilihan Umum 1955. Pelantikan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan pertama hasil Pemilihan Umum ini dilaksanakan dan dilantik oleh Bapak Sanusi Hardjadinata selaku Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia saat itu. Pelantikan ini dilakukan pada tanggal 9 Juni 1958. Adapun para anggota DPRD hasil Pemilihan Umum 1955 tersebut adalah:

No	Nama	Partai
1.	M. Siddieq Adiem	Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
2.	Achmad Djambi	Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
3.	Sjechan Sjahab	Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
4.	Mahdani Caropeboka	Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
5.	M. Sjafrri Naum	Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
6.	A. Bangsa Ratu	Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
7.	Abu Jasid	Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
8.	M. Saleh Uding	Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
9.	Bachtiar Amin	Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
10.	Ny. Djawanis Umar	Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
11.	K. H. A. Sobir	Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)

12.	Siradj Assaari Ishak	Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
13.	M. Diah Husin	Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
14.	H. M. J. Sjamsuddin	Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi)
15.	R. Sjahri Djajadiwirja	Partai Nasional Indonesia (PNI)
16.	R. Suwarno	Partai Nasional Indonesia (PNI)
17.	R. Sugiharto	Partai Nasional Indonesia (PNI)
18.	S. Panhar	Partai Nasional Indonesia (PNI)
19.	A. Mohd. Ali	Partai Nasional Indonesia (PNI)
20.	Zaikadir	Partai Komunis Indonesia (PKI)
21.	Busjari Latief	Partai Komunis Indonesia (PKI)
22.	Abdullah	Partai Komunis Indonesia (PKI)
23.	Pieter Simanjuntak	Partai Komunis Indonesia (PKI)
24.	Djunaid Surapati	Partai Komunis Indonesia (PKI)
25.	A. Rauf Ali	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
26.	Idris Baksin	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
27.	M. Ali Tojib	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
28.	M. Hasan Chan	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
29.	Ki. Burhanuddin	Partai Nahdlatul Ulama (NU)
30.	Siti Aminah Mustofa	Partai Nahdlatul Ulama (NU)
31.	Ali Gathmyr	Partai Nahdlatul Ulama (NU)
32.	Supirman	Partai Nahdlatul Ulama (NU)
33.	Burhan Dahri	IPKI
34.	Hanafi	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)
35.	Amir Husin	Partai Sosialis Indonesia (PSI)

DPRD Provinsi Sumatera Selatan hasil Pemilihan Umum ini seyogyanya bertahan 5 tahun sesuai masa kerjanya. Namun, karena keadaan yang kurang menentu akibat keluarnya Dekrit Presiden 1959. Maka hanya bertahan beberapa tahun, DPRD Provinsi Sumatera Selatan hasil Pemilihan Umum 1955 diganti dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR) Provinsi Sumatera Selatan. DPRD-GR ini memiliki masa kerja 5 tahun sejak dilantik tahun 1961.

Berbeda dengan sebelum, pembentukan parlemen di Sumatera Selatan, selain keanggotaannya berasal dari partai-partai politik atau wakil-wakil golongan politik. Karena Masyumi sebagai partai pemenang pertama dalam Pemilihan Umum 1955, dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada tahun 1960. Presiden Soekarno membubarkan Masyumi karena dianggap tokoh-tokohnya memiliki handil dan terlibat dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Maka keanggotaan dari golongan politik di DPRD-GR Sumatera Selatan diisi dari Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Komunis Indonesia (PKI), Nahdlatul Ulama (NU), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia

(IPKI), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik dan Partai Murba.

Selain itu, terdapat kebaruan, di mana anggota-anggota DPRD-GR Sumatera Selatan juga mengambil dari tokoh-tokoh masyarakat yang tidak berafiliasi ke partai politik atau golongan karya. Keanggotaan DPRD-GR Sumatera Selatan non-partai politik ini dilakukan dengan penunjukan oleh Gubernur Sumatera Selatan sebagai pemimpin tunggal daerah. Anggota non-partai politik ini berasal dari angkatan bersenjata, baik angkatan darat, angkatan laut, maupun angkatan udara. Selain itu, ada juga berasal Kepolisian Negara, OKD/OPR dan veteran. Dari golongan kerohanian terwakili dari tokoh alim ulama Sumatera Selatan. Dari golongan Pembangunan Spritual di Sumatera Selatan diwakili tokoh cendekiawan, pemuda, wanita, angkatan 1945, seniman, dan wartawan. Golongan pembangunan materiil terdapat perwakilan tani, buruh, koperasi, dan pengusaha nasional yang ada di Sumatera Selatan.

Adapun keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR) Provinsi Sumatera Selatan, ini adalah:

No	Nama	Partai
1.	Hasjim Alamlah	Partai Nasional Indonesia (PNI)
2.	Hafdli	Partai Nasional Indonesia (PNI)
3.	R. Soegiharto	Partai Nasional Indonesia (PNI)
4.	S. Ajad Darib	Partai Komunis Indonesia (PKI)
5.	Hasan Arsjad	Partai Komunis Indonesia (PKI)
6.	Ny. Rosmani Zaelani	Partai Komunis Indonesia (PKI)
7.	M. Chidiryuudin	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
8.	Peradjin	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
9.	Madani Ansjori	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
10.	K. H. Moehamad Sjadjari	Partai Nahdlatul Ulama (NU)
11.	Hadji Muhammad Jasin	Partai Nahdlatul Ulama (NU)
12.	Ali Gathmyr	Partai Nahdlatul Ulama (NU)
13.	Hanafi	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)
14.	dr. Mohammad Hoesin	IPKI
15.	Dr. Suwarno Tjokwardojo	Partindo
16.	Soetojo	Katholik
17.	Nawi Achmad	Murba
18.	Mayor Abihasan Said	Angkatan Bersenjata
19.	Kapten Mukti	Angkatan Bersenjata
20.	Lts. Sjamsul Kamal	Angkatan Bersenjata
21.	Mayor Djarab	OPR/OKD
22.	H. Muhamad Amin	Kepolisian
23.	M. Noerdin	Veteran

24.	H. Zainal Arifin	Ulama
25.	Masagus Jahja Agus	Pemuda
26.	Ny. Hasima Nadjamoeddin	Wanita
27.	Abdullah Amaluddin	Angkatan 45
28.	Myrin Koesoemo	Seniman
29.	Uteh Riza Jahja	Wartawan
30.	R. Sjachri Djajadiwirja	Tani
31.	Johannes Simandjuntak	Koperasi
32.	P. M. S. L. Tobing	Buruh
33.	Drs. M. Ali Assari	Pengusaha
34.	Bustam Mansur	Adat
35.	Ir. K. J. Wassil	Cendekiawan

Periode kerja DPRD-GR Provinsi Sumatera Selatan selama lima tahun, antara tahun 1961 sampai 1965. Berbeda dengan aturan sebelum, pada masa DPRD-GR Provinsi Sumatera Selatan ini yang bertindak sebagai ketua dewan adalah Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan karena jabatan. Keputusan diambil dengan suara bulat setelah dimusyawarahkan dan apabila tidak didapat kebulatan suara. Maka keputusan akan dikembalikan kepada Kepala Daerah yang mengambil keputusan atas dasar suara-suara yang telah dikeluarkan di DPRD-GR. Sistem pungutan suara untuk sesuatu keputusan tidak diadakan sama sekali dalam masa DPRD-GR Provinsi Sumatera Selatan ini.



Bustan Mansyur. Anak Pasirah Marga Paku Sengkunyt, OKU. Dijadikan anggota DPRD-GR Sumsel dari tokoh adat. Lahir di Paku Sengkunyt, Martapura, OKU, 31 Agustus 1919. Mengenyam pendidikan HIS, ELS dan HBS. Menjadi Pembarap Marga Paku Sengkunyt, 1940-1945. Mendapat pendidikan Gyugun Pagaralam berpangkat Letnan Dua pada masa Revolusi Fisik. Selanjutnya menjadi Pasirah Marga Paku Sengkunyt. Dilanjutkan menjadi anggota DPRD Sumsel dari 1961-1977. Sejak 1971 masuk Golongan Karya.

Pada masa DPRD-GR ini ketuanya diambil dari Gubernur Sumatera Selatan dengan wakil dari anggota dewan sendiri. Wakil ketua DPRD-GR dipilih oleh anggota dewan dengan pemilihan dan kesepakatan akhirnya sebagai wakil ketua DPRD-GR adalah Ali Gathmir.

Hasil-Hasil yang Dicapai DPRD-GR Sumatera Selatan, 1961-1966

Berdasarkan Dekrit Presiden dan Penetapan Presiden No. 6 1959 Pemerintahan Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR). Selanjutnya, Dewan Pemerintah Daerah (DPD) tidak ada lagi diganti Badan Pemerintah Harian (BPH). Pemerintah kolegal di daerah berubah dalam bentuk pemerintahan tunggal.

Demikian juga di Provinsi Sumatera Selatan, pejabat tunggal tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Instansi Pusat, dengan melalui pencalonan oleh DPRD-GR Provinsi Sumatera Selatan. Pejabat tunggal ini tidak bertanggung jawab ke DPRD-GR namun pada instansi yang mengangkat dan memberhentikan. Kepala Daerah ini ditugaskan mempunyai dua fungsi yakni fungsi dekonsentrasi sebagai pejabat negara alat pemerintahan Pusat dan dan fungsi desentralisasi sebagai alat pemerintah daerah.

Gubernur sebagai alat pemerintah daerah sebab memegang pimpinan pelaksanaan kekuasaan eksekutif pemerintah daerah dengan setahun sekali mempertanggung jawabkan tugasnya pada DPRD-GR Provinsi Sumatera Selatan. Namun Gubernur Provinsi Sumatera Selatan walau harus mempertanggungjawabkan tindakan-tindakannya setahun sekali terhadap DPRD-GR. Tetapi tidak dapat dijatuhkan oleh DPRD-GR Provinsi Sumatera Selatan.

Pada periode Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRD-GR) Provinsi Sumatera Selatan 1961-1965 selanjutnya Ketua DPRD mengadakan sidang lanjutan. Pada Sidang Lanjutan DPRD-GR Provinsi Sumatera Selatan menetapkan calon-calon Kepala Daerah. Penetapan Calon Kepala Daerah tidak terikat dengan nomor urutan calon Kepala Daerah yang diajukan oleh DPRD. Adapun calon-calon kepala daerah pada masa berlakunya Dekrit Presiden yang ditetapkan dan diajukan oleh DPRD-GR Provinsi Sumatera Selatan ini adalah:

1. H. A. Bastari (waktu itu adalah Kepala Komisariat Polisi Jawa Tengah).
2. M. Hoesien (Gubernur petahanan Provinsi Sumatera Selatan saat itu),
3. Muchtar Prabunegara (Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan saat itu)

Usul DPRD-GR Provinsi Sumatera Selatan dibawah ke Kementerian Dalam Negeri. Akhirnya H. A. Bastari terpilih menjadi

Gubernur sekaligus Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan. H. A. Bastari dilantik menjadi Gubernur Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 4 Januari 1960.

Tugas utama Gubernur Sumatera Selatan H. A. Bastari menyatukan sekretariat urusan otonomi dengan sekretariat urusan pemerintahan umum dalam satu atap. Sebelumnya, sekretariat ini masing-masing berada pada dua tempat. Sekretariat urusan pemerintahan umum selama ini berada di Gedung BP-7 daerah Talang Semut, Palembang. Sementara sekretariat urusan otonomi bertempat di Jalan Kapten A. Rivai, Gedung Pemda Tk I Provinsi Sumatera Selatan. Artinya, pada pagi hari Gubernur H. A. Bastari berkantor di Talang Semut, sementara siang hari di Jalan Kapten A. Rivai. Sejak penyatuan ini Beliau dapat berkonsentrasi untuk hanya berada di Kantor Jalan Kapten A. Rivai saja.

Disamping itu telah pula diangkat anggota Badan Pemerintah Harian (BPH) Provinsi Sumatera Selatan atas usul DPRD-GR dengan nama-nama, yakni:

1. Ir. Alting Panji Indra (Perwakilan daerah Lampung)
2. Letnan Kolonel Sulaiman Palindih (Perwakilan daerah Bengkulu)
3. R. Abdullah (Perwakilan daerah Bangka-Belitung) dan,
4. Yazid Mantap (Perwakilan daerah Palembang).

Setelah muncul gerakan anti PKI di Sumatera Selatan yang didukung oleh Gubernur H. A. Bastari sejak 1960 seperti diceritakan di atas tadi. Pada tahun 1963, Gubernur H. A. Bastari balik diserang oleh para pendukung PKI. Sehingga, pada tahun tersebut Beliau meletakkan jabatannya sebelum periodenya berakhir. Oleh DPRD-GR Sumatera Selatan, pengunduran diri tiba-tiba ini harus diatasi terlebih dahulu dengan membuat tim pejabat sementara gubernur Sumatera Selatan sebelum terpilih gubernur yang baru. DPRD-GR Sumatera Selatan, selanjutnya membentuk Tim Pimpinan pemegang sementara pemerintahan Sumatera Selatan yang terdiri, dari:

1. M. Sorimuda Pohan (Residen)
2. R. Abdullah (dari Badan Pemerintah Harian Sumatera Selatan)
3. R. Sugiharto (anggota DPRD-GR Sumatera Selatan), serta
4. M. Ali Amin (Sekretaris Daerah Sumatera Selatan).

Selanjutnya, pada tanggal 19 September 1963, DPRD-GR Sumatera Selatan melakukan pencalonan Gubernur Sumatera Selatan. Hasil pencalonan yang dilakukan oleh para anggota DPRD-GR ini adalah:

1. Kolonel Sulaiman Amin yang mendapat dukungang dari 12 orang anggota DPRD-GR
2. Komisaris Besar Abdullah Kadir yang mendapat dukungang 11 anggota DPRD-GR
3. Letkol (Pur) Barlian yang mendapat dukungang 6 anggota DPRD-GR

Namun ketiga nama calon Gubernur Sumatera Selatan yang diusulkan ke Pusat ini kurang direspon, terbukti selama 8 bulan nama calon ini digantung dan terkatung-katung tidak jelas kabarnya. Akhirnya, DPRD-GR kembali mengadakan pemilihan dan usul ulang, yang mendapat 2 calon gubernur Sumatera Selatan yang baru lagi, yaitu:

1. Letkol. Abihasan Said, dan
2. Noerdin Pandji.

Namun, kedua calon yang diusulkan ini kembali tidak direspon oleh Pusat. Untuk mengatasi hal tersebut, maka Departemen Dalam Negeri kembali memutuskan agar DPRD-GR Sumatera Selatan melakukan pemilihan ulang kembali calon gubernur Sumatera Selatan. Pada pemilihan ketiga ini, DPRD-GR Sumatera Selatan memutuskan calon tunggal, yakni M. Ali Amin, SH yang waktu itu menjabat rangkap sebagai sekretaris Gubernur Sumatera Selatan sekaligus Residen Bengkulu.

Selanjutnya, justru terjadi peristiwa unik ditengah usul calon tunggal tersebut, Pemerintah Pusat justru memiliki dan menetapkan untuk jabatan Gubenur Sumatera Selatan jatuh ke tangan H. Abu Jazid Boestomi. Sementara calon yang diusulkan DPRD-GR Sumatera Selatan, M. Ali Amin, SH diposisikan sebagai wakil gubernur. H. Abu Jazid Boestomi saat itu menjabat Pembantu Utama Menteri Dalam Negeri Bidang Pelaksanaan. Kondisi ini juga semakin menjadi unik, karena pada tahun 1966, ketika Gubernur H. Abu Jazid Boestomo ditarik ke Pusat. Wakilnya M. Ali Amin dinaikkan sebagai Gubernur Sumatera Selatan. Namun H. Ali Amin hanya menjabat periode 1966-1967.

Selain keterlibatan dalam pemilihan gubernur di Sumatera Selatan. DPRD-GR periode 1961-1966 ini juga terlibat dalam pemekaran Provinsi Sumatera Selatan. Sejak tahun 1961, masyarakat Lampung sudah berusaha memperjuangkan berdirinya Lampung sebagai sebuah provinsi lewat DPRD-GR Sumatera Selatan. Masyarakat Lampung pada tahun tersebut mendirikan Panitia Pembentukan Provinsi Lampung dengan ketua Raja Syah Alam dari Partai Nasional Indonesia (PNI). Selain itu, sokongan dari pemimpin daerah datanng langsung dari

Residen Lampung R. Mohammad, Walikota Tanjung Karang Zainal Abidin, Bupati Lampung Selatan Hasan Basri, Bupati Lampung Tengah Hasan Basri dan Bupati Lampung Utara Somad.

Perjuangan ini baru mendapatkan tiga tahun kemudian. Pada tanggal 14 Maret 1964 secara resmi berdiri Pemerintah Daerah Tk I Provinsi Lampung. Gubernur pertama yang menjabat ditunjuk Kusno Danupoyo. Berdirinya Provinsi Lampung ini menyebabkan Provinsi Sumatera Selatan waktu itu kehilangan 1 kota, yakni Kota Tanjung Karang dan 3 kabupaten yakni Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Utara.

BAGIAN II
DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN
MASA ORDE BARU

BAB 5

DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 1966-1972

Bab ini menjelaskan DPRD Provinsi Sumatera Selatan mulai dari masa awal Orde Baru setelah pemberontakan G-30-S/PKI sampai dengan pengangkatan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan hasil pemilihan umum kedua tahun 1971.

Peristiwa G-30-S/PKI 1965 dan Pembentukan DPRD-GR Sumatera Selatan 1966-1972

Memanfaatkan situasi kemelut politik di Indonesia dimana organisasi politik dan masyarakat yang tidak sejalan atau tidak mendukung Nasakom, dianggap kontra revolusi. Pemberangusan media massa ataupun pembubaran organisasi massa yang dianggap kontra revolusi dilaksanakan atas fitnah PKI. Puncak fitnah ini adalah dilontarkan kepada TNI-AD, dengan menyatakan bahwa adanya, Dewan Jendral yang akan mengadakan kudeta. Fitnah dibarengi dengan pembunuhan para Jendral TNI-AD secara kejam dan diluar batas kemanusiaan. Gerakan PKI ini dikenal dengan Gerakan 30 September. Gerakan ini adalah suatu usaha merebut kekuasaan.

Gerakan pendudukan yang dilancarkan pada dinihari tanggal 1 Oktober 1965 oleh G-30-S/PKI untuk sementara berhasil membingungkan masyarakat. Operasi penumpasan G-30-S/PKI dilancarkan pada tanggal 1 Oktober itu juga, diusahakan: sedapat mungkin tanpa bentrokan senjata. Gerakan penumpasan PKI ini dilakukan dengan Cepat oleh ABRI dan dibantu sepenuhnya oleh masyarakat, Gerakan operasi penumpasan G-30-S/PKI didaerah termasuk di Sumsel.

Dalam buku berjudul Laporan Pimpinan MPRS Tahun 1966-1972 yang diterbitkan oleh Penerbitan MPRS tahun 1972 disebutkan DPRD-GR Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 30 Januari 1967 juga memberikan pernyataannya :

1. Menolak pelengkapan Pidato Nawaksara Presien Soekarno sebagaimana tersebut dalam suratnya kepada pimpinan MPRS

tertanggal 10 Januari 1967, karena belum memenuhi keputusan MPRS Nomor 5/MPRS/1966

2. Menolak ucapan dan pendapat presiden Soekarno yang menyatakan bahwa MPRS yang sekarang telah dikebiri

3. Mendesak agar MPRS segera mengadakan sidang untuk membicarakan situasi politik tanah air Indonesia sekarang ini, khususnya tentang Lembaga Kepresidenan RI dan kedudukan Presiden Soekarno.

4. Mendesak kepada pemegang Surat Perintah 11 Maret 1966 agar segera mengadakan penelitian fakta-fakta peranan presiden Soekarno dalam peristiwa G-30-S/PKI dan berdasarkan fakta-fakta yang bersangkutan, menghadapkan Presiden Soekarno dalam sidang Mahkamah Militer Luar Biasa.

Sementara itu, di Pemerintah Daerah Sumatera Selatan telah dilaksanakan pula pembersihan pegawai-pegawai yang terlibat atau berindikan PKI dan diambil tindakan dengan pemberhentian.

Adapun jumlahnya adalah sebagai berikut di Pemda Tk I Sumatera Selatan sebanyak 84 orang, Pemda Tk II dinas-dinas sebanyak 786 orang. Sehingga sebanyak 870 orang diberhentikan karena dituduh terlibat G-30-S/PKI.

Peristiwa-peristiwa Nasional di tingkat Pusat, secara otomatis membawa pengaruh ke daerah. Demikian pula peristiwa seteah G-30-S/PKI, dimana aparat dan pimpinan daerah ini harus menghadapinya. Menurut Drs. H. M. Arma, "H. Abujazid Boestomi ditarik ke Jakarta digantikan oleh M. Ali Amin, S.H. Sampai mengakhiri tugas, beliau tetap melaksanakan tugas dengan predikat Wakil Gubernur. Pengangkatan beliau sebagai Pj. gubernur terhitung sejak serah terima dengan Bapak H. Abujazid Boestomi, baru diketahui pada waktu pelantikan Gubernur Kepala Daerah Asnawi Mangku Alam.

Tugas M. Ali Amin SH sebagai Pj. Gubernur Kepala Daerah cukup berat, menata kembali pemerintahan sebagai akibat G-30-S/PKI. Aksi-aksi Front Pancasila dan aksi-aksi dari KAMI, KAPPI, KAGI dan lain-lain masih berlangsung, sebagai kelanjutan dari aksi Tritura yang dicetuskan oleh Kesatuan Aksi tanggal 10 Januari 1966 di Jakarta. Pejabat-pejabat yang dianggap antek-antek PKI dan PNI Asu dituntut oleh Kesatuan Aksi untuk turun. Disamping itu tugas yang pelik ialah menyusun kembali DPRD-GR dan melaksanakan pencalonan dan pemilihan Gubernur Kepala Daerah.

Pelaksanaan pencalonan Gubernur dalam kepemimpinan M. Ali Amin SH diwarnai oleh demonstrasi-demonstrasi KAMI, KAPPI, KAGI dll. Dalam demonstrasi tersebut terjadi insiden, dimana sejumlah anggota KAPPI cidera dan seorang diantaranya yang bernama Nuraini tangannya harus dipotong.

DPRD-GR Sumsel dimana pemimpinnya yang baru ditetapkan pada tanggal 15 September 1966 yaitu yang terdiri dari M Nurdin, sebagai Ketua dan masing-masing sebagai Wakil Ketua adalah Hamdani Said dan N. J Messakh. Pada tanggal 2 Maret 1967 terjadi penyempurnaan DPRD-GR yang sangat mendasar, berdasarkan kepada surat kawat Mendagri No Pemda 5/3/15 tanggal 2 Maret 1967.

Nama-Nama Anggota DPRD-GR tersebut adalah 5 orang dari Nahdlatul Ulama yakni 1. Ir. Tabrani Ismail (NU), 2. H. A. Rahim Karim (NU), 3. Hamdani Said (NU), 3. Ir. Bakri Hamid (NU), 4. Bas M. Amin (NU), 5. Tabrani Hanany (NU). 6 orang dari Partai Syarikat Islam Indonesia yakni 1. M. Chidiryuddin (PSII), 2. Ir. Arbai Naya (PSII), 3. Nurhadji Hasan (PSII), 4. A. Mangku Alam (PSII), 5. Arasman Karim (PSII), dan 6. Ramly Nurhapy (PSII). 1 orang dari Partai Komunis Indonesia yakni 1. M. Adenan Ibrahim (PKI). 2 orang dari Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia yakni 1. Syahabudin Zainuddin (IPKI) dan 2. R. A. Arifai Tjek Jan (IPKI). 2 orang dari Partai Kristen yakni 1. Johannes Hoekman (Katolik) dan 2. Elisa Sitorus (Parkindo). 2 orang dari Perti yakni 1. Bahar Tantuah (Perti) dan 2. Usman Diah (Perti). Sementara Letkol Usman (ABRI/AD), Mayor Makmun Rasyid (ABRI/AD), Letkol Nuh Matjan (ABRI/AD), H.M Amin (ABRI/AD). M. Nurdin Pandji (Veteran), Muhar Madjid (Muhammadiyah), Drs. Alhady Haq (Muhammadiyah), Jahari (Cendekiawan), Ir. K. Madani Idrus (Cendekiawan), Aidil Fitriyah (Cendekiawan), Drs. Zaidan Djauhari (Pemuda), Nursidin (Pemuda), Ny. Siti Musiani Roni (Wanita), H. M. Junus (A-45), R. A. Rozak (Seniman), dan K. Syafarudin (Buruh).

Kemudian lowong lain dilengkapi dengan nama-nama berikut (kesemuanya dari Sekber Golkar), yakni A. Natar, Jahudin Sehat, Drs. Ismail Djalili, Marhami Ali, Bachrie, Drs. Mustafa Umar, Drs. Idris Halim. Pimpinan DPRD-GR diatas diketuai oleh Drs. A. Zaidan Djauhari dengan Wakil-wakil ketua adalah Aidil Fitriyah, BA. dan Jahudin Sehat.

Struktur dan Anggota DPRD-GR Sumatera Selatan, 1966-1972

Menjelang akhir Orde Lama terjadi kemelut politik di Tanah Air, termasuk di Sumatera Selatan. Pada masa akhir Partai Komunis Indonesia (PKI) melancarkan apa yang disebut dengan Gerakan 30 September/PKI (G-30-S/PKI). Pembersihan terhadap tokoh-tokoh dan mereka yang dianggap terlibat keanggotaan Partai Komunis Indonesia (PKI) terutama dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret (Supersemar). Tanggal 11 Maret 1966 ini juga dianggap sebagai tonggak kelahiran era baru, yang disebut Orde Baru.

Sejak peristiwa G-30-S/PKI dan setelahnya, situasi dan kondisi politik pada tingkat Pusat memiliki pengaruh besar pada daerah-daerah di tanah air, termasuk Sumatera Selatan. Pada Provinsi Sumatera Selatan, Gubernur Sumatera Selatan H. Abu Jazid Boestomi ditarik ke Pemerintahan Pusat di Jakarta. Posisi Beliau, digantikan oleh Wakil Gubernur M. Ali Amin, SH. Tugas Gubernur M. Ali Amin, SH cukup berat dalam menata pemerintahan daerah Sumatera Selatan. Karena kekacauan politik yang ada di Sumatera Selatan waktu itu. Berbagai aksi dari KAMI, KAPPI, KAGI dan lain sebagainya yang menyebut dirinya sebagai Front Pancasila masih berlangsung sengit. Para pejabat dan pegawai di Sumatera Selatan yang dianggap dan diduga sebagai antek-antek PKI, maupun PNI-Asu diminta untuk turun dan dipenjarakan.

Sementara itu, tugas Gubernur M. Ali Amin juga berkenaan dengan penataan pemerintahan daerah untuk menyusun kembali DPRD-GR Provinsi Sumatera Selatan pasca G-30-S/PKI. Gubernur M. Ali Amin harus melaksanakan pencalonan, pemilihan dan penetapan Gubernur Kepala Daerah Sumatera Selatan Defenitif pengganti H. Abu Jazid Boestomi, sekaligus pengganti dirinya. Selain itu, Gubernur M. Ali Amin pada saat bersamaan harus mencari, mencalonkan, memilih sekaligus menetapkan anggota DPRD-GR yang baru.

Gubernur M. Ali Amin setelah mengajukan usul keanggotaan DPRD-GR yang baru baru pada tanggal 2 Maret 1967 diminta untuk menyempurnaan kembali DPRD-GR Provinsi Sumatera Selatan berdasar surat kawat Menteri Dalam Negeri yang ditetapkan oleh Beliau dalam Keputusan Pemda berkop 5/3/15 tertanggal 2 Maret 1967. Adapun susunan keanggotaan DPRD-GR Provinsi Sumatera Selatan Periode 1967-1968, sebagai berikut:

No	Nama	Partai
1.	Ir. Tabrani Ismail	Nahdlatul Ulama (NU)
2.	H. A. Rahim Karim	Nahdlatul Ulama (NU)
3.	Hamdani Said	Nahdlatul Ulama (NU)
4.	Ir. Bakri Hamid	Nahdlatul Ulama (NU)
5.	Bas M. Amin	Nahdlatul Ulama (NU)
6.	Tabrani Hanany	Nahdlatul Ulama (NU)
7.	M. Chidiryuddin	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
8.	Ir. Arbai Naya	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
9.	Nurhadji Hasan	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
10.	A. Mangku Alam	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
11.	Arasman Karim	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
12.	Ramly Nurhapy	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
13.	M. Adenan Ibrahim	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)
14.	Syahabudin Zainudin	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)
15.	R. A. Arifai Tjek Yan	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)
16.	Bahar Tantuah	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)
17.	Usman Diah	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)
18.	Johanes Hoekman	Katolik
19.	Elisa Sitorus	Parkindo
20.	Letkol. Usman	ABRI/AD
21.	Mayor Makmun Rasyid	ABRI/AD
22.	Letkol. Nuh Matjan	ABRI/AD
23.	H. M. Amin	ABRI/AK
24.	M. Noerdin Pandji	Veteran
25.	Muhar Madjid	Muhammadiyah
26.	Drs. Alhady Haq	Muhammadiyah
27.	Jahari	Cendekiawan
28.	Ir. K. Madani Idrus	Cendekiawan
39.	Aidil Fitrisyah	Cendekiawan
30.	Drs. A. Zaidan Djauhari	Pemuda
31.	Nursidin	Pemuda
32.	Ny. Siti Musiani Roni	Wanita
33.	H. M. Junus	Angkatan-45
34.	R. A. Rozak	Seniman
35.	K. Syafarudin	Buruh
36.	A. Natar	Sekber Golkar
37.	Jahudin Sehat	Sekber Golkar
38.	Drs. Ismail Djalili	Sekber Golkar
39.	Marhami Ali	Sekber Golkar
40.	Bachrie	Sekber Golkar
41.	Drs. Mustafa Umar	Sekber Golkar
42.	Drs. Idris Halim	Sekber Golkar

Pimpinan DPRD-GR Provinsi Sumatera Selatan Periode 1967-1968 ini dipilih dan ditetapkan sebagai ketua adalah Drs. A. Zaidan

Djauhari. Wakil ketua ada dua orang yakni, Aidil Fitriyah, BA dan Jahudin Sehat.



Aidil Fitriyah. Wakil dari tokoh cendekiawan DPRD-GR Provinsi Sumatera Selatan 1967-1968. Lahir di Muko-Muko, Bengkulu, 7 Agustus 1939. Pendidikan Sekolah Rakyat Bengkulu, 1953. SGB dan SGPD (1957) di Palembang. SGA (1960) dan Sarjana Muda Civic Hukum, Unsri (1965) dan Sarjana Civic Hukum, Unsri (1967). Mengawali karir sebagai guru dan kepala sekolah SD dan SMP di Palembang sambil kuliah. Tokoh gerakan mahasiswa di Palembang tahun 1965 sebagai ketua HMI, selanjutnya terjun ke politik dengan menjadi anggota

deewan di Sumsel sejak 1966-1977. Menjabat jabatan penting di pemerintahan Sumatera Selatan. Ketua PGRI Sumatera Selatan dan Pendiri Universitas PGRI Palembang. Jabatan terakhir menjadi anggota DPD perwakilan Sumatera Selatan tiga periode, sampai beliau menutup usia 9 November 2014.

Setelah penyempurnaan DPRD-GR Provinsi Sumatera Selatan, maka dilakukan pencalonan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Pada tanggal 17 Mei dan 18 Mei 1967, DPRD-GR Provinsi Sumatera Selatan melakukan pencalonan pada Gubernur. Hasilnya, tercatat ada 4 (empat) orang calon yang akan diajukan DPRD-GR Provinsi Sumatera Selatan ke Pusat. Keempat calon Gubernur Sumatera Selatan tersebut adalah:

1. Abdullah Kadir yang mendapat dukungan sebesar 13 orang anggota DPRD-GR Provinsi Sumatera Selatan
2. Asnawi Mangkualam didukung 10 suara anggota DPRD-GR Provinsi Sumatera Selatan
3. Mohamad Noerdin Pandji mendapat dukungan 8 suara anggota DPRD-GR Provinsi Sumatera Selatan, dan
4. H. Makmun Sulaiman mendapatkan dukungan 7 suara dari anggota DPRD-GR Provinsi Sumatera Selatan.

Selanjutnya nama-nama calon ini dikirim ke Pemerintah Pusat di Jakarta. Namun keempat nama calon yang diusulkan dan dikirim ini setelah delapan bulan nampaknya cukup lama mendapat respon dari Pemerintah Pusat. Baru pada tanggal 10 Januari 1968, salah satu calon Asnawi Mangkualam dinyatakan terpilih dan dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Basuki Rahmat sebagai Gubernur Sumatera Selatan.

Masa kerja pada tahun pertama, Gubernur Asnawi Mangkualam masih dalam masa transisi, dari masa Orde Lama ke Orde Baru. Landasan hukum pemerintahan daerah yang berlaku saat itu masih

berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 yang tercatat sebagai produk akhir dari Orde Lama. Undang-Undang ini masiih dikategorikan menganut asas desentralisasi. Oleh karena itu MPR-GR di Pusat berusaha meninjau kembali kebijakan undang-undang tersebut.

Peristiwa lain dalam masa DPRD-GR Provinsi Sumatera Selatan masa transisi ini adalah munculnya pemekaran Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu daerah yang merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan yakni Bengkulu dinyatakan berdiri sendiri sebagai sebuah provinsi baru. Pada tanggal 12 September 1967, eks Keresidenan Bengkulu dibentuk menjadi Provinsi ke-26 dalam wilayah Republik Indonesia. Pembentukan Provinsi Bengkulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 yang dituangkan dalam peraturan pelaksanaannya PP Nomor 20 Tahun 1968. Dengan demikian, sejak berdirinya Provinsi Sumatera Selatan selama 18 tahun, terdapat dua wilayah yang dimekarkan yakni terlebih dahulu Provinsi Lampung tahun 1964 dan Provinsi Bengkulu tahun 1967. Dengan demikian daerah kota dan Kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan tinggal 8 Kabupaten dan 2 Kotamadya.

BAB 6

DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 1972-1977

Bab ini menelusuri perjalanan DPRD Provinsi Sumatera Selatan hasil Pemilihan Umum 1971. Kemudian akan berakhir dengan hadirnya DPRD Provinsi Sumatera Selatan hasil Pemilihan Umum 1977.

Keadaan Politik Menjelang Pengangkatan Anggota DPRD Sumsel 1972-1977

Menjelang Pemilihan Umum pertama masa Orde Baru yang semula direncanakan selambat-lambatnya tanggal 6 Juni 1968. MPRS-GR ditingkat pusat mengeluarkan ketetapan MPRS Nomor XI tahun 1966. Pada ketetapan ini dibuat dan dicapai suatu konsensus untuk menyederhanakan partai-partai politik. Namun Pejabat Presiden Soeharti menyatakan bahwa Pemilihan Umum tidak dapat dilaksanakan di tahun 1968 sesuai ketentuan awal. Selanjutnya, MPRS menjadwalkan ulang Pemilihan Umum dengan menetapkan Pemilihan Umum akan dilaksanakan paling lambat tanggal 5 Juli 1971.

Pada proses praktek penyederhanaan partai ini, adalah penguatan Sekretariat Bersama (Sekber) Golongan Karya. Sekber Golkar ini merupakan peleburan tujuh kelompok organisasi induk (Kino) yakni:

1. Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro)
2. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)
3. Sentra Organisasi Karyawan Sosialis Indonesia (Soksi)
4. Ormas Hankam
5. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (Gakari)
6. Karya Profesi
7. Karya Pembangunan

Pemilihan Umum 1971 dilaksanakn berdasarkan payung hukum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilu. Penyederhanaan partai politik lewat fusi lebih banyak diserahkan kepada kesadaran dan inisiatif dari partai-partai politik itu sendiri. Akhirnya diputuskan partai peserta Pemilihan Umum hanya Sembilan partai politik saja. Kesembilan partai politik ini, yakni:

1. Golongan Karya
- Partai-partai lama di masa Orde Lama, seperti:
2. Partai Nasional Indonesia (PNI)
3. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)
4. Partai Nahdlatul Ulama (NU)
5. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
6. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)
7. Musyawarah Rakyat Banyak (Murba)
8. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
9. Partai Katholik

Serta satu partai baru, yakni:

10. Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)

Namun satu tahun menjelang Pemilihan Umum 1971, pada bulan Februari 1970. Presiden Soeharto bertemu dengan para pemimpin partai politik. Presiden Soeharto membahas rencana pemerintah untuk mengurangi jumlah partai peserta Pemilihan Umum 1971. Akhirnya diambil keputusan yang merupakan jalan tengah. Pemilihan Umum 1971 akan tetap diikuti oleh 10 partai. Namun ketika Pemilihan Umum 1971 menghasilkan anggota parlemen, maka di parlemen dua kelompok koalisi.

Pertama, Kelompok Demokrasi Indonesia yang terdiri dari partai-partai, yakni:

1. Partai Nasional Indonesia (PNI)
2. Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)
3. Musyawarah Rakyat Banyak (Murba)
4. Partai Kristen Indonesia (Parkindo)
5. Partai Katholik

Kedua, Kelompok Persatuan Pembangunan yang terdiri dari partai-partai, yakni:

1. Partai Nahdlatul Ulama (NU)
2. Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)
3. Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
4. Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)

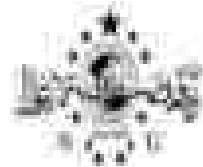
1
Partai Katholik



2
PSII



3
NU



4

Parmusi



5

Golongan Karya



6

Parkindo



7

MURBA



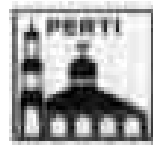
8

PNI



9

PERTI



10

IPKI



Gambar 17. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 1971

Berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 1970 tanggal 23 Mei 1970 maka ditetapkan partai-partai peserta Pemilihan Umum 1971 seperti yang ada pada gambar di atas. Partai-partai politik yang ikut dalam Pemilihan Umum 1971 tersebut sudah ada dan diakui serta mempunyai wakil di DPR/DPRD sebelumnya.

Selain itu pada tanggal 5 Juli 1971, serentak di seluruh Indonesia dilakukan Pemilihan Umum 1971 dalam memilih anggota DPR, DPRD Tk. I dan DPRD Tk. II. Berdasarkan jumlah penduduknya Provinsi Sumatera Selatan saat itu berjumlah 3.443.749 orang. Pada

Pemilihan Umum 1971 terdapat pemilih di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 1.535.468 orang. Selanjut dari jumlah tersebut yang memberikan suara dalam Pemilihan Umum 1971 sebanyak 1.408.740 orang atau lebih kurang 92 persen. Suara sah sebesar 1.393.861 pemilih.

Pemilihan Umum 1971

Pemilihan Umum 1971 menghasilkan kemenangan absolut bagi oleh Golongan karya yang meraup suara sebesar 63,8 persen. Persentase Golongan Karya ini jauh mengguguli 9 partai politik yang ikut dalam Pemilihan Umum 1971 yang hanya memperoleh 36,2 persen suara saja.

Berdasarkan hasil Pemilihan Umum 1971 pada Provinsi Sumatera Selatan, diperoleh hasil pemungutan suara, sebagai berikut:

No	Partai	Jumlah Suara	Kursi
1.	Golongan Karya	883.750	20 Kursi
2.	Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)	169.156	4 Kursi
3.	Partai Nahdlatul Ulama (NU)	152.847	4 Kursi
4.	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)	79.062	2 Kursi
5.	Partai Nasional Indonesia (PNI)	68.120	2 Kursi
6.	Partai Katholik	13.676	-
7.	Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)	10.392	-
8.	Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti)	9.616	-
9.	Partai Kristen Indonesia (Parkindo)	6.054	-
10.	Musyawaharah Rakyat Banyak (Murba)	1.188	-
		1.393.861	32

Berdasarkan tabel di atas pemilihan Umum Juli 1971 yang merupakan tonggak berdirinya Orde Baru. DPRD Provinsi Sumatera Selatan menghasilkan wakil-wakil rakyat dengan susunan sebagai berikut: Golongan Karya mendapat 20 Kursi, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) mendapat 4 Kursi, Partai Nahdlatul Ulama (NU) mendapat 4 Kursi, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) mendapat 2 Kursi, Partai Nasional Indonesia (PNI) mendapat 2, ABRI diwakili 6 Kursi dan diangkat sebagai perwakilan ormas 2 Kursi. Jadi, DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1971-1977 seluruhnya diisi 40 Kursi perwakilan rakyat.

Berdasarkan angka di atas, Golongan Karya memperoleh kursi terbanyak di Provinsi Sumatera Selatan dengan suara sebanyak 883.750 suara (63%). Namun jika dibandingkan dengan provinsi lain, perolehan suara Golongan Karya di Sumatera Selatan pada Pemilihan Umum 1971 masih tergolong kecil. Tetapi jika dihubungkan dengan keadaan khusus di Provinsi Sumatera Selatan yang pengaruh partai agama sangat kuat seperti pada Pemilihan Umum Tahun 1955, perolehan suara Golongan Karya tersebut masih dikatakan cukup tinggi. Belum lagi kondisi di Sumatera Selatan yang mana memiliki banyak tokoh-tokoh pimpinan partai politik di tingkat pusat yang pengaruh kuat, maka dapat dikatakan perolehan suara Golongan Karya pada Pemilihan Umum 1971 tersebut merupakan suatu surprise. Jika dibandingkan dengan Pemilihan Umum Tahun 1955, maka ada pergeseran kekuatan politik di Sumatera Selatan. Dari dominasi partai politik agama pada Pemilihan Umum Tahun 1955 kekuatan politik berpindah ke Golongan Karya pada Pemilihan Umum Tahun 1971.

Pelaksanaan Pemilu yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 5 Juli 1971, berjalan dengan baik dan sukses di Sumatera Selatan. Dari jumlah penduduk sebanyak 3.443.749 orang, terdapat jumlah mata pilih sebanyak 1.535.468 orang. Jumlah pemilih yang memberikan suaranya sebanyak 1.408.740 orang atau sebesar kurang lebih 92 %.

Untuk pembagian kursi menurut wilayah (Propinsi dan Kab /Kotamadya), dan Golongan Karya /Parpol serta ABRI, adalah sebagai berikut:

No	Daerah	Parpol	Golkar	Diangkat		Jumlah
				ABRI	Non-ABRI	
1	Sumatera Selatan	12	20	6	2	40
2	Palembang	15	17	6	2	40
3	Ogan Komering Ilir	11	2	6	2	40
4	Ogan Komering Ulu	12	20	6	2	40
5	Musi Banyuasin	14	15	5	2	36
6	Musi Rawas	4	16	4	1	25
7	Lahat	10	20	5	2	37
8	Muara Enim	10	19	5	2	36
9	Bangka	7	12	4	1	24
10	Belitung	3	13	3	1	20
11	Pangkal Pinang	7	9	3	1	20
Jumlah		105	182	53	18	358

Sesuai dengan ketentuan tentang jadwal ditetapkan pelantikan anggota DPRD TK-II se- Provinsi Sumatera Selatan diserahkan kepada para Bupati/Walikota Kepala Daerah untuk melantik serentak, kecuali DPRD Kotamadya Palembang oleh Gubernur Kepala Daerah Sumsel, pada tanggal 7 Oktober 1971 dan pelantikan anggota DPRD Tk 1 Sumatera Selatan dilakukan pada tanggal 17 Oktober 1971.

Dari angka-angka tersebut di atas maka ternyata Golongan Karya memperoleh kursi terbanyak baik untuk DPRD Tk II, DPRD Tk I maupun DPR-RI, karena dapat mengumpulkan suara pemilih paling banyak dibandingkan dengan suara yang diperoleh seluruh partai politik, yaitu sebanyak 883.750 suara (63 %).

Dibandingkan dengan Propinsi lain di Indonesia mungkin suara yang diperoleh oleh Golkar di Sumatera Selatan kecil, akan tetapi kalau dihubungkan dengan keadaan khusus di Sumatera Selatan dimana pengaruh partai agama sangat kuat sebagaimana terbukti dalam Pemilu 1955, yang memperoleh 80 % suara yang masuk.

Tambahan lagi Sumatera Selatan adalah merupakan daerah dimana banyak tokoh-tokoh pimpinan Partai Politik tingkat Nasional yang masih mempunyai pengaruh di Sumatera Selatan, maka sebenarnya jumlah suara yang diperoleh Golkar tersebut merupakan suatu *surprise*.

Dari hasil pemungutan suara tersebut diatas terlihat pula bahwa di Sumatera Selatan telah terjadi perubahan ikatan politik dalam masyarakat dan dengan demikian terjadi pergeseran dalam perimbangan kekuatan politik. Di tahun 1955 kekuatan politik di daerah ini terletak pada parpol agama, maka tahun 1971 beralih ke Golongan Karya.

Pada tanggal 14 Oktober 1971 pukul 09.00 WUB bertempat di gedung DPRD Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan diadakan Sidang Paripurna Khusus Ke-1 dengan acara pengambilan sumpah dan pelantikan anggota-anggota DPRD hasil Pemilu 1971. Sejak pelantikan sampai berakhirnya tigas sangat banyak kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan. Anggota DPR-RI Periode 1971-1977 Perwakilan Sumatera Selatan hasil Pemilihan Umum 1971 menempatkan Provinsi Sumatera Selatan memperoleh sepuluh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Perwakilan Sumatera Selatan, yakni:

No	Nama	Partai
1.	Zulkarnain Tjikmat	Golongan Karya
2.	M. Hasjim Singapati Djajanegara	Golongan Karya

3.	Drs. Achmad Laconi Sjamsuddin	Golongan Karya
4.	Drs. Moersalin	Golongan Karya
5.	Ny. Mamie Satibi Darwis	Golongan Karya
6.	Amil Danal, S.H.	Golongan Karya
7.	Mohamad Fachrur Rozi	Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)
8.	Drs. A. Zaidan Djauhary	Partai Nahdlatul Ulama (NU)
9.	Oesman Joesoef Helmi	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
10.	H. Kemas Fachruddin	Partai Nasional Indonesia (PNI)



Gambar 18. Pelantikan Anggota DPRD Sumsel hasil Pemilihan Umum 1971

Sementara, berdasarkan hasil Pemilihan Umum 1971 diperoleh anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan Periode 1971-1977, sebagai berikut:

No	Nama	Partai
1.	Kiagus Syafaruddin	Golongan Karya
2.	H. K. Syarkowi	Golongan Karya
3.	Bustan Mansyur	Golongan Karya
4.	H. M. Bakri	Golongan Karya
5.	Amratul Mukminin, BA	Golongan Karya
6.	Ny. Siti Isnaniah Nuh Macan	Golongan Karya
7.	H. Zaenal AA Mangkunegara	Golongan Karya
8.	Ny. R. A. Tutty Z. Hamid, S.H.	Golongan Karya
9.	A. Zawawi Tjik Molek	Golongan Karya
10.	A. Truman S. O. Bakri, S.H.	Golongan Karya
11.	R. M. Soewardi Soerjohoedojo	Golongan Karya
12.	Ny. Fatonah L. Syamsuddin	Golongan Karya

13.	Ny. Masayu Yuhaeni Mattjik	Golongan Karya
14.	Drs. A. Ismail Djalili	Golongan Karya
15.	Tarmizi Effendi SH	Golongan Karya
16.	Ismail Matyani BA	Golongan Karya
17.	Ny. H. Maryam Maliki Saleh	Golongan Karya
18.	Ny. Hilma Arma	Golongan Karya
19.	Therik Joel	Golongan Karya
20.	Drs. Aidil Fitri Syah	Golongan Karya
21.	Ny. Hj. Rachmaniah Mochtar	Golongan Karya
22.	Idris Baksin	Golongan Karya
23.	Masagus Yahya Agus	Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)
24.	K. H. A. Dahlan	Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)
25.	Djumahat H. Radjim	Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)
26.	Drs. M. Darus Agap	Partai Muslimin Indonesia (Parmusi)
27.	K. H. Daud Rusydi	Partai Nahdlatul Ulama (NU)
28.	K. H. Abd. Wahab Sa'idy	Partai Nahdlatul Ulama (NU)
29.	H. Tabrani Hanany BA	Partai Nahdlatul Ulama (NU)
30.	Bas M. Amin	Partai Nahdlatul Ulama (NU)
31.	Saleh Ismail	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
32.	Drs. Ramly Nurhapy	Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII)
33.	Ny. H. Rohana Usman	Partai Nasional Indonesia (PNI)
34.	H. A. Rachman Djekamat	Partai Nasional Indonesia (PNI)
35.	Syamsulbachi Oemar	ABRI
36.	Zainal Datuk Perpatih	ABRI
37.	H. M. Saleh Hoesin	ABRI
38.	Chabarsyah	ABRI
39.	Supangat Harijanto	ABRI
40.	Abdul Madjid, S.H.	ABRI

Pada tanggal 17 Oktober 1971 dilakukan pelantikan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan hasil Pemilihan Umum 1971. Pada Sidang Pleno DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1971-1977 hasil Pemilihan Umum 1971 ini, diputuskan bahwa Syamsulbahri Oemar (Golongan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia/ABRI) sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan 1971-1977. Sementara terpilih dua orang yakni Kiagus Syafaruddin (Golongan Karya) dan Drs. M. Darus Agap (Partai Muslimin Indonesia/Parmusi) sebagai wakil ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1971-1977.



Kolonel Syamsulbahri Oemar. Ketua DPRD Sumatera Selatan 1971-1977. Fraksi ABRI. Putra asli Sumatera Selatan kelahiran Pagaralam, 27 Agustus 1927. Mendapat pendidikan HIS tahun 1935-1942. Melanjutkan se Mizohogakoeng tahun 1942 dan SMA LPPU tahun 1954-1965. Memulai pekerjaan sebagai Gyu Kambu Pagaralam pada masa Jepang 1942-1945. Komandan Desatesemen Brigade Garuda Merah Lubuk Linggau, 1948/1949. Jabatan militer terakhir sebagai Kasrem 42

Garuda Puti Jambi, 1969/1971. Terpilih sebagai anggota DPRD Sumsel hasil pemilihan 1971.



Kiagus Syafaruddin. Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan 1971-1977. Fraksi Golkar. Gelar Kiagus, keturunan asli Palembang diwariskan dari ayah. Beliau lahir di Curup, 2 Februari 1926. Mendapat pendidikan Vervolg School Curup, 1939. Melanjutkan Taman Siswa Kelas 7 di Palembang, 1942. Mengambil pendidikan SMUI Lubuk Linggau tahun 1947 dan SMAC di Palembang. Memulai karir sebagai pegawai Jawatan Penyediaan Bahan Makanan Rakyat (PMR) Keresidenan Palembang di Lubuk Linggau pada masa Revolusi Fisik.

Selanjutnya menjadi pegawai Dinas Peternakan Provinsi Sumatera Selatan. Menjadi Anggota MPRS 1963-1967 utusan Sumsel. Anggota DPRD-GR Sumsel 1966-1971. Terpilih sebagai anggota DPRD Sumsel hasil pemilihan 1971.



Drs. M. Darus Agap. Wakil Ketua DPRD Sumatera Selatan 1971-1977. Fraksi Parmusi. Kelahiran Lahat, 15 Desember 1936. Pendidikan Sekolah Rakyat Pagar Gunung, Lahat, 1949. Taman Dewasa (SM) 1952 dan Taman Guru (SGA) Yogyakarta tahun 1955. SMA Palembang 1960. Sarjana Muda FKIP Unsri 1963. Diploma University of Wellington, New Zealand, 1964. DAN Sarjana Pendidikan Jurusan Bahasa Inggris FKIP Unsri, 1970. Memulai karir sebagai guru Taman Dewasa

dan SGA Muhammadiyah Lahat, 1956. Mengajar di Taman Dewasa Palembang sambal kuliah, 1957-1963. 1965-1970 guru dan wakil direktur SHD/SPP Palembang sekaligus Dosen Luar Biasa di FKIP Unsri. Terpilih sebagai anggota DPRD Sumsel hasil pemilihan 1971.

Dalam perjalanannya DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1971-1977 telah terjadi beberapa pergantian anggota yang berhenti dengan hormat, masing-masing sdr. Drs. Aidil Fitri Syah DAN Ny. Hj. Rachmaniah Muchtar dengan diganti oleh anggota baru yakni Sdr. Achmad Boerlian dan Srd. Syaiful Hadin. Demikian pula pada tahun 1976 DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah kehilangan seorang anggota yaitu Sdr. Idris Baksin yang meninggal dunia karena operasi di

Muara Enim. Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1971-1977, sebagai berikut:

No	Nama	Sebab	Pengganti	Partai
1.	Drs. Aidil Fitri Syah	-	Syaiful Hadin	Golkar
2.	Ny. Hj. Rachmaniah Mochtar	-	Ahmad Boerlian	Golkar
3.	Idris Baksin	Wafat	-	

Selanjutnya pada awal tahun 1973, terjadi penyederhanaan partai politik ditingkat Pusat. Pada tanggal 5 Januari 1973 terbentuk Kelompok Persatuan Pembangunan gabungan dari empat partai yakni Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Nahdlatul Ulama (NU), dan Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Selanjutnya pada tanggal 11 Januari 1973 terbentuk kelompok Demokrasi Pembangunan yang merupakan gabungan dari enam partai utama yakni Partai Nasional Indonesia (PNI), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI), Musyawarah Rakyat Banyak (Murba), Partai Kristen Indonesia (Parkindo) dan Partai Katholik. Pada tanggal 24 Februari 1973 di Provinsi Sumatera Selatan juga dilakukan fusi dari partai-partai politik berdasar Undang-undang Nomor 3 tahun 1975.



Gambar 19. Foto Bersama Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1971-1977 di depan gedung lama DPRD Sumsel

Pada DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1971-1977, anggotanya diminta untuk duduk sebagai Badan Pertimbangan Daerah (BPD) Provinsi Sumatera Selatan. Adapun yang duduk di BPD Provinsi Sumatera Selatan periode 1971-1977 ini adalah:

1. Syamsulbachri Oemar
2. Kiagus Syafaruddin
3. Drs. M. Darus Agap
4. H. A. Rachman Djekamat

Dengan Sekretaris BPD Sumatera Selatan 1971-1977 adalah A. Hamid Wantjik, SH.



Gambar 20. Suasana Pemilihan Gubernur Sumsel 1973 di DPRD SS



Gambar 21. Pelantikan Periode Kedua Gubernur Sumsel 1973-1978, H. Asnawi Mangkualam di sidang Paripurna DPRD Sumsel 1971-1977

BAB 7

DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 1977-1982

Pada bab ini dibahas perjalanan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Hasil Pemilihan Umum 1977 sampai dengan menjelang Pemilihan Umum 1982 di Sumatera Selatan.

Keadaan Politik Menjelang Pengangkatan Anggota DPRD Sumatera Selatan, 1977-1982

Ciri penting Pemilihan Umum 1977 di Sumatera Selatan adalah menurunnya jumlah Organisasi Peserta Pemilu (OPP). Dari sepuluh OPP pada Pemilihan Umum 1971 menjadi 3 OPP pada Pemilihan Umum 1977. Ketiga Organisasi Peserta Pemilu (OPP) sudah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 mengenai Partai Politik dan Golkar.

Menjelang Pemilihan Umum 1977 terjadi perbedaan isu kampanye dari Pemilu 1971. Penyederhanaan partai politik, membuat isu Pemilihan Umum 1977 di Sumatera Selatan mengerucut pada perbedaan tajam antara kelompok Golongan Karya yang berorientasi pembangunan dengan kelompok partai politik dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang berorientasi ideologi.



Gambar 22. Organisasi Peserta Pemilihan Umum 1977

Isyu yang berhembus dalam Pemilihan Umum 1977 di Sumatera Selatan berkisar pada kemampuan dan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan roda pembangunan. Pada Pemilihan

Umum 1977, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Sumatera Selatan terlihat kompak terutama Nahdlatul Ulama. Mereka mengusung isu-isu ke-Islam-an dengan simbol tanda gambar Ka'bah sebagai lambang Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Ka'bah yang memiliki dua sisi sampingnya tegak lurus dari atas ke bawah mengirim pesan dan makna bagi warga Sumatera Selatan agar berposisi sama sekaligus sama rata. Para pemilih dan banyak warga Islam di Sumatera Selatan yang menitipkan suara politik ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pada Pemilu 1977, PDI mengusung tema-tema sebagai partai tersisihkan. Hal ini disebabkan secara fusi ketiga dibentuk PDI dalam perjalanan politiknya selalu dihadapkan pada berbagai masalah.

Golongan Karya di Sumatera Selatan melancarkan strategi pembangunan Orde Baru dalam melaksanakan dan menegakkan Pancasila dengan trilogi pembangunan. Trilogi ini meliputi:

1. Stabilitas politik dalam kelangsungan pembangunan
2. Pertumbuhan ekonomi tinggi
3. Pemerataan hasil pembangunan dalam memenuhi prinsip keadilan.

Golongan Karya mampu melakukan pembinaan dengan baik dan berjalan pesat dibandingkan partai-partai politik yang sudah memiliki tradisi dan mekanisme. Rakyat-rakyat di daerah pedesaan di Sumatera Selatan yang tidak terikat dengan berbagai organisasi fungsional mampu diikat secara formal dengan baik oleh Golongan Karya. Golongan Karya dalam Pemilihan Umum 1977 menampilkan diri sebagai organisasi kader dan menumbuhkan kelompok-kelompok profesi dan fungsional yang menjadi tulang punggung pembangunan Orde Baru.

Pada 1977, pemilihan umum ditujukan memilih DPR-RI Pusat, DPRD Tingkat 1 Provinsi Sumatera Selatan, dan DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya di Sumatera Selatan. Sistem Pemilihan Umum 1977 menganut sistem proporsional dengan stelsel daftar yang diikuti hanya tiga partai politik. Pada Pemilihan Umum 1977 dilaksanakan hak pilihnya kurang lebih 90 persen.

Organisasi penyelenggara di Sumatera Selatan dibentuk Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I (PPD I) Provinsi Sumatera Selatan. Panitia ini dibentuk secara bertingkat yakni, Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II di berbagai Kabupaten/Kotamadya Sumatera Selatan. Panitia Pemungutan Suara (PPS) diberbagai Kecamatan Sumatera Selatan. Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih) di berbagai Desa/Kelurahan Sumatera Selatan. Untuk melaksanakan pemungutan dan

penghitungan suara dibentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Selain itu, sejak Pemilihan Umum 1971, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) sudah diikuti dalam parlemen mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Sejak Pemilihan Umum 1977, ABRI membangkitkan kembali konsep Dwi Fungsi ABRI untuk memberi kesempatan yang luas kepada perwira tentara dalam berpartisipasi di bidang non-militer. Kebijakan ini bertujuan agar stabilitas politik tetap berjalan dengan baik. Melalui Dwi Fungsi ABRI, para perwira militer memegang posisi penting pada masa pemerintahan Orde Baru seperti menjadi walikota, gubernur, parlemen, duta besar, peradilan dan lain sebagainya.

Setelah Pemilu 1971, pemilu berikutnya baru dilaksanakan 6 tahun lebih, yakni Pemilu 1977. Setelah itu Pemilihan Umum berikutnya dilakukan terjadwal dan periodic sekali dalam 5 tahun. Pemungutan suara Pemilihan Umum tahun 1977 dilaksanakan tanggal 2 Mei 1977 secara serentak. Cara pembagian kursinya masih sama seperti pemilu sebelumnya, yaitu mengikuti ketentuan di daerah pemilihan. Pemilu 1977 berjalan dengan menerapkan empat asas, yaitu asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Pemilihan Umum di Sumatera Selatan dilakukan dengan pemilih terdaftar sebesar 1.962.674 jiwa. Pemilih yang melakukan hak pilihnya sebesar 1.825.352 atau sebesar 90 persen.

Struktur DPRD Provinsi Sumatera Selatan 1977-1982

Hasil Pemilihan Umum 1977 menempatkan Provinsi Sumatera Selatan memperoleh sepuluh anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Perwakilan Sumatera Selatan Periode 1977-1982, yakni:

No	Nama	Partai
1.	Drs. Achmad Laconi Sjamsuddin	Golongan Karya
2.	Tumbuh Semendawai, S.H.	Golongan Karya
3.	Oemar Ibrohi	Golongan Karya
4.	M. Samiono	Golongan Karya
5.	Ny. Hilma Arma	Golongan Karya
6.	Drs. A. Zaidan Djauhary	PPP
7.	Dr. H. Djaelani Naro, S.H.	PPP

8.	Drs. Ramly Nurhaty	PPP
9.	Ny. Hj. Syarkawi Mustafa	PPP
10.	H. Kemas Fachruddin	PDI

Sementara, berdasarkan hasil Pemilihan Umum 1977 diperoleh anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan Periode 1977-1982, sebagai berikut:

No	Nama	Partai
1.	Kiagus Syafaruddin	Golongan Karya
2.	H. M. Bakri	Golongan Karya
3.	A. Truman S. O. Bakri, SH	Golongan Karya
4.	M. Umar R. A.	Golongan Karya
5.	Zainal Abidin Ning	Golongan Karya
6.	H. Abdullah H. Seman	Golongan Karya
7.	H. M. Saleh Husin	Golongan Karya
8.	H. Sofyan Kenawas	Golongan Karya
9.	Ki. H. A. Murod	Golongan Karya
10.	Ki. H. Ahmad Dumiati Anwar	Golongan Karya
11.	K. H. M. Thoha	Golongan Karya
12.	A. Mukti Achmad	Golongan Karya
13.	Tarmizi Effendy, SH	Golongan Karya
14.	M. Mursyid	Golongan Karya
15.	Ny. Teodora Tatipata Latuny	Golongan Karya
16.	Ny. H. St. Mastoh Umar	Golongan Karya
17.	Ahmad Natar	Golongan Karya
18.	Drs. Yusman Haris	Golongan Karya
19.	Drs. M. Darus Agap	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
20.	Masagus Yahya Agus	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
21.	H. Tabrani Hanany, BA	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
22.	H. Djumahat H. Radjim	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
23.	Bas M. Amin	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24.	Taufiq Abdullah Gathmyr	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
25.	H. Rusdhy Cosim, BA	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
26.	Alimarwan Hanan, BA.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
27.	Muhar Madjid	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
28.	M. A. H. Mustafa Saleh	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
29.	Ny. Siti Rumbiyah	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
30.	Arasman Karim	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
31.	M. Akib Aman	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
32.	Mahmud Pikir	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
33.	H. M. Saleh Hoesin	Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
34.	M. Zaini Saleh	Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
35.	A. Badaruddin	ABRI
36.	H. M. Noertegoen	ABRI
37.	Maliki Mangkuraja	ABRI

38.	H. Hamid Sarim	ABRI
39.	Syahabuddin	ABRI
40.	Soenandar	ABRI

Pimpinan DPRD Tk 1 Provinsi Sumatera Selatan Hasil Pemilu 1977, dengan susunan, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Partai
1.	M. Umar RA	Ketua	Golkar
2.	A. Badaruddin	Wakil Ketua	ABRI
3.	M. A. H. Mustafa Saleh H. Tabrani Hanani, BA	Wakil Ketua Diganti tahun 1980	PPP PPP

Dalam perjalanannya DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1977-1982 telah terjadi beberapa pergantian anggota yang berhenti dengan hormat atau pergantian antar waktu, masing-masing seperti tabel dibawah ini:

No	Nama	Pengganti	Partai
1.	M. Akib Aman	Mustafa Thenar	PPP
2.	Mgs Yahya Agus	Ibrahim Hamid	PPP
3.	H. Djumahat H. Radjim	Bahusin RS	PPP
4.	M. A. H. Mustafa Saleh	K. H. Muhamad Sjadjari	PPP
5.	Tabrani Hanani	Sogian Siwang	PPP
6.	Muhar Majid	Hayatuddin	PPP
7.	Ny. Teodora Tatipata Latuny	Ny. Siti Isnaniah Nuh Macan	Golkar
8.	H. Hamid Sarim	Mayor Polisi Azhar Oedin	ABRI

Pada DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1977-1982, anggotanya sebagai Badan Pertimbangan Daerah (BPD) Provinsi Sumatera Selatan. Adapun yang duduk di BPD Provinsi Sumatera Selatan periode 1977-1982 ini adalah:

1. M. Umar R. A.
2. Achmad Badaruddin
3. M. H. Mustofa Saleh (diganti oleh H. Thabrani Hanani BA.)
4. M. Yusuf Basir

Dengan Sekretaris BPD Sumatera Selatan 1977-1982 adalah A. Hamid Wantjik, SH.

Hasil-hasil yang dicapai DPRD Sumatera Selatan, 1977-1982

Pada bulan April 1978, Gubernur Sumatera Selatan Asnawi Mangkualam mengakhiri masa jabatannya. Tugas DPRD Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan pemilihan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 1978-1983. DPRD Provinsi Sumatera Selatan melakukan Sidang Paripurna Khusus pada tanggal 31 Juli 1978. Pada sidang ini akhirnya anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan membuat keputusan pemilihan calon Gubernur Sumatera Selatan, sebagai berikut:

No	Nama Calon	Dukungan
1.	Brigjen TNI AD (Pur) H. Sainan Sagiman	27 suara
2.	Drs. Sarufi Ganap	8 suara
3.	Drs. Rusdi Abdullah Pekaya	4 suara

Daftar tiga calon Gubernur Sumatera Selatan dikirim ke Pemerintah Pusat. Akhirnya ditetapkan Brigadir Jenderal TNI AD (Pur) H. Sainan Sagiman sebagai Gubernur Sumatera Selatan Periode 1978 – 1983. Pada tanggal 12 September 1978 Brigjen TNI AD (Pur) H. Sainan Sagiman dilantik sebagai Gubernur Sumatera Selatan berdasar Keputusan Presiden Republik Indonesia.

Pada tahun 1980 dan 1982 atas usul DPRD Provinsi Sumatera Selatan dibentuk tiga kota administratif baru di Sumatera Selatan, yakni Lubuk Linggau, Baturaja dan Prabumulih. Pada tanggal 30 Oktober 1981 Kota Lubuk Linggau dengan walikota pertama, Taufik Rahman, SH diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Amir Machmud. Pada tahun 1982 dilakukan pembentukan Pada tanggal 22 Juni 1982 Kota Administratif Prabumulih dengan walikota pertama, Drs. Syukur Bahaudin. Sedangkan pada tanggal 20 Agustus 1982 dibentuk Kota Administratif Baturaja dengan walikota pertama, Arifin Boestoeri, SH. Kedua kota ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Soedharmono, SH.

BAB 8

DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 1982-1987

Bab ini melihat perjalanan DPRD Provinsi Sumatera Selatan hasil Pemilihan Umum 1982. DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode ini ditandai dengan mulai mengakarkan dan kuat Golongan Karya pada masa Orde Baru.

Keadaan Politik Menjelang Pengangkatan Anggota DPRD Sumatera Selatan, 1982-1987

Pemilihan umum keempat tahun 1982, dibawah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Landasan hukum bagi penyelenggaraan pemilu keempat diperkuat dengan Tap MPR Nomor VII/MPR/1978. Mekanisme penyelenggaraannya diatur dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Pemilihan Umum serta UU Nomor 3 tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 1982 di Provinsi Sumatera Selatan dikatakan berjalan aman, tertib dan lancar. Hasil-hasil suara dan prosentase dalam Pemilihan Umum 1982 yang dicapai oleh masing-masing Organisasi Peserta Pemilu (OPP) 1982 di Sumatera Selatan, yakni:

No	Parpol	Perolehan			
		DPR-RI		DPRD Sumsel	
		%	Kursi	%	Kursi
1.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	38,05	4	38,11	12
2.	Golongan Karya	56,03	6	56,06	18
3.	Partai Demokrasi Indonesia (PDI)	5,92	1	5,83	2
Jumlah		100	11	100	32

Hasil Pemilihan Umum 1982 menempatkan Provinsi Sumatera Selatan memperoleh kenaikan satu kursi, dari sepuluh pada Pemilu 1977 menjadi sebelas pada Pemilu 1982. Adapun anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR-RI) Periode 1982-1987 Perwakilan Sumatera Selatan Hasil Pemilihan Umum 1982, yakni:

No	Nama	Partai
1.	A. Truman S. O. Bakri, SH	Golongan Karya
2.	Mohammad Hatta Mustafa, SH	Golongan Karya
3.	Ny. R. A. Tuty Zahra Hamid, SH	Golongan Karya
4.	C. H. Muhammad Muas	Golongan Karya
5.	Drs. H. Abdul Chalik	Golongan Karya
6.	Sulaiman Amin	Golongan Karya
7.	Drs. Ramly Nurhaty	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
8.	H. Kemas Badaruddin	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
9.	Muhar Madjid	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
10.	Drs. H. Muhammad Yunus Umar	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11.	H. Kemas Fachruddin	Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Struktur dan Anggota DPRD Sumatera Selatan, 1982-1987

Sementara, berdasarkan hasil Pemilihan Umum 1982 diperoleh anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan Periode 1982-1987, sebagai berikut:

No	Nama	Partai
1.	Kiagus Syafaruddin	Golongan Karya
2.	Zainal Abidin Ning	Golongan Karya
3.	Ahmad Natar	Golongan Karya
4.	A. Mukti Achmad	Golongan Karya
5.	H. Sofyan Kenawas	Golongan Karya
6.	Drs. Yusman Haris	Golongan Karya
7.	Mohammad Moersyid	Golongan Karya
8.	Achmad Badaruddin	Golongan Karya
9.	Ny. Sumarmie Trajumas Rozak	Golongan Karya
10.	Ny. Iskandar Pratikno	Golongan Karya
11.	Fatmah Oemar	Golongan Karya
12.	H. Abdul Lani	Golongan Karya
13.	H. Romlie Rozak	Golongan Karya
14.	H. A. Somad Fabil Bunayu SH	Golongan Karya
15.	As'ad Diwiryo	Golongan Karya
16.	M. Sani Indawan, SH	Golongan Karya
17.	Zaidan Zen, BA	Golongan Karya
18.	Soenardi	Golongan Karya
19.	Drs. M. Darus Agap	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
20.	Alimarwan Hanan, BA	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
21.	Taufiq Abdullah Gathmyr	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
22.	H. Rusdhy Cosim, BA	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
23.	Mahmud Pikir	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
24.	Ki. Yusuf Umar	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

25.	Bermawi Alzan	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
26.	Hakky Alian B. A.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
27.	Drs. Ghufran M. N.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
28.	Drs. Muharam Syaribi	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
29.	Tjek Roni Tjek Ollah	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
30.	M. Husin MS	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
31.	H. Teguh Syamsuddin	Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
32.	Taslim Hakky Cholib	Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
33.	Letkol. Inf. R. A. Karnen Adikusumah	ABRI
34.	Letkol. Inf. H. A. Colyubi	ABRI
35.	Letkol. Pol (Pur) Maliki Mangkuraja	ABRI
36.	Mayor CKU. H. Kodrat	ABRI
37.	Mayor Mariner Petrus Soeprapto	ABRI
38.	Kapten DK. M. Diat	ABRI
39.	K. H. Abdul Murod	Diangkat
40.	K. Achmad Mattjik	Diangkat

Pimpinan DPRD Tk 1 Provinsi Sumatera Selatan Periode 1982-1987 hasil Pemilu 1977, dengan susunan, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Partai
1.	H. Zainal Abidin Ning	Ketua	Golkar
2.	R. A. Karnen Adikusumah	Wakil Ketua	ABRI
3.	Drs. H. M. Darus Agap	Wakil Ketua	PPP



H. Zainal Abidin Ning. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1982-1987. Fraksi Golongan Karya. Kelahiran Tebing Tinggi, Lahat, 25 Juli 1922. Pendidikan Algemeene Middelbare School (AMS) B di Jakarta dan Middelbare Opleiding voor Inlandsche Ambtenaren (Mosvia) di Bandung. Pada asa Jepang mendapat pendidikan Militer Gyugun dengan pangkat Cyu Soi (Letnan Dua). Pangkat Mayor (1946) menjadi Komandan TKR Pagar Alam. Pangkat Letnan Kolonel (1946) menjabat sebagai Komandan Resimen 12 Baturaja dan Komanda Resimen14 Bengkulu sepanjang 1946. Kepala staf

Brigade Pertempuran Prabumulih 1947. Menjadi Sekretaris Gubernur Sumsel 1952. Bupati Musi Rawas 1957-1964. Menjadi anggota parlemen di Sumsel sejak 1955-1958, 1968-1970, 1977-1982. Dan terpilih kembali sebagai anggota DPRD hasil pemilihan umum 1982.



R. A. Karnaen Adikusumah. Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1982-1987. Fraksi ABRI. Kelahiran Ciamis, Jawa Barat. Pendidikan Akademi Militer Nasional (AMN) Magelang angkatan 1962. Jabatan militer awal ditempatkan sebagai Komandan Peleton Yonif 143 Lahat Kodam IV/Sriwijaya, 1963-1964. Kemudian berpentalang di jabatan militer di Pulau Kalimantan. Terakhir sebagai Komandan KODIM 0413 Pangkal Pinang KODAM

IV/Sriwijaya, 1979-1982. Dan terpilih sebagai perwakilan ABRI DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1982-1987.

Pada masa ini H. Sainan Sainan kembali dipilih menjadi Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. Beliau mengungguli dua pesaing lain, yakni Drs. Ibrahim Somad dan Drs. M. Junus Mansyah. pada tanggal 12 September 1983 Gubernur H. Sainan Sagiman dilanti oleh Menteri Dalam Negeri, Soepardjo Roestam. Selanjutnya Gubernur Sainan Sagiman menunjuk Drs. H. M. Arma menjadi wakil gubernur. Jabatan wakil gubernur ini sudah lama tidak dijabat, sejak tahun 1968 pada masa M. Ali Amin, SH.



Gambar 23. Pembacaan SK nama-nama Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan hasil Pemilihan Umum 1982 oleh Sekretaris Dewan HA. Hamid Wantjik, S.H.

Dalam perjalanannya DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1982-1987 telah terjadi beberapa pergantian anggota yang berhenti dengan hormat atau pergantian antar waktu, masing-masing seperti tabel dibawah ini:

No	Nama	Sebab	Pengganti	Partai
1.	HM. Tegoeh Syamsuddin	Meninggal Dunia	Hasanuddin Dollahfel	PDI
2.	Soenardi	Meninggal Dunia	-	Golkar



Gambar 24. Penutupan Sidang Paripurna Istimewa DPRD Sumatera Selatan oleh Ketua Periode sebelumnya, M. Umar RA sebelum diserahkan palu pimpinan kepada K.H. Yusuf Umar pimpinan sementara DPRD Sumatera Selatan Hasil Pemilu 1982.

Pada DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1982-1987, anggotanya sebagai Badan Pertimbangan Daerah (BPD) Provinsi Sumatera Selatan. Adapun yang duduk di BPD Provinsi Sumatera Selatan periode 1982-1987 ini adalah:

1. H. Zainal Abidin Ning
2. Drs. H. M. Darus Agap
3. R. Karnaen Adikusumah
4. H. M. Tegoeh Syamsuddin
5. HA. Hamad Wantjik, S.H. (Sekwan)

Dengan Sekretaris BPD Sumatera Selatan 1982-1987 adalah A. Hamid Wantjik, SH.



Gambar 25. Penandatanganan Berita Acara Pelantikan Pimpinan DPRD Sumatera Selatan hasil Pemilu 1982 oleh Gubernur H. Sainan Sagiman



Gambar 26. Pengambilan Sumpah BPD oleh Gubernur H. Sainan Sagiman

Hasil-hasil yang dicapai DPRD Sumatera Selatan, 1982-1987

Setelah terpilihnya anggota DPRD Daerah Tingkat 1 Provinsi Sumatera Selatan hasil Pemilihan Umum 1982. Selanjutnya, dibentuk

alat kelengkapan dewan pada awalnya terpilih HA. Hamad Wantjik, S.H. sebagai Sekretaris Dewan. Namun kemudian yang bersangkutan ditunjuk sebagai Irwilprop sehingga digantikan oleh Drs. Wibowo Widyasusanto. Beliau ditunjuk sebagai unsur Pemerintah Daerah, DPRD Provinsi Sumatera Selatan turut serta mengawasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan. Pembangunan dan pembinaan masyarakat Sumatera Selatan diprogramkan melalui kunjungan kerja secara rutin dan periodik.



Gambar 27. Pelantikan Periode Kedua H. Sainan Sagiman sebagai Gubernur Sumatera Selatan 1983-1988 dalam Sidang Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sumatera Selatan 1982-1987 oleh Menteri Dalam Negeri RI

DPRD Daerah Tingkat 1 Provinsi Sumatera Selatan periode ini juga dihadapkan dengan persoalan penghapusan Pemerintahan Marga di Provinsi Sumatera Selatan. Berdasarkan laporan Pemerintah Daerah Tingkat 1 Provinsi Sumatera Selatan dijelaskan bahwa tidak adanya hambatan dalam pelaksanaan PP No. 5 Tahun 1979 disebabkan bahwa Marga atau Pasirah yang sudah ada sejak masa Kesultanan Palembang sampai pelaksanaan PP No. 5 tahun 1979 belum ada perubahan yang berarti, sehingga kekayaan desa dan sumber kekayaan desa yang berlaku masa itu masih tetap berjalan sebagaimana biasa. Oleh sebabnya, missal lebak lebuk, delta, pemungutan pasir dan pancung alas yang semula pendapatan marga dijadikan dan masuk ke kas desa.

DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1982-1987 juga melakukan realisasi keinginan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan untuk menetapkan Sultan Mahimud Badaruddin II sebagai Pahlawan Nasional. DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1982-

1987 selanjutnya membentuk Tim Pelengkap Data-Data Kepahlawanan Sultan Mahmud Badaruddin II. Tim ini terdiri dari Zainal Abidin Ning (Ketua), H. Rusdi Cosim, BA. (Anggota), Drs. H.M. Alhaddy Haq (Anggota), HA. Hamid Wantjik (Anggota), dan Drs. H.A. Hijazi (Anggota).

Tim bentukan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1982-1987 menghadap Menteri Sosial Republik Indonesia dalam melengkapi data perjuangan, kesetiaan dan tindak kepahlawanan Sultan Mahmud Badaruddin II dalam memimpin pertempuran dengan penjajah pada perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia di daerah Sumatera Selatan.



Gambar 28. Makam Sultan Mahmud Badaruddin II di Kampung Palembang, Ternate tahun 1983

Pada pengusulan Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai Pahlawan Nasional, Tim bentukan DPRD Provinsi Sumatera Selatan juga berkunjung ke Kampung Palembang di Ternate. Pada kunjungan tanggal 10 Desember 1983, tim melakukan kegiatan dengan melihat keadaan fisik pemakaman Sultan Mahmud Badaruddin yang wafat pada tahun 1852 setelah pembuangan tahun 1822 di Ternate. Selain itu, Tim mengadakan wawancara dengan Pemerintahan Daerah setempat, para zuriat Sultan yang masih hidup, dan penduduk asli Ternate yang dianggap mengetahui riwayat sultan.

Atas usaha Tim bentukan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1982-1987 dan masyarakat Sumatera Selatan, maka pada tanggal 29 Oktober 1984 keluar keputusan Presiden untuk mengangkat

Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai Pahlawan Nasional. Surat Keputusan ini bernomor 063/TK/1984.



Gambar 29. Gedung Baru DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan ciri arsitektur Rumah Limas Sumatera Selatan yang anggun

Pada tanggal 1 Februari 1987, diakhir masa jabatannya DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1982-1987 menempati gedung baru. Gedung baru ini merupakan ex. Sriwijaya Fair Kompleks Kampus di Jalan Kapten A. Rivai, Palembang. Perpindahan gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan ini agar memudahkan mobilisasi dan kerja dewan di mana jumlah anggota dewan sudah mulai banyak dari waktu awal masa orde lama. Karena gedung lama di belakang kantor Gubernur Sumatera Selatan dirasakan tidak memungkinkan lagi untuk dibangun lebih besar.

Gedung baru DPRD Provinsi Sumatera Selatan memiliki bentuk unik dengan arsitektur, Rumah Limas, rumah tradisional Sumatera Selatan. Arsitektur rumah tradisional ini sebagai bentuk kepedulian dewan dalam melestarikan ciri rumah tradisional sekaligus sebagai show window dalam pendorongan pembangunan gedung bercirikan rumah limas Sumatera Selatan yang anggun. Gedung baru dilengkapi dengan lima bangun untuk gedung fraksi, gedung komisi-komisi, gedung panitia anggaran, gedung paripurna, dan gedung musholla.

Penempatan gedung baru ini menjadikan dorongan dan semangat para wakil-wakil rakyat untuk selalu mengumandangkan

aspirasi masyarakat Provinsi Sumatera Selatan. Tugas DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagai bagian dari unsur Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang Legislatif.

DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1982-1987 sangat produktif karena menghasilkan banyak Peraturan Daerah (Perda). Salah satunya Perda No. 1 Tahun 1982 tanggal 6 Februari 1982 tentang Pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) di Sumatera Selatan. Perda No. 4 Tahun 1983 tanggal 22 Januari 1983 tentang Kedudukan dan Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala Dusun.

BAB 9

DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 1987-1992

Bab ini menelusik DPRD Provinsi Sumatera Selatan hasil Pemilihan Umum 1987. DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 1987-1992 ini menurunnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akibat menguatnya ideologi Pancasila. PPP harus mengubah asasnya dari Islam menjadi Pancasila serta dari lambang Kabah menjadi lambang bintang. Akibatnya Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sebagai partai peserta pemilu lainnya yang mewakili kaum nasionalis mendapat keuntungan besar dari anjlok dan penggemosan suara PPP.

Keadaan Politik Menjelang Pengangkatan Anggota DPRD Sumatera Selatan, 1987-1992

Pemilihan Umum Tahun 1987 dilakukan dengan perubahan beberapa Undang-Undang oleh Pemerintah Pusat. Pada tahun 1985, sebelum pelaksanaan Pemilihan Umum 1987 keluar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 yang merubah tentang Pemilu. Pada undang-undang sebelumnya, jika Dewan Pertimbangan Lembaga Pemilihan Umum dipegang oleh Menteri Dalam Negeri. Pada undang-undang yang baru, Dewan Pertimbangan, selain dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri juga ditambah sejumlah menteri dan panglima ABRI. Peran birokrat dan militer menjadi semakin terlihat sebagai pengendali Pemilu 1987. Dampak besar dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1985 tentang Pemilu yang baru, menyebabkan Lembaga Pemilihan Umum akhirnya menjadi lembaga yang memihak, bukan lembaga yang seharusnya netral.

Selanjutnya keluar juga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1985. Pada undang-undang ini asas partai politik dan Golongan Karya disamakan yaitu Pancasila. Akibatnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) harus mengubah asasnya dari Islam menjadi Pancasila. Selain itu, lambang Partai Persatuan Pembangunan (PPP) harus mengalami perubahan dari lambang Kabah menjadi lambang bintang. Kondisi ini Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi partai yang paling

dirugikan akibat kewajiban asas tunggal Pancasila dan penggantian logo.



Gambar 30. Organisasi Peserta Pemilihan Umum 1987

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga menjadi partai politik yang banyak mengalami pengembisan suara menjelang Pemilihan Umum 1987 salah satu lainnya karena Partai Persatuan Pembangunan (PPP) harus kehilangan banyak suara lantaran hengkangnya Nahdlatul Ulama (NU). Padahal, pada pemilu-pemilu sebelumnya, Nahdlatul Ulama (NU) merupakan basis massa penting bagi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), termasuk di Sumatera Selatan.

Pada Pemilihan Umum, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) sebagai partai peserta pemilu lainnya yang mewakili kaum nasionalis dan non-Islam. Mendapat keuntungan besar dari anjlok dan pengembosan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Pemilu Tahun 1987. Walau dalam realitanya, partai berlambang kepala banteng ini tetap saja berada di urutan ketiga atau terakhir. Namun perolehan suara dalam Pemilihan Umum 1987 dan jatah kursi, baik di DPR-RI maupun DPRD Provinsi Sumatera Selatan mengalami pelonjokan tajam.

Pada Pemilihan Umum 1987, Orde Baru yang menggalangi Golongan Karya mengerahkan segala cara agar dapat mengamankan suara Golongan Karya sekaligus kembali mengantarkan Soeharto ke puncak kekuasaan. Rezim Orde Baru selanjutnya juga menerapkan aturan yang berpengaruh terhadap Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang menguntungkan Golongan Karya. Kebijakan ini misalnya larangan pembentukan cabang partai di bawah tingkat provinsi, pengurangan masa kampanye dari sebelumnya 45 hari menjadi 25 hari, hingga pelarangan kritik terhadap kebijakan pemerintah dalam isu Kampanye Pemilihan Umum 1987.

Pemilihan Umum Tahun 1987

Pemungutan suara Pemilihan Umum untuk anggota legislatif dilakukan secara serentak pada tanggal 23 April 1987, termasuk di Sumatera Selatan. Pemilihan Umum 1987, tercatat sebagai pemilu keempat dalam rezim pemerintahan Orde Baru. Pemilu 1987 dilaksanakan dengan asas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (Luber).



Gambar 31. Jurkam Golkar dalam Kampanye Pemilu 1987 di Lapangan Hatta Palembang

Hasil Pemilihan Umum 1987 di Sumatera Selatan ditandai dengan kemerosotan terbesar Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Pada suara untuk pemilihan anggota legislatif di DPR-RI Perwakilan Sumatera Selatan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), harus kehilangan 2 kursi dibandingkan Pemilu 1982, sehingga pada pemilu 1987 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hanya mendapat 2 kursi. Anjloknya jatah suara hasil Pemilihan Umum 1987 juga berdampak besar pada perolehan kursi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Jika pada Pemilihan Umum 1982 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memperoleh 12 kursi. Namun pada Pemilihan Umum 1987 Partai Persatuan

Pembangunan (PPP) hanya mendapatkan jatah 7 kursi. Penyebab merosotnya Partai Persatuan Pembangunan (PPP), antara lain karena tidak boleh lagi partai itu memakai asas Islam dan diubahnya lambang dari Ka'bah ke lambang Bintang dan terjadinya penggembosan oleh tokoh-tokoh Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari unsur Nahdlatul Ulama (NU).

Pada Pemilihan Umum 1987, Golongan Karya mengalami kenaikan suara dan jatah kursi di DPR-RI. Pada Pemilihan Umum 1982, Golongan Karya menempatkan wakil dari Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 6 kursi. Namun pada Pemilihan Umum 1987, jatah kursi Golongan Karya di DPR-RI naik menjadi 9 kursi. Sedangkan pada keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan hasil Pemilihan Umum 1987, jatah kursi Golongan Karya mendapat jatah sebanyak 25 kursi, lebih dari 60 persen kursi di DPRD Sumatera Selatan. Jumlah jatah kursi ini meningkat dari Pemilihan Umum 1982 yang mendapatkan kursi sebanyak 18 kursi.

Partai ketiga, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) mendapat limpahan positif dari anjloknya suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Pemilihan Umum 1987. Jika pada Pemilihan Umum 1982, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) hanya mendapatkan 1 kursi di DPR-RI mewakili Sumatera Selatan. Namun Pemilihan Umum 1987 jatah kursi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dipusat melonjak menjadi 2 kursi. Pelonjakkan suara dan jatah kursi di DPRD Sumatera Selatan pada Partai Demokrasi Indonesia (PDI) juga terjadi. Jika pada Pemilihan Umum 1982 hanya mendapatkan kursi sebesar 2 kursi. Pemilihan Umum 1987 jatah kursi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di DPRD Sumatera Selatan naik menjadi sebesar 4 kursi.

Pada Pemilihan Umum 1987, penghargaan juga diberikan pada Gubernur Sumatera Selatan, Sainan Sagiman yang selain melanjutkan pembangunan di Sumatera Selatan. Namun mendekati akhir jabatan masa keduanya mampu melaksanakan tanggungjawab dalam mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum 1987.

Nama-Nama anggota DPR-RI Periode 1987-1992 Perwakilan Sumatera Selatan terpilih hasil Pemilihan Umum 1987, yakni:

No	Nama	Partai
1.	Mohammad Hatta Mustafa, SH	Golongan Karya
2.	Ny. R. A. Tuty Zahra Hamid, SH	Golongan Karya
3.	C. H. Muhammad Muas	Golongan Karya
4.	Ir. H. Indra Bambang Utoyo, SE	Golongan Karya

5.	H. Modh. Taslim Ibrahim	Golongan Karya
6	Harry Soewondo, SH	Golongan Karya
7.	Ny. Wulanrugian M. Ratulangie Sudjoko	Golongan Karya
8.	H. Amir Yudowinarno	Golongan Karya
9.	H. Ahmad Natar	Golongan Karya
10.	Muhar Madjid	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11.	Drs. Suandi Hambali	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
12.	H. Kemas Fachruddin	Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
13.	M. Taufiq Kemas	Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Sementara nama-nama anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1987-1992 Hasil Pemilihan Umum 1992, sebagai berikut:

No	Nama	Partai
1.	H. Zainal Abidin Ning	Golongan Karya
2.	Achmad Badaruddin	Golongan Karya
3.	As'ad Diwiryoyo	Golongan Karya
4.	M. Sani Indawan, SH	Golongan Karya
5.	Drs. Yusman Haris	Golongan Karya
6.	H. Abdul Lani	Golongan Karya
7.	M. Diat	Golongan Karya
8.	H. A. Colyubi	Golongan Karya
9.	Drs. Noviarman Kailani	Golongan Karya
10.	Dr. H. Burlian Abdullah	Golongan Karya
11.	H. A. Wahab Sarobu	Golongan Karya
12.	Ny. Triyati Ibrahim Somad	Golongan Karya
13.	Ny. H. Nurhanah Latief Rais	Golongan Karya
14.	Ny. Dra. Zamroh Satar	Golongan Karya
15.	H. Rokian Cik Ubir	Golongan Karya
16.	Drs. H. Achmad Hijazi	Golongan Karya
17.	H. A. K. Hudoyo	Golongan Karya
18.	Drs. H. Azom Romli	Golongan Karya
19.	Ir. Achmad Syafriar	Golongan Karya
20.	A. Hamid Tuah	Golongan Karya
21.	H. M. Ikhsan	Golongan Karya
22.	Arifin Paie	Golongan Karya
23.	Hafni AS	Golongan Karya
24.	M. H. Ritonga	Golongan Karya
25.	Ramli Sutanegara	Golongan Karya
26.	Alimarwan Hanan, BA	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
27.	Tjek Roni Tjek Ollah, BBA	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
28.	Mahmud Pikir	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
29.	Drs. Muharam Syaribi	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
30.	Mohammad Natsir Jakfar	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

31.	Drs. Anwar Malik	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
32.	Arasman	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
33.	Taslim Hakky Cholib	Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
34.	Hasanuddin Dolah Pei	Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
35.	B. M. Nainggolan	Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
36.	J. M. Sihombing	Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
37.	Mayor CKU. H. Kodrat	ABRI
38.	Mayor Mariner Petrus Soeprapto	ABRI
39.	Mohammad Amin, BA	ABRI
40.	Muhammad Zaini	ABRI
41.	Ahmad Tibyan, SH	ABRI
42.	Aliruddin, SH	ABRI
43.	Moelyadi	ABRI
44.	Karsidi, SH	ABRI

Pimpinan DPRD Tk 1 Provinsi Sumatera Selatan Periode 1987-1992 hasil Pemilu 1987, dengan susunan, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Partai
1.	H. Zainal Abidin Ning	Ketua	Golkar
2.	Muhammad Zaini	Wakil Ketua	ABRI
3.	Alimarwan Hanan, BA	Wakil Ketua	PPP

Pada DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1987-1992, anggotanya sebagai Badan Pertimbangan Daerah (BPD) Provinsi Sumatera Selatan. Adapun yang duduk di BPD Provinsi Sumatera Selatan periode 1987-1992 ini adalah:

1. H. Zainal Abidin Ning
2. Alimarwan Hanan, SH
3. M. Zaini
4. Taslim Hakki Chalik

Dengan Sekretaris BPD Sumatera Selatan 1987-1992 adalah Drs. Wibowo Widyasusanto yang menjalankan tugas sampai Oktober 1991 selanjutnya digantikan oleh Drs. Abdullah Makmun.



Gambar 32. Peresmian Pembangunan Monumen Perjuangan Rakyat (Monpera) tahun 1988 masa DPRD Sumatera Selatan Periode 1988-1993

Pada pengujung tahun 1988, H. Sainan Sagiman mengakhiri jabatan sebagai Gubernur Sumatera Selatan. DPRD Provinsi Sumatera Selatan mengadakan rapat pleno untuk memilih calon Gubernur Sumatera Selatan Periode 1988-1993, yakni:

No	Nama	Jabatan saat itu
1.	Brigjen H. Ramli Hasan Basri	TNI Aktif
2.	H. Nung Rozali, SH	Assisten I Sekwilda Sumatera Selatan
3.	H. Idroes Ahmad	Kepala Diklat Provinsi Sumatera Selatan

Pemilihan gubernur ini dilakukan langsung oleh anggota-anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan hasil Brigjen H. Ramli Hasan Basri meraih suara terbanyak dan terpilih sebagai Gubernur Sumatera Selatan. Pada tanggal 12 September 1988 H. Ramli Hasan Basri dilantik sebagai Gubernur Sumatera Selatan oleh Menteri Dalam Negeri, Rudini.

Hasil-hasil yang Dicapai DPRD Sumatera Selatan 1987-1992

Pada masa kerja DPRD Provinsi Sumatera Selatan 1987-1992 dimulai usaha menggeliatkan kawasan Jakabaring. Pemerintah Daerah Sumatera Selatan, lewat Gubernur Ramli Hasan Basri (1988-1998) bersama Siti Hardijanti Rukmana alias Mbak Tutut, putri sulung Soeharto, menginginkan Jakabaring menjadi sebuah pusat perkotaan dan perkantoran. Dengan dukungan DPRD Sumsel, impian Ramli, kawasan hutan-rawa itu hendak disulap menjadi kawasan pusat perkantoran dan pusat niaga sebagaimana yang terletak di kawasan Seberang Ilir

Untuk mewujudkan proyek besar tersebut, pemerintah daerah itu mulai mereklamasi kawasan Jakabaring. Sampai tahun 1991, semua lahan di Jakabaring telah diambil-alih pemerintah. Sampai titik ini, Jakabaring mulai menampakkan tanda-tanda akan menggeliat. Apalagi, Rosihan Arsyad, Gubernur Sumatera Selatan pada periode 1998-2003 berhasil meyakinkan Jakarta dan DPRD Sumsel untuk menggelar Pekan Olahraga Nasional XVI-2004.

Pada masa Arsyad berkuasa, di Jakabaring dimulai pembangunan sejumlah gelanggang olahraga. Syahril Oesman, yang memimpin daerah itu pada tahun 2004-2009 menggantikan Arsyad, lalu melanjutkan membangun Jakabaring, hingga kini Jakabaring menjadi pusat olahraga, pusat bisnis dan pusat perkantoran.

BAB 10

DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 1992-1997

Bab ini membahas DPRD Provinsi Sumatera Selatan hasil Pemilihan Umum 1992. Pemilihan Umum 1992 menerapkan pengawasan melekat pada litsus (Penelitian khusus) terhadap pemilih dan yang dipilih pada keterlibatan baik langsung maupun tidak langsung dalam peristiwa G-30-S/PKI termasuk di Sumatera Selatan.

Keadaan politik menjelang Pengangkatan Anggota DPRD Sumatera Selatan, 1992-1997

Keadaan politik menjelang Pemilihan Umum 1992, ditandai dengan akan berakhirnya masa jabatan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, H. Ramli Hasan Basri. Masa jabatan Beliau akan berakhir pada bulan September 1993. Namun, sebelum Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, H. Ramli Hasan Basri mengakhiri masa jabatan tersebut. Beliau berusaha mensukseskan Pemilihan Umum tahun 1992.

Suasana menjelang Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, pada dasarnya semua peserta pemilu, baik Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya, maupun Partai Demokrasi Indonesia (PDI) harus memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam peraturan Pemilihan Umum 1992. Peraturan ini berpedoman bahwa calon legislatif yang akan dipilih dan duduk di DPRD Provinsi Sumatera Selatan, antara lain:

1. Harus warganegara Indonesia
2. Setia kepada Pancasila
3. Tidak terlibat G 30 S/PKI
4. Tidak sedang dicabut hak pilihnya
5. Tidak sedang dipidana
6. Sehat jiwanya
7. Terdaftar sebagai pemilih
8. Dicalonkan oleh organisasi peserta pemilu (OPP)
9. Memenuhi prosedur pencalonan.

Pada prakteknya menjelang Pemilihan Umum 1992, walau ketentuan di atas pada umumnya sudah terpenuhi. Namun, satu hal

penting yakni kebanyakan hubungan antara si calon dengan rakyat yang diwakilinya kurang dipenuhi. Kondisi ini diakibatkan para calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang dijadikan calon OPP, kebanyakan bukan berasal dari daerah pemilihannya sendiri. Sehingga para calon tersebut, umumnya kurang begitu dikenal sekaligus tidak mengenal rakyat dari daerah pemilihannya. Situasi seperti itu hampir semua terlihat dalam partai politik peserta Pemilihan Umum 1992.

Pemilihan umum (pemilu) di masa pemerintahan Orde Baru tercatat digelar 5 kali, yakni pada 1977, 1982, 1987, 1992, dan terakhir pada 1997. Saat itu pemerintahan yang dipimpin Presiden Suharto menerapkan penyederhanaan atau penggabungan (fusi) partai politik. Hal itu ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Saat itu ditetapkan hanya ada 2 partai politik peserta pemilu.

Pertama adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan penggabungan dari NU, Parmusi, Perti, dan PSII. Lalu ada Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan fusi dari PNI, Parkindo, Partai Katolik, Partai IPKI, dan Partai Murba. Sedangkan Golongan Karya atau Golkar tidak dikategorikan sebagai partai politik, tetapi ikut mendulang suara dan mempunyai posisi di parlemen. Sejak 1977 juga menandai perhelatan pemilu digelar rutin setiap 5 tahun sekali.

Pada Pemilu 1992 proses pemungutan suara digelar pada 9 Juni 1992 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I Provinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1992-1997.

Cara pembagian kursi pada Pemilu ini tetap mengacu pada ketentuan sebelumnya. Saat itu Golkar menang dengan meraih 66.599.331 suara dan 282 kursi di DPR. Kemudian PPP dengan 16.624.647 suara dan 62 kursi di DPR. PDI meraih 14.565.556 suara dan 56 kursi di DPR. Di Sumatera Selatan PPP meraih 385,889 suara (4 kursi), Golkar meraih 2.262,172 suara (26 kursi) dan PDI meraih 564,029 suara (6 kursi).

Lalu di Pemilu 1997 adalah yang terakhir yang digelar pada masa Orde Baru. Pemilu ini untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat I Provinsi maupun DPRD Tingkat II Kabupaten/Kotamadya) se-Indonesia periode 1997-1999. Pemungutan suara diselenggarakan

tanggal 29 Mei 1997. Perolehan suara PDI yang dirundung konflik internal merosot. Para pendukung Megawati Soekarnoputri memilih mengalihkan dukungan kepada PPP, sehingga saat itu koalisi tak resmi mereka dijuluki "Mega Bintang".

Golkar menjadi pemenang dengan 84.187.907 suara dan 325 kursi di DPR. PPP meraih 25.340.028 suara dan 89 kursi di DPR. Sedangkan PDI mendapatkan 3.463.225 suara dan 11 kursi di DPR. Sedangkan di Sumatera Selatan, PPP meraih 446,792 suara (11.30%), Golkar meraih 3,361,164 suara (84,98 %) dan PDI meraih 147,131 suara (3,72 %)

Pemilihan Umum 1992

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri/Ketua LPU Nomor 89 Tahun 1992 jumlah Badan Penyelenggara Pemilu 1992 di Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan adalah sebagai berikut:

- a. Panitia Pemilihan Daerah Tk. I (PPD-I) dipimpin oleh 1 orang dengan Pembantu Ketua PPD-1 (Pembantu Gubernur) sebanyak 3 orang.
- b. Panitia Pemilihan Daerah Tk. II (PPD-II): 10 dengan Pembantu Ketua PPD-II (Pembantu Bupati) sebanyak 18 orang.
- c. Panitia Pemungutan Suara (PPS): 98 dengan Pembantu Ketua PPS (Perwakilan Kecamatan): 65
- d. Panitia Pendaftaran Pemilih (Pantarlih): 2.904
- e. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS): 10.355

Adanya perbedaan jumlah Desa /Kelurahan (2.525) dengan jumlah Pantarlih (2.904), disebabkan adanya pembentukan 289 Pantarlih pada masing-masing UPT (Unit Permukiman Transmigrasi).

Pendaftaran Pemilihan Umum 1992 untuk Pemilih adalah seluruh jumlah penduduk atau Warga negara Republik Indonesia (WNRI). Dengan aturan WNRI ini tidak terlibat persoalan Organisasi Terlarang (OT). Dalam rangka persiapan pendaftaran pemilih / jumlah penduduk WNRI, diawali dengan kegiatan penelitian dan penilaian terhadap WNRI yang terlibat baik langsung maupun tidak langsung dalam pemberontakan G-30-S/PKI (OT/1992) untuk dapat dipertimbangkan penggunaan hak memilihnya dalam Pemilu 1992.



Gambar 33. Ketua Umum PPP dalam Kampanye Pemilu 1992 di Lapangan Nigata Plaju

Menjelang Pemilihan Umum 1992, mulai banyak kritik yang muncul bahwa para calon anggota parlemen di DPRD Provinsi Sumatera Selatan tersebut, kurang mencerminkan aspirasi dan kepentingan rakyat di daerah pemilihnya. Sehingga hanya mewakili kepentingan golongan maupun partainya sendiri.

Suasana selama kampanye Pemilihan Umum 1992 di Provinsi Sumatera Selatan hampir mirip dengan di daerah lain. Jargon kebebasan Pemilu, tampaknya disertai dengan berbagai arahan, petunjuk dan larangan. Terlihat misalnya, tema dan materi kampanye dalam Pemilihan Umum 1992, sudah ditentukan, di mana program setiap organisasi peserta pemilu harus berhubungan dengan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Oleh sebabnya, selama masa kampanye Pemilihan Umum 1992, organisasi peserta pemilu harus lebih dahulu memberitahukan secara tertulis pada penguasa berwenang tujuh hari sebelum pelaksanaan kampanye.

Poster, plakat, surat selebaran, slide, film, dan alat-alat peraga kampanye Pemilihan Umum 1992 lainnya selambat-lambatnya tujuh hari sebelum digunakan dalam kampanye Pemilihan Umum 1992 harus diberitahukan lebih dahulu kepada penguasa setempat untuk mendapat persetujuan. Tidak hanya itu, naskah kampanye Pemilihan Umum 1992 yang akan disiarkan melalui TVRI maupun RRI harus diteliti lebih dahulu oleh Panitia Peneliti Naskah Kampanye Pemilihan Umum 1992.

Kondisi menjelang dan selama kampanye Pemilihan Umum 1992, hampir tidak ada bedanya dengan suasana kampanye tahun 1971, 1982 dan 1987, belum menampakkan kemajuan yang berarti dan boleh dikatakan masih tetap mempergunakan cara-cara tradisional.

Pada teknik pembagian kursi untuk Pemilihan Umum 1992 juga masih sama dengan Pemilu sebelumnya. Hasil Pemilihan Umum 1992 yang pemungutan suaranya dilaksanakan tanggal 9 Juni 1992 di Sumatera Selatan Golongan Karya tetap tertinggi. Namun hasil Pemilihan Umum 1992 di Sumatera Selatan mengagetkan banyak orang. Sebab perolehan suara Golongan Karya mengalami kemerosotan dibanding Pemilihan Umum 1987.

Pada Pemilu 1992 dilakukan pengajuan calon untuk keanggotaan DPRD I dilakukan oleh masing-masing Dewan Pimpinan Daerah Tingkat I Organisasi Peserta Pemilu (OPP) kepada Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I (PPD I) pada tanggal 7 September 1991.

Adapun jumlah Calon yang diajukan oleh masing-masing OPP sebagai berikut

No	Partai	Bakal Calon	DCS	DCT
1	PPP	72 Calon	57 Calon	56 Calon
2	Golkar	72 Calon	71 Calon	71 Calon
3	PDI	67 Calon	43 Calon	40 Calon

Setiap calon yang diajukan untuk dapat tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DCS) diteliti keabsahan dan pemenuhan kelengkapan persyaratannya oleh Panitia Peneliti Daerah Tingkat I (Panlitda I). Dari hasil penelitian tersebut yang dapat disetujui untuk dicantumkan dalam DCS anggota DPRD I Sumatera Selatan disebut calon jadi seperti tabel paling kanan.

Sesuai ketentuan seorang Calon untuk dapat tercantum dalam DCT, maka DCS DPRD I diumumkan secara luas, dan serentak melalui mass media baik RRI, Surat Kabar dan media cetak lainnya selama 30 hari yaitu mulai tanggal 20 Januari 1992 sampai dengan 18 Februari 1992. Dalam pelaksanaan pengumuman DCS tersebut tercatat sebanyak 68 surat tanggapan yang menanggapi DCS Pemilihan Umum Anggota DPRD Tk-I Provinsi Sumatera Selatan. Untuk menentukan kebenaran isi tanggapan masyarakat, Panlitda I melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dan pimpinan OPP di Daerah Tingkat I dimaksud. Tata cara pencalonan dan penelitian calon untuk

keanggotaan DPRD II dilaksanakan sesuai tata cara yang dilaksanakan untuk DPRD I.

Sebelum diadakan pelaksanaan Kampanye, ketiga OPP telah mengadakan kesepakatan bersama dengan dihadiri oleh Muspida Provinsi Sumatera Selatan untuk mengatur mengenai jadwal waktu dan penggunaan tempat kampanye. Hal itu berlaku juga di daerah Tingkat-II se-Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan Kampanye tidak terdapat eksekusi yang berarti yang dapat mengganggu jalannya pelaksanaan Pemilu 1992, walaupun masih terdapat beberapa pelanggaran terhadap ketentuan mengenai kampanye yang dilakukan oleh masing-masing OPP.

Pemungutan suara Pemilu DPR, DPRD I dan DPRD II dilaksanakan serentak dalam satu hari, yaitu pada tanggal 9 Juni 1992 di 10.355. Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Jumlah pemilih yang terdaftar dalam wilayah Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebanyak 3.540.232 orang. Sedangkan jumlah pemilih yang memberikan suara untuk masing-masing jenis badan perwakilan rakyat adalah sebagai berikut:

No	Pemilu	Jumlah Pemilih
1	Anggota DPR	3.218.413 orang
2	Anggota DPRD Tk-I	3.212.090 orang
3	Anggota DPRD Tk-II	3.195.656 orang

Penghitungan suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPRD I dan DPRD II dilaksanakan secara bertingkat, yaitu:

1. di TPS, dilakukan dengan cara menghitung satu demi satu surat suara;
2. di PPS, dilakukan dengan cara menghitung jumlah suara yang diperoleh masing-masing OPP berdasarkan berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara yang diterima dari KPPS dalam wilayah kerja.
3. di PPD II dilakukan dengan cara menghitung jumlah suara yang diperoleh masing-masing OPP berdasarkan berita acara penghitungan suara daerah pemungutan yang diterima dari PPS dalam wilayah kerjanya.
4. di PPD I dilakukan dengan cara menghitung jumlah suara yang diperoleh masing-masing OPP untuk pemilu DPR dan DPRD I

berdasarkan berita acara penghitungan suara daerah tingkat II yang diterima dari PPD II dalam wilayah kerjanya.

Rapat Penetapan hasil pemilu untuk keanggotaan DPRD I yang berlangsung dari pukul 08.30 sampai dengan 12.30 dipimpin oleh Gubernur KDH/Ketua PPD I dihadiri oleh wakil-wakil ketiga OPD, anggota Panwaslak I, pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat.

Sebelum diadakan pembagian kursi untuk keanggotaan DPRD I terlebih dahulu ditentukan Bilangan Pembagi Pemilihan (BPP) yaitu dengan cara membagi seluruh jumlah suara sah yang diperoleh OPP dibagi jumlah kursi anggota DPRD I yang dipilih (36) yaitu: $3.212.090 : 36 = 89.224$

No	OPP	Jumlah perolehan suara	BPP	Jumlah Kursi	Sisa Suara
1	PPP	385.889	385.889: 89.224	4 Kursi	32.494
2	Golkar	2.262.172	2.262.172: 89.224	25 Kursi	35.385
3	PDI	564.029	564.029:89.224	6 Kursi	32.149

Dari hasil pembagian kursi tahap I tersebut, terdapat 1 (satu) sisa kursi. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan penggabungan suara dari ketiga OPP untuk keanggotaan DPRD I maka sisa kursi tersebut diberikan kepada OPP yang mempunyai sisa suara terbesar yaitu Golongan Karya.

Rincian hasil penghitungan suara untuk tiap jenis Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Pusat, DPRD Provinsi adalah sebagai berikut:

No	OPP	DPR	DPRD Tk I
1	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	384.040	385.889 suara
2	Golongan Karya (Golkar)	2.260.716	2.262.172
3	Partai Demokrasi Indonesia (PDI)	573.657	564.029
	Jumlah suara sah	3.218.413	3.212.090
	Jumlah suara tidak sah	135.380	131.484

Setelah penghitungan suara pemilu anggota DPR, DPRD I dan DPRD II daerah tingkat II/daerah tingkat I, PPD II/PPD I mengadakan rapat penetapan hasil pemilu anggota DPRD II/DPRD I. Dalam rapat penetapan hasil pemilu dilakukan dua kali yaitu pembagian kursi dan penetapan terpilih. Berdasarkan pembagian tersebut maka ketiga OPP, memperoleh kursi di DPRD I Sumatera Selatan masing -masing adalah:

No	OPP	Jumlah Kursi
1	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4 Kursi
2	Golongan Karya (Golkar)	26 Kursi
3	Partai Demokrasi Indonesia (PDI)	6 Kursi

Penetapan Calon terpilih untuk keanggotaan DPRD I dari masing –masing OPP dilakukan berdasarkan nomor urut calon dalam Daftar Calon Tetap Pemilu Anggota DPRD Tk-I Sumatera Selatan sejumlah perolehan kursi, dimulai dari nomor urut 1, yaitu:

1. Calon dari Partai Persatuan Pembangunan yang dinyatakan terpilih adalah calon nomor urut 1 sampai dengan calon nomor urut 4
2. Calon dari Golongan Karya yang dinyatakan terpilih adalah calon nomor urut 1 sampai dengan calon nomor urut 26
3. Calon dari Partai Demokrasi Indonesia yang dinyatakan terpilih adalah calon nomor urut 1 sampai dengan calon nomor urut 6

Pengambilan sumpah/janji keanggotaan DPRD I Propinsi Daerah Sumatera Selatan dilaksanakan pada hari Sabtu , tanggal 25 Juli 1992 dipimpin oleh Ketua DPRD I Periode 1987-1992. Setelah pembacaan keputusan peresmian keanggotaan DPRD I untuk melaksanakan pengambilan sumpah/janji anggota DPRD I, pimpinan sidang DPRD I diserahkan kepada pimpinan sementara yaitu anggota DPRD I hasil pemilu 1992 yang tertua didampingi anggota yang termuda usianya. Adapun anggota DPRD I Sumatera Selatan yang diambil sumpah/janji oleh Ketua Pengadilan Tinggi atas nama Ketua Mahkamah Agung adalah sejumlah 45 orang yang terdiri dari:

No	OPP	Jumlah Kursi
1	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4 Kursi
2	Golongan Karya (Golkar)	26 Kursi
3	Partai Demokrasi Indonesia (PDI)	6 Kursi
4	ABRI	9 Kursi
	Jumlah	45 Kursi

Struktur DPRD Provinsi Sumatera Selatan 1992-1997

Walau pada kursi Parlemen di DPR-RI, Golongan Karya pada Pemilihan Umum 1992 memperoleh mampu mempertahankan 9 kursi yang didapat pada Pemilihan Umum 1987. Namun pada DPRD Provinsi

Sumatera Selatan, Golongan Karya pada Pemilihan Umum 1992 hanya memperoleh 16 kursi. Artinya, terdapat sepuluh kursi yang hilang dibanding Pemilihan Umum 1987, di mana Golongan Karya mampu memperoleh 26 kursi. Nama-nama anggota DPR-RI Periode 1992-1997 Perwakilan Sumatera Selatan Hasil Pemilihan Umum 1992, sebagai berikut:

No	Nama	Partai
1.	Mohammad Hatta Mustafa, SH	Golongan Karya
2.	C. H. Muhammad Muas	Golongan Karya
3.	Ir. H. Indra Bambang Utoyo, SE	Golongan Karya
4.	Ny. Wulanrugian M. Ratulangie Sudjoko	Golongan Karya
5.	Ny. Dra. Zamroh Satar	Golongan Karya
6.	Jahja Bahar	Golongan Karya
7.	R. Ali Mursalam	Golongan Karya
8.	Dra. Ratnawati Fuad	Golongan Karya
9.	Saiful M. D.	Golongan Karya
10.	Alimarwan Hanan, BA	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
11.	Drs. H. Mukrom As'ad	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
12.	M. Taufiq Kemas	Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
13.	Drs. M. Syafei Ali Gumay	Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

Perolehan Suara Pemilu 1992 untuk DPRD Tk 1 provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut:

No	Partai	Jumlah Suara	Jumlah Kursi
1.	PPP	385.889	4 Kursi
2.	Golkar	2.262.172	16 Kursi
3.	PDI	564.029	6 Kursi

Adapun, nama-nama anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1992-1997 terpilih hasil Pemilihan Umum 1992, sebagai berikut:

No	Nama	Partai
1.	Drs. Noviarman Kailani	Golongan Karya
2.	Dr. H. Burlian Abdullah	Golongan Karya
3.	H. Rokian Cik Ubir	Golongan Karya
4.	Ir. Achmad Syafriar	Golongan Karya
5.	Drs. H. Arifin Paie	Golongan Karya
6.	Hafni AS	Golongan Karya
7.	H.M. Amin Masa	Golongan Karya
8.	Drs. H. Achmad Hijazi	Golongan Karya
9.	H. Soemarsono	Golongan Karya
10.	Ir. Wasista Bambang Utoyo	Golongan Karya

11.	Prof. Dr. K. H. O. Gajahnata	Golongan Karya
12.	H. Ahmad Kori	Golongan Karya
13.	H. Nasrun Madang	Golongan Karya
14.	Hj. Inismar Arbai Naya	Golongan Karya
15.	Ir. Fatimah Syamsul	Golongan Karya
16.	Hj. SR. Emmy Oliver	Golongan Karya
17.	Endang Soerya, SH	Golongan Karya
18.	R. Zulkifli Kadir	Golongan Karya
19.	Karsidi, SH	Golongan Karya
20.	Drs. Hasan Ibrahim	Golongan Karya
21.	Drs. H. Syueb Tamat	Golongan Karya
22.	M. Zaini	Golongan Karya
23.	Drs. Adib Kailani	Golongan Karya
24.	Marzuki Hasyim	Golongan Karya
25.	Ansyori Manahan	Golongan Karya
26.	Djohan Hanafiah	Golongan Karya
27.	Mahmud Pikir	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
28.	Mohammad Natsir Jakfar	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
29.	Drs. Anwar Malik	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
30.	Saiman, SH	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
31.	Taslim Hakki Cholib	Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
32.	Dr. Adjis Saip, S.H.	Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
33.	Dr. Faisal Anwar Sohan	Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
34.	Drs. M. Husni Hamzah	Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
35.	Syamsul Anwar AZ	Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
36.	Aslan Guluk	Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
37.	Kolonel Moeljadi	ABRI (TNI AD)
38.	Kolonel M. Hasyim Husin	ABRI (TNI AD)
39.	Kolonel H. A. Satar Djailani BA	ABRI (TNI AD)
40.	Kolonel Drs. H. Achmad Asyik	ABRI (TNI AD)
41.	Kolonel Suwandi	ABRI (TNI AD)
42.	Kolonel Jacob Chaidir, S.H.	ABRI (TNI AD)
43.	Kolonel Ade Misbach Komar	ABRI (TNI AD)
44.	Kolonel A. Tibyan M, S.H.	ABRI (TNI AD)
45.	Kolonel Ir. Wibowo Pratikto	ABRI (TNI AU)

Pimpinan DPRD Tk 1 Provinsi Sumatera Selatan Periode 1992-1997 hasil Pemilu 1992, dengan susunan, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Partai
1.	H. Soemarsono	Ketua	Golkar
2.	M. Hasyim Husin	Wakil Ketua	ABRI
3.	H. Ahmad Kori	Wakil Ketua	Golkar
4.	Taslim Hakki Cholib	Wakil Ketua	PDI

Dalam perjalanannya DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1992-1997 telah terjadi beberapa pergantian anggota yang berhenti dengan hormat atau pergantian antar waktu, masing-masing seperti tabel dibawah ini:

No	Nama	Partai
1.	H.M. Amin Masa	M. H. Ritonga Golkar
2.	Kolonel Drs. H. Achmad Asyik	Kolonel Amirudin Ibrahim ABRI

Pada DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1992-1997, anggotanya sebagai Badan Pertimbangan Daerah (BPD) Provinsi Sumatera Selatan. Adapun yang duduk di BPD Provinsi Sumatera Selatan periode 1992-1997 ini adalah:

1. H. Soemarsono
2. M. Hasyim Husin
3. H. A. Kori
4. Taslim Hakki Cholik
5. M. Natsir Jaktar

Dengan Sekretaris BPD Sumatera Selatan 1992-1997 adalah Drs. Abdullah Makmun

Hasil-hasil yang dicapai DPRD Sumatera Selatan, 1992-1997

Meneruskan Repelita V (1989-1994) dan masuk ke Repelita VI (1994-1999) pengawasan pembangunan di Sumatera Selatan. Beberapa proyek besar yang dijalankan di Sumatera Selatan misalnya, Proyek Irigasi Upper Komering. Proyek ini selesai seluruhnya dapat mengairi lahan persawahan seluas 70.000 ha di daerah Sumatera Selatan.

Proyek Pelabuhan Samudra Tanjung Api-Api yang bertujuan mengantisipasi hasil-hasil produksi industri dan agro-industri yang tidak dapat ditampung lagi oleh pelabuhan Boom Baru. Proyek Jembatan Musi II yang menghubungkan Seberang Ulu dan Seberang Ilir termasuk jalan by pass tanpa melalui pusat kota.

Proyek Pengembangan Rawa Pasang Surut untuk daerah transmigrasi di Banyuasin dalam meningkatkan teknologi penggarapan sawah pasang surut. Pengembangan daerah pasang surut tersebut

dengan potensi kurang lebih 18.000 ha dalam mempertahankan dan meningkatkan swasembada pangan di Sumatera Selatan.

Proyek Pembangunan Taman Purbakala Sriwijaya yang berlokasi di Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Ilir Barat II, Kotamadya Palembang. Proyek ini berada dilahan seluas kurang lebih 11,5 ha yang dianggap sebagai temuan situs Sriwijaya berdasar poto udara, penelitian dan ekskavasi.

Selain itu, DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1992-1997 mengeluarkan beberapa Peraturan Daerah (Perda) seperti, Perda Nomor 3 Tahun 1992 tentang Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan. Perda Nomor 3 tahun 1998 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Perda Nomor 5 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 10 Tahun 1990 Tentang Perusahaan Daerah Prodexim. Perda Nomor 17 tahun 1998 Tentang Pembinaan Dan Pengamanan Pengembangan Perkebunan Dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat Perkebunan (Pir-Bun) di Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

Selain menghasilkan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), DPRD Sumatera Selatan periode kali ini mendukung diantaranya upaya normalisasi Sungai Musi dan reklamasi kawasan Jakabaring yang semula rawa menjadi lahan matang. Pada masa Gubernur Sumatera Selatan H. Ramli Hasan Basri inilah selesai dilaksanakan pembebasan tanah warga di kawasan Jakabaring.

DPRD Sumatera Selatan juga mendukung sektor pertanian didorong untuk berkembang pada masa pemerintahan Gubernur H. Ramli Hasan Basri. Sumatera Selatan mulai ditargetkan menjadi lumbung pangan nasional sejak tahun 1990. Presiden Soeharto sempat menggelar panen raya di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Namun, bencana kekurangan pangan juga pernah dialami warga Air Sugihan, Ogan Komering Ilir, akhir tahun 1991.

Untuk mendukung prestasi olahraga, Gubernur H. Ramli Hasan Basri membagikan bonus Rp 30 juta untuk atlet peraih medali dalam Pekan Olahraga Nasional (PON) XII. Ia juga menyediakan dana Rp 1,5 miliar untuk pembinaan olahraga tahun 1990. Ide pembangunan Pelabuhan Tanjung Api-api muncul dalam masa pemerintahan Gubernur H. Ramli Hasan Basri pada tahun 1991 yang didukung DPRD Sumatera Selatan.

Gubernur H. Ramli Hasan Basri juga dikenal sebagian kalangan sebagai gubernur yang peduli terhadap persoalan sejarah dan kebudayaan. Bagi pengamat sejarah, Gubernur H. Ramli Hasan Basri termasuk orang yang sangat perhatian pada Kerajaan Sriwijaya. Kepedulian ini sangat berarti karena jarang pemimpin daerah yang memerhatikan sejarah. Di masa Gubernur H. Ramli Hasan Basri Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya (TPKS) dibangun. Termasuk DPRD Sumatera Selatan mendukung mengangkat wisata Danau Ranau yang digagas Gubernur H. Ramli Hasan Basri.

Gubernur H. Ramli Hasan Basri mengakhiri jabatan pada 1998. DPRD Sumatera Selatan memastikan Kepala Staf Komando Armada RI Kawasan Barat Laksamana Pertama TNI Rosihan Arsyad sebagai pengganti Ramli. Pria kelahiran Bengkulu, 29 Juli 1949, yang juga dikenal sebagai penerbang di TNI AL, itu dilantik menjadi gubernur periode 1998-2003 setelah mengantongi 26 dari 45 suara DPRD Sumatera Selatan.

BAB 11

DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 1997-1999

Bab ini membahas DPRD Provinsi Sumatera Selatan hasil Pemilihan Umum 1997. Menarik para anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan masa ini mestinya memiliki periode kerja 1997-2002. Namun karena gejala reformasi, maka para anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan tercatat sebagai masa kerja yang paling pendek dan harus berakhir pada tahun 1999. Masa kerjanya hanya dua tahun setelah dilantik.

Keadaan politik menjelang Pengangkatan Anggota DPRD Sumatera Selatan, 1997-1999

Pembagian kursi dalam Pemilihan Umum 1997 yang digunakan tidak berubah. Tercatat masih menggunakan cara yang sama dengan Pemilu 1971, 1977, 1982, 1987, dan Pemilihan Umum 1992. Pemungutan suara diselenggarakan tanggal 29 Mei 1997. Hasilnya Pemilihan Umum 1997 menunjukkan bahwa setelah pada Pemilihan Umum 1992 mengalami kemerosotan, namun kali ini Golongan Karya kembali merebut suara pendukungnya di Provinsi Sumatera Selatan. Perolehan suaranya mencapai 74,51 persen, atau naik 6,41.

Sedangkan perolehan kursinya meningkat menjadi 325 kursi, atau bertambah 43 kursi dari hasil Pemilihan Umum sebelumnya. PPP juga menikmati hal yang sama, yaitu meningkat 5,43 persen. Begitu pula untuk perolehan kursi. Pada Pemilihan Umum 1997 ini PPP meraih 89 kursi atau meningkat 27 kursi dibandingkan Pemilihan Umum 1992.

Sedangkan PDI, yang mengalami konflik internal dan terpecah antara PDI Soetjadi dengan Megawati Soekamoputri setahun menjelang pemilu, perolehan suaranya merosot 11,84 persen, dan hanya mendapat 11 kursi, yang berarti kehilangan 45 kursi di DPR dibandingkan Pemilu 1992. Pemilihan Umum 1997 dinilai banyak diwarnai protes. Protes terhadap kecurangan terjadi di banyak daerah, termasuk di beberapa wilayah Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasar hasil perolehan Suara Pemilihan Umum 1997 untuk DPRD Tk 1 Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut:

No	Partai	Jumlah Suara	Jumlah Kursi
1.	PPP	385.889	4 Kursi
2.	Golkar	2.262.172	30 Kursi
3.	PDI	564.029	2 Kursi

Struktur dan Anggota DPRD Sumatera Selatan, 1997-1999

Hasil Pemilihan Umum 1997 pada parlemen di Pusat, DPR-RI diperoleh wakil-wakil Provinsi Sumatera Selatan Periode 1997-1999, sebagai berikut:

No	Nama	Partai
1.	Ny. Dra. Zamroh Satar	Golongan Karya
2.	R. Ali Mursalam	Golongan Karya
3.	Marzuki Achmad, S.H.	Golongan Karya
4.	Drs H. Noviarman Kailani	Golongan Karya
5.	Karsidi, S.H.	Golongan Karya
6.	M. Akip Renatin, S.E.	Golongan Karya
7.	Drs. H. Djulkip Siregar	Golongan Karya
8.	Ir. H. Ahmad Aman Astra, S.E.	Golongan Karya
9.	Ir. Yusuf Herry Utama Alamsjah, M.Arch.	Golongan Karya
10.	Ir. H. Azhar Romli	Golongan Karya
11.	Faisal Saleh	Golongan Karya
12.	Harry Salman Farizi Sohar	Golongan Karya
13.	Alimarwan Hanan, BA	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
14.	Drs. H. Mohammad Mukrom As'ad	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Sedang komposisi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 1997-2002, hasil pemilihan umum 1997, sebagai berikut:

No	Nama	Partai
1.	H. Muhammad Arub, S.H.	Golongan Karya
2.	Dr. H. Burlian Abdullah	Golongan Karya
3.	Drs. H. Achmad Hijazi	Golongan Karya
4.	Prof. Dr. K. H. O. Gajahnata	Golongan Karya
5.	H. Nasrun Madang	Golongan Karya
6.	Ir. Fatimah Syamsul	Golongan Karya
7.	Drs. Hasan Ibrahim	Golongan Karya
8.	Drs. Adib Kailani	Golongan Karya
9.	Ansyori Manahan	Golongan Karya
10.	Drs. H. Zamzami Ahmad	Golongan Karya

11.	Moeljadi	Golongan Karya
12.	Drs. H. Ismail Djalili	Golongan Karya
13.	H. Mukhtar	Golongan Karya
14.	Ir. Ratu Mutialela, M.S.	Golongan Karya
15.	H. Ahmad Natar	Golongan Karya
16.	Ny. Hj. Mien Sutarmina S	Golongan Karya
17.	Dra. Sawiah Bolan Kori	Golongan Karya
18.	Drs. Asnawi P. Ratu	Golongan Karya
19.	Drs. H. Ahmad Sukry Atieq, M.A.	Golongan Karya
20.	Drs. H.A. Karim Ani	Golongan Karya
21.	Dr. (Hc) H. Ramli Sutanegara, MBE	Golongan Karya
22.	Drs. Chairul Salasa Benyamin Lani	Golongan Karya
23.	Drs. Darwin CU	Golongan Karya
24.	H. Ali Hamzah Lubis	Golongan Karya
25.	H. Wirman, BA	Golongan Karya
26.	Mohammad Sani Indawan, S.H.	Golongan Karya
27.	Ayimil Ganie, S.H.	Golongan Karya
28.	Sarjan Tahir, S.E.	Golongan Karya
29.	Gunung Iskandar Alamlah	Golongan Karya
30.	Sidun Bagus, S.H.	Golongan Karya
31.	Mohammad Natsir Jakfar	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
32.	Drs. Djabaruddin AR	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
33.	Drs. Azhari AS	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
34.	Drs. H. Ghufran MN	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
35.	Dr. Faisal Anwar Sohan	Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
36.	Drs. M. Husni Hamzah	Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
37.	Kol. F. Rozi Dahlan, S.H.	ABRI (TNI-AD)
38.	Kol. Ir. Wibowo Pratikto	ABRI (TNI-AU)
39.	Kol. Idrus Bahrien	ABRI (TNI-AL)
40.	Letkol. Soebijanto	ABRI (POLRI)
41.	Letkol. Drs. Malian Syahri	ABRI (TNI-AD)
42.	Letkol. Johnny Rampen	ABRI (TNI-AD)
43.	Letkol. Sonny Poerwono	ABRI (TNI-AD)
44.	Letkol. Taswa Sunari	ABRI (TNI-AD)
45.	Letkol. M. Simanjuntak	ABRI (TNI-AD)

Pimpinan DPRD Tk 1 Provinsi Sumatera Selatan Periode 1997-2002 hasil Pemilihan Umum 1997, dengan susunan, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Partai
1.	H. Muhammad Arub, S.H.	Ketua	Golkar
2.	Mohammad Natsir Jakfar	Wakil Ketua	PPP
3.	-	Wakil Ketua	ABRI
4.	-	Wakil Ketua	Golkar

Setelah Pemilihan Umum 1997, Indonesia mulai dilanda gelombang krisis moneter yang luar biasa. Pada tanggal 20 Januari 1998, Presiden Soeharto secara resmi menerima pencalonannya oleh Golongan Karya untuk jabatan kepresidenan.

Pada Sidang Umum MPR bulan Maret 1998 terpilih Soeharto dan B.J. Habibie sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI untuk masa jabatan 1998-2003. Presiden Suharto membentuk dan melantik Kabinet Pembangunan VII. Pada kabinet ini Presiden Soeharto menyertakan putrinya Siti Hardiyanti Rukmana sebagai Menteri Kesejahteraan Sosial, dan orang dekatnya Bob Hasan sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian.

Krisis moneter dengan kondisi kehidupan bangsa dan negara tidak kunjung membaik. Perekonomian nasional semakin memburuk dan masalah-masalah sosial semakin menumpuk dengan semakin kuatnya KKN. Keadaan itu menimbulkan keprihatinan dan kekhawatiran rakyat Indonesia yang menyebabkan munculnya gelombang protes untuk memperbaiki keadaan bangsa. Pada awal Mei 1998 mahasiswa memelopori unjuk rasa menuntut dihapuskannya KKN, penurunan harga-harga kebutuhan pokok, dan Soeharto turun dari jabatan Presiden. Ketika para mahasiswa melakukan demonstrasi pada tanggal 12 Mei 1998 terjadilah bentrokan dengan aparat keamanan. Dalam peristiwa ini beberapa mahasiswa Trisakti cedera dan bahkan tewas.

Pemerintah Soeharto semakin disorot setelah tragedi Trisakti yang kemudian memicu kerusuhan 13 Mei 1998 sehari selepasnya. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir di seluruh Indonesia. Dibawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998. Soeharto menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. B.J. Habibie diangkat sebagai Presiden Ke-3 RI. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.

Setelah terpilih sebagai presiden, B.J. Habibie melaksanakan percepatan Pemilihan Umum yang semula tahun 2002 akan diadakan pada 7 Juni 1999 untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD yang baru. Maksud Pemilu yang akan dilaksanakan tersebut untuk membentuk sebuah pemerintahan baru yang kuat, dapat dipercaya, dan mampu menyelesaikan berbagai krisis yang melanda bangsa Indonesia. Pemilihan umum ini akan dilakukan dengan sistem perwakilan dan asas Langsung, Umum, Bebas, dan Rahasia (LUBER).

Pemilu berlangsung tertib, aman dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan. Pemilu tersebut mengikut sertakan organisasi peserta pemilu yang banyak. Pada waktu pendaftar, lebih dari 100 partai politik yang terdaftar, namun hanya 48 partai politik yang dinyatakan memenuhi persyaratan.

Percepatan Pemilu 1999 yang seharusnya diselenggarakan pada 2002, bertujuan mengadakan reformasi serta mengganti anggota-anggota parlemen yang berkaitan dengan pemerintahan sebelumnya yang dianggap tidak memiliki legitimasi. Peristiwa nasional ini berdampak besar juga ke daerah-daerah, termasuk Provinsi Sumatera Selatan. Oleh sebabnya, anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1997-2002, tercatat periode tercepat karena akan berakhir pada tahun 1999. Mereka akan diganti oleh anggota baru Provinsi Sumatera Selatan hasil Pemilihan Umum 1999 untuk Periode 1999-2004.

BAGIAN III

MASA ORDE REFORMASI

BAB 12

DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 1999-2004

Bab ini mengkaji DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada masa awal Orde Reformasi. Sama seperti di daerah lain, DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 1999-2004 dipilih melalui pemilihan langsung oleh masyarakat Sumatera Selatan. Pemilihan Umum 1999, termasuk di Sumatera Selatan diikuti oleh 48 partai politik.

Keadaan politik menjelang pengangkatan anggota DPRD Sumatera Selatan 1999-2004

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1999 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 7 Juni 1999 untuk memilih 462 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 1999-2004.

Pemilihan Umum ini merupakan yang pertama kali diselenggarakan setelah runtuhnya Orde Baru dan juga yang terakhir kalinya diikuti oleh Provinsi Timor Timur. Pemilihan Umum ini diikuti oleh 48 partai politik, yang mencakup hampir semua spektrum arah politik (kecuali komunisme yang dilarang di Indonesia). Penentuan kursi dilakukan secara proporsional berdasarkan persentase suara nasional. Pemilihan Umum ini seharusnya diselenggarakan pada tahun 2002, tetapi atas desakan publik untuk mengadakan reformasi serta mengganti anggota-anggota parlemen yang berkaitan dengan Orde Baru, maka pemilihan umum dipercepat dari tahun 2002 ke tahun 1999 oleh pemerintah waktu itu.

Dari 48 partai peserta pemilu 1999, hanya 21 partai yang mendapatkan kursi di DPR dan PDI-P keluar sebagai pemenang mayoritas suara, disusul Partai Golkar, PPP, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional di posisi lima besar. Kemudian dari hasil Sidang Umum MPR, Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih. Pasangan Abdurrahman Wahid dan Megawati

Soekarnoputri kemudian digantikan oleh pasangan Megawati Soekarnoputri dan Hamzah Haz dari Sidang Istimewa MPR RI, 23 Juli 2001.

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mencatat sejumlah poin penting dalam pelaksanaan pemilu 1999. Pertama, pemerintahan transisi setelah berhentinya Presiden Soeharto dikehendaki untuk sesingkat mungkin, dimana pemilu ditargetkan untuk dapat dilaksanakan pada bulan Mei atau selambat-lambatnya Juni 1999. Kedua, terdapat asas demokratis, jujur, dan adil sebagai tambahan terhadap asas pemilu sebelumnya, yaitu asas langsung, umum, bebas, dan rahasia. Ketiga, penyelenggaraan pemilu dilaksanakan pada hari libur atau hari yang diliburkan.

Keempat, peserta pemilu tidak hanya dua partai politik dan satu golongan, tetapi pemilu diikuti oleh partai politik atau peserta pemilu yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan memiliki kedudukan dan hak yang sama antara yang satu dengan yang lainnya. Kelima, penyelenggara pemilu adalah suatu badan yang bebas dan mandiri yang terdiri dari unsur partai politik dan pemerintah, serta diawasi oleh suatu badan pengawas yang mandiri.

Pemilihan Umum Tahun 1999

Mundurinya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 akibat krisis politik dan ekonomi. Dengan Wakil Presiden, Bacharuddin Jusuf Habibie (B. J. Habibie) selanjutnya meneruskan masa kerja presiden hingga pelaksanaan pemilihan umum tanggal 7 Juni 1999. Pemerintahan B. J. Habibie dianggap transisi, namun berhasil menyelenggarakan Pemilihan Umum demokratis tahun 1999. Pemilihan Umum 1999 seharusnya diselenggarakan pada tahun 2002. Namun atas desakan publik untuk mengadakan reformasi serta mengganti anggota-anggota parlemen yang berkaitan dengan Orde Baru, maka pemilihan umum dipercepat dari tahun 2002 ke tahun 1999 oleh pemerintah waktu itu.

Presiden B.J. Habibie pada 25 Mei 1998 melakukan pertemuan dengan pimpinan DPR/MPR untuk melakukan konsultasi sekaligus membahas diadakannya Pemilu dan bersepakat melaksanakannya lebih cepat. Kemudian Pemilu diputuskan akan dilaksanakan pada 7 Juni

1999, keputusan tersebut dicetuskan dalam Sidang Istimewa MPR 10 sampai 13 November 1998.

Masa transisi pemerintahan Orde Baru ke Era Reformasi, juga memperkuat Pemilihan Umum 1999 dengan melahirkan Undang-Undang baru berkaitan dengan Pemilu. Produk tersebut seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Dengan diterbitkannya Undang-Undang baru tentang partai politik, bagai jamur di musim hujan, terbentuk sebanyak 171 partai baru dari berbagai macam asas. Dari jumlah tersebut, sebanyak 141 partai yang terdaftar dan 48 partai lolos untuk mengikuti Pemilu 7 Juni 1999.

Perkuatan Pemilihan Umum 1999 juga dengan membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU bertujuan menghindari campur tangan pemerintah serta menjaga objektivitas pemilihan umum dalam pelaksanaan Pemilu 1999. Komisi Pemilihan Umum 1999 diketuai oleh Jenderal (Purn) Rudini didampingi Wakil Ketua Harun Al Rasyid dan beranggotakan sebanyak 48 orang yang mewakili 48 partai yang berpartisipasi dalam Pemilu 1999, dan ditambah empat wakil dari pemerintah.

Pemilihan Umum 1999 dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999 dengan sistem perwakilan berimbang dengan stelsel daftar, menghabiskan dana Rp 1,3 triliun, dengan jumlah peserta 48 partai dan 462 kursi. Pemilu 1999 dimenangi PDI Perjuangan dengan total suara 35.689.073 atau 33.74 persen dengan peraihan sebanyak 154 kursi, disusul Golkar di posisi kedua dengan jumlah suara 23.741.749 atau 22.44 persen dengan perolehan kursi sebanyak 120.

Kemudian posisi ketiga dalam Pemilu pertama era reformasi diraih Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan total suara 11.329.905, dengan 59 kursi. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berada di posisi keempat meski mendapat suara lebih banyak ketimbang PPP yakni 13.336.982 suara, namun jumlah kursi yang didapat lebih banyak PPP, yaitu sebanyak 51 kursi. Posisi kelima dimenangkan oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dengan jumlah suara 7.52. Bagi Partai Golongan Karya meskipun duduk di posisi kedua, namun ditengah terpaan gonjangan akibat dianggap bagian rezim Orde Baru. Hasil ini dianggap luar biasa.

Hasil Pemilihan Umum tahun 1999 menandakan lahirnya era baru, Orde Reformasi, yang mengangap sebagai pengganti era

sebelumnya, Orde Baru. Masa Orde Baru perkembangan politik di Indonesia banyak dipengaruhi oleh usulan-usulan dan dominasi Golongan Karya bersama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Golongan Karya dan ABRI berhasil menguasai seluruh sendi-sendi pemerintahan, mulai tingkat pusat hingga sampai ke desa-desa. Kondisi ini membuat partai-partai lain tidak bisa berkembang.

Setelah muncul gerakan reformasi yang didukung kaum intelektual kampus bersama rakyat. Pemerintahan Orde Baru dibawah pimpinan dan kendali Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun akhirnya mengalami keruntuhan. Pengaruh euforia reformasi di Provinsi Sumatera Selatan relatif besar terutama bidang politik. Kondisi ini ditunjukkan dengan diberikannya kebebasan bagi partai-partai baru untuk muncul dan menjadi peserta Pemilihan Umum 1999. Keberadaan multi-partai pada masa Orde Reformasi diperkuat lahirnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 yang mengakui persyaratan dan keberadaan partai-partai politik di Indonesia. Salah satu isi dari undang-undang ini adalah organisasi pemilihan umum sebuah partai politik yang memenuhi syarat dengan jumlah pendukung sekurang-kurangnya 50 orang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 21 tahun ke atas.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum 1999 adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang anggotanya berasal dari wakil partai politik dan wakil dari pemerintah. Organisasi peserta Pemilihan Umum 1999 sebanyak 48 partai politik. Mencakup hamper semua sprekrum arah politik, kecuali komunisme yang dilarang di Indonesia. Pada Pemilihan Umum 1999 di Sumatera Selatan menampilkan lima besar hasil pemilu, yaitu PDI Perjuangan (PDIP), Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PPP dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Sebelum Pemilihan Umum 1999 dilaksanakan, partai-partai politik konstestan melakukan kegiatan kampanye untuk menarik perhatian massa. Secara nasional, Pemilihan Umum 1999 ditandai maraknya aksi kerusuhan antar partai politik serta aksi perusakan peraga kampanye dan posko partai politik. Misalnya, kerusuhan pendukung PDI Perjuangan dan Golongan Karya di beberapa daerah serta Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Kebangkitan Bangsa di beberapa daerah. Namun kampanye Pemilihan Umum 1999 di Sumatera Selatan masih relatif aman dan terkendali. Kampanye partai-partai politik peserta Pemilihan Umum 1999 di Sumatera Selatan dilakukan dengan pola dan strategi kampanye secara massal.

Kampanye dilakukan di lapangan terbuka dan diwarnai penyelenggaraan pawai di tempat-tempat tertentu dan dalam satu momen kampanye ditampilkan lebih dari satu juru kampanye (jurkam). Kampanye Pemilihan Umum 1999 di Sumatera Selatan menjadi ajang persaingan program, dan biasanya program itu identik dengan program-program pembangunan. Namun, sebenarnya bisa dikatakan tidak mungkin membeberkan program di tengah-tengah masa kampanye yang emosional. Yang paling mudah dilakukan oleh juru kampanye dalam situasi tersebut adalah memabangkitkan emosi massa dengan slogan-slogan yang memojokkan atau menghancurkan lawan politiknya.

Hasil Pemilihan Umum 1999 menjadi indikator perubahan politik yang paling konkret. Pemilihan Umum 1999 di Sumatera Selatan berjalan menggambarkan terjadinya perimbangan kekuatan antar Organisasi Peserta Pemilu yang bersaing. Pemilihan Umum 1999 bagi masyarakat di Sumatera Selatan diperlukan dalam memilih pemimpin adil, jujur dan berwibawa serta bertanggung jawab membawa bangsa ke arah lebih baik.

Pemilihan Umum 1999 sangat menonjol dan berbeda dengan pemilu-pemilu sebelumnya sejak 1971 karena diikuti banyak sekali peserta. Partai politik kemudian bermunculan di awal masa pemerintahan reformasi tahun 1998 bak "cendawan yang tumbuh di musim hujan". Jumlah partai politik yang mendaftarkan diri ke Departemen Kehakiman ketika itu mencapai jumlah 141 partai, akan tetapi partai politik yang bisa mengikuti pemilu di tahun 1999 "hanya" 48 partai politik saja. Sebagaimana biasanya sistem multipartai, pemilihan umum tahun 1999 yang diikuti banyak partai politik tidak mampu menghasilkan partai politik pemenang mayoritas, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai partai politik pemenang pemilihan umum tahun 1999 hanya memperoleh suara nasional kurang lebih 30 persen.

Kala itu, jumlah pemilih yang ikut Pemilu 1999 mencapai 105.786.661 suara. Jumlah ini dibagi sesuai dengan total 462 kursi di parlemen. Setelah penghitungan, ada 18 partai politik yang masuk ke parlemen. Hasil pembagian itu menunjukkan, lima partai besar memborong 417 kursi DPR atau 90,26 persen dari 462 kursi yang diperebutkan. Pada Pemilihan Umum 1999, termasuk di Sumatera Selatan terdapat 48 organisasi peserta Pemilihan Umum 1999 di Sumatera Selatan tersebut adalah:

1 Partai Indonesia Baru	2 Partai Kristen Nasional Indonesia	3 PNI – Supeni IPNI	4 PADI	5 Partai KAMI
				
6 Partai Ummat Islam	7 PKU	8 Partai Masyumi Baru	9 PPP	10 PSI
				
11 PDI Perjuangan	12 Partai Abul Yatama	13 Partai Kebangsaan Merdeka	14 Partai Demokrasi Kasih Bangsa	15 Partai Amanat Nasional
				
16 Partai Rakyat Demokratik	17 PSII 1905	18 Partai Katolik Demokrat	19 Partai Pilihan Rakyat	20 Partai Rakyat Indonesia
				
21 PPII Masyumi	22 PBB	23 PSI	24 Partai Keadilan	25 PNU
				
26	27 Parta IPKI	28 Partai Republik	29	30



Gambar 34. Partai-Partai Peserta Pemilihan Umum 1999

Partai Golongan Karya dalam Pemilihan Umum 1999 yang semula diragukan. Namun mampu memperoleh suara besar dan secara nasional menduduki urutan kedua hasil pemilihan Umum 1999. Posisi ini dianggap karena kemampuan Partai Golongan Karya mengkonsolidasikan diri pada Musyawarah Nasional 1998. Golongan Karya merubah dirinya menjadi Partai Politik dengan paradigma baru, yang bertujuan ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa Golkar baru bersifat reformis yang berbeda dengan Golkar lama. Partai Golkar

baru memandang demokrasi suatu keniscayaan dengan visi barunya, yaitu: terbuka, mandiri, demokratis, moderat, mengakar dan responsif.

Inti dari paradigma baru Partai Golkar ini dibangun dengan nilai-nilai baru selaras dengan tuntutan reformasi, dan menjadikan dirinya sebagai partai politik yang terbuka (inklusif), mandiri (independen), demokratis, moderat, solid, mengakar dan responsif terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat, bangsa dan negara dengan melaksanakan fungsi-fungsi partai politik secara konsisten. Perubahan ini membuat Partai Golkar menjadi pemenang kedua pada Pemilu 1999 setelah PDIP. Hasil Pemilu 1999 ini memperlihatkan mesin politik Partai Golkar relatif jauh lebih baik di banding parpol-parpol lain.

Pada daerah Sumatera Selatan, Pemilihan Umum 1999 walau dimenangkan oleh PDI Perjuangan. Namun Partai Golongan Karya memapu berada pada posisi kedua. Secara urutan pada Pemilihan Umum 1999 di Sumatera Selatan didominasi oleh PDI Perjuangan, Partai Golongan Karya di posisi kedua, diikuti Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Bulan Bintang (PBB).

Kemenangan PDI Perjuangan yang mampu mengungguli Partai Golongan Karya dalam Pemilihan Umum 1999 di Sumatera Selatan. Boleh dikatakan saat itu, tidak lepas dari kekecewaan masyarakat Sumatera Selatan terhadap kinerja politik Partai Golongan Karya yang dianggap masih berada dalam bayang-bayang rezim orde baru. Sehingga Pemilihan Umum 1999 di Sumatera Selatan dianggap sebagai perlawanan masyarakat untuk tidak memilih Partai Golkar menyebabkan suara Partai Golongan Karya yang dalam pemilu-pemilu sebelumnya mendominasi. Namun tergeser menjadi urutan kedua dalam Pemilihan Umum 1999 di Sumatera Selatan.

Kampanye PDI Perjuangan dengan isu-isu kemiskinan selama orde baru menjadi senjata ampuh untuk meyakinkan pemilih, terutama masyarakat kelas menengah ke bawah yang saat itu mendominasi segmentasi pemilih di Sumatera Selatan. Kalangan inilah yang menentukan PDI Perjuangan berhasil meraih simpati pemilih dalam Pemilihan Umum 1999 di Sumatera Selatan. Seperti di daerah lain, Pemilihan Umum 1999 di Sumatera Selatan terjadi sebuah jargon politik *metal* yang berarti merah total sebagai representasi dukungan terhadap Megawati Soekarnoputri sebagai simbol politik atau *trademark*-nya PDI Perjuangan.

Selain itu, pada Pemilihan Umum 1999 di Sumatera Selatan factor ekonomi, di mana menjelang pemilu 1999 kondisi ekonomi politik yang diselimuti krisis ekonomi politik membuat masyarakat lapis bawah merasakan keadaan sulit. Merosotnya nilai Rupiah terhadap Dollar menjadi akar persoalan munculnya krisis ekonomi dan rakyat menyalahkan rezim orde baru sebagai biang kerok krisis ini. Partai Golongan karya terkena imbasnya dalam Pemilihan Umum 1999 di Sumatera Selatan sehingga mampu disalip oleh PDI Perjuangan.

Hasil perolehan kursi Pemilihan Umum 1999 di Sumatera Selatan untuk DPR-RI, sebagai berikut:

No	Partai	Jumlah Kursi
1.	PDI Perjuangan	6 Kursi
2.	Partai Golkar	4 Kursi
3.	PPP	2 Kursi
4.	PAN	1 Kursi
5.	PKB	1 Kursi
6.	PBB	1 Kursi

Adapun sebagai pemenang Pemilihan Umum 1999 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saat itu mengirim 6 anggota di DPR-RI diikuti oleh Partai Golongan Karya sebanyak 4 orang anggota. Sementara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2 anggota. Selanjutnya Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Bulan Bintang (PBB) masing-masing diwakili 1 anggota parlemen DPR-RI. Adapun nama-nama anggota DPR-RI Periode 1999-2004 Perwakilan Sumatera Selatan Hasil Pemilihan Umum 1999, sebagai berikut:

No	Nama	Partai	Dapil
1.	M. Taufiq Kemas	PDI Perjuangan	Palembang
2.	M. Nazarudin Kiemas	PDI Perjuangan	Muara Enim
3.	Dudhie Makmun Murod	PDI Perjuangan	OKU
4.	Surya Chandra Surapaty	PDI Perjuangan	Musi Banyuasin
5.	M. Yamin P. Mangkunegara	PDI Perjuangan	OKI
6.	Gusti Basan Burnia	PDI Perjuangan	Palembang
7.	Marzuki Achmad	Golongan Karya	OKI
8.	Ridwan Mukti	Golongan Karya	Musi Rawas
9.	Harry Salman Farizi Sohar	Golongan Karya	Musi Banyuasin
10.	Ahmad Hafiz Zawawi	Golongan Karya	OKU
11.	Alimarwan Hanan	PPP	Palembang
12.	Djabaruddin AR	PPP	Muara Enim
13.	Awaluddin Burhanan	PKB	Palembang

14.	Tibrani Basri	PAN	Bangka
15.	Darmansyah Husein	PBB	Belitung

Kemudian selama periode 1999-2004 anggota DPR-RI Perwakilan Sumatera Selatan Hasil Pemilihan Umum 1999 juga terjadi pergantian antar waktu, sebagai berikut:

No	Nama	Pengganti	Tahun
1	Gusti Basan Burnia	Trymedia Panjaitan	2002
2	Marzuki Achmad	Ir. H. Azhar Romli, M.Si.	-
3	Alimarwan Hanan	Anwar Malik	2001
4	Darmansyah Husein	Zainoeddin Steind Gumay	2003

Struktur dan Anggota DPRD Sumatera Selatan, 1999-2004

Sementara pada tingkat provinsi di Sumatera Selatan perolehan kursi Pemilihan Umum 1999 untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan diperoleh 65 anggota DPRD. Selanjutnya ditambah 8 anggota dari TNI-Polri dan 2 anggota yang diangkat. Adapun nama-nama anggota terpilih untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1999-2004 Hasil Pemilihan Umum 1999 tersebut, sebagai berikut:

No	Nama	Partai
1.	Drs. H. Zamzami Ahmad	Partai Golongan Karya
2.	H. Achmad Natar	Partai Golongan Karya
3.	H. Mohammad Sani Indawan, S.H.	Partai Golongan Karya
4.	H. A. Hidjazi, BBA.	Partai Golongan Karya
5.	H. Andi Achmad Ismail	Partai Golongan Karya
6.	Drs. H. Arifin Paie	Partai Golongan Karya
7.	H. Djohan Hanafiah, S.E.	Partai Golongan Karya
8.	H. Ansori Manahan, S.Pd.	Partai Golongan Karya
9.	Drs. H. Oemar Boerniat	Partai Golongan Karya
10.	Ir. Helman Effendi	Partai Golongan Karya
11.	H. Iskandar Syamwell	Partai Golongan Karya
12.	Hj. Dahlia Ibrahim	Partai Golongan Karya
13.	Drs. H. M. Ishak Sani	Partai Golongan Karya
14.	Agus Sulaiman Singadekane	Partai Golongan Karya
15.	Ir. Hj. Fatimah Syamsul	Partai Golongan Karya
16.	Drs. Elianuddin HB	PDI Perjuangan
17.	Dr. Adjis Saip, S.H.	PDI Perjuangan
18.	B.M. Nainggolan, BA.	PDI Perjuangan
19.	M. Aliandra Gantada, S.H.	PDI Perjuangan

20.	Drs. Kuwatno	PDI Perjuangan
21.	Darmadi Djufri, S.H.	PDI Perjuangan
22.	Nur Iswanto, S.H., MM., MBA.	PDI Perjuangan
23.	Hermanto, S.H.	PDI Perjuangan
24.	Suhardi Edysam	PDI Perjuangan
25.	H. Muhammad Merdeka	PDI Perjuangan
26.	Sudirman Said	PDI Perjuangan
27.	Bambang Sugianto, S.H., M.Hum.	PDI Perjuangan
28.	Zakaria Abas, S.H.	PDI Perjuangan
29.	Drs. H. Sjamsuddin Abbas	PDI Perjuangan
30.	Ir. M. Daud Isa, S.E., MBA.	PDI Perjuangan
31.	H. M. I. A. Mangkudepati, MBA.	PDI Perjuangan
32.	H. A. Gofir Nasruddin	PDI Perjuangan
33.	M. Sjamsidi TR, S.H.	PDI Perjuangan
34.	Emmy Fatrianti	PDI Perjuangan
35.	Salmiah Umar	PDI Perjuangan
36.	Sri Hastuti	PDI Perjuangan
37.	Ir. Sri Wahyuni	PDI Perjuangan
38.	Novalena, S.P.	PDI Perjuangan
39.	Ir. Syafrudi	PDI Perjuangan
40.	Maita Dewi, S.E.	PDI Perjuangan
41.	B. Sri Mardiana Putri	PDI Perjuangan
42.	H. Mohammad Natsir Jakfar	PPP
43.	H. Aminullah Ayub, MBA.	PPP
44.	Drs. Ibnu Hajar Dewantara	PPP
45.	H. Romzi Nihan, BA	PPP
46.	H. Hopandi Said, BSc.	PPP
47.	Drs. H. Syahroni Anang	PPP
48.	Hj. Fatimah Rais, BA.	Partai Amanat Nasional (PAN)
49.	Drs. H. Abdul Gaffar Guna	Partai Amanat Nasional (PAN)
50.	Ir. Mustopa Jaer	Partai Amanat Nasional (PAN)
51.	Hj. Asmurni, MBA.	Partai Amanat Nasional (PAN)
52.	Hj. Salmah Cik Udin, MBA.	Partai Amanat Nasional (PAN)
53.	H. Mahmud Fikir	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
54.	H. Kaharuddin Aziz	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
55.	H. Sudaruddin	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
56.	H. Komala Jaya Yusuf, MBA.	Partai Bulan Bintang (PBB)
57.	Drs. Umar Delair	Partai Bulan Bintang (PBB)
58.	Dr. H. Kms M. Syarkowi Wijaya, S.E., MS.	Partai Persatuan
59.	Drs. H. Kgs M. Rozali Zen	PSII Masyumi
60.	Yuswar Hidayatullah	Partai Keadilan (PK)
61.	H. Mughni Ahmad	PSII
62.	M. Fatahillah Zamzani, S.H.	Partai Daulat Rakyat (PDR)
63.	Drs. Agus Sutikno, S.E., MBA., MM.	Partai Ummat Islam (PUI)
64.	H. Abdoel Hamid Toeah, BSc.	Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)
65.	Drs. Gamaleri Aliganso, MBA.	Partai Demokrasi Indonesia (PDI)
66.	Kol. Razali Tjut Ahmad	ABRI (TNI-AD)

67.	Kol. Zafrullah Tjekmat	ABRI (TNI-AD)
68.	Kolonel Drs. HIS Amir Putra	ABRI (TNI-AD)
69.	Kol. Komaludin Ginting, S.H., SIP.	ABRI (TNI-AD)
70.	Kol. Lam. Syarli	ABRI (TNI-AD)
71.	Letkol Marno Sastrodiyono, S.E.	ABRI (TNI-AU)
72.	Kol. Djoko Budi Supono, SIP.	ABRI (TNI-AL)
73.	Kombes Drs. RM. Sjafei Diradja, S.H.	POLRI
74.	Ir. Artari, M.Sc.	Partai NU (Nahdlatul Ummat)
75.	Drs. H. Jahari	Partai Bhinneka Indonesia (PBI)

Sebenarnya, terdapat beberapa anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 1999-2004 yang pertama dilantik. Namun kemudian mengalami pergantian, antara lain:

No	Nama	Partai	Pengganti
1.	Drs. H. Ahmad Sukry Atieq, M.A.	Golkar	H. A. Hidjazi, BBA.
2.	Zulfan Abdullah, S.H.	Golkar	Ir. Hj. Fatimah Syamsul
3.	Heru Prasmaji, S.H.	PDI-P	Ir. Syafrudi
4.	Ahmad Dasuki	PDI-P	Maita Dewi, S.E.
5.	Ir. Sudirman Muchtar	PDI-P	B. Sri Mardiana Putri
6.	Drs. Azhari AS	PPP	Drs. H. Syahroni Anang
7.	H. Baharuri Nawari	PBB	Drs. Umar Delair
8.	Kolonel Sonny Poerwono	TNI	Kol. Razali Tjut Ahmad
9.	Kolonel Taswa Sunari	TNI	Kol. Zafrullah Tjekmat
10.	Kolonel Manasar Simanjuntak	TNI	Kol. Komaludin Ginting, S.H., SIP.
11	Kolonel Syahril Basir	TNI	Kol. Lam. Syarli
12	Kolonel Idrus Bahrien	TNI	Kol. Djoko Budi Supono, SIP.
13	Kolonel Drs. Soebijanto	POLRI	Kombes Drs. RM. Sjafei Diradja, S.H.

Nama-nama pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1999-2004 hasil Pemilu 1999, dengan susunan, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Partai
1.	Adjis Saip	Ketua (1999 - Juli 2003)	PDI-P
	Drs. Elianuddin HB	Ketua (Juli-Sep 2003)	PDI-P
2.	Kol. Sonny Poerwono	Wakil Ketua	ABRI
	Kolonel Drs. HIS Amir Putra	WK (Juli-Sep 2003)	ABRI
3.	Drs. H. Zamzami Ahmad	Wakil Ketua	Golkar
4.	Mohammad Natsir Jakfar	Wakil Ketua	PPP



Drs. H. Adjis Saip. Adjis Saip sosok politisi yang konsisten dan penuh tanggung jawab dalam sikap dan tugasnya. Melakukan kegiatan berpartai sudah cukup lama mulai dari zaman Partai Nasional Indonesia (PNI) hingga masa Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. Duduk di parlemen sejak Pemilu 1987 dengan menjadi DPRD Kota Palembang periode 1987-1992, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan 1992-1997.

Dengan Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Sumatera Selatan 1999-2004 adalah Iskandar Zulkarnain, S.H. dari tahun 1999 sampai 2022 dan diganti oleh Drs. H. Abdul Shobur, S.H., M.H. dari tahun 2002 sampai 2004.



Gambar 35. Peresmian Keanggotaan dan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera 1999-2004

Namun pada masa anggota DPRD Sumatera Selatan 1999-2004 ini dalam perjalannya terjadi bongkar pasang anggota DPRD Sumatera Selatan periode itu, yang awalnya anggota DPRD Sumatera Selatan periode 1999-2004 berjumlah 56 orang namun dalam perjalanannya terjadi penambahan. Hal ini disebabkan pemekaran wilayah salah satunya di tahun 2021 Bangka Belitung yang tadinya menjadi kabupaten di bawah Sumatera Selatan menjadi provinsi tersendiri

anggota DPRD Sumatera Selatan dari daerah pemilihan Bangka Belitung memilih kembali ke DPRD Bangka Belitung. Selain itu pensiunnya sejumlah perwakilan TNI/Polri dimana keterwakilan TNI /Polri di periode ini adalah keterwakilan terakhir TNI/Polri.

Sehingga komposisi anggota DPRD Sumatera Selatan 1999-2004 kembali berubah dan ditetapkan menjadi 75 orang berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.26-973 Tanggal 6 September 1999, Keputusan Nomor 161.26-1019 Tanggal 16 September 1999 dan Keputusan Nomor 161.26-1175 Tanggal 14 Oktober 1999, terdiri dari:



Gambar 36. Orientasi tugas dan fungsi DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1999-2004 di Jatinangor, Jawa Barat.

Pada pembentukan fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1999-2004, mengelompok:

1. Fraksi PDI-Perjuangan 26 Orang dari Partai PDI-Perjuangan
2. Fraksi Golkar 15 Orang dari Partai Golongan Karya
3. Fraksi TNI-Polri 8 Orang dari Wakil TNI-Polri
4. Fraksi Persatuan Gabungan 15 Orang dari PPP, PKB, PK, PBB, PSII, PDR dan PUI
5. Fraksi Reformasi 9 Orang dari PAN, PDI, PKP, Partai Persatuan dan PSII Masyumi
6. Non Fraksi 2 orang

No	Fraksi PDI-Perjuangan	Partai
1	Dr. Adjis Saip, S.H.	PDI-Perjuangan
2	B. M. Nainggolan, B.A.	PDI-Perjuangan
3	H Muhammad Merdeka	PDI-Perjuangan
4	Darmadi Djufri	PDI-Perjuangan
5	Hermanto, S.H.	PDI-Perjuangan
6	Sri Hastuti	PDI-Perjuangan
7	Zakaria Abas, S.H.	PDI-Perjuangan
8	Salmiah Umar	PDI-Perjuangan
9	Ir. M. Daud Isa, S.E, MBA	PDI-Perjuangan
10	Drs. H. Elianuddin HB	PDI-Perjuangan
11	Drs. Kuwatno	PDI-Perjuangan
12	Drs. H. Syamsuddin Abbas	PDI-Perjuangan
13	M. Sjamsidi TR, S.H.	PDI-Perjuangan
14	Ir. Sri Wahyuni	PDI-Perjuangan
15	Bambang Sugianto, S.H., M.Hum.	PDI-Perjuangan
16	M. Aliandra Gantada, S.H.	PDI-Perjuangan
17	H. M.I.A Mangkudepati, MBA	PDI-Perjuangan
18	Emmy Fatrianti	PDI-Perjuangan
19	Nur Iswanto S.H., M.M., MBA	PDI-Perjuangan
20	Suhardi Edysamm	PDI-Perjuangan
21	H. A. Gofir Nasruddin	PDI-Perjuangan
22	Novalena, S.P.	PDI-Perjuangan
23	Sudirman Said	PDI-Perjuangan
24	Maita Dewi, S.E.	PDI-Perjuangan
25	Ir. Syafrodi	PDI-Perjuangan
26	Beby Sri Mardiana Putri	PDI-Perjuangan

No	Fraksi Golkar	Partai
1	Drs. H. Zamzami Achmad	Golongan Karya
2	Drs. H. Oemar Boerniat	Golongan Karya
3	Agoes Soellaiman Singedekane	Golongan Karya
4	H. M. Sani Indawan, S.H.	Golongan Karya
5	H. Djohan Hanafiah	Golongan Karya
6	H. Ahmad Natar	Golongan Karya
7	H. Andi Achmad Ismail	Golongan Karya
8	Drs. Arifien Paie	Golongan Karya
9	Ir. Helman Effendy	Golongan Karya
10	H. Iskandar Syamwell	Golongan Karya
11	Drs. H. M. Ishak Sani	Golongan Karya
12	Hj. Dahlia Ibrahim	Golongan Karya
13	H. Ansyori Manahan, S.Pd.	Golongan Karya
14	H. A. Hidjazi, BBA	Golongan Karya
15	Ny. Hj. Ir. Fatimah Syamsul	Golongan Karya

No	Fraksi Persatuan Gabungan	Partai
1	H. M. Natsir Djakfar	PPP
2	H. Romzi Nihan	PPP
3	Drs. H. Ibnu Hajar Dewantara	PPP
4	H. Aminullah Ayub, MBA.	PPP
5	H. Hopandi Said, B.Sc, MBA	PPP
6	Drs. H. Syahroni Anang, BA	PPP
7	H. Kaharuddin Aziz	PKB
8	H. Sudaruddin	PKB
9	H. Mahmud Fikir	PKB
10	Drs. Umar Delair	PBB
11	H. Komala Jaya Yusuf, MBA	PBB
12	Yuswar Hidayatullah	PK
13	H. Mughni Ahmad	PSII
14	Drs. Agus Sutikno, S.E., MBA, MM	Partai Daulat Rakyat
15	Muhammad Fatahillah Zamzami, S.H.	Partai Ummat Islam

No	Fraksi Reformasi	Partai
1	Drs. H. A. Gaffar Guna	PAN
2	Ir. H. Mustofa Djaer	PAN
3	Hj. Asmurni	PAN
4	Hj. Fatimah Rais, BA	PAN
5	Hj. Salmah Cik Udin, MBA	PAN
6	Drs. Gamaleri Aliganso, MBA	PDI
7	H. Abdul Hamid Toeh, B.Sc.	PKP
8	Dr. H. Kms. Syarkowi Wijaya, S.E., MS.	Partai Persatuan
9	Drs. Kgs. H. M. Rozali Zen	PSII Masyumi

No	Fraksi TNI-Polri	Wakil
1	Kol. Inf. Drs. H.I.S Amir Putra	Wakil TNI-Polri
2	Kol. Inf. Razali Tjut Ahmad	Wakil TNI-Polri
3	Kol. Inf. Kamaludin Ginting, S.H., S.IP.	Wakil TNI-Polri
4	Kombes Pol. Drs. R.M. Safei Diradja, S.H.	Wakil TNI-Polri
5	Kol. Laut Djoko Budi Supono, S. IP	Wakil TNI-Polri
6	Kol. Kal. Marno Sastrodiyono, S.E.	Wakil TNI-Polri
7	Kol. Lam. Syarli	Wakil TNI-Polri
8	Kol. Inf. Zafrullah Tjekmat	Wakil TNI-Polri

No	Non-Fraksi	Partai
1	Drs. H. Jahari	Partai NU (Nahdlatul Ummat)
2	Ir. Artasi, MSc	Partai Bhinneka Indonesia (PBI)

Kemudian Komposisi Pimpinan dan anggota DPRD Sumatera Selatan Periode 1999-2004 terutama dari Fraksi PDI-P kembali berubah pasca pemilihan Gubernur Sumatera Selatan tanggal 4 Agustus 2003 yang dipilih langsung oleh DPRD Sumatera Selatan yang merupakan pemilihan terakhir yang di gelar di DPRD Sumatera Selatan.

Hal ini disebabkan 15 anggota DPRD Sumatera Selatan dari Fraksi PDI-P membelot dan tidak mendukung pasangan Calon Gubernur Sumatera Selatan H. Rosihan Arsyad dan H. Rajab Semendawai yang didukung DPP PDI-P dan mendukung Calon Gubernur Sumatera Selatan lainnya, H. Syahrial Oesman dan H. Mahyudin Ns. Ke-15 orang anggota Fraksi PDI-P tersebut akhirnya resmi diberhentikan.

Keputusan pemberhentian sekaligus pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) dari anggota DPRD Sumatera Selatan yang diberhentikan berlaku sejak dikeluarkannya SK Mendagri yaitu SK Mendagri No 161.26-323 Tahun 2004 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu DPRD Provinsi Sumatera Selatan, tertanggal 24 Maret 2004.

Ke-15 orang anggota DPRD Sumatera Selatan yang diberhentikan itu adalah para mantan kader PDI-P Provinsi Sumatera Selatan. Sebelumnya, mereka telah dikenai sanksi pemecatan dari keanggotaan partai oleh DPP PDI-P terkait dengan proses pemilihan Gubernur Sumatera Selatan tersebut. Dalam SK Mendagri itu disebutkan bahwa Mendagri meresmikan pemberhentian dengan hormat nama-nama yang tercantum dalam lampiran SK tersebut.



Gambar 37. Program Peningkatan Kompetensi Kelegislatifan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan 1999-2004

Selanjutnya dalam surat yang ditandatangani Mendagri Hari Sabarno itu diresmikan pengangkatan PAW yang juga disebutkan dalam lampiran SK serta keputusan mulai berlaku sejak ditetapkan. Ke-15 orang yang berhentian tersebut adalah Adjis Saip, Nur Iswanto, Muhammad Merdeka, Sri Wahyuni, Suhardi Edysam, A. Gofir Nasruddin, Beby Sri Mardiana Putri, Hermanto, Emmy Fatrianti, Novalena, Salmiah Umar, M. Sjamsidi TR, Syafrodi, Sudirman Said, dan Sri Hastuti.

Selain mengganti 15 anggota DPRD Sumatera Selatan dari Fraksi PDI-P di DPRD Sumatera Selatan, Ketua DPRD Sumatera Selatan yang sebelumnya dijabat Dr. Adjis Saip, S.H. digantikan anggota Fraksi PDI-P DPRD Sumatera Selatan, Drs. H. Elianuddin HB.

Pada masa awal DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1999-2004 terjadi pemekaran Provinsi Sumatera Selatan. Jika pada tanggal 18 Maret 1964 Provinsi Lampung dimekarkan dari Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 18 November 1968 Provinsi Bengkulu dipisahkan dari Provinsi Sumatera Selatan, maka pada tahun 2000 provinsi baru, Provinsi Bangka Belitung dibentuk dari provinsi induknya, Provinsi Sumatera Selatan.

Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasar berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tanggal 21 Nivember 2000 yang lepas dari Provinsi Sumatera Selatan. Membawah konsekuensi pada susunan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1999-2004. Beberapa anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1999-2004 yang berasal dari pemilihan daerah Pulau Bangka dan Pulau Belitung serta merta menjadi anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung yang baru untuk Periode 1999-2004. Perpindahan itu dimulai sejak Pemerintahan provinsi Bangka Belitung disahkan dan diresmikan pada tanggal 9 Februari 2001 dengan Pejabat Gubernur dipegang oleh H. Amur Muchasim, S.H. yang sebelumnya menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Perpindahan anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung dan pengangkatan pejabat gubernur ini, menandai dimulainya aktivitas roda pemerintahan baru Provinsi Sumatera Selatan.

Adapun anggota DPRD Provinsi Bangka Belitung yang baru untuk Periode 1999-2004 yang berasal dari DPRD Provinsi Provinsi Sumatera Selatan saat itu adalah:

No.	Nama Diganti	Partai	Nama Pengganti
1	Heru Prasmaji, S.H.	PDI Perjuangan	Maita Dewi, S.E.
2	Ahmad Dasuki	PDI Perjuangan	Ir. Syafrodi

3	Ir. Sudirman Muchtar	PDI Perjuangan	B. Sri Mardiana Putri
4	Zulfan Abdullah, S.H.	Golkar	H. A. Hidjazi, BBA.
5.	Drs. Azhari AS	PPP	M. Fatahillah Zamzani, S.H.
6.	H. Baharuri Nawari	PBB	Drs. Umar Delair

Pada tahun 2003 dilakukan pemilihan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan terakhir yang dipilih oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Adapun kandidat calon yang maju sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan periode 2003-2008 adalah pasangan:

Paslon	
Cagub	Cawagub
Laksda TNI (Purn) H. Rosihan Arsyad	H. Rajab Semendawai
Ir. H. Syahrial Oesman, MM.	Prof. Dr. dr. Mahyudin
Harry Sohar, BA	Dr. H. Marzuki Ali, S.E., M.M.

Pemilihan ini dimenangkan pasangan Ir. H. Syahrial Oesman, MM. dan Prof. Dr. dr. H. Mahyudin N.S., SpOG menang tipis satu suara dari pasangan Laksda TNI (Purn) H. Rosihan Arsyad dan H. Rajab Semendawai. Sedangkan pasangan Harry Sohar, BA dan Dr. Marzuki Ali, S.E., M.M. tidak mendapatkan suara.

Proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tanggal 4 Agustus 2003 berjalan alot dan memunculkan sejumlah persoalan. Selisih satu suara dan dihitung sampai tiga kali karena terdapat surat suara yang hilang. Namun dianggap sah secara hukum dan tidak cacat prosedur. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Drs. Jahari yang dalam keadaan sakit menggunakan hak suara didampingi anaknya dikatakan tidak memiliki persoalan karena tidak dianggap melanggar asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam pemilihan tersebut. Selain itu, berdasar PP No. 151 Tahun 2000 dan Peraturan DPRD No. 03 Tahun 2003 yang pasangan berhak menjadi pemenang adalah yang memperoleh suara terbanyak. Pada tanggal 7 November 2003 pasangan Ir. H. Syahrial Oesman, MM. - Prof. Dr. dr. Mahyudin N.S., SpOG dilantik oleh Menteri Dalam Negeri, Hari Sabarno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan periode 2003-2008.

Namun pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur ini memiliki pengaruh besar pada keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Terutama pada fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). PDI Perjuangan melakukan pemecatan pada 15 anggota fraksi dari partainya. Mereka adalah Adjis Saip, Nur Iswanto, Gofir Nasrudin,

Muhamad Merdeka, Sudirman Said, Syafrودي, Hermanto, Suhardi Eddisyam, Sjamsidi, Novalena, Sri Wahyuni, Sri Mardiana, Sri Hastuti, Salmiah Umar, dan Emmy Fatrianti. Kelimabelas anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Partai PDI Perjuangan ini direcall dan dipecat oleh Ketua PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri. Namun mereka menolak dibebastugaskan. 14 anggota ini, minus Sudirman Said, membentuk fraksi baru di DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan nama Fraksi Perjuangan dengan ketua Nur Iswanto.

Hasil-Hasil yang Dicapai DPRD Sumatera Selatan 1999-2004

Pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan yang dilakukan DPRD Provinsi Sumatera Selatan tanggal 4 Agustus 2003 dimenangkan oleh pasangan Syahril Oesman dan Mahyuddin mengalahkan pasangan incumbent H Rosihan Asyad-Radjad Semendawai meski hanya terdapat selisih satu angka. Ini merupakan pemilihan kepala daerah yang terakhir dibesut DPRD Provinsi Sumatera Selatan setelah itu pemilihan kepala daerah berdasarkan undang-undang dikembalikan ke Komisi Pemilihan Umum.

Sayang penghitungan suaranya sempat diulang 3 kali karena dinilai ada surat suara yang hilang. Hal ini DPRD Provinsi Sumatera Selatan terpecah menjadi dua kelompok yaitu kelompok 37 (pendukung H Rosihan Arsyad) dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan M. Natsir Jafar dan kelompok 38 (pendukung H Syahril Oesman) dipimpin Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Adjis Saip.

Tiga permasalahan yang dipolemikkan oleh sebagian anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Tiga permasalahan tersebut adalah, pertama, tidak ada aturan yang mewajibkan dalam penetapan bakal calon pasangan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan menjadi pasangan calon mewajibkan menyebutkan secara terbuka fraksi-fraksi pendukungnya. Kedua, keadaan sakit yang berakibat tidak mampu membaca dan menulis sebagaimana dialami oleh Drs. Jahari, yang kemudian dalam penggunaan hak suaranya didampingi oleh anaknya tidak perlu dipersoalkan dan tidak dapat dianggap melanggar asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil. Karena, sebagaimana kebiasaan pelaksanaan Pemilu, seorang Tuna Netra didampingi oleh keluarga atau anggota KPPS dengan disaksikan oleh para saksi partai

politik atau anggota KPPS mendatangi Rumah Sakit agar para pasien dapat tetap menggunakan hak pilihnya.

Ketiga, bahwa berdasarkan peraturan yang ada (PP No. 151 Tahun 2000 dan Peraturan DPRD No. 03 Tahun 2003) penulis berpendapat apabila terdapat dua kandidat pasangan calon yang mendapatkan suara, yang berhak menjadi pasangan calon terpilih ada yang memperoleh suara terbanyak. Tidak lagi berdasarkan ketentuan jumlah suara separoh plus satu. Tertundanya SK Presiden RI tentang pengesahan hasil pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan diakibatkan keterlambatan proses administrasi di Departemen Dalam Negeri. Pada tanggal 7 November 2003, tepat pukul 09.00 Jumat pagi ini, pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih Provinsi Sumatera Selatan Syahrial Oesman dan Mahyuddin dilantik Mendagri Hari Sabarno.

Dalam sambutan pelantikan yang dilakukan di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang, Hari Sabarno mengatakan, dengan dilantikannya Syahrial Oesman dan Mahyuddin maka Provinsi Sumsel telah mempunyai gubernur definitif yang sah yang merupakan Gubernur Sumsel sipil pertama setelah 35 tahun Provinsi Sumatera Selatan dipimpin Gubernur dari kalangan militer. Hari juga mengatakan, pemilihan hari pelantikan, yaitu hari Jumat di Bulan Suci Ramadhan, bukanlah satu kebetulan. Ia mewanti-wanti agar arti pelantikan ini benar-benar dihayati kedua orang kepercayaan masyarakat Provinsi Sumatera Selatan ini. "Seperti pelantikan tanggal 7 November ini, angka 7 dipercaya sebagai banyaknya lapisan langit," katanya. "Surat Keputusan (SK) no 203 itu, kalau dijumlah adalah lima, jumlah rukun Islam," kata Hari yang entah mengapa sedang senang mengotak-atik angka ini. Hari juga mengatakan, bahwa lambatnya pelantikan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan bukan karena ada masalah, tetapi itu bertanda adanya dinamika yang tinggi di daerah ini. "Dan itulah proses demokrasi," katanya.

Dalam pelantikan nampak hadir beberapa pejabat dan tokoh masyarakat, baik sipil maupun militer seperti Menteri Koperasi Alimarwan Hanan, Guruh Soekarno Putra, Marzuki Usman dan mantan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Ramli Hasan Basri. Pasca pemilihan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan tersebut Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri memecat 15 orang anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang dianggap membelot dan tidak memilih pasangan H Rosihan Arsyad –

Radjab Semendawai, mereka yang di pecat adalah Adjis Saip (Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Selatan /Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan), Suhardi Edisyam, B Sri Mardani, Emi Fatrianti, A Gofir Nasrudin, Hermanto, Novalena, M Syamsidi, Salmiah Umar, Muhammad Merdeka, Saprodi, Nuriswanto, Sudirman Said, Sri Wahyuni dan Sri Hastuti.

Hasil kerja besar lain DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada masa ini adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengadakan perjanjian pemanfaatan BMD dengan PT Bayu Jaya Lestari Sukses (PT BJLS) berupa tanah yang berada pada Jalan Angkatan 45 Palembang. Perjanjian inipun disetujui DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Pihak Pertama yaitu H. Rosihan Arsyad (Gubernur Provinsi Sumatera Selatan) dan Pihak Kedua yaitu Sengman Tjahja (Direktur Utama) sepakat mengikat diri dalam Perjanjian Kerja Sama Nomor 14/SPK/III/2002 dan Nomor SPK-02/BJLS/VIII/2002 tanggal 2 Agustus 2002 tentang Pembangunan, Pengelolaan dan Penyerahan (Build, Operate and Transfer/BOT) Aset Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berupa Lahan/Tanah Sertifikat Hak Pakai Nomor 336 Tanggal 8 April 1986 dan Nomor 384 Tanggal 20 April 1986 dengan Luas 56.217 m² yang terletak di Jalan Angkatan 45 Palembang.

Obyek BOT adalah tanah seluas 56.217 m² yang merupakan milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Sertifikat Hak Pakai (HP) Nomor 384 tanggal 20 April 1994 seluas 26.855 m² dan Nomor 335 tanggal 8 April 1986 seluas 29.362 m² dan merupakan eks. Taman Ria. Hasil dari BOT berupa gedung pusat perbelanjaan, hotel bintang 4, bangunan kantor toko (Kantor), dan fasilitas perparkiran yang dibangun dan dikelola oleh PT BJLS akan diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan setelah berakhirnya masa pengelolaan yaitu selama 25 tahun.

Perjanjian ini kemudian diubah dengan Adendum Nomor 16/Add/SK/IX/02 dan Nomor 030/BJLS/XII/2002 tanggal 24 Desember 2002 karena adanya pelepasan hak tanah seluas 24.253m² yang semula dikerjasamakan melalui ganti rugi dan ruislag oleh PT BJLS. Perubahan perjanjian mencakup hal-hal berikut.

1. Tanah yang dikerjasamakan menjadi seluas 30.287 m² dengan Sertifikat HPL Nomor 01 tanggal 23 September 2002;
2. Hasil BOT berupa Hotel Bintang 4 dan Fasilitas Perparkiran;

3. PT BJLS wajib menyediakan satu buah kantor bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang terletak menghadap Lapangan Parkir Bumi Sriwijaya;
4. Jangka waktu pengelolaan hotel dan fasilitas perparkiran ditetapkan selama 30 tahun dihitung mulai dioperasikannya dan atau selesainya pembangunan Hotel Bintang 4 dan fasilitasnya;
5. Setelah berakhirnya jangka waktu pengelolaan, PT BJLS dapat mengajukan usulan untuk memperpanjang jangka waktu pengelolaan Hotel Bintang 4 sesuai dengan syarat dan ketentuan yang akan ditetapkan/disepakati oleh kedua belah pihak.

Selain itu, DPRD Provinsi Sumatera Selatan pernah membuat Peraturan Daerah (Perda) pertama di Sumsel yaitu Perda Nomor 12/tahun 2002 tentang Pemberantasan Maksiat. Selanjutnya, menyetujui melalui APBD Provinsi Sumatera Selatan pembuatan Jalan Palembang -Tanjung Api-Api, Jalan Prabumulih - Baturaja, Jalan Sekayu- Lubuk Linggau, dan menyetujui pelaksanaan Provinsi Sumatera Selatan sebagai tuan rumah PON XVI-2004 (PON XVI-2004) dari 2 September hingga 14 September 2004.

Pada periode ini juga, Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Adjis Saip bersama Gubernur Provinsi Sumatera Selatan H Rosihan Arsyad digugat di PTUN Palembang lantaran melakukan pengalihan dana bantuan sosial menjadi dana mobilitas anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebanyak Rp2, 22 miliar dalam APBD Sumsel Tahun Anggaran 2000.

BAB 13

DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2004-2009

Pada Bab ini dikaji DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2004-2009. Pada pemilu 2004 terlihat mulai menguatnya partai-partai mapan, seperti Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Serta munculnya partai baru, Partai Demokrat yang mampu mengimbangi partai-partai mapan tersebut dalam Pemilu 2004.

Keadaan politik menjelang Pengangkatan Anggota DPRD Sumatera Selatan, 2004-2009

Ada dua peristiwa penting menjelang Pemilihan Umum 2004. Pertama, Pemilu 2004, selain memilih wakil rakyat untuk duduk di parlemen. Kedua, Pemilu 2004 merupakan pertama kali rakyat melaksanakan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Menurut konstitusi 1945 hasil amandemen ke-4, pemilihan pasangan presiden dan wakil presiden tidak lagi dipilih melalui Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Konstitusi mengamanatkan pemilihan presiden dan wakil presiden dilakukan oleh rakyat secara langsung melalui mekanisme pemilu.

Pemilihan Umum 2004 eksperimen baru dalam demokrasi Indonesia yang berbeda sangat jauh dengan Pemilihan Umum 1999. Hal tersebut disebabkan menjelang Pemilihan Umum 2004 dilakukan amandemen ke-4 UUD 1945. Amandemen ini terutama menyangkut Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Rakyat berdaulat atas kehendak dan hak-hak politiknya. Sehingga melalui amandemen struktur politik Indonesia dirubah sedemikian rupa sehingga mempengaruhi proses rekrutmen elit politik.

Beberapa perubahan penting lain dalam amandemen tersebut, berkaitan dengan Pemilihan Umum 2004, tidak saja dalam hal mekanisme pemilihan presiden dan wakil presiden. Namun juga dibentuknya lembaga baru yang bernama Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Perubahan terjadi juga pada pola rekrutmen kepala daerah yang efektif dilakukan setelah pemilu nasional 2004. Kehadiran

lembaga DPD menjadikan konsep perwakilan yang dianut Indonesia bergeser dari *unicameral* menjadi *bicameral*. Secara prinsip, konsep perwakilan yang ada di DPD, sesuai namanya, adalah wujud dari representasi ruang atau daerah yang diwakilinya. Ide perwakilan ruang ini terbentuk untuk mengkompensasi kelemahan dalam perwakilan politik yang ada di DPR. Di dewan terjadi ketidakseimbangan antara perwakilan politik yang berasal dari Jawa dan luar Jawa. Akibatnya, jumlah wakil yang ada di DPR lebih banyak berasal dari daerah Pulau Jawa dibandingkan wakil dari daerah luar Pulau Jawa. Dengan hadirnya DPD, ketidak seimbangan itu berusaha diatasi.

Pemilihan Umum 2004 jumlah partai politik yang mendaftarkan diri melalui Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia justru bertambah menjadi 237 partai politik. Akan tetapi partai politik yang bisa mengikuti pemilihan umum tahun 2004 "hanya" 24 partai politik ditambah partai lokal yang ada di Aceh.

Ke-24 partai yang ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2004 setelah berhasil melalui 3 tahap penyaringan. Penyaringan tahap pertama dilakukan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam memberikan status atau pengesahan partai politik sebagai sebuah badan hukum sesuai UU No. 31 Tahun 2002 Tentang Partai Politik. Pada tahap ini ada 50 partai politik yang dinyatakan lulus penyaringan.

Penyaringan tahap kedua verifikasi administratif oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ke-50 partai yang lulus penyaringan Kementerian Kehakiman dan HAM mendaftarkan diri ke KPU untuk menjadi calon peserta Pemilu. Sebuah partai politik berhak mengikuti Pemilu 2004 apabila memenuhi sejumlah persyaratan. Pertama, mempunyai kepengurusan lengkap di sekurang-kurangnya 2/3 jumlah provinsi di Indonesia. Kedua, mempunyai pengurus lengkap di sekurang-kurangnya 2/3 kabupaten/kota di setiap provinsi di mana ia mempunyai kepengurusan. Ketiga, semua kepengurusan tersebut harus mempunyai kantor. Keempat, mempunyai anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk di setiap daerah di mana ia mempunyai pengurus. Pembuktian setiap partai yang mendaftarkan diri tersebut dilakukan melalui proses verifikasi, baik verifikasi administratif dan verifikasi faktual.

Verifikasi faktual merupakan penyaringan tahap ketiga yang meneliti dan memastikan kebenaran dokumen-dokumen mengenai kepengurusan dan keanggotaan dalam verifikasi administratif.

Berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2003 ada enam partai telah lulus *electoral threshold* (mempunyai 2% dari jumlah kursi di DPR) di dalam Pemilu 1999. Partai yang sudah memenuhi *electoral threshold* tersebut, langsung ditetapkan menjadi peserta Pemilu 2004 apabila mendaftarkan diri sebagai calon peserta Pemilu ke KPU. Keenam partai tersebut adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, dan Partai Bulan Bintang. Oleh karena jumlah partai yang mengikuti proses verifikasi ada 44. Setelah keseluruhan proses verifikasi selesai, ada 18 partai yang lulus. Ditambah dengan 6 partai yang lulus *threshold*, jumlah keseluruhan partai yang berhak menjadi peserta Pemilu 2004 adalah 24.

Berdasarkan penyaringan kedua dan ketiga akhirnya KPU memutuskan dari 50 partai hanya 24 partai yang bias menjadi organisasi peserta pemilu (OPP) Pemilihan Umum 2004. Partai-Partai tersebut adalah:

1
PNI Marhaenisme



2
Partai Buruh Sosial Demokrat



3
Partai Bulan Bintang



4
Partai Merdeka



5
Partai Persatuan Pembangunan



6
Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan



7
Partai Perhimpunan Indonesia Baru



8
Partai Nasional Banteng Kemerdekaan



9
Partai Demokrat



10
Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia



11
Partai Penegak Demokrasi Indonesia



12
Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia



13

14

15

16



Gambar 38. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2004

Pemilihan Umum 2004 menggunakan landasan yuridis Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 melalui model pencantuman daftar nama calon anggota legislatif dalam surat suara, sehingga format surat suara yang dicetak KPU menjadi sangat besar dan lebar. Namun demikian masyarakat pemilih bisa langsung memilih calon di setiap daerah pemilihan. Dengan berbagai kekurangan yang terjadi, Pemilu 2004 yang diikuti oleh 24 (dua puluh empat) parpol peserta pemilu berhasil diselenggarakan, meskipun tingkat kerumitannya tinggi akibat surat suara harus berbeda antar-daerah pemilihan, baik bagi DPR RI maupun DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dan potensi tertukar antar-daerah pemilihan serta kesalahan cetak sangat tinggi.

Pemilihan Umum 2004 memiliki dua macam pemilihan umum, yang pertama pemilihan untuk memilih anggota parlemen yang partainya memenuhi *parliamentary threshold*. Saat itu, pemilu diikuti oleh 24 partai politik dan diselenggarakan pada 5 April 2004. Kedua, melakukan pemilihan presiden yang diikuti oleh lima pasangan calon. Pada pemilihan calon presiden tahun 2004 dilakukan dua putaran. Putaran pertama dilakukan pada 5 Juli 2004, sedangkan putaran kedua dilakukan pada 20 September 2004.

Ketentuan ini sesuai dengan perubahan Pasal 6A Ayat (1) UUD 1945. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat. Pasal 5 Ayat (4) UUD 1945 juga menyatakan bahwa calon presiden dan wakil presiden hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15 persen dari jumlah kursi DPR atau 20 persen dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR. Kemudian, pasangan calon presiden dan wakil presiden dinyatakan terpilih apabila mendapatkan suara melebihi 50 persen dari jumlah suara dalam pilpres, dengan sedikitnya 20 persen suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 66 Ayat (2) UU Pemilu. Apabila tidak ada pasangan calon terpilih sesuai dengan ketentuan tersebut, maka diadakan putaran kedua, yakni dua pasangan calon yang mendapat suara terbanyak pertama dan kedua dipilih kembali oleh rakyat secara langsung melalui pilpres.

Dalam Pemilu 2004, ada perbedaan sistem bila dibandingkan dengan pemilu periode sebelumnya, khususnya dalam sistem pemilihan DPR/DPRD, sistem pemilihan DPD, dan pemilihan presiden-wakil presiden yang dilakukan secara langsung dan bukan lagi melalui anggota MPR seperti pemilu sebelumnya. Selain itu, penyelenggaraan pemilu juga bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Pemilihan Umum 2004

Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2004 diselenggarakan secara serentak pada tanggal 5 April 2004 untuk memilih 550 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 128 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2004-2009.

Hasil akhir pemilu menunjukkan bahwa Golkar mendapat suara terbanyak. Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dua partai terbaru dalam pemilu ini, mendapat 7,45% dan 7,34% suara. Pemilihan umum 2004 dinyatakan sebagai pemilu paling rumit dalam sejarah demokrasi.

Sementara itu di Sumatera Selatan, belasan Partai Politik (Parpol) di beberapa kabupaten dan kota di Sumatera Selatan menolak

hasil Pemilu 2004. Setelah 18 parpol di Kota Prabumulih, giliran 11 parpol di Muaraenim, dan 16 parpol di Musirawas. Alasan penolakan hasil Pemilu 2004 itu yakni banyak ketidak-sesuaian perhitungan suara antara jumlah suara dengan jumlah suara yang sah yang dilakukan petugas di TPS-TPS, serta indikasi *money politic*. Aksi itu sama sekali tidak diikuti Partai Golkar. Di Muaraenim, ke-11 parpol itu PD, PPP, PNUI, PDIP, PBB, PBSO, PKS, PIB, PKB, PPDI, dan Merdeka.

Menurut Ketua DPC PKS Muaraenim, Zulkarnain, salah satu persoalan amburadulnya kerja KPU yakni ketidakakuratan data perhitungan jumlah suara. Contohnya, perhitungan suara di TPS Desa Tanjung Serian. Dari hasil rekapitulasi tertulis jumlah suara untuk DPRD II 1008. Padahal suara sah 795. Jadi ada kelebihan 213, yang menjadi pertanyaan kami suara siapa yang lebih itu. Kemudian, jumlah suara untuk DPR-RI di TPS Pasar II Muaraenim, disebutkan bahwa jumlah suaranya 2699 dan jumlah suara sah 3781 suara, berarti ada kekurangan 1802 suara.

Sesuai dengan UU No 12 tahun 2003 pasal 96 ayat 11 disebutkan, saksi Parpol mendapatkan salinan rekapitulasi perhitungan suara di KPPS. Tetapi kenyataannya para petugas saksi dari Parpol tidak pernah mendapatkan hasil rekapitulasi, bahkan pihaknya terpaksa merekap sendiri-sendiri. Pihaknya mengharapkan kepada KPUD Muaraenim benar-benar memperhatikan aspirasi mereka. Bila perlu, jika pihak KPUD dan PPK merasa kekurangan tenaga atau petugas dalam penghitungan suara, pihaknya sanggup menyiapkan pararelawan tersebut.

Sementara di 16 parpol Musirawas yang tergabung dalam Forum Lintas Parpol menolak hasil Pemilu 5 April 2004. Alasannya begitu banyak surat suara yang rusak lantaran KPU menempeli setiap lembar kertas suara dengan nomor urut dan nama caleg PAN. Sudah ada kesepakatan antara KPU, Panwaslu dan Parpol bahwa kertas suara akibat kesalahan cetak itu dicetak ulang, namun KPU masih saja tetap menempelkan nama dan gambar parpol.

Penolakan ini untuk mengingatkan anggota KPUD dan PPK karena selain di kertas suara ada cacat juga banyak terjadi pembengkakan hasil perolehan suara. Makanya kita menolak hasil Pemilu ini. Seperti diketahui akibat kesalahan cetak surat suara DPRD Kabupaten Musirawas soal nama dan nomor urut caleg PAN, ribuan kertas suara itu diperbaiki dengan menempelkan lembaran perbaikan di

kertas suara. Padahal berdasarkan keputusan KPU Pusat kertas suara itu harus dicetak ulang.

Ke-16 Parpol yang menolak hasil Pemilu dan minta Pemilu diulang di Musirawas itu adalah PNI-M, PBSB, PBB, P Merdeka, PPP, PPK, PNBK, PPDI, PPNUI, PAN, PBR, PDS, Patriot Pancasila, PSI, PPD dan Pelopor. Pernyataan bersama itu dikirim ke KPU Pusat, Ketua Panwaslu Pusat dan Mahkamah Konstitusi.

Sebelumnya sebanyak 18 parpol di Prabumulih juga menyatakan menolak hasil Pemilu 2004 dan menuntut pemungutan suara ulang, lalu di Palembang tiga parpol yakni PNBK, PIB, dan PPK, menyatakan hal yang sama. Dalam pemilu 2004, di DPRD Sumsel periode 2004-2009 Partai Golkar merai 16 kursi, PDI Perjuangan meraih 12 kursi, Partai Demokrat meraih 9 kursi, PAN Meraih 8 kursi, PPP meraih 6 kursi, PBR meraih 6 kursi, PBB meraih 1 kursi, PKS meraih 4 kursi, PKB meraih 4 kursi

Struktur DPRD Provinsi Sumatera Selatan 2004-2009

Pada Pemilihan Umum 2004 di Sumatera Selatan terjadi pembalikan hasil. Jika pada Pemilihan Umum 1999, PDI Perjuangan berhasil menempati urutan pertama dan Partai Golkar ada di urutan kedua. Namun pada Pemilihan Umum 2004 Partai Golkar berhasil memenangi pertarungan diikuti oleh PDI Perjuangan di posisi kedua. Konfigurasi hasil Pemilihan Umum 2004 di Sumatera Selatan juga mengalami pergeseran Partai Demokrat yang notabene partai baru berhasil berada pada posisi ketiga, diikuti oleh Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merupakan nama baru dalam Pemilihan Umum 2004 di Sumatera Selatan setelah dalam Pemilu 199 sebelum bernama Partai Keadilan (PK)

Perolehan Suara Pemilu 2004 untuk DPR-RI perwakilan Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut:

No	Partai	Jumlah Suara	Jumlah Kursi
1.	Partai Golongan Karya	714.399	4 Kursi
2.	PDI Perjuangan	576.596	2 Kursi
3.	Partai Demokrat	358.718	2 Kursi
4.	PAN	234.608	2 Kursi
5.	PPP	218.019	2 Kursi

6.	PKS	204.870	1 Kursi
7.	PBR	182.134	1 Kursi
8.	PKB	143.501	1 Kursi
9.	PBB	137.995	1 Kursi

Sementara nama-nama anggota DPR-RI Periode 2004-2009 Perwakilan Sumatera Selatan Hasil Pemilihan Umum 2004, sebagai berikut:

No	Nama	Partai	Dapil
1.	Marzuki Achmad	Golongan Karya	Sumsel II
2.	Ridwan Mukti	Golongan Karya	Sumsel I
3.	Drs. Kahar Muzakir	Golongan Karya	Sumsel I
4.	Ahmad Hafiz Zawawi	Golongan Karya	Sumsel II
5.	dr. H. Hakim Sorimuda Pohan, SpOG	Demokrat	Sumsel I
6.	Sarjan Tahir, SE., MM.	Demokrat	Sumsel II
7.	M. Nazarudin Kiemas	PDI Perjuangan	Sumsel I
8.	Dudhie Makmun Murod	PDI Perjuangan	Sumsel II
9.	H. Romzi Nian, S.IP.	PPP	Sumsel II
10.	Drs. H. Djabaruddin Ahmad	PPP	Sumsel I
11.	M. Joko Santoso, S.Sos.	PAN	Sumsel I
12.	Ir. Putra Jaya Husin	PAN	Sumsel II
13.	Mustafa Kamal, S.S.	PKS	Sumsel I
14.	Dr. H. Ishartanto, S.E., M.M.A.	PKB	Sumsel I
15.	Drs. H. Moh. Darus Agap	PBB	Sumsel II
16.	Bursah Zarnubi, SE.	PBR	Sumsel II

Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2004 dilaksanakan dengan sistem yang berbeda dari pemilu-pemilu sebelumnya. Pemilihan Umum anggota DPR-RI dan DPRD Provinsi dilaksanakan dengan sistem perwakilan berimbang (proporsional) dengan system daftar calon terbuka. Partai politik peserta Pemilu 2004 akan mendapatkan kursi dari sejumlah suara sah yang diperoleh. Pembagian kursi akan diberikan kepada calon yang memenuhi atau melebihi nilai bilangan pembagi pemilih (BPP). Apabila tidak ada calon yang memenuhi BPP, maka penentuan kursi akan diberikan pada calon berdasarkan nomor urut. Perolehan Suara Pemilu 2004 untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut:

No	Partai	Jumlah Kursi
1.	Partai Golongan Karya	16 Kursi
2.	PDI Perjuangan	12 Kursi
3.	Partai Demokrat	9 Kursi

4.	PAN	7 Kursi
5.	PPP	6 Kursi
6.	PKS	4 Kursi
7.	PBR	5 Kursi
8.	PKB	4 Kursi
9.	PBB	1 Kursi
10.	PPNUI	1 Kursi

Adapun nama-nama anggota terpilih DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2004-2009 Hasil Pemilihan Umum 2004, sebagai berikut:

No	Nama	Partai	Dapil
1.	Drs. H. Zamzami Ahmad	Partai Golkar	Sumsel VI
2.	H. Ahmad Natar	Partai Golkar	Sumsel V
3.	Drs. H. Arifin Paie	Partai Golkar	Sumsel IV
4.	Ir. Achmad Syafiar	Partai Golkar	Sumsel I
5.	Dhennie Zainal, S.E.	Partai Golkar	Sumsel II
6.	Drs. H. Oemar Boerniat	Partai Golkar	Sumsel V
7.	Fatonah Al-Syamsuddin	Partai Golkar	Sumsel III
8.	Ir. Hj. Fatimah Syamsul	Partai Golkar	Sumsel II
9.	Kol. H. (Purn) Drs. Supardi	Partai Golkar	Sumsel III
10.	Drs. H. Abdul Karim Anie	Partai Golkar	Sumsel VII
11.	Drs. Djafri Iwansyah	Partai Golkar	Sumsel VII
12.	Hermansyah, AK	Partai Golkar	Sumsel I
13.	H. Hasan Basri, S.E.	Partai Golkar	Sumsel I
14.	Ir. H. Hilman Effendy	Partai Golkar	Sumsel II
15.	H. Sartimin, SIP.	Partai Golkar	Sumsel IV
16.	Drs. H. Johan Anuar, S.H.	Partai Golkar	Sumsel V
17.	Drs. H. Elianuddin HB	PDI Perjuangan	Sumsel II
18.	M. Aliandra Pati Gantada, S.H.	PDI Perjuangan	Sumsel III
19.	Drs. Kuwatno	PDI Perjuangan	Sumsel I
20.	Darmadi Djufri, S.H.	PDI Perjuangan	Sumsel VII
21.	Drs. H. Sjamsuddin Abbas, M.A.	PDI Perjuangan	Sumsel VI
22.	Fahlevi Maizano, S.H.	PDI Perjuangan	Sumsel V
23.	Ir. A. Lagan, MM.	PDI Perjuangan	Sumsel I
24.	Drs. IG Soewardjo	PDI Perjuangan	Sumsel V
25.	Maita Dewi, S.E.	PDI Perjuangan	Sumsel II
26.	Leny Fati Yani	PDI Perjuangan	Sumsel III
27.	Aswandi Asgap Serampoe	PDI Perjuangan	Sumsel IV
28.	M. Giri Ramanda N. Kiemas, S.E.	PDI Perjuangan	Sumsel IV
29.	Arudji Kartawinata	Partai Demokrat	Sumsel I
30.	H. Asmoensi Asyik, BSc.	Partai Demokrat	Sumsel II
31.	Ir. H. Bihaqqi Soefyan	Partai Demokrat	Sumsel II
32.	Ir. H. Muslimi, BIE	Partai Demokrat	Sumsel VI
33.	Drs. H. Syafei Alim, M.A.	Partai Demokrat	Sumsel V

34.	Ir. Syaiful Islam	Partai Demokrat	Sumsel I
35.	Ir. Mislaha R	Partai Demokrat	Sumsel I
36.	Hj. Rogayati Baidjuri, S.H.	Partai Demokrat	Sumsel VII
37.	Ir. H. Ahmad Yani, MM.	Partai Demokrat	Sumsel IV
38.	Hj. Fatimah Rais, BA.	PAN	Sumsel VI
39.	Amin Kias, S.H.	PAN	Sumsel I
40.	Amrullah H. Munir, BBA	PAN	Sumsel II
41.	Jamal Rosyidin Hakki	PAN	Sumsel V
42.	Septiatini, S.E.	PAN	Sumsel III
43.	Muammar Khadafi, S.E.	PAN	Sumsel III
44.	Drs. Badrullah Daud Kohar	PAN	Sumsel VII
45.	Drs. Ibnu Hajar Dewantara	PAN	Sumsel III
46.	Drs. Azhari AS, M.H.	PPP	Sumsel V
47.	Musthofa Tenar	PPP	Sumsel VI
48.	Fatimah Zuhro, S.H., CN.	PPP	Sumsel I
49.	Khoiriah YS, S.Ag.	PPP	Sumsel IV
50.	Agus Sutikno, S.E., MBA. MM.	PPP	Sumsel II
51.	Nur Iswanto, S.H.	PBR	Sumsel VI
52.	Dr. H. Kms Syarkowi Wijaya, S.E., MS.	PBR	Sumsel I
53.	STA Latief Hasjim, S.H., M.Hum.	PBR	Sumsel III
54.	Dr. Ir. H. Sukman NS, MS.	PBR	Sumsel II
55.	Ir. Artasi, M.Sc.	PBR	Sumsel VI
56.	Amiruddin Nahrowi, S.Ag.	PKB	Sumsel V
57.	Drs. H. Ahmad Fikri	PKB	Sumsel II
58.	Drs. Ramlan Holdan	PKB	Sumsel III
59.	Ibnu Hakim, S.Ag.	PKB	Sumsel VII
60.	Drs. H. Mohd. Iqbal Romzi	PKS	Sumsel I
61.	H. Tol'at Wafa Ahmad, Lc.	PKS	Sumsel III
62.	Ir. Bahruddin	PKS	Sumsel II
63.	Zahrudin Hodsay, S.Pd.	PKS	Sumsel I
64.	Ir. H. Nasrul Anis	PBB	Sumsel V
65.	Syamsul Wijaya	PPNUI	Sumsel II

Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2004-2009 hasil Pemilihan Umum 2004, dengan susunan, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Partai
1.	Drs. H. Zamzami Ahmad	Ketua	Golkar
2.	Drs. H. Elianuddin HB	Wakil Ketua	PDI-P
3.	Ir. H. Bihaqqi Soefyan	Wakil Ketua	Demokrat
4.	Hj. Fatimah Rais, BA.	Wakil Ketua	PAN

Sekretaris Dewan DPRD Provinsi Sumatera Selatan 2004-2009 adalah Drs. H. Mulyanto, M.M. dari tahun 2004 sampai 2006 dan diganti oleh Ir. H. Sofyan Machmud, M.Si. dari tahun 2006 sampai 2009.

Pelantikan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2004-2009 dilaksanakan pada Rabu, 23 September 2004. Pelantikan dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri, Letjen TNI (Purn) Hari Sabarno yang diwakili oleh Gubernur Sumatera Selatan, Ir. H. Syahril Oesman, MM. Namun satu anggota terpilih, karena masalah status pegawai negeri sipil, Drs. Badrullah Daud Kohar dari Partai Amanat Nasional (PAN) baru dapat dilantik pada tanggal 1 November 2004.

Sementara Pergantian Antar Waktu DPRD Provinsi Sumatera Selatan adalah Arudji Kartawinata dengan Anton Nurdin dari Partai Demokrat menjelang masa akhir DPRD Provinsi Sumatera Selatan di bulan Februari 2014.



Drs. H. Zamzami Achmad. Kelahiran Lahat, 30 Juli 1937. Pendidikan Sekolah Rakyat diselesaikan tahun 1948 di Lahat. Sekolah Menengah Pertama tahun 1954. Sekolah Menengah Atas tahun 1957. Melanjutkan ke Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) selesai tahun 1964. Sarjana S1 Institut Ilmu Pemerintah selesai tahun 1977. Jabatan di pemerintahan sebagai Sekwilda Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lahat dan Tugub Wilayah I Palembang. Terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemilu 1999 dan Pemilu 2004.



Drs. H. Elianuddin, HB. Kelahiran Palembang, 19 September 1962. Pendidikan SD Xaverius 3 Palembang, 1973. SMP Xaverius III Palembang, 1977. SMA Xaverius 1, 1981. Sarjana S1 FISIP di Universitas Diponegoro Semarang selesai tahun 1988. Terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemilu 1999 dan Pemilu 2004



Ir. H. Bihagqi Soefyan. Pria kalem kelahiran Krui, Lampung, 1 Juni 1962. Menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas di tanah kelahiran Krui, Lampung. Mendapat gelar Sarjana Pertanian dari Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Jabatan politis sebagai wakil ketua DPD Partai Demokrat Sumatera Selatan. Terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemilu 2004.



Hj. Fatimah Rais, BA. Putri kelahiran Solo tanggal 26 Januari 1942. Pendidikan SD selesai tahun 1954. SMP selesai tahun 1957. SMA selesai tahun 1960. Pendidikan Diploma D3 selesai tahun 1963. Adik kandung dari Ketua MPRS/DPR RI 1999-2004 dan pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), Prof. Dr. M. Amien Rais ini terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemilu 1999 dan Pemilu 2004.

Hasil-hasil yang dicapai DPRD Sumatera Selatan, 2004-2009

Beberapa Peraturan Daerah (Perda) yang diterbitkan oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2004 sampai 2009 dalam mengawal pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan antara lain. Mengeluarkan perda nomor 26 tahun 2004 tentang rencana strategis pembangunan daerah provinsi Sumatera Selatan tahun 2003-2009. Perencanaan strategis merupakan arahan dan tuntunan dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam proses yang dilakukan oleh Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan dalam menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) dalam mencapai strategi ini.

DPRD Provinsi Sumatera Selatan mengharapkan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan mengalokasikan seluruh sumber daya yang menjadi strategi dan diproyeksikan dalam jangka waktu atau periode tertentu yang diharapkan dapat mencapai target yang diharapkan pada akhir periode tersebut. Rencana Strategis (Renstra) Pemerintahan

Provinsi Sumatera Selatan menjadi acuan bagi seluruh unit organisasi di lingkungan pemprov Sumatera Selatan dalam penyusunan rencana strategis unit kerja, perencanaan kinerja tahunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan pelaporan atas pelaksanaan rencana kinerja tersebut. Renstra pemprov Sumatera Selatan memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi BPKP.

Selanjutnya DPRD Provinsi Sumatera Selatan juga menyusun arah kebijakan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan mengenai lumbung pangan nasional tahun 2006-2025 yang tertuang dalam Perda Nomor 6 tahun 2007. Program Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan merupakan arah kebijakan untuk Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan suatu perencanaan yang meliputi serangkaian aktivitas terpadu di bidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan, termasuk agroindustri dan pemasarannya dalam kerangka system dan usaha agribisnis. Kegiatan ini diharapkan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan melalui investasi dan ekspor sector pertanian.

Selain itu peningkatan kualitas dan penyerapan tenaga kerja secara proporsional untuk mengurangi pengangguran, pengentasan tingkat kemiskinan dilakukan dalam program ini. Program ini juga diharapkan meningkatkan pendapatan masyarakat serta memacu revitalisasi pedesaan dan memantapkan ketahanan pangan masyarakat di Sumatera Selatan.

Peraturan Daerah tatkala penting lainnya sebagai hasil kerja DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode ini adalah Perda Nomor 5 tahun 2007 tentang hari jadi Provinsi Sumatera Selatan. Penetapan hari jadi diambil setiap tanggal 15 Mei. Dasarnya pada tanggal 15 Mei 1946 bertepatan dengan diumumkan pembagian wilayah Provinsi Sumatera menjadi tiga sub-provinsi berdasarkan usul dan pertimbangan konferensi residen seluruh Sumatera, wakil pemerintah pusat, dan keputusan Dewan Rakyat Sumatera. Ketiga sub-provinsi itu, yakni Sub-Provinsi Sumatera Utara meliputi Keresidenan Aceh, Sumatera Timur dan Tapanuli, Sub-Provinsi Sumatera Tengah yang meliputi keresidenan Sumatera Barat, Riau dan Jambi. Selanjutnya Sub-Provinsi Sumatera Selatan meliputi keresidenan Bengkulu, Palembang, Lampung dan Bangka Belitung.

Berdasarkan pembagian wilayah itu, melalui proses panjang dilandasi kajian ilmiah dan segala pertimbangan dari berbagai aspek, baik aspek yuridis, historis sosiologis, filosofis dan budaya serta meliputi penelitian terhadap dokumen hasil musyawarah Bukit Tinggi dan data data di Arsip Nasional Jakarta, akhirnya disepakati bahwa pada 15 Mei 1946 adalah sebagai awal terbentuknya Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya DPRD Provinsi Sumatera Selatan mengeluarkan Perda Nomor 5 Tahun 2007 sebagai hari jadi Provinsi Sumatera Selatan. Tujuan hari jadi ini agar Sumatera Selatan yang memiliki potensi sumber daya alam luar biasa. Baik dalam perut buminya seperti sumber gas alam, minyak bumi, batu bara mineral dan segala apa yang diperlukan pasar dunia. Serta apa yang ada di atas tanahnya yang cukup subur untuk membudidayakan segala komoditas bernilai ekonomi tinggi. Sehingga semuanya dapat diproses dalam industry pengolahan atas sumber daya alam di dalam tanah dan di atas tanah yang bermanfaat untuk kesejahteraan seluruh masyarakat di Sumatera Selatan yang sudah berkontribusi tinggi sejak berabad-abad yang lalu.

Pada tahun 2009 melalui Perda nomor 3 DPRD Provinsi Sumatera Selatan juga mengamanatkan Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan melenggarakan program sekolah gratis. Program ini meminta Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan melakukan penyelenggaraan sekolah gratis di berbagai tingkatan pendidikan dalam meringankan beban orang tua siswa. Program ini sekaligus mempercepat program wajib belajar dan memutus angka buta aksara di masyarakat Sumatera Selatan.

BAB 14

DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2009-2014

Bab ini membahas DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2009-2014. Anggota DPRD yang berasal dari Pemilihan Umum 2009 mampu menghadirkan beberapa event internasional di Sumatera Selatan. Antara lain Sea Games 2011, Islamic Solidarity Games (ISG) 2013 dan MTQ Internasional.

Keadaan Politik Menjelang pengangkatan anggota DPRD Sumatera Selatan 2009-2014

Pada hari Kamis tanggal 24 September 2009 pagi. Merupakan momentum yang tak terlupakan bagi 74 politikus di Sumatera Selatan. Sebab mereka dilantik sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2009-2014 di Ruang Paripurna DPRD Sumatera Selatan Jalan POM IX, Palembang. Pelantikan yang akan dilangsungkan pukul 10.00 ini dihadiri 1.200 undangan, termasuk gubernur, bupati dan walikota di Sumatera Selatan.

Sebagai informasi dari 74 anggota DPRD Sumatera Selatan hasil Pemilu legislatif 2009 lalu, hanya 15 orang lama (incumbent) yang mampu bertahan di kursi Dewan. Lainnya adalah wajah baru. Nah, dari wajah baru ini sebenarnya adalah orang lama di pemerintahan di Sumatera Selatan. Misalnya Budiarto Masrul, yang pernah menjabat Wakil Walikota Pagaralam, Solichin Daud yang pernah menjabat bupati Lahat. Lalu, keluarga pejabat antara lain Lucianti Pahri, istri Bupati Kabupaten Musi Banyuasin Fahri Azhari, dan Yan Anton Ferdian, anak Bupati Banyuasin Amiruddin Inoed.

Sementara incumbent yang masih duduk di DPRD Sumatera Selatan adalah Mohd Iqbal Romzi, Badrullah Daud Kohar, Syaiful Islam, Misiha, Agus Sutikno, Gantada, Bihaqqi Soefyan, Giri Ramanda Kiemas, Aswandi Asgap, A Yani, Nasrun Madang, Arudji Kartawinata, Djafiris Ikhwanasyah, Darmadi Djufri, dan Rogayati Baidjuri.

Jumlah perempuan yang menjadi anggota DPRD Sumatera Selatan periode 2009-2014 sebanyak 10 orang atau 13 persen dari 75 anggota Dewan (1 orang belum menerima SK). Angka ini jauh sekali

dari 30 persen kuota perempuan di legislatif sebagaimana diamanatkan undang-undang. Yang menarik hasil Pemilu 2009 di Sumatera Selatan, hadirnya anggota Dewan dari keturunan Tionghoa yakni Sakim (PDI Perjuangan) dan Kobar Kotot (Partai Golkar).

Seharusnya hari ini sebanyak 75 orang dilantik, tapi Mendagri hanya men-SK-kan 74 wakil. Satu orang calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Hanura daerah pemilihan (Dapil) VII Sumsel, yaitu Aslam Mahrom, urung dilantik. Ini lantaran Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan Partai Amanat Nasional (PAN) yang mengakibatkan caleg Partai Hanura yang telah ditetapkan KPU Sumatera Selatan itu digusur oleh caleg dari PAN. Namun, MK sendiri menetapkan calon tetap yang menggusur Aslam Mahrom bernama Hasan bin Abdullah. Dan nama itu tidak ada daftar calon anggota legislatif pada Pemilu 2009 lalu, nama yang ada yakni Husin bin Abdullah. Oleh karena itu, KPU Sumatera Selatan memutuskan hanya 74 dari 75 nama anggota DPRD Sumatera Selatan periode 2009-2014 yang disampaikan ke Mendagri untuk dilantik, yang kemudian mengeluarkan SK sesuai usulan tersebut.

Pemilihan Umum Tahun 2009

Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2009 (biasa disingkat Pemilu Legislatif 2009 atau Pileg 2009) diselenggarakan untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun anggota DPRD Kota/Kabupaten se-Indonesia periode 2009-2014. Pemungutan suara diselenggarakan secara serentak di hampir seluruh wilayah Indonesia pada tanggal 9 April 2009 (sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada 5 April, tetapi kemudian diundur). 38 partai memenuhi kriteria untuk ikut serta dalam pemilu 2009. Partai Demokrat memenangkan suara terbanyak, diikuti dengan Golongan Karya dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Struktur dan Anggota DPRD Sumatera Selatan, 2009-2014

Pemilihan Umum 2009 merupakan pemilu ketiga dalam alam reformasi. Pemilihan Umum 2009 diikuti lebih banyak partai ada 33

organisasi peserta pemilu (OPP) 2004. Pemungutan suara Pemilihan Umum 2009 untuk pemilu legislatif dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009.

Hasil Pemilihan Umum 2009 untuk Nama-Nama Anggota DPR-RI Periode 2009-2014 Perwakilan Sumatera Selatan hasil Pemilihan Umum 2009, sebagai berikut:

No	Nama	Partai	Dapil
1.	Drs. Kahar Muzakir	Golongan Karya	Sumsel I
2.	Dodi Reza Alex Noerdin	Golongan Karya	Sumsel I
3.	Tantowi Yahya	Golongan Karya	Sumsel II
4.	Bobby Adhityo Rizaldi	Golongan Karya	Sumsel II
5.	M. Nazarudin Kiemas	PDI Perjuangan	Sumsel I
6.	Surya Chandra Surapaty	PDI Perjuangan	Sumsel I
7.	R. Erwin Moeslimin Singaraju, SH.	PDI Perjuangan	Sumsel II
8.	Mahyuddin NS	Demokrat	Sumsel II
9.	Juhaini Alie	Demokrat	Sumsel II
10.	Syofwatillah Mohzaib	Demokrat	Sumsel I
11.	Mustafa Kamal, S.S.	PKS	Sumsel I
12.	Buchori	PKS	Sumsel II
13.	Edhy Prabowo	Gerindra	Sumsel I
14.	Nur Iswanto	Gerindra	Sumsel II
15.	Ahmad Yani	PPP	Sumsel I
16.	Hanna Gayatri	PAN	Sumsel II
17.	A. Fauzi Ahmad	Hanura	Sumsel II

Sementara hasil perhitungan suara Pileg 2009 untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2009-2014 hasil Pemilihan Umum 2009, sebagai berikut:

No	Partai	Jumlah Kursi
1.	Partai Golongan Karya	16 Kursi
2.	Partai Demokrat	13 Kursi
3.	PDI Perjuangan	11 Kursi
4.	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	7 Kursi
5.	Partai Gerindra	6 Kursi
6.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	5 Kursi
7.	Partai Amanat Nasional (PAN)	5 Kursi
8.	Partai Hanura	4 Kursi
9.	Partai kebangkitan Bangsa (PKB)	3 Kursi
10.	Partau Bintang Reformasi (PBR)	2 Kursi
11.	Partai Bulan Bintang (PBB)	1 Kursi
12.	Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB)	1 Kursi

13.	Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN)	1 Kursi
	Jumlah	75 Kursi

Pada hari Kamis, 24 September 2009 dilakukan pelantikan atas anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2009-2014 hasil Pemilihan Umum 2009, sebagai berikut:

No	Nama	Partai	Dapil
1.	Muhammad Yansuri, SIP	Golongan Karya	Sumsel I
2.	Hj. R.A. Anita Noeringhati, S.H., M.H.	Golongan Karya	Sumsel I
3.	Kobar Kotot, MB.	Golongan Karya	Sumsel I
4.	Yan Antoni Ferdian, S.H.	Golongan Karya	Sumsel II
5.	H. Sulgani Pakuali, SIP.	Golongan Karya	Sumsel II
6.	Ir. Wasista Bambang Utoyo	Golongan Karya	Sumsel II
7.	Nadia Basjir, S.E.	Golongan Karya	Sumsel II
8.	H.A. Rozak Amin, S.H.	Golongan Karya	Sumsel III
9.	H.M. Najib Matjan, S.H.	Golongan Karya	Sumsel III
10.	H. Medi Basri, S.Sos.	Golongan Karya	Sumsel IV
11.	Dr. Abadi B. Darmo, S.H., M.H., MM.	Golongan Karya	Sumsel IV
12.	H. Nasrun Madang, S.H.	Golongan Karya	Sumsel V
13.	Edward Jaya, S.H.	Golongan Karya	Sumsel V
14.	H. Iskandar Syamweli, S.E.	Golongan Karya	Sumsel VI
15.	Hj. Lili Martiani Maddari	Golongan Karya	Sumsel VII
16.	Drs. Djafris Iwansyah	Golongan Karya	Sumsel VII
17.	Drs. H. A. Djauhari, MM.	Partai Demokrat	Sumsel I
18.	R.H.M. Rasyidi, S.E.	Partai Demokrat	Sumsel I
19.	Ir. H. Syaiful Islam	Partai Demokrat	Sumsel I
20.	Ir. Hj. Misliha R, MM.	Partai Demokrat	Sumsel I
21.	Muhammad F. Ridho, S.T., M.T.	Partai Demokrat	Sumsel II
22.	Dra. Hj. Nurwati Wahab, MM.	Partai Demokrat	Sumsel II
23.	Ir. H. Bihaqqi Soefyan	Partai Demokrat	Sumsel III
24.	Hj. Lindawati H. Ali Komang, S.E.	Partai Demokrat	Sumsel III
25.	Ir. H. Ahmad Yani, MM.	Partai Demokrat	Sumsel IV
26.	Zainuddin, S.T., MM.	Partai Demokrat	Sumsel V
27.	Arudji Kartawinata	Partai Demokrat	Sumsel V
28.	Ir. Holda, M.Si.	Partai Demokrat	Sumsel VI
29.	Hj. Rogayati Baidjuri, S.H.	Partai Demokrat	Sumsel VII
30.	MD Sakim, S.H., M.H.	PDI Perjuangan	Sumsel I
31.	M. Ikman Goring, S.E., M.Si.	PDI Perjuangan	Sumsel I
32.	Drs. H. Darwin Azhar, MM.	PDI Perjuangan	Sumsel II
33.	Susanto Adjis, S.H.	PDI Perjuangan	Sumsel II
34.	H. M. Aliandra Pati Gantada, S.H.	PDI Perjuangan	Sumsel III
35.	H. A. Fikri Juhan, S.H.	PDI Perjuangan	Sumsel III
36.	Aswandi Asgap Serampoe	PDI Perjuangan	Sumsel IV
37.	M. Giri Ramanda Nazaputra Kiemas, S.E.	PDI Perjuangan	Sumsel IV
38.	Ir. Yudha Rinaldi	PDI Perjuangan	Sumsel V

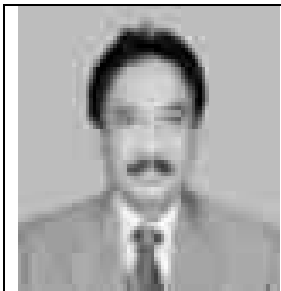
39.	Hj. Sumiati Kamal, S.E.	PDI Perjuangan	Sumsel VI
40.	Darmadi Djufri, S.H.	PDI Perjuangan	Sumsel VII
41.	H. Yuswar Hidayatullah, SIP., MAP.	PKS	Sumsel I
42.	Drs. H. Mohd. Iqbal Romzi	PKS	Sumsel I
43.	Erza Saladin, S.T.	PKS	Sumsel II
44.	H. Ali Imron Bayin, S.E., M.Si	PKS	Sumsel III
45.	Saifurrahman, M.Pdi.	PKS	Sumsel IV
46.	Drs. H. M. Amin Haderi, MM.	PKS	Sumsel V
47.	H. Muhammad Tukul, S.E., MM.	PKS	Sumsel VII
48.	Drs. Mgs KHA Zaini Husin Umrie	PPP	Sumsel I
49.	Agus Sutikno, S.E., MBA. MM.	PPP	Sumsel II
50.	Ir. Muhammad ID	PPP	Sumsel III
51.	H. Rizal Kennedy, S.H., MM.	PPP	Sumsel IV
52.	Popo Ali M, BCom	PPP	Sumsel V
53.	Dr. H. Budiarto Masrul, S.E., M.Si.	Partai Gerindra	Sumsel I
54.	Maliono, S.H.	Partai Gerindra	Sumsel II
55.	H. Hasbullah Akib, S.E., MM.	Partai Gerindra	Sumsel III
56.	M. Arwani Deny, S.E.	Partai Gerindra	Sumsel IV
57.	Efrans Effendi, S.H.	Partai Gerindra	Sumsel V
58.	Nopran Marjani, S.E.	Partai Gerindra	Sumsel VI
59.	Drs. Muhi Maza	Partai Hanura	Sumsel I
60.	H. Ali A. Rasyid, S.H.	Partai Hanura	Sumsel II
61.	Drs. H. Solichin Daud	Partai Hanura	Sumsel III
62.	Drs. H. Djunaidi Ramli, S.H., M.Si.	Partai Hanura	Sumsel V
63.	Drs. Badrullah Daud Kohar	PAN	Sumsel I
64.	Ir. Hj. Lucianty Pahri, S.E.	PAN	Sumsel II
65.	Rusdi Tahar, S.E.	PAN	Sumsel III
66.	H. Suharindi SJ., S.Pd., MM.	PAN	Sumsel VI
67.	H. Zulqarnain Ibrahim, S.E., MM.	PAN	Sumsel VII
68.	H. Kartak, SAS., S.E.	PKB	Sumsel I
69.	M. Arbi	PKB	Sumsel II
70.	Hj. Nilawati, SIP.	PKB	Sumsel V
71.	H. Rusli Matdian, SIP.	PBR	Sumsel V
72.	Ir. H. Firasgo Jaya Santika	PBR	Sumsel VI
73.	H. A. Wahab Nawawi, S.Sos., MM.	PBB	Sumsel V
74.	H. M. Erwin, S.T.	PKPB	Sumsel II
75.	H. Slamet Soemosentono	PPRN	Sumsel II

Berdasarkan kolom di atas ada 75 nama-nama terpilih. Namun pada waktu pelantikan ada satu nama yakni, Aslan Mahrom dari Partai Hanura belum dilantik. Penundaan ini disebabkan masih adanya sengketa hasil pemilu 2009 untuk Dapil Sumsel VII. Antara Aslan Mahrom dan Hasan Abdullah dari Partai PAN. Mahkamah konstitusi mengabulkan dan memenangkan Hasan Abdullah. Namun karena nama Hasan Abdullah tidak ada didaftar caleg 2009. Sementara nama yang

ada adalah Husin Abdullah. Maka selanjutnya KPU Provinsi Sumatera Selatan memutuskan hanya 74 nama anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang disampaikan ke Kemendagri untuk dilantik.

Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Hasil Pemilu 2009 dengan masa jabatan 2009-2014, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 161.16 – 731 Tahun 2009 tanggal 19 Oktober 2009, dengan susunan sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Partai
1.	Ir. H. Wasista Bambang Utoyo	Ketua	Golongan Karya
2.	Drs. H. A. Djauhari, MM.	Wakil Ketua	Partai Demokrat
3.	H. M. Aliandra Pati Gantada, S.H.	Wakil Ketua	PDI Perjuangan
4.	Drs. H. Mohd. Iqbal Romzi	Wakil Ketua	PKS



Ir. Wasista Bambang Utoyo. Laki-laki kelahiran Palembang, 16 Mei 1955. Putra pejuang Sumatera Selatan Letjen TNI Bambang Utoyo ini akrab dipanggil Tony. Legislator senior ini memulai karir politik ketika bergabung menjadi kader Partai Golkar sejak 1992 dengan menjadi Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPP) Golkar Sumatera Selatan. Terpilih menjadi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 1992-1997 dan periode 2009-2014. Pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014 Beliau maju sebagai calon legislatif DPR-RI

namun tidak menang. Pada September 2016, Beliau menggantikan Dodi Reza Alex Noerdin sebagai Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR-RI periode 2014-2019. Dodi Reza Alex Noerdin mengundurkan diri karena mencalonkan diri sebagai Calon Bupati Musi Banyuasin pada Pilkada Serentak 2017.



Dr. H. Ahmad Djauhari, MM. Pendidikan SMA diselesaikan tahun 1975 di SMA Pengatur Rawat Kesdam IV. S1 Administrasi Negara diselesaikan di Stisipol Candradimuka Palembang tahun 1988. Magister di Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen LPMI Jakarta tahun 2000. Selanjutnya pada tahun 2000 menyelesaikan doktor manajemen sumber daya manusia di Universitas Persada Indonesia, Jakarta. Menjadi legislator Partai Demokrat di DPRD Kota Palembang periode 2004-2009. Kemudian Legislator di DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2009-2014. Pada Pemilu 2014 maju sebagai calon legislator DPR-RI, namun belum berhasil.



H. M. Aliandra Pati Gantada, S.H.

Kelahiran Baturaja, OKU, 31 Maret 1964. Memiliki jalan panjang dalam parlemen di Sumatera Selatan. Sejak periode 1999-2004 sudah menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dilanjutkan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2004-2009, periode 2009-2014 dan 2014-2019.



Drs. H. Mohammad Iqbal Romzi.

Pria alim kelahiran Sakatiga, Ogan Ilir, 5 November 1960. Mengeyam pendidikan SDN Sakatiga (1972), MTs Sakatiga (1975), dan MAN Raudathul Ulum Sakatiga (1978). Pendidikan S1 diselesaikan di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1987). Ketua Umum DPW PK Sumsel (1998-2002) dan DPW PKS Sumsel (2004-2006). Terpilih sebagai legislator DPRD Provinsi Sumsel (2009-2014) dan DPR-RI Periode 2014-2019.

Dalam perjalanannya DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2009-2014 telah terjadi beberapa pergantian anggota yang berhenti dengan hormat atau pergantian antar waktu, masing-masing seperti dibawah ini:

Nama Diganti	Alasan	Nama Pengganti	Partai
M. Ikman Goring	Meninggal Dunia	Tolha Hasan	PDI Perjuangan
Ir. H. Syaiful Islam	Pindah Parpol (Hanura)	Susilawaty Somad	Demokrat (Sep 2013)
H. Ali Imron Bayin, S.E., M.Si	Pindah Parpol (Hanura)	Ust. Imam Mansyur	PKS (Sep 2013)
H. Sulgani Pakuali, SIP.	Pindah Parpol (Golkar)	Hasan Basri	PKB
H. Rusli Matdian, SIP.	PBR		
Ir. H. Firasgo Jaya Santika	PBR		
H. M. Erwin, S.T.	PKPB		
H. Slamet Soemosentono	PPRN		

Hasil-hasil yang dicapai DPRD Sumatera Selatan, 2009-2014

Hasil yang dicapai dengan membuat sejumlah Perda inisiatif DPRD Sumatera Selatan, memberikan dana hibah kepada masyarakat walaupun dibelakang hari menjadi masalah.

Selain itu mendukung dan membantu Gubernur Sumatera Selatan dalam mempersiapkan Sea Games 2011, Islamic Solidarity Games (ISG) yang akan diselenggarakan pada tanggal 22 September - 1 Oktober 2013 di Kota Palembang dan MTQ Internasional di Palembang. Termasuk DPRD Sumatera Selatan membantu pembangunan asrama mahasiswa asal Sumatera Selatan yang berkuliah di Universitas Al Azhar Cairo, Mesir.

BAB 15

DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2014-2019

Bab ini mengkaji DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2014-2019 hasil Pemilihan Umum 2014. Kemampuan DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode ini mendorong diadakannya pesta olahraga Asia, Asian Games 2018 di Sumatera Selatan. Mendongkrak pembangunan pesat di Sumatera Selatan, seperti Stadion bertaraf Internasional Gelora Sriwijaya, Kompleks Olahraga Jakabaring Sport City, Pembangunan Jalur Tanjung Api-Api sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Keadaan politik menjelang pengangkatan anggota DPRD Sumsel periode 2014-2019

Keadaan politik menjelang pengangkatan anggota DPRD Sumsel periode 2014-2019 berjalan kondusif karena hasil pemilu menggunakan bilangan pembagi pemilih (BPP) yang diterapkan sejak pemilihan langsung pasca reformasi. Pemilu saat itu tidak banyak terjadi permasalahan hukum baik antar partai maupun antar caleg sendiri.

Terkait Pemilihan Umum 2014 terdapat perubahan peraturan. Pemerintah mengeluarkan UU Nomor 8 Tahun 2012 sebagai undang-undang pemilihan umum terbaru. Undang-undang ini mengatur ambang batas parlemen untuk DPR ditetapkan sebesar 3,5 persen, naik dari Pemilu 2009 yang sebesar 2,5 persen.

Proses penyaringan organisasi peserta pemilu (OPP) dilakukan sejak tanggal 7 September 2012. Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan daftar 46 partai politik yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilu 2014. Beberapa partai di antaranya merupakan partai politik yang baru pertama kali mengikuti pemilu ataupun baru mengganti namanya. Terdapat 9 partai lainnya merupakan peserta Pemilihan Umum 2009 yang berhasil mendapatkan kursi di DPR periode 2009-2014. Pada tanggal 10 September 2012, KPU meloloskan 34 partai yang memenuhi syarat pendaftaran minimal 17 buah dokumen.

Pemilihan Umum 2014, berbeda dengan pemilu sebelumnya. Pertama, jumlah partisipan menurun drastis pada Pemilu 2014, yakni hanya 12 parpol. Dari 12 parpol tersebut, 10 parpol lolos ke DPR karena

memenuhi syarat minimal 3,5 persen dari perolehan suara nasional. Kedua, dalam aspek pembagian kursi pada pemilu 2014 disediakan 3-10 kursi per dapil DPR dan 3-12 kursi per dapil DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Nantinya, penentuan caleg terpilih ditentukan berdasarkan suara terbanyak. Terakhir ketiga, cara pemberian suara di pemilu 2014 dilakukan dengan cara mencoblos satu kali pada nomor atau tanda gambar partai politik atau nama caleg.

Selanjutnya tanggal 28 Oktober 2012 KPU mengumumkan 16 partai yang lolos verifikasi administrasi dan akan menjalani verifikasi faktual. Pada perkembangannya, sesuai dengan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, verifikasi faktual juga dilakukan terhadap 18 partai yang tidak lolos verifikasi administrasi. Hasil verifikasi faktual ditetapkan pada tanggal 8 Januari 2013. KPU mengumumkan 10 partai sebagai peserta Pemilu 2014.

Namun, dalam perkembangan berikutnya, keputusan KPU ini digugat oleh beberapa partai politik yang tidak lolos verifikasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Akhirnya, ada dua partai tambahan yang dikabulkan gugatannya oleh PTUN yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) pada tanggal 18 Maret 2013 dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) pada tanggal 25 Maret 2013. KPU mengabulkan putusan PTUN tersebut dan menetapkan kedua partai tersebut menjadi peserta Pemilu Legislatif 2014. Berikut daftar 12 partai politik nasional peserta Pemilihan Umum Legislatif 2014 beserta nomor urutnya.

1
Partai NasDem



2
PKB



3
PKS



4
PDI Perjuangan



5
Partai Golongan Karya



6
Partai Gerakan Indonesia Raya



7
Partai Demokrat



8
PAN





Gambar 39. Partai Peserta Pemilihan Umum 2014

Ada 12 Partai Politik peserta Pemilihan Umum 2014, ditambah 3 partai lokal Aceh, yakni: nomor urut 11. Partai Damai Aceh, nomor urut 12. Partai Nasional Aceh, dan nomor urut 13. Partai Aceh. Partai peserta Pemilu 2014 terdapat 9 partai yang ikut Pemilu 2009 sebelumnya. Ada 3 partai yang baru ikut, yakni Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

Pemilihan Umum 2014

Pemilihan Umum 2014 dilaksanakan dua kali yaitu Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) yang dilaksanakan serentak pada tanggal 9 April 2014 memilih para anggota dewan legislatif. Khusus untuk pemungutan suara di luar negeri digelar sebelum 9 April dan hanya memilih anggota DPR. Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 2014 (biasa disingkat Pemilu Legislatif 2014) untuk memilih 560 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 132 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota) se-Indonesia periode 2014-2019.

Pemilihan Umum 2014 untuk pemilihan legislatif, para pemilih diberi kesempatan untuk memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Untuk Pemilu DPR dan DPRD menggunakan sistem proporsional terbuka (suara terbanyak), sedangkan untuk memilih anggota DPD menggunakan sistem distrik perwakilan banyak. Pemilihan kedua, Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) pada tanggal 9 Juli 2014 yang memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pemilihan Umum 2014 memakai e-voting dengan harapan menerapkan sebuah sistem baru dalam pemilihan umum. Keutamaan dari penggunaan sistem e-voting adalah Kartu Tanda Penduduk

Elektronik (e-KTP) yang sudah mulai dipersiapkan sejak tahun 2012 secara nasional.

Kampanye Pemilihan Umum 2014 dimulai sejak 11 Januari 2013. Partai politik melakukan kampanye melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye kepada umum, dan pemasangan alat peraga. Tebar baliho dan spanduk sudah mulai terasa semenjak jadwal kampanye ditetapkan. Seperti pemilu-pemilu sebelumnya di Indonesia, baliho, spanduk dan kaos menjadi alat peraga yang utama dalam kampanye.

Secara hasil Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Golongan Karya masih mendominasi. Namun pada posisi ketiga, partai baru, yakni Partai Gerindra mampu menyodok pada peringkat ketiga. Berikut rincian perolehan suara partai politik secara nasional dalam Pemilu 2014:

No	Partai	Perolehan Suara	Persentase Suara	Jumlah Kursi
1.	PDI Perjuangan	23.681.471	18,95	109
2.	Partai Golkar	18.432.312	14,75	91
3.	Partai Gerindra	14.760.371	11,81	73
4.	Partai Demokrat	12.728.913	10,19	61
5.	Partai Kebangkitan Bangsa	11.298.957	9,04	47
6.	Partai Amanat Nasional	9.481.621	7,59	49
7.	Partai Keadilan Sejahtera	8.480.204	6,79	40
8.	Partai Nasdem	8.402.812	6,72	35
9.	Partai Persatuan Pembangunan	8.157.488	6,53	39
10.	Partai Hanura	6.579.498	5,26	16
11.	Partai Bulan Bintang	1.825.750	1,46	0
12.	PKPI	1.143.094	0,91	0

Berdasarkan hasil perolehan suara ini, maka Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tidak lolos ke DPR karena perolehan suara kurang dari 3,50 persen. Keduanya tidak lolos ambang batas parlemen (*parliament tresholfi*) sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Sedangkan untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2014 diikuti oleh dua pasang calon Presiden dan Wakil Presiden. Pada tanggal 31 Mei 2014, Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan 2 pasang calon Presiden dan Wakil Presiden, serta melakukan pengundian nomor urut pada 1 Juni 2014.

Pasangan nomor urut 1. Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa didukung oleh Koalisi Merah Putih (KMP) yang terdiri dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai

Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Demokrat. Secara akumulasi kursi hasil pileg 20014, Koalisi Merah Putih di DPR-RI sebesar 63.54 persen.

Pasangan nomor urut 2, Joko Widodo dan Jusuf Kalla didukung oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Berdasar akumulasi kursi hasil pileg 20014, Koalisi Indonesia Hebat di DPR RI adalah 36,46 persen.

Namun, dalam Proses pemungutan suara dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2014. Pemilihan presiden dan wakil presiden dimenangi oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dengan memperoleh 70.997.833 suara (53,15 persen) dan mengalahkan pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang memperoleh 62.576.444 suara (46,85 persen) sesuai dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada 22 Juli 2014. Jumlah itu berselisih 8.421.389 suara. Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilantik pada tanggal 20 Oktober 2014. Menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada Pemilihan Umum 2014 di Sumatera Selatan untuk kursi DPR-RI Periode 2014-2019 yang diperoleh dari hasil suara Pemilu 2014, sebagai berikut:

No	Partai	Jumlah Kursi
1.	PDI-P	3 Kursi
2.	Golkar	3 Kursi
3.	Demokrat	2 Kursi
4.	Gerindra	2 Kursi
5.	PAN	2 Kursi
6.	PKS	2 Kursi
7.	Nasdem	1 Kursi
8.	Hanura	1 Kursi
9.	PKB	1 Kursi

Berdasarkan hal tersebut maka, untuk anggota DPR-RI Periode 2014-2019 Perwakilan Sumatera Selatan hasil Pemilihan Umum 2014, sebagai berikut:

No	Nama	Partai	Dapil
----	------	--------	-------

1.	Drs. Kahar Muzakir	Golongan Karya	Sumsel I
2.	Dodi Reza Alex Noerdin	Golongan Karya	Sumsel I
3.	Bobby Adhityo Rizaldi	Golongan Karya	Sumsel II
4.	M. Nazarudin Kiemas	PDI Perjuangan	Sumsel I
5.	R. Erwin Moeslimin Singaraju, SH.	PDI Perjuangan	Sumsel II
6.	Yulian Gunhar	PDI Perjuangan	Sumsel II
7.	Syofwatillah Mohzaib	Demokrat	Sumsel I
8.	Wahyu Sanjaya	Demokrat	Sumsel II
9.	Mustafa Kamal, S.S.	PKS	Sumsel I
10.	Muhammad Iqbal Romzi	PKS	Sumsel II
11.	Edhy Prabowo	Gerindra	Sumsel I
12.	Sri Meliyana	Gerindra	Sumsel II
13.	Achmad Hafisz Tohir	PAN	Sumsel I
14.	Hanna Gayatri	PAN	Sumsel II
15.	Fauzi H. Amro	Hanura	Sumsel II
16.	Bertus Merlas	PKB	Sumsel II
17.	Irma Suryani	Nasdem	Sumsel II

Terjadi juga pergantian antar waktu Dalam perjalanannya DPR Perwakilan Sumatera Selatan Periode 2014-2019, masing-masing seperti tabel dibawah ini:

No	Nama	Pengganti	Partai
1	Dodi Reza Alex Noerdin	Wasista Bambang Utoyo	Golongan Karya
2	Fauzi H. Amro	Tari Siwi Utami	Hanura

Pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2014 di Sumatera Selatan untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Hampir semua partai, 11 partai memperoleh kursi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Kecuali Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) yang tidak mendapatkan kursi. Hasil Pemilihan Umum 2014 di Sumatera Selatan untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan diperoleh hasil suara Pemilu 2014, sebagai berikut:

No	Partai	Jumlah Kursi
1.	PDI-P	13 Kursi
2.	Demokrat	11 Kursi
3.	Golkar	10 Kursi
4.	Gerindra	10 Kursi
5.	PAN	6 Kursi
6.	PKB	6 Kursi
7.	Nasdem	5 Kursi
8.	PKS	5 Kursi
9.	Hanura	5 Kursi

10.	PPP	2 Kursi
11.	PBB	2 Kursi
12.	PKPI	0 Kursi

Pelantikan Calon Anggota DPRD Sumatera Selatan periode 2014-2019 terpilih dilakukan pada tanggal 24 September 2014 oleh ketua Pengadilan Tinggi (PT) Palembang, Dr. Nommy HT Siahaan, S.H., M.H. Pelantikan dilakukan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Kapten A. Rivai, Palembang pukul 14.00 WIB.

Pembacaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI No 161-68 tahun 2014 rekapitulasi nama-nama terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dilakukan oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ramadhan S. Basyeban, S.H., M.H. setelah pembacaan baru kemudian dilakukan pelantikan dengan memanggil satu persatu anggota dewan terpilih. Namun satu calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2014-2019 terpilih ditunda pelantikan disebabkan yang bersangkutan sedang menunaikan ibadah haji.

Berikut nama-nama anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2014-2019 Hasil Pemilihan Umum 2014, terpilih:

No	Nama	Partai	Dapil
1.	Hj. R.A. Anita Noeringhati, S.H., M.H.	Golongan Karya	Sumsel I
2.	Muhammad Yansuri, SIP.	Golongan Karya	Sumsel II
3.	H.A. Rozak Amin, S.H.	Golongan Karya	Sumsel III
4.	Edward Jaya, S.H.	Golongan Karya	Sumsel IV
5.	Sri Mulyadi, S.E., M.Si.	Golongan Karya	Sumsel V
6.	H. Medi Basri, S.Sos.	Golongan Karya	Sumsel VI
7.	Ir. Herpanto, S.H.	Golongan Karya	Sumsel VII
8.	H. Hasbi Asadiki, S.Sos, MM.	Golongan Karya	Sumsel VIII
9.	Anwar Hasan, BA.	Golongan Karya	Sumsel IX
10.	Nadia Basjir, S.E.	Golongan Karya	Sumsel X
11.	Usman Effendi, S.H., M.Hum.	PDI Perjuangan	Sumsel I
12.	Ir. H. Zulfikri Kadir	PDI Perjuangan	Sumsel II
13.	H. Fahlevi Maizano, S.H., M.H.	PDI Perjuangan	Sumsel II
14.	H. M. Aliandra Pati Gantada, S.H.	PDI Perjuangan	Sumsel III
15.	Ike Mayasari, S.H., M.H.	PDI Perjuangan	Sumsel III
16.	H. A. Syarnubi, S.P., MM.	PDI Perjuangan	Sumsel IV
17.	Hj. Tina Malinda, S.E., M.Si.	PDI Perjuangan	Sumsel V
18.	M. Giri Ramanda Nazaputra Kiemas, S.E.	PDI Perjuangan	Sumsel VI
19.	Dr. Drs. H. Rachman Djalili, MM.	PDI Perjuangan	Sumsel VI
20.	Yulius Maulana	PDI Perjuangan	Sumsel VII
21.	Hj. Srie Hernalini Nita Utama, S.E.	PDI Perjuangan	Sumsel VIII

22.	Ir. H. Uzer Effendi, MS.	PDI Perjuangan	Sumsel IX
23.	Robby Budy Puruhita, S.E.	PDI Perjuangan	Sumsel X
24.	H. Chairul S. Matdiah, S.H., M.H.	Partai Demokrat	Sumsel I
25.	H. M. Husni Thamrin	Partai Demokrat	Sumsel II
26.	H. Muchendi Mahzarekki, S.E.	Partai Demokrat	Sumsel III
27.	Surip Januarto, S.S., MM.	Partai Demokrat	Sumsel III
28.	H. Mirzan Ikbal, S.E.	Partai Demokrat	Sumsel IV
29.	Zainuddin, S.T., MM.	Partai Demokrat	Sumsel V
30.	Ir. H. Ahmad Yani, MM.	Partai Demokrat	Sumsel VI
31.	Ir. Holda, M.Si.	Partai Demokrat	Sumsel VII
32.	Drs. H. A. Gani Subit, MM.	Partai Demokrat	Sumsel VIII
33.	Dra. Hj. Nurwati Wahab, MM.	Partai Demokrat	Sumsel IX
34.	Muhammad F. Ridho, S.T., M.T.	Partai Demokrat	Sumsel X
35.	Ir. H. Sujarwoto	Partai Gerindra	Sumsel I
36.	Dr. H. Budiarto Masrul, S.E., M.Si.	Partai Gerindra	Sumsel II
37.	Hj. Riwij, S.Pd.	Partai Gerindra	Sumsel III
38.	Efrans Effendi, S.H.	Partai Gerindra	Sumsel IV
39.	Hj. Susilawati, S.H, M.Kn.	Partai Gerindra	Sumsel V
40.	Asgianto, S.T.	Partai Gerindra	Sumsel VI
41.	Nopran Marjani, S.E.	Partai Gerindra	Sumsel VII
42.	H. Solehan Ismail	Partai Gerindra	Sumsel VIII
43.	Kartika Sandra Desi, S.H.	Partai Gerindra	Sumsel IX
44.	Maliono, S.H.	Partai Gerindra	Sumsel X
45.	H. Kartak, SAS., S.E.	PKB	Sumsel I
46.	Drs. Ramlan Holdan	PKB	Sumsel III
47.	Hj. Dra. Nilawati, SIP.	PKB	Sumsel IV
48.	Erawan Abizar, S.Sos.	PKB	Sumsel V
49.	Nanto, S.E. Ak	PKB	Sumsel VII
50.	Nasrul Halim, S.H.	PKB	Sumsel X
51.	Mgs. H. Syaiful Padli, S.T., MM.	PKS	Sumsel I
52.	H. Imam Mansyur, Lc.	PKS	Sumsel II
53.	H. Askweni, S.Pd.	PKS	Sumsel III
54.	Ridwan	PKS	Sumsel VII
55.	H. Muhammad Tukul, S.E., MM.	PKS	Sumsel VIII
56.	Rusdi Tahar, S.E.	PAN	Sumsel III
57.	H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., MM.	PAN	Sumsel VII
58.	Drs. Achmad Bastarie	PAN	Sumsel VIII
59.	Ir. Hj. Lucianty Pahrj, S.E.	PAN	Sumsel IX
60.	Mardiansyah, S.HI.	PAN	Sumsel IX
61.	Ir. H. Rudi Apriadi, MBA.	PAN	Sumsel X
62.	H. Ardhani Awam, S.H.	Partai Nasdem	Sumsel II
63.	Drs. H. Elianuddin HB	Partai Nasdem	Sumsel III
64.	Hj. Meilinda, S.Sos.	Partai Nasdem	Sumsel IV
65.	H. Eddy Rianto, S.H., M.H.	Partai Nasdem	Sumsel VI
66.	Didi Epriadi, S.H.	Partai Nasdem	Sumsel VII
67.	H. Ali Imron Bayin, S.E., M.Si.	Partai Hanura	Sumsel III
68.	Iwan Hermawan, S.T.	Partai Hanura	Sumsel V

69.	Kamirul	Partai Hanura	Sumsel VI
70.	H. Aslan Mahrom, S.T., S.E.	Partai Hanura	Sumsel VIII
71.	H. Arkoni MD, SIP.	Partai Hanura	Sumsel X
72.	H. Rizal Kennedy, S.H., MM.	PPP	Sumsel VI
73.	Agus Sutikno, S.E., MBA. MM.	PPP	Sumsel X
74.	Hardi Saputra, S.E.	PBB	Sumsel III
75.	H. A. Wahab Nawawi, S.Sos., MM.	PBB	Sumsel V

Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2014-2019 Hasil Pemilu 2014, dengan susunan, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Partai
1.	H. M. Giri Ramanda N Kiemas, S.E., MM.	Ketua	PDI-P (2014-2018)
	Ir. H. Uzer Effendi, MS.	Plt. Ketua	PDI-P (2018)
	Muhammad Yansuri, SIP.	Plt. Ketua	Golkar (2018)
	H. M. Aliandra Pati Gantada, S.H.	Ketua	PDI-P (2018-2019)
2.	H. Chairul S. Matdiah, S.H., M.H.	Wakil Ketua	Demokrat
3.	Muhammad Yansuri, SIP	Wakil Ketua	Golkar
4.	Nopran Marjani, S.E.	Wakil Ketua	Gerindra (2014-2018)
	Kartika Sandra Desi, S.H.	Wakil Ketua	Gerindra (2018-2019)



H. M. Giri Ramanda Nazaputra Kiemas, S.E., MM.

Anak kedua dari tiga saudara, politisi kawakan Sumatera Selatan H. Nazaruddin Kiemas. Ponakan langsung dari tokoh PDI Perjuangan, H. Taufiq Kiemas. Kelahiran Jakarta, 1 April 1980. Pendidikan dari SD hingga SMA diselesaikan di Jakarta. Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia. Menjadi ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan termuda berusia 34 tahun saat dilantik tahun 2014. Pada tahun 2018, Beliau maju sebagai calon Wakil Gubernur Sumatera Selatan berpasangan dengan H. Dodi Reza Alex Noerdin, Lic., Econ., MBA.



H. Chairul S. Matdiah, S.H., M.H.

Laki-laki kelahiran Mesuji, OKI, 7 Februari 1964. Mengenyam pendidikan SMA Bhakti Ibu Palembang (1981-1984). Menyelesaikan sarjana hukum di Universitas Muhammadiyah Palembang (1984-1992). Sebelum terpilih sebagai legislator, sudah kondang sebagai pengacara di Kota Palembang dengan Kantor Hukum S. Matdiah. Mengawali karir politik sebagai pengurus teras DPC Partai Demokrat Kabupaten OKI (2005-2010) dan DPD Partai Demokrat provinsi Sumatera Selatan (2010-2021). Terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi

Sumatera Selatan periode 2014-2019 dan periode 2019-2024.



Muhammad Yansuri, SIP. Kelahiran Baturaja, OKU, 14 Desember 1951. Pendidikan Sarjana Ilmu Pemerintahan. Memiliki jalan panjang dalam parlemen di Sumatera Selatan. Menjadi legislator di DPRD Kota Palembang sejak periode 1997-1999, periode 1999-2004 dan periode 2004-2009. Bahkan, pernah menjadi ketua DPRD Kota Palembang Periode 2004-2009. Selanjutnya sejak periode 2009-2014 menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dilanjutkan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2014-2019 dan 2014-2019.



Nopran Marjani, S.E. Laki-laki kelahiran Padang Tepung, Ulu Musi, Empat Lawang, 5 Nopember 1972. Menyelesaikan pendidikan SDN 4 Lahat (1985). SMPN 5 Lahat (1988). SMAN 2 Lahat (1991). Sarjana Pendidikan diperoleh di FKIP Universitas Sriwijaya (1996). Terjun ke dunia politik dengan menjadi sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 2008. Menjadi koordinator pemenangan Pemilu 2009 untuk DPR-RI Dapil 2 Sumatera Selatan dan Sekretaris Pemenangan Presiden Prabowo-Hatta Pemilu 2014. Maju sebagai Cabup Lahat 2018-2023 berpasangan dengan Herliansyah, S.H., M.H.

Dalam perjalanannya DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2014-2019 telah terjadi beberapa pergantian anggota yang berhenti dengan hormat atau pergantian antar waktu, masing-masing seperti tabel dibawah ini:

Nama Diganti	Alasan	Nama Pengganti	Partai
Edward Jaya, S.H.	Cabup OKUT	H. Nasrun Madang, S.H. (2015-2016)	Golkar
H. A. Wahab Nawawi, S.Sos., MM.	Cabup OKUT	Meriyadi, S.H., M.H. (2015-2019)	PBB
H. Muchendi Mahzarekki, S.E.	Cawabup OI	Agus Pianto, S.H. (2015-2016)	Demokrat
Ir. Hj. Lucianty Pahari, S.E.	-	Srikandi Ningsih (2017-2019)	PAN
H. Nasrun Madang, S.H.	Wafat	Lindawati Syarofi (2017-2019)	Golkar
Agus Pianto, S.H.	Wafat	Lindawati Alikonang (2016-2019)	Demokrat

H. Muhammad Tukul, S.E., MM.	Wafat	M. Subhan, S.E. (2018-2019)	PKS
H. Joncik Muhammad, S.Si., S.H., MM.	Cabup Lahat	Ir. H. Firasgo Jaya Santika (2018-2019)	PAN
H. M. Giri Ramanda N Kiemas, S.E., MM.	Cawagub Sumsel 2018	Ir. H. Aswandi Asgaf Serampoe (2018-2019)	PDI-P
Nopran Marjani, S.E.	Cabup Lahat	Sutra Imansyah (2018-2019)	Gerindra
Arkoni	Cabup Banyuasin	H. Ali A. Rasyid (2018-2019)	Hanura
Ahmad Yani	Cabup Muara Enim	Tri Aljadin (2018-2019)	Demokrat
Yulius Maulana	Cawabup Empat Lawang	Sumiati (2018-2019)	PDI-P
Mirzan Ikkal	-	H. Gumari (2018-2019)	Demokrat
Hardi Sopuan, S.E.	-	Agustina, S.H. (2018-2019)	PBB

Kemudian ada juga anggota dewan yang mengundurkan diri karena menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), sebagai berikut:

Nama Diganti	Jabatan yang ditinggalkan	Partai	Jabatan yang dituju
H. M. Giri Ramanda N Kiemas, S.E., MM.	Ketua DPRD Sumsel	PDI-P	Cawagub Sumsel 2018-2023
Nopran Marjani, S.E.	Wakil Ketua DPRD Sumsel	Gerindra	Cabup Lahat 2018-2023
Joncik Mohammad	Ketua Komisi II DPRD Sumsel	PAN	Cabup Lahat 2018-2023
Yulius Maulana	Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumsel	PDI-P	Cawabup Empat Lawang 2018-2023
Arkoni	Sekretaris Komisi II DPRD Sumsel	Hanura	Cabup Banyuasin 2018-2023
Ahmad Yani		Demokrat	Cabup Muara Enim 2018-2023

Hasil-Hasil yang di Capai DPRD Sumsel 2014-2019

Hasil-Hasil yang di Capai DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2014-2019 menunjang Pesta Olahraga Asia 2018 , secara resmi dikenal sebagai Pesta Olahraga Asia ke-18 dan Jakarta-Palembang 2018, adalah ajang olahraga wilayah Asia yang diselenggarakan dari 18

Agustus sampai 2 September 2018 di Indonesia, tepatnya di kota Jakarta dan Palembang. Dimana persiapannya sudah dilakukan sejak tahun 2015 termasuk pembahasan anggaran bersama DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang kemudian APBN ikut membantu.

Selain itu DPRD Provinsi Sumatera Selatan bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dikomandoi Gubernur Provinsi Sumatera Selatan H. Alex Noerdin mendorong agar Kompleks Jakabaring Sport City di Palembang yang akan menjadi tuan rumah diajukan untuk menambah dan meningkatkan fasilitas di dalam kompleks ini, termasuk peningkatan kapasitas Stadion Gelora Sriwijaya dari 36.000 menjadi 60.000 kursi yang kemudian dibatalkan, namun malah menurunkan kapasitas menjadi 27.000 setelah memasang kursi single seat di semua tribun bersama dengan promosi dan peningkatan fasilitas lainnya di stadion. Tempat baru di Jakabaring Sport City adalah arena bowling dengan 40 lintasan yang selesai pada akhir Mei 2018. Delapan lapangan tenis tambahan dibangun di kompleks untuk ajang ini. Panjang tempat mendayung dan kano di Danau Jakabaring diperpanjang hingga 2.300 meter bersama dengan fasilitas dayung dan tribun yang dibangun di tepi danau.

Wisma atlet di Jakarta dibangun di Kemayoran, Jakarta Pusat di atas lahan seluas 10 hektar, yang memiliki 7.424 apartemen dalam 10 menara. Total kapasitas akomodasi sebesar 22.272 di perkampungan ini melebihi standar Komite Olimpiade Internasional, yang mengharuskan tuan rumah Olimpiade untuk menyediakan kamar bagi 14.000 atlet. Wisma atlet di dalam Jakabaring Sport City di Palembang akan menampung 3.000 atlet dan ofisial.

Jalur LRT Palembang sepanjang 25 kilometer dari Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II ke Jakabaring Sport City dibangun bersama beberapa fasilitas transportasi lainnya seperti *underpass*, *flyover*, dan jembatan Musi IV dan Musi VI juga akan dibangun di kota tersebut. Bandar Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II akan memperluas terminal kedatangan dan keberangkatan yang ada, dan membangun *skybridge* dengan terminal kereta ringan (LRT) yang akan membawa penumpang ke Jakabaring. Selain itu Jakabaring Sport City yang sering digunakan dalam perhelatan pesta olahraga internasional lainnya. DPRD Provinsi Sumatera Selatan juga ikut mendorong pembangunan Jalan Tol Palembang-Indralaya di tahun 2018. Termasuk mendorong Tanjung Api-Api yang sempat menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

BAB 16

DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2019-2024

Bab ini mengkaji tentang DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2019-2024 hasil Pemilihan Umum 2019. DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode ini mampu mengalau dan menetralkan semua residu kampanye Pemilu 2019 yang berjalan dengan berbagai dominasi isu-isu SARA, politik identitas, konten berita palsu dan ujaran kebencian, serta olok-olok politik antar kubu terkait isu-isu yang tidak substantif yang berjalan masif melalui media sosial. Sehingga mampu ikut menciptakan ketentraman di masyarakat Sumatera Selatan.

Keadaan politik menjelang Pengangkatan Anggota DPRD Sumatera Selatan, 2019-2024

Setelah era Reformasi, Indonesia berhasil menyelenggarakan berbagai jenis pemilihan umum (pemilu) secara berkala. Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) untuk DPD, DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota telah diselenggarakan sejak Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 1999, Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2004, Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2009 dan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) tahun 2014. Sementara Pemilu Umum Presiden (Pilpres) secara langsung berlangsung sejak Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2004, Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2009 dan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014. Termasuk Untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) juga secara langsung telah diselenggarakan sejak Pilkada serentak tahun 2005 dan penyelenggaraan pilkada secara serentak sejak tahun 2015, 2017, dan 2018.

Pada tahun 2019, Indonesia menyelenggarakan Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) secara serentak untuk pertama kalinya. Pemilihan umum 2019 serentak antara Pilpres dan Pileg ini yang dilakukan pada 17 April 2019 walau tidak jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya. Namun dianggap paling rumit dan paling menakjubkan di dunia karena skalanya yang besar dan dilaksanakan dalam satu hari saja. Tercatat ada sejumlah pemilih

sebanyak 193 juta orang pada pemilu 2019 yang dianggap sebagai pemilu terbesar di dunia dalam hal memilih presiden secara langsung. Sebab, jumlah pemilih bertambah sebanyak 2,4 juta orang dari pemilu 2014 sebelumnya. Pemungutan suara dilaksanakan di 809.500 tempat pemungutan suara (TPS), di mana setiap TPS akan melayani sekitar 200 hingga 300 orang pada saat hari pencoblosan. Padahal, dalam Pemilu tahun 2014, jumlah TPS sekitar 500.000 dan setiap TPS melayani sekitar 400 pemilih.

Selain itu, pelaksanaan pencoblosan dan penghitungan secara manual membuat pemilu di Indonesia termasuk paling kompleks di dunia. Sebab, penghitungan manual secara berjenjang itu juga membuat hasil penghitungan atau rekapitulasi berlangsung lama. Sehingga hasil penghitungan suaranya baru diketahui 30 hari sesudahnya. Kerumitan ini juga ditambah banyak jumlah total calon anggota legislatif yang bersaing sekitar 245.000 orang yang memperebutkan sekitar 20.500 kursi yang ada di 34 provinsi dan sekitar 500 kabupaten kota. Sehingga, pada hari yang sama, pemilu 2019 ini menjalankan lima pemilihan bersamaan yaitu pemilihan presiden-wakil presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Oleh karenanya, pada Pemilu 2019, para pemilih mendapat lima surat suara berbeda dengan warna yang berbeda pula.

Pemilu 2019 yang diselenggarakan serentak di seluruh Indonesia dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Berdasarkan analisis pemilu sebelumnya, pada Pemilu 2009 tingkat partisipasi politik masyarakat untuk Pileg sebesar 71%. Sementara pilpres turun menjadi 72,09%. Sedangkan dalam pemilu 2014, partisipasi pemilih dalam pemilu anggota legislatif sebesar 75,1% sedangkan dalam pemilihan umum presiden sebesar 69,58%.

Penurunan tingkat partisipasi ini dapat dihindari apabila dilaksanakan pemilu serentak. Artinya, pemilu 2019 yang dilakukan secara serentak antara pileg dan pilpres akan meningkatkan partisipasi, memiliki efisiensi waktu, tenaga dan biaya dari pemilih yang dikeluarkan untuk datang ke TPS. Selain itu Pemilu 2019 yang dilakukan secara serentak memberikan dorongan psikologis, yaitu mereka menilai bahwa mereka memilih dua pejabat tinggi secara serentak. Pemilu serentak memberikan peluang bagi terciptanya sistem pemerintahan presidensial yang lebih kuat dan stabil. Hal ini karena koalisi yang dibentuk dalam mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dilakukan

lebih awal dan didasarkan kepada visi misi yang sama, tidak semata-mata untuk memenangkan pemilihan.

Pemilu 2019 serentak menguntungkan partai pendukung presiden, dan mengurangi fragmentasi antara legislatif dan eksekutif dengan semakin kaut dan solidnya koalisi antar partai. Partai politik, bahkan partai kecil sekalipun mempunyai peluang yang sama dalam mengusung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden. Pasangan capres dan cawapres yang populer dan bisa diterima oleh partai-partai yang lain merupakan cara untuk mendongkrak suara partai dan memenangkan pemilu.

Masa kampanye Pilpres 2019 seyogianya menjadi sarana bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai gagasan yang ditawarkan oleh kandidat paslon. Publik menanti munculnya beragam narasi programatik yang akan dijadikan dasar dalam menentukan pilihan di tanggal 17 April 2014 tersebut.

Pada kampanye Pemilu 2019 masa kampanye yang berlangsung selama lima bulan didominasi oleh isu-isu SARA, politik identitas, konten berita palsu dan ujaran kebencian, serta olok-olok politik antar kubu terkait isu-isu yang tidak substantif. Kondisi ini juga diperparah dengan masifnya mobilitas kampanye di media sosial, melalui mobilisasi *influencers* dan pasukan *buzzer* dalam rangka mempercepat penyebaran isu. Alih-alih mendorong proses pemilu 2014 yang berkualitas, fenomena ini justru semakin menambah polarisasi di masyarakat, bahkan disinyalir semakin mendorong apatisme terhadap pemilu dan menguatnya gerakan mendorong golongan putih (golput).

Pada Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019 terlihat beberapa keadaan yang mendominasi. Pertama, konteks kontestasi saat pilpres 2019 merupakan residu dari tajamnya polarisasi politik dan politisasi isu-isu identitas yang terjadi selama Pilpres 2014 dan Pilgub DKI Jakarta 2017. Dengan kata lain, ada semacam dinamika kontestasi dan polarisasi yang terus dirawat. Kedua, desain elektoral yang menetapkan adanya *presidential threshold* turut meningkatkan intensitas polarisasi politik, karena secara politis hanya membuka peluang munculnya dua kandidat. Ketiga, fenomena industri konsultan politik, *influencer*, dan *buzzer* dalam kampanye digital paslon. Selain berperan penting dalam menentukan produksi isu dan amplifikasi konten kampanye di platform digital, peran mereka juga turut memperburuk polarisasi politik dan politisasi isu-isu identitas. Selama

kampanye Pemilu 2014, isu-isu non-programatik terus direproduksi dan diglorifikasi oleh *cyber army* masing-masing kubu.

Keempat, keserantakan Pemilu 2019 menyebabkan lebih dominannya isu pilpres dan meminggirkan perhatian terhadap Pileg, baik DPR RI, DPD, maupun DPRD Provinsi dan Kab/Kota. Kelima, media sebagai sumber informasi publik justru cenderung memiliki preferensi terhadap isu-isu non programatik dalam pemberitaannya. Selain itu, narasi kampanye yang dominan di tingkat nasional justru meminggirkan isu-isu lokal dalam kampanye caleg dan parpol di daerah. Hal ini membuat caleg di tingkat lokal berada dalam kondisi rumit karena terpecahnya konsentrasi parpol antara fokus terhadap pileg dan pilpres. Parpol dan caleg mengalami dilema untuk mengelola isu kampanye pilpres di dapil dengan karakteristik pemilih yang beragam.

Pemilihan Umum 2019

Pemilihan Umum 2019 dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 137) dan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2018. Pada awalnya ada 23 partai politik yang mendaftar ke KPU untuk mengikuti Pemilu 2019. Namun terdapat 7 (tujuh) partai politik yang dinyatakan tidak memenuhi syarat administrasi. Sehingga ketujuh partai politik ini tidak dapat dilakukan verifikasi dan dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019. Ketujuh partai politik tersebut adalah Partai Bhinneka Indonesia (PBI), Partai Indonesia Kerja (PIKA), Partai Islam Damai Aman (Partai Idaman), Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI), Partai Rakyat, Partai Republik dan Partai Suara Rakyat Indonesia (Parsindo).

Sisanya terdapat 16 (enam belas) Partai Politik yang ditetapkan KPU sebagai partai politik yang memenuhi syarat sebagai Peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019. Partai politik dan nomor urutnya tersebut adalah:

1	2	3	4
Partai Kebangkitan Bangsa	Partai Gerakan Indonesia Raya	PDI Perjuangan	Partai Golkar



Gambar 40. Partai Peserta Pemilu 2019

Selain keenambelas partai politik ini, Pemilu 2019 juga diikuti oleh empat partai local Aceh, yakni: Partai Aceh, Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh (Partai Sira), Partai Daerah Aceh (PD Aceh), dan Partai Nangroe Aceh (PNA). Dari 16 partai politik peserta pemilihan Umum 2019, terdapat 4 (empat) partai politik baru, yakni: Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Persatuan Indonesia (Perindo), Partai Berkarya dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda).

Hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 yang dilaksanakan untuk memilih anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024 yang dilakukan pada 17 April 2014. Selanjutnya ditetapkan oleh KPU Sumatera Selatan pada hari Senin, 12 Agustus 2019.

Pada Pemilihan Umum 2014 di Sumatera Selatan untuk kursi DPR-RI Periode 2019-2024 yang diperoleh dari hasil suara Pemilu 2019, sebagai berikut:

No	Partai	Jumlah Kursi
----	--------	--------------

1.	Gerindra	3 Kursi
2.	Nasdem	3 Kursi
3.	Golkar	3 Kursi
4.	PDI-P	2 Kursi
5.	Demokrat	2 Kursi
6.	PAN	2 Kursi
7.	PKS	1 Kursi
8.	PKB	1 Kursi

Berdasarkan hal tersebut maka, untuk anggota DPR-RI Periode 2019-2024 Perwakilan Sumatera Selatan hasil Pemilihan Umum 2019, sebagai berikut:

No	Nama	Partai	Dapil
1.	Edhy Prabowo	Gerindra	Sumsel I
2.	Eddy Santana Putra	Gerindra	Sumsel I
3.	Sri Meliyana	Gerindra	Sumsel II
4.	Fauzi H. Amro	Nasdem	Sumsel I
5.	Percha Leanpuri	Nasdem	Sumsel II
6.	Sri Kustina	Nasdem	Sumsel II
7.	Drs. Kahar Muzakir	Golongan Karya	Sumsel I
8.	Alex Noerdin	Golongan Karya	Sumsel II
9.	Bobby Adhityo Rizaldi	Golongan Karya	Sumsel II
10.	Riezky Aprilian	PDI Perjuangan	Sumsel I
11.	Yulian Gunhar	PDI Perjuangan	Sumsel II
12.	Ishak Mekki	Demokrat	Sumsel I
13.	Wahyu Sanjaya	Demokrat	Sumsel II
14.	Achmad Hafisz Tohir	PAN	Sumsel I
15.	Hanna Gayatri	PAN	Sumsel II
16.	Mustafa Kamal, S.S.	PKS	Sumsel I
17.	Bertus Merlas	PKB	Sumsel II

Terjadi juga pergantian antar waktu DPR Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024, masing-masing seperti tabel dibawah ini:

No	Nama	Pengganti	Partai
1	Edhy Prabowo	Renny Astuti diganti Siti Nurizka Puteri Jaya	Gerindra
2	Percha Leanpuri	Irma Suryani Chaniago	Nasdem

Komposisi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024 hasil pemilu 2019 terdiri dari 11 partai politik. Pada tingkat lokal untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan terdapat tiga besar partai

politik yang memperoleh kursi terbanyak. Partai Golongan Karya menjadi partai politik pemilik kursi terbanyak yaitu 13 kursi. Selanjutnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menduduki posisi kedua dengan raihan 11 kursi. Sedangkan partai Gerindra menduduki posisi ketiga dengan jumlah 10 kursi.

Hasil Pemilihan Umum 2019 di Sumatera Selatan untuk DPRD Provinsi Sumatera Selatan diperoleh pembagian kursi parlemen sebagai berikut:

No	Partai	Jumlah Kursi
1.	Partai Golkar	13 Kursi
2.	PDI-P	11 Kursi
3.	Gerindra	10 Kursi
4.	Demokrat	9 Kursi
5.	PKB	8 Kursi
6.	PKS	6 Kursi
7.	Nasdem	6 Kursi
8.	PAN	5 Kursi
9.	Hanura	3 Kursi
10.	Perindo	3 Kursi
11.	PPP	1 Kursi
12.	PBB	0 Kursi
13.	PKPI	0 Kursi
14.	Partai Solidaritas Indonesia	0 Kursi
15.	Partai Berkarya	0 Kursi
16.	Partai Garuda	0 Kursi

Berdasarkan tabel di atas, dari 75 anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024 di atas. Terdapat tiga anggota dewan dari partai politik baru, yakni Partai Perindo. Sementara lima partai politik peserta pemilu 2019 di Sumatera Selatan yang tidak bisa menempatkan kursinya di legislatif Provinsi Sumatera Selatan adalah Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Berkarya, dan Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda). Hasil Pemilu 2019 untuk calon anggota legislatif (caleg) terpilih DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024 selanjutnya ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Selatan pada hari Senin tanggal 12 Agustus 2019.



Gambar 41. Sidang rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan
Masa Jabatan 2019-2024

Pelantikan Anggota DPRD Sumatera Selatan periode 2019-2024 terpilih dilakukan pada tanggal 24 September 2019. Pelantikan dilakukan dalam rapat paripurna ke-LXV (65) di Gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Jalan Kapten A. Rivai, Palembang dengan agenda pengucapan sumpah dan janji 75 anggota DPRD Sumsel terpilih.

Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode sebelumnya, H.M. Aliandra Pati Gantada, S.H., M.Hum. Dihadiri oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, S.H., M.H. dan Wakil Gubernur, Mawardi Yahya. Pembacaan nama-nama terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dilakukan oleh Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Ramadhan S. Basyeban, S.H., M.M.

Namun satu calon anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2019-2024 terpilih, Hasbullah dari PDI Perjuangan tidak bisa dilantik. Beliau meninggal dunia dua bulan sebelum pelantikan di hari Rabu, 16 Juli 2019 di RSMH Palembang. Beliau berasal dari Dapil Sumsel VII (Kabupaten Lahat, Kota Pagaralam, dan Kabupaten Empat Lawang), Posisi Beliau di PDI Perjuangan diganti dengan Sumiati.

Berikut nama-nama anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024 Hasil Pemilihan Umum 2019, terpilih:

No	Nama	Partai	Dapil
1.	Hj. R.A. Anita Noeringhati, S.H., M.H.	Partai Golkar	Sumsel I

2.	M. Yansuri, S.IP.	Partai Golkar	Sumsel II
3.	H. Nawawi, S.H.	Partai Golkar	Sumsel III
4.	Hj. Lindawati Syahropi, S.H., M,H.	Partai Golkar	Sumsel IV
5.	Heru Prayogo, S.H.	Partai Golkar	Sumsel V
6.	Andie Dinaldie, S,E.	Partai Golkar	Sumsel V
7.	H. Medi Basri, S.Sos.	Partai Golkar	Sumsel VI
8.	H. David Hadrianto Aljufri, S.H.	Partai Golkar	Sumsel VII
9.	H. Hasbi Asadiki, S.Sos, MM.	Partai Golkar	Sumsel VIII
10.	Drs. Thamrin, M.Si.	Partai Golkar	Sumsel IX
11.	H. Fatra Radezayansyah, S.T., MM.	Partai Golkar	Sumsel IX
12.	Nadia Basjir, S.E.	Partai Golkar	Sumsel X
13.	Marzuki, S.E.	Partai Golkar	Sumsel X
14.	Dedi Sipriyanto, S.Kom., MM.	PDI Perjuangan	Sumsel I
15.	Ir. H. Zulfikri Kadir	PDI Perjuangan	Sumsel II
16.	Hj. Meli Mustika, S.E., MM.	PDI Perjuangan	Sumsel III
17.	Ike Mayasari, S.H., M.H.	PDI Perjuangan	Sumsel III
18.	H. Ahmad Syarnubi, S.P., MM.	PDI Perjuangan	Sumsel IV
19.	Hj. Tina Malinda, S.E., M.Si.	PDI Perjuangan	Sumsel V
20.	H. M. Giri Ramanda N. Kiemas, S.E., MM.	PDI Perjuangan	Sumsel VI
21.	Hj. Sumiati / Hasbullah	PDI Perjuangan	Sumsel VII
22.	Hj. Dra. Rita Suryani	PDI Perjuangan	Sumsel VIII
23.	Susy Imelda Frederika	PDI Perjuangan	Sumsel IX
24.	Susanto Adjis, S.H.	PDI Perjuangan	Sumsel X
25.	Prima Salam, S.H.	Partai Gerindra	Sumsel I
26.	Dr. H. Budiarto Marsul, S.E., M.Si.	Partai Gerindra	Sumsel II
27.	Raden Gempita, S.H.	Partai Gerindra	Sumsel III
28.	H. Efrans Effendi, S.H.	Partai Gerindra	Sumsel IV
29.	Hj. Susilawati, S.H, M.Kn.	Partai Gerindra	Sumsel V
30.	Asgianto, S.T.	Partai Gerindra	Sumsel VI
31.	H. Saifudin Aswari Rivai, S.E.	Partai Gerindra	Sumsel VII
32.	H. Burlian, S.Sos., MM.	Partai Gerindra	Sumsel VIII
33.	Kartika Sandra Desi, S.H.	Partai Gerindra	Sumsel IX
34.	Maliono, SH.	Partai Gerindra	Sumsel X
35.	H. Chairul S. Matdiah, SH., M.H.	Partai Demokrat	Sumsel I
36.	Tamtama Tanjung	Partai Demokrat	Sumsel II
37.	H. Muchendi Mahzarekki, S.E.	Partai Demokrat	Sumsel III
38.	H. Ir. M. Kanovriyandi	Partai Demokrat	Sumsel III
39.	Azmi Shofiq, S.R., S.IP.	Partai Demokrat	Sumsel IV
40.	Lia Anggraini, S.H.	Partai Demokrat	Sumsel VI
41.	Hj. Ir. Holda, M.Si.	Partai Demokrat	Sumsel VII
42.	Drs. H. A. Gani Subit, MM.	Partai Demokrat	Sumsel VIII
43.	Muhamad F. Ridho, S.T., M,T.	Partai Demokrat	Sumsel X
44.	H. Kartak SAS., S.E.	PKB	Sumsel I
45.	Antoni Yuzar, S.H., M.H.	PKB	Sumsel II
46.	Meri, S.Pd.	PKB	Sumsel III
47.	Dr. Hj. Nilawati	PKB	Sumsel IV
48.	Fathan Qoribi, ST.	PKB	Sumsel V

49.	Hj. Dra. Nurhilyah	PKB	Sumsel VI
50.	M. Oktafiansyah, S.T., MM.	PKB	Sumsel VII
51.	Nasrul Halim, S.H.	PKB	Sumsel X
52.	Mgs. H. Syaiful Padli, S.T., MM.	PKS	Sumsel I
53.	H. M. Anwar Al Syadat, S.Si., M.Si.	PKS	Sumsel II
54.	H. Askweni, S.Pd.	PKS	Sumsel III
55.	Firdaus, S.H.	PKS	Sumsel VI
56.	H. M. Subhan, S.E.	PKS	Sumsel VIII
57.	Ahmad Toha, S.PdI., M.Si.	PKS	Sumsel IX
58.	H. Nopianto, S.Sos., MM.	Partai Nasdem	Sumsel II
59.	H. Sri Sutandi, S.E., MBA.	Partai Nasdem	Sumsel III
60.	Yenny Elita, S.Pd., MM.	Partai Nasdem	Sumsel V
61.	Dr. Ir. H. Syamsul Bahri, MM.	Partai Nasdem	Sumsel VI
62.	H. Novian Fauzi, S.H.	Partai Nasdem	Sumsel VIII
63.	Herman	Partai Nasdem	Sumsel X
64.	Junaidi, S.E.	PAN	Sumsel III
65.	H. Juanda Hanafiah, S.H., MM.	PAN	Sumsel VII
66.	H. Toyeb Rakembang, S.Ag.	PAN	Sumsel VIII
67.	Abusari H. Burlian, S.H., M.Si.	PAN	Sumsel IX
68.	Muhammad Yaser, S.E.	PAN	Sumsel X
69.	H. Ali Imron Bayin, S.E., M.Si.	Partai Hanura	Sumsel III
70.	Iwan Hermawan, S.T.	Partai Hanura	Sumsel V
71.	Alfrenzi Panggarbesi, S.Si.	Partai Hanura	Sumsel VII
72.	Ahmad Firdaus Ishak, S.H., M.Si.	Partai Perindo	Sumsel III
73.	H. Syahrudin, S.T., MM.	Partai Perindo	Sumsel IV
74.	Rudi Hartono	Partai Perindo	Sumsel V
75.	H. Rizal Kennedy, S.H., MM.	PPP	Sumsel VI

Pada hari Rabu, 23 Oktober 2019, R.A. Hj, Anita Noeringhati, S.H., M.H. dilantik sebagai ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2019-2024. Pelantikan Beliau dilakukan pada rapat paripurna III DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Selanjutnya, berdasar Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 161.16-4042 tahun 2019 tertanggal 13 September 2019. Juga dilantik wakil-wakil ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2019-2014, yakni H.M. Giri Ramanda N Kiemas, S.H., M.H. dari PDI Perjuangan, Kartika Sandra Dewi, S.H. dari Partai Gerindra dan H. Muchendi Mahzarekki, S.E. dari Partai Demokrat. Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2019-2024 Hasil Pemilu 2019, dengan susunan, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Partai
1.	Hj. R.A. Anita Noeringhati, S.H., M.H.	Ketua	Golkar
2.	H. M. Giri Ramanda N. Kiemas, S.E., MM.	Wakil Ketua	PDI-P
3.	Kartika Sandra Desi, S.H.	Wakil Ketua	Gerindra

4.	H. Muchendi Mahzarekki, S.E.	Wakil Ketua	Demokrat
----	------------------------------	-------------	----------



Hj. R.A. Anita Noeringhati, S.H.,

M.H. Wanita tangguh kelahiran Klaten, 28 Juli 1963 ini besar dan didik di Yogyakarta. Pendidikan Sekolah Dasar diselesaikan tahun 1974 di SD Kristen II Klaten. Sekolah Menengah Pertama tahun 1977 di SMP Negeri 2 Klaten. Sekolah Menengah Atas tahun 1981 di SMA Penampungan Klaten. Menyelesaikan Sarjana Hukum di Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 1988. Magister hokum diselesaikan tahun 2007 di Universitas Sriwijaya. Advokat mumpuni sejak 1993-2009. Berpengalaman banyak di parlemen sebab sudah duduk di DPRD Provinsi Sumatera Selatan sejak periode 2009-2014 dan periode

2014-2019 serta periode 2019-2024. Mendapat banyak penghargaan, seperti Kartini Award Palembang 2011, tokoh kebangsaan Sumatera Selatan 2014, Politikus Inspiring Award Sumatera Selatan 2018. Dan menjadi narasumber berbagai kegiatan seminar serta aktivis dan penggiat pemberdayaan perempuan di Sumatera Selatan.



H. M. Giri Ramanda N. Kiemas, S.E.,

MM. Kelahiran Jakarta, 1 April 1980. Pendidikan SD St. Maria Fatima Jaktim (1986-1992). SMP St. Maria Fatima Jaktim (1992-1995). SMA Negeri 12 Jakarta Timur (1995-1998). Sarjana ekonomi dirahi di Universitas Indonesia (1998-2004) dan Magister Manajemen Universitas Sriwijaya (2009-2010). Sedang mengambil gelar doktor Administrasi Publik di Universitas Sriwijaya sejak 2020. Terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2004-2009, periode 2009-2014, periode 2014-2019 dan periode 2019-2024.



Kartika Sandra Desi, S.H. Perempuan cantik akrab dengan panggilan Cici. Kelahiran Banyulincir, MUBA, 26 September 1976. Pendidikan SDN 2 Banyu Lincir (1990). SMPN 1 Banyu Lincir (1993). SMA Negeri 8 Palembang (1996). Sarjana Hukum dirahi di Universitas Syakyakirti Palembang (2006). Terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2014-2019 dan periode 2019-2024. Pada periode 2014-2019 menjadi wakil ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan menggantikan H. Nopran Marjani, S.Pd.



H. Muchendi Mahzarekki, S.E. Kelahiran Palembang tanggal 26 Juni 1987. Pendidikan SDN 100 Palembang (1996). SMPN 1 Palembang (1999). SMAN 1 Palembang (2002). Sarjana ekonomi (2005) dari Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Tahun 2010-2012 menjadi PNS protokoler di Humas Pemerintahan Kota Palembang dan di Pemerintahan Kabupaten OKI (2012-2013). Terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2014-2019 dan periode 2019-2024.



Gambar 42. Hj. R.A. Anita Noeringhati, S.H., M.H. terpilih sebagai Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Masa Jabatan 2019-2024

Dalam perjalanannya DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024 telah terjadi beberapa pergantian anggota yang berhenti dengan hormat atau pergantian antar waktu, masing-masing seperti tabel dibawah ini:

No	Nama Diganti	Alasan	Nama Pengganti	Partai
1.	Hasbullah	Wafat	Hj. Sumiati, S.Sos., MM.	PDI Perjuangan
2.	H. Medi Basri, S.Sos.	Wafat	Ersangkut, S.Psi. (2020-2024)	Partai Golkar
3.	H. Burlian, S.Sos., MM.	Wafat	Drs. Solehan Ismail (2021-2024)	Gerindra

Hasil-Hasil yang Dicapai DPRD Sumatera Selatan, 2019-2024

DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2019-2024 cukup produktif. Dalam kurun waktu 2 tahun awal, 2019-2020 sudah menghasilkan 32 keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Diantaranya penetapan program pembentukan peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan. Dalam setahun masa kerja awalnya, 2019 DPRD Provinsi Sumatera Selatan mampu menyelesaikan kurang lebih 102 penyampaian aspirasai masyarakat Sumatera Selatan secara tertulis.



Gambar 43. Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam Peringatan Hari Jadi Provinsi Sumatera Selatan Ke-76. Dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan Hj. R.A. Anita Noeringhati, S.H., M.H. bersama Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru, S.H., M.M.

Peraturan daerah (Perda) juga banyak diciptakan selama tahun 2019 sampai 2021. Seperti antara lain. Pada tahun 2019 beberapa Peraturan Daerah dikeluarkan oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam mengawal roda pembangunan di Sumatera Selatan. Perda No 1 Tahun 2019 mengatur rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2019-2023. Perda No 2 Tahun 2019 mengatur penyelenggaraan cadangan pangan pemerintah provinsi. Perda No 4 Tahun 2019 mengatur rencana umum energi daerah. Perda No 12 Tahun 2020 mengatur pendirian perusahaan daerah perseroan terbatas Sriwijaya Agro Industri. Selanjutnya pada tahun 2021 keluar perda nomor 2 tentang arsitektur bangunan gedung berornamen jati diri budaya di Sumatera Selatan.

Pada tahun 2021 dari 9 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) produk DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Ditetujui tujuh Raperda yang ditetapkan sebagai Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Selatan. Tujuh Perda tersebut. Pertama, Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kedua, Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan BUMD Bidang Pertambangan Minyak dan Gas BUMN. Ketiga, Peraturan Daerah tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Keempat, Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan. Kelima, Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023. Keenam, Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha. Ketujuh, Peraturan Daerah tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah No 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Sumsel.

Sementara pada tahun 2022, DPRD Provinsi Sumatera Selatan membuat sembilan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dalam Propemperda. Kesembilan Raperda tersebut terdiri dari empat Raperda inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan lima Raperda Usul Eksekutif.



Gambar 44. Peresmian Pembahasan Sembilan Raperda di DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Kesembilan Raperda yang dibahas sepanjang tahun 2022 ini untuk usul Raperda Inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Pertama, Raperda tentang Pelestarian Nilai-Nilai Budaya Marga dalam

Masyarakat. Kedua, Raperda tentang Pemanfaatan Alur Sungai dan atau Perairan Pedalaman. Ketiga, Raperda tentang Pengaturan Distribusi dan Peruntukkan Air Irigasi. Keempat, Raperda tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia. Sementara untuk usul Raperda Eksekutif. Kelima, Raperda tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Keenam, Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Sumatera Selatan. Ketujuh, Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021. Kedelapan, Raperda tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2022. Terakhir kesembilan, Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2023.

Epilog

Sejarah DPRD Provinsi Sumatera Selatan keberadaannya dapat ditelusuri sejak terbentuknya *Gemeenteraad Palembang* dengan perwakilan para penguasa dan usahawan serta pemimpin lokal dari pribumi dan timur asing lainnya di Kota Palembang sebagai cikal bakal dewan atau parlemen di Sumatera Selatan. Walau pada akhir masa kolonial, Belanda sekitar awal tahun 1940 membentuk *Groepsgemeenschap Palembang* atau *Palembang Raad* dengan keanggotaan dewan yang lebih luas meliputi seluruh Keresidenan Palembang atau Provinsi Sumatera Selatan, sekarang ini. Kemudian berlanjut ke masa Pendudukan Jepang dengan dibentuk *Su-Sangi-Kai* atau Dewan Rakyat Sumatera Selatan yang berakhir tahun 1945.

Setelah masa kolonial, antara tahun 1945 sampai 1949 di Sumatera Selatan dibentuk dewan. Dewan yang dibentuk ini bersifat sementara. Pada tanggal 3 September 1945 A. K. Gani sebagai pemimpin lokal Sumatera Selatan membentuk KNID Sumatera Selatan dengan anggota sebagian besar diambil dari *Su-Sangi-Kai*. Selanjutnya untuk mengganti KNID Sumatera Selatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan. Dilakukan Kongres Rakyat Daerah Seluruh Palembang pada bulan Desember 1945.

Kongres Rakyat Seluruh Palembang ini dihadiri 1100 orang perwakilan seluruh Komite Nasional Daerah di Kewedanaan Sumatera Selatan. Tujuan utama kongres memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan. Diakhir kongres terpilih 60 anggota yang duduk sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Selatan. Ke 60 anggota DPRD Sumatera Selatan ini bersama kepala daerah melaksanakan pemerintahan di Sumatera Selatan. Namun keadaan kembali berubah. Setelah Agresi Militer Belanda ke-1, terbentuk Daerah Militer Sumatera Selatan. Sehingga DPRD Sumatera Selatan tahun 1946 kembali diganti. Pada 7 Juni 1948 setelah berdiri Provinsi Sumatera Selatan dengan gubernurnya dr. M. Isa yang berkedudukan di Curup. Selanjutnya dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan. DPRD Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan perwakilan dari 4 (empat) Keresidenan di Provinsi Sumatera Selatan saat itu, yakni Keresidenan Palembang, Keresidenan Bengkulu, Keresidenan Lampung dan Keresidenan Bangka Belitung.

Berbagai penggantian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan selama masa revolusi fisik ini menggambarkan kesulitan pengendalian pemerintahan saat itu. Sehingga hamper tiada kebijakan-kebijakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan saat itu yang dapat dijalankan. Masa ini terus berlangsung hingga adanya pengakuan kedaulatan dari Belanda lewat hasil Konferensi Meja Bundar awal November 1949.

Ketika dibentuk sistem pemerintahan di Indonesia. Dengan kembalinya negara kesatuan Republik Indonesia dan diterapkannya UUDS 1950 tanggal 17 Agustus 1950, termasuk di Sumatera Selatan. Pada tanggal 12 September 1950, berdasar Peraturan Pemerintah (PP) dari pelaksanaan Undang-undang Nomor 3/1950, di Sumatera Selatan dibentuk Provinsi Sumatera Selatan. Provinsi Sumatera Selatan ini sebagai gabungan dari Keresidenan Palembang, Keresidenan Bengkulu, Keresidenan Lampung dan Keresidenan Bangka Belitung. Provinsi Sumatera Selatan beribukota dan berkedudukan di Kota Palembang.

Setelah pembentukan Provinsi Sumatera Selatan, dalam menjalankan roda pemerintahan di Provinsi Sumatera Selatan. selanjutnya dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara (DPRD-S) Provinsi Sumatera Selatan. Namun DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk ini masih bersifat sebagai perwakilan daerah-daerah di dalam Provinsi Sumatera Selatan dengan 30 orang anggota. Dengan W.A. Rahman terpilih sebagai Ketua dan Ali Gathmyr sebagai Wakil Ketua. Sesuai dengan namanya DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan hanya bersifat sementara untuk dua tahun 1950-1951. Namun karena tidak kunjung terbentuknya DPRD Kota/Kabupaten sebagai perwakilan ke DPRD Provinsi Sumatera Selatan, maka masa kerja DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan dilanjutkan hingga tahun 1955. Tahun ini diambil agar nanti DPRD Provinsi Sumatera Selatan dapat diisi oleh anggota terpilih dari Pemilihan Umum 1955.

Pasca pemilihan umum tahun 1955 hasilnya anggota terpilih tidak dapat segera dilantik. Akhirnya pada 1 Juli 1956 dibentuk DPRD-Peralihan Provinsi Sumatera Selatan yang juga masih bersifat sementara. Keanggotaannya akan dibubarkan setelah DPRD hasil Pemilihan Umum 1955 dilantik. Namun pergolakan politik yang memanas antara kelompok Islam, negara dan komunis sepanjang tahun 1956-1960 sebagai eksekusi dari hasil Pemilu 1955. Menyebabkan

DPRD-Peralihan Provinsi Sumatera Selatan diperpanjang masa kerjanya hingga tahun 1958.

Selanjutnya sebagai dampak dari pergolakan politik tersebut Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Pemberlakuan Dekrit Presiden ini menyebabkan di Sumatera Selatan dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR). Anggota DPRD-GR, termasuk di Provinsi Sumatera Selatan, diambil dari anggota-anggota yang terdiri atas wakil-wakil golongan-golongan politik ditambah golongan-golongan karya dengan komponen-komponennya dari golongan ABRI, veteran, para alim ulama, tokoh pembangunan spiritual dan pembangunan materiil. Keadaan ini terus berlangsung hingga meletusnya G-30-S/PKI dengan tumbangannya sistem pemerintahan Orde Lama.

Selama masa Orde Lama ini, kinerja DPRD Provinsi Sumatera Selatan, baik DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan (1950-1955), DPRD-Peralihan Provinsi Sumatera Selatan (1956-1960), dan DPRD-GR Provinsi Sumatera Selatan (1961-1966) tidak dapat bekerja maksimal. Kinerja DPRD-S Provinsi Sumatera Selatan terganggu dengan adanya gerakan daerah di Sumatera Selatan. DPRD-Peralihan Provinsi Sumatera Selatan juga dikungkung oleh pergolakan politik antara islam, komunis dan negara. Sedangkan DPRD-GR Provinsi Sumatera Selatan terperangkap oleh harus pusat dengan sistem pemerintahan yang dipimpin.

Masuk ke masa orde baru dengan naiknya Presiden Soeharto. Penataan daerah berada pada Gubernur M. Ali Amin dalam menyusun kembali DPRD-GR Provinsi Sumatera Selatan pasca G-30-S/PKI. Pada tanggal 2 Maret 1967, Gubernur M. Ali Amin setelah mengajukan usul keanggotaan DPRD-GR yang baru untuk periode 1966-1968. Pemilihan Umum yang direncanakan diadakan tahun 1968 dimundur hingga tahun 1971. Sehingga keanggotaan DPRD-GR Provinsi Sumatera Selatan masa ini kembali diperpanjang.

Pada tanggal 5 Juli 1971 diadakan Pemilihan Umum serentak di seluruh Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan dengan 10 partai peserta. Hasilnya, tanggal 14 Oktober 1971 dilakukan pelantikan anggota-anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan hasil Pemilu 1971. DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode ini sampai berakhirnya tugas melaksanakan banyak kegiatan. Dari 40 anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan masa ini didominasi oleh Golongan Karya sebanyak 22 kursi. Kekuatan Golongan Karya ditambah oleh 6 kursi dari ABRI.

Masa ini terus berlanjut dengan adanya penyederhanaan partai pada Pemilihan Umum 1977. Partai tersebut adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) serta Golongan Karya (Golkar). Namun hasil Pemilu 1977 di Sumatera Selatan cukup mengejutkan karena Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mampu mengimbangi Golongan Karya. Dari 40 anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1977-1982 hasil Pemilu 1977, PPP mampu menempatkan 14 kursi berbanding 18 kursi Golkar. Kondisi ini dipertahankan dalam Pemilu 1982 di DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1977-1982.

Namun kekuatan Golongan Karya berubah dan semakin kokoh dengan kemampuan memborong lebih dari separuh kursi dan menempatkan 25 kursi DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1987-1992 Hasil Pemilihan Umum 1992. Dilanjutkan dengan Pemilu 1992 dengan memborong sebanyak 26 kursi DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 1992-1997. Dominasi Golongan Karya semakin kokoh dengan memborong hampir seluruh kursi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 1997-2002, hasil pemilihan umum 1997. Semakin kuatnya Orde Baru dengan topangan Golongan Karya terlihat dari ketidaknya keseimbangan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Membuat gelombang protes sebagai dampak dari yang juga terjadi di tanah air secara keseluruhan. Gelombang protes ini meruntuhkan Presiden Soeharto dan Orde Baru. Melahirkan Orde Reformasi. Namun dalam catatan hasil kerja DPRD Provinsi Sumatera Selatan masa Orde Baru ada kestabilan politik dengan bukti adanya berbagai pembangunan di Sumatera Selatan yang mampu disokong dengan sangat baik oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Memasuki masa Orde Reformasi dilakukan pemilihan umum 1999 untuk mengganti DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 1997-2002. Hasilnya, untuk perolehan kursi Pemilihan Umum 1999 periode 1999-2004 dengan 65 kursi. Hasil Pemilu 1999 ini mengantarkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dengan kursi 26 kursi mampu mengungguli Golkar yang mendapat 15 kursi.

Namun dominasi PDI-P dalam pemilu 2009 tersendat. Golongan Karya mampu unggul di DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2004-2009 dengan 16 Kursi berbanding 12 Kursi PDI-P dari 65 kursi dewan. Disusul kekuatan baru Partai Demokrat dengan 9 Kursi dan Partai Amanat Nasional dengan 8 Kursi. Komposisi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2009-2014 hasil Pemilihan Umum 2009

kembali dimenangkan Golongan Karya tetap dengan 16 Kursi. Partai Demokrat menjadi kekuatan baru dengan 13 Kursi. Sementara PDI-P hanya menyumbang 11 kursi. Dari 75 kursi yang ada di DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2009-2014.

Pemerataan kekuatan kursi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan terjadi pada periode 2014-2019. Hasil Pemilu 2014 yang menjatahkan 75 kursi. Mencatat keberimbangan yang tidak terlalu berbeda. PDI-P mendapat 13 kursi, Partai Demokrat mendapat 11 kursi, Golongan Karya 10 kursi, dan partai Gerindra 10 kursi. PAN dan PKB mengintip dengan 6 kursi, sedangkan PKS, Nasdem dan Hanura dengan 5 kursi.

Pada Pemilu 2019 ada 80 jatah kursi yang diperebutkan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk periode 2019-2024. Kekuatan politik di DPRD Provinsi Sumatera Selatan kembali berimbang. Golongan Karya meraup 13 kursi, PDI-P mendapat 11 kursi, Partai Gerindra 10 kursi, Partai Demokrat mendapat 9 kursi. Sementara, PKB mengintip dengan 8 kursi, sedangkan PKS dan Nasdem 6 kursi, PAN dengan 5 kursi. Sedangkan Hanura dan partai Baru Perindo mendapat 3 kursi. Sebaliknya PPP hanya menduduki 1 kursi.

Pada masa reformasi tampaknya ada kompetisi yang ketat untuk partai yang mendominasi DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Perebutan dominasi ini menjadi kekuatan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan berimbang selama masa reformasi.

Pelajaran apa yang dapat diambil dari eksistensi DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam perjalanan sejarahnya yang panjang. Buku *Sejarah DPRD Sumatera Selatan: Tiga Masa Menjaga Pembangunan di Bumi Sriwijaya* memperlihatkan bahwa pada setiap masa terlihat berbagai peranan, baik yang bersifat besar maupun kecil dalam mengawal pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Ketika berbagai gejolak daerah maupun politik di masa Orde Lama terjadi ada kestagnan dan keterbatasan peranan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam mendorong pembangunan. Sementara dalam masa Orde Baru, kekuatan DPRD Provinsi Sumatera Selatan lebih stabil karena dominasi suara Golongan Karya yang mampu mendorong pembangunan Orde Baru di Sumatera Selatan lebih terasa. Sebaliknya, ketika hampir tanpa dominasi besar karena adanya perimbangan kekuatan politik di DPRD Provinsi Sumatera Selatan masa reformasi. Justru berbagai insiatif yang bersifat inovatif dan reformatif lebih terlihat. Segala bentuk kekuatan lokal

mampu dieksponer dalam mengusung berbagai pembangunan dengan segala event nasional dan internasional hadir di Bumi Sriwijaya.

Sejarah mengajarkan dari buku ini bahwa penyelenggaraan pemerintahan berwajah lokalitas tanpa konflik (seperti idiom Sumatera Selatan *zero* konflik) dalam keanggotaan di DPRD Provinsi Sumatera Selatan merupakan warisan yang harus terus dijaga dan dipelihara dengan baik. Siapapun yang nanti duduk di kursi dewan DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada masa yang akan datang. Sehingga penjagaan tradisi pembangunan terus berlanjut di Bumi Sriwijaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah. M. (1991). *Sejarah Daerah Sumatera Selatan* (Palembang: Depdikbud Bagian Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya Propinsi Sumatera Selatan).
- Abdullah, M. (ed.) (1992). *Kota Palembang sebagai Kota Dagang dan Industri*. (Jakarta: Depdiknas dan Jarahnitra).
- Agustini, P., Wardhani, R.A.D.A., Gustia, R., Perdana, Y., & Selawati. (2022). Peran Sumber Daya manusia Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan ODP Sekertariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 2(1): 113-122.
- Andi, C. (2004). Meninjau legalitas pemilihan Gubernur Daerah Sumatera Selatan 2003 (Studi Kasus Pemilihan Gubernur di Sumatera Selatan). *Thesis*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Anonim. *Beberapa Masalah Ekonomi dan Pembangunan di Propinsi Sumatera Selatan: Untuk Bahan Seminar Pembangunan Daerah Propinsi Sumatera Selatan*, dari tanggal 7 s/d 10 Djanuari 1971
- Anwar, S., & Said, A. Z. (1989). *Haji Asnawi Mangkualam: Padamu Terletak Qadar*. (Jakarta: Penerbit Masagung)
- Ardipandanto, A. (2015). Kelemahan Pelaksanaan Pilpres 2014: Sebuah Analisis (Weaknesses Of The 2015 Presidential Elections: An Analysis). *Politica*, 6(1): 87-106.
- Aria, D. (2017). Dinamika Politik Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014. *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*, 15(2): 85-164.
- Arnas Jakarta. (2015). *Guide Arsip Pemilihan Umum 1955 – 1999*. (Jakarta: Arsip Nasional Republik Indonesia).
- Budiarjo, M. (1998). *Partisipasi dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).
- Dwipayana, A.A.G.N.A. (2009). *Demokrasi Biaya Tinggi*. (Yogyakarta: FISIPOL UGM).
- Effendi, M. (2000). *Perjuangan Mencari Ridha Tuhan: Catatan Tiga Zaman dari Balik Terali Penjara Rezim Tirani Soeharto Sketsa Perjuangan Kemerdekaan di Sumatera Selatan* (Jakarta: Al-Mukhtar)
- Eko, S. (2004). *Pilkada Secara Langsung: Konteks, Proses, dan Implikasi*. (Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa)

- Feith, H. (1999). *Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia).
- Forwapol Sumsel. (2008). *Penyambung Lidah Rakyat: Profil Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Periode 2004-2009*. (Palembang: Forum Wartawan Politik Sumatera Selatan).
- Hanafiah, D. (1988). *Palembang Zaman Bahari: Citra Palembang Tempo Doeloe*. (Palembang: Humas Pemda Tingkat II).
- Hanafiah, J. (ed.) (1996). *Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Daerah Sumatera Selatan*. (Palembang: Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan).
- Hanafiah, D. (1998). *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Kotamadya Palembang Daerah Tingkat II Palembang*. (Palembang: Pemerintahan Kotamadya Palembang).
- Hanafiah, D. (ed.). (1998). *Kesan-Kesan Dalam Kehidupan dan Dalam Berkarya dari H. M. Ali Amin, SH: Pengalaman Seorang Pegawai Tiga Zaman*. (Palembang: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan).
- Haris, S. (ed.). (1998). *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia – PPW LIPI).
- Hasibuan, I., & Yamin, M. (ed.). (2008). *Jembatan Kebangsaan: Biografi Politik Taufiq Kiemas*. (Jakarta: Rumah Kebangsaan dan Q Communication).
- Hayness, J. (2000). *Demokrasi dan Masyarakat Sipil di Demokrasi Ketiga: Gerakan Politik Baru Kaum Terpinggir*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).
- Huntington, S.P., & Nelson, J. (1994). *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Husin, H., & Marihandono, M.I.J. (2020). Ethnic Chinese in Colonial Bureaucracy: An Overview of the History of the Institutionalization of Vreemde Oosterlingen Palembang 1906-1942. Proceedings of the International University Symposium on Humanities and Arts 2020 (INUSHARTS 2020), 539, hlm. 145-150.
- Janedjri, G. (2012). *Politik Hukum Pemilu*. (Jakarta: Konstitusi Press).
- Kemenpen. (1954). *Republik Indonesia, Propinsi Sumatera Selatan*. (Jakarta: Kementerian Penerangan)
- LPU. 1994. *Pemilihan Umum 1992 Dari Daerah Ke Daerah*. (Jakarta: Lembaga Pemilihan Umum)

- Mahyuddin. (2008). *Kita Menghadapi Kemenangan/Kegagalan dalam Pemilihan*. (Palembang: Visit Musi)
- Muchtar, A.T. (ed.) (2014). *Sketsa Pemilu 2014: Antara Substansi, Proses, dan Kenyataan (Kumpulan Artikel Terpilih)*. (Jakarta: The Indonesian Institute).
- Pahlevi, I. (2014). Dinamika Sistem Pemilu Masa Transisi di Indonesia. *Politica*, 5(2): 111-135.
- Pemda Dati I Sumsel. (1977). *Hasil Pemilihan Umum 1971: Buku Kenang-Kenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan*. (Palembang: Pemda Dati I Propinsi Sumatera Selatan)
- Pemda Dati I Sumsel. (1982). *Hasil Pemilihan Umum 1977: Buku Kenang-Kenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan*. (Palembang: Pemda Dati I Propinsi Sumatera Selatan).
- Pemda Dati I Sumsel. (1988). *Fakta dan Data Hasil Pembangunan di Propinsi Dati I Sumatera Selatan Tahun 1977 s/d 1987*. (Palembang: Pemda Dati I Propinsi Sumatera Selatan).
- Rokian, A. (2018). *Rekam Jejak Pengabdian Aidil Fitri Syah: Bidang Pendidikan, Kepemudaan, Birokrat dan Panggung Politik*. (Palembang: Yayasan Pendidikan Rosania)
- Rustandi, D. (ed.). (2014). *Dinamika Komunikasi Politik Menjelang Pemilu 2014*. (Bandung: Balai Pengkajian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatika Bandung, BPPKI).
- Sholikin, A. (2019). Mahalnya Ongkos Politik dalam Pemilu Serentak Tahun 2019. *Jurnal Transformative*, 5(1): 87-108.
- Suara Rakyat Sumatera Nomor 58 Rebo 12 Maret 1952
- Suara Rakyat Sumatera , Rabu , 23 Januari 1952
- Surbakti, R., Supriyanto, D., & Asy'ari, H. (2011). *Merancang Sistem Politik Demokratis Merancang Sistem Politik Demokratis Menuju Pemerintahan Presidensial yang Efektif*. (Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan).
- Susanto, Z. (ed.). (2021). *Seabad Rakyat Indonesia Berparlemen Sejarah DPR RI*. (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI).
- Sekretariat DPRD Propinsi Dati I Sumsel. (1987). *Hasil Pemilihan Umum 1982: Buku Kenang-Kenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan*. (Palembang: Sekretariat DPRD Propinsi Dati I Sumsel)

- Sekretariat DPRD Sumsel. (2003). *Selayang Pandang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan*. (Palembang: Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan)
- Sekretariat DPRD Provinsi Sumsel. (2005). *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Selatan: Profil Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Masa Jabatan 2004-2009*. (Palembang: Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan)
- Sekretariat DPRD Provinsi Sumsel. (2011). *Selayang Pandang: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Selatan*. (Palembang: Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan)
- Sekretariat DPRD Provinsi Sumsel. (2013). *Selayang Pandang: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Selatan*. (Palembang: Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan)
- Sekretariat DPRD Sumsel. (2019). *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Selatan: Profil Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Masa Jabatan 2019-2024*. (Palembang: Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan)
- Sekretariat DPRD Sumsel. (2021). *Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sumatera Selatan: Profil Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Masa Jabatan 2019-2024*. (Palembang: Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan)
- Santun, D.I.M. (2010). *Venesia Dari Timur: Memaknai Produksi dan Reproduksi Simbolik kota Palembang Dari Kolonial Sampai Pascakolonial*. (Yogyakarta: Penerbit Ombak).
- Tim Penulis Sejarah Kota Palembang. (2000). *Palembang Doeloe, Sekarang dan Akan Datang*. (Palembang: Humas Kota Palembang).
- Uji, N.W. (ed.) (2018). *Jogja Memilih: Sejarah Pemilu 1951 & 1955 di Yogyakarta*. (Yogyakarta: Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta).
- Yuarsa, Feris. Mohamad Isa: Pejuang Kemerdekaan yang Visioner, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016).
- Zed. M. (2003). *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950*. (Jakarta: LP3ES).
- Zubir, Z., Rois, S., & Arios, L. (2012). *Bunga Rampai Sejarah Sumatera Selatan: Sumatera Selatan dalam Kajian Sosial dan Ekonomi*. (Padang: BPSNT Padang Press).

Lampiran 1

Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua yang berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan ialah anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan ialah anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua, dan ketiga serta keempat.

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara terbanyak dalam pemilihan umum. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara sama, ketua dan wakil ketua ditentukan berdasarkan persebaran perolehan suara.

DPRD Provinsi Sumatera Selatan masa jabatan tahun 2019-2024 dengan pimpinan, sebagai berikut:

Hj. R. A. Anita Noeringhati, S.H., M.A. Ketua Partai Golongan Karya
H.M. Giri Ramanda N. Kiemas, S.E., MM. Wakil Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
Kartika Sandra Dewi, S.H. Wakil Ketua Partai Gerindra
H. Muchendi Mahreki, S.E. Wakil Ketua Partai Demokrat

Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas:

- Memimpin sidang-sidang DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan menyimpulkan hasil sidang untuk mengambil keputusan.
- Menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua.
- Melakukan koordinasi dalam upaya mensinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Selatan.
- Menjadi juru bicara DPRD Provinsi

Sumatera Selatan. (e). Melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan; (f). Mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan instansi pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya sesuai dengan keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan; (g). Mewakili DPRD Provinsi Sumatera Selatan di pengadilan; (h). Melaksanakan keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan berkenaan dengan penetapan saksi atau rehabilitasi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (i). Menyusun rencana anggaran DPRD Provinsi Sumatera Selatan bersama sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan. dan (j). Menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang khusus diadakan untuk itu.

Susunan, Kedudukan, Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Susunan dan Kedudukan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, yakni: DPRD Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari anggota partai politik peserta Pemilihan Umum yang dipilih melalui Pemilihan Umum.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan mempunyai fungsi: (a). Legislasi. Fungsi Legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan. (b). Anggaran. Fungsi Anggaran diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. (c). Pengawasan. Fungsi Pengawasan diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda), Keputusan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah Provinsi Sumatera Selatan.

DPRD Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas dan wewenang: (a). Membentuk Peraturan Daerah bersama Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. (b). Membahas dan memberi persetujuan Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. (c). Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (d). Mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan kepada

Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian. (e). Memilih Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dalam hal terjadi kekosongan Jabatan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan. (f). Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. (g). Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. (h). Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Selatan. (i). Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat daerah Provinsi Sumatera Selatan. (j). Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undang, dan (k). Melaksanakan tugas dan wewenang lain di Provinsi Sumatera Selatan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Hak Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Hak Interpelasi. Hak DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara. Hak Angket. Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak menyatakan pendapat. Hak DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Hak-hak yang dimiliki Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan: (1). Hak mengajukan rancangan Peraturan daerah di Provinsi Sumatera Selatan. (2). Hak mengajukan pertanyaan. (3). Hak memilih dan dipilih. (4). Hak membela diri. (5). Hak imunitas atau hak kekebalan hukum, yaitu anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan tidak dapat dituntut dimuka pengadilan karena pernyataan dan pendapat yang

disampaikan dalam rapat-rapat DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan pemerintah dan rapat-rapat DPRD Provinsi Sumatera Selatan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (6). Hak protokoler atau hak anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk memperoleh penghormatan berkenaan dengan jabatannya dalam acara-acara kenegaraan atau acara resmi maupun dalam melaksanakan tugasnya. (7). Hak keuangan dan administratif, dan (8). Menyampaikan Usul dan Pendapat.

Jenis Rapat DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Jenis Rapat DPRD Provinsi Sumatera Selatan, adalah:

(a). Rapat Paripurna (b). Rapat Paripurna Istimewa (c). Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan (d). Rapat Fraksi (e). Rapat konsultasi (f). Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan Kepala Daerah (g). Rapat Badan Musyawarah (h). Rapat komisi (i). Rapat Gabungan Komisi (j). Rapat Badan Anggaran (k). Rapat Badan Legislasi Daerah (l). Rapat Badan Kehormatan (m). Rapat Panitia Khusus (n). Rapat Kerja (o). Rapat Dengar Pendapat Umum

Rapat Paripurna Merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Rapat pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan merupakan rapat para Anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Rapat Fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi biasa dimanfaatkan untuk menyusun pandangan umum fraksi dan pendapat fraksi pada setiap pembahasan rancangan peraturan daerah. Rapat Konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.

Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah rapat usur pimpinan, bersama pimpinan alat kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan Kepala Daerah. Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Musyawarah dalam rangka menetapkan agenda DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Rapat Komisi merupakan rapat internal anggota komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Komisi membahas permasalahan-permasalahan sesuai dengan bidang yang

ditangani. Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk membahas permasalahan-permasalahan yang merupakan lingkup lintas komisi.

Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua badan anggaran untuk membahas Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Sumatera Selatan. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan rapat badan pembentukan peraturan daerah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua badan pembentukan peraturan daerah untuk membahas rancangan peraturan daerah baik inisiatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan maupun yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Badan Kehormatan membahas berkenaan dengan disiplin anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Rapat Panitia Khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua panitia khusus. Rapat Kerja merupakan rapat antara DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk yang dipimpin oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan atau badan anggaran, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk yang dipimpin oleh pimpinan alat kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang terkait.

Rapat Dengar Pendapat Umum merupakan rapat antara DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan dipimpin oleh pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan atau pimpinan alat kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang terkait

Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Alat kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari:
a. Pimpinan; b. Badan Musyawarah; c. Komisi; d. Badan Pembentukan

Perda; e. Badan Anggaran; f. Badan Kehormatan; dan g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk rapat paripurna.

Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Badan kehormatan dibentuk oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan merupakan alat kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang bersifat tetap. Pembentukan badan kehormatan ditetapkan dengan keputusan DPRD. Anggota badan Kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dipilih dari dan oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan jumlah Anggota 3 (tiga) orang. Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.

Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan pada rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan usul dari masing-masing fraksi. Untuk memilih anggota badan kehormatan, masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan. Masa tugas anggota badan kehormatan paling lama 2½ (dua setengah) tahun. Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan pengganti antar waktu menduduki tempat anggota badan kehormatan yang digantikan.

Anggota badan kehormatan DPRD Provinsi Sumatera Selatan masa jabatan tahun 2019-2024, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Dr. Ir. H. Syamsul Bahri, MM.	Ketua Merangkap Anggota
2.	Maliono, S.H.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	H. Fatra Radezayansyah, S.T., MM.	Anggota
4.	Ir. H. Zulfikri Kadir	Anggota
5.	Tamtama Tanjung	Anggota
6.	Meri, S.Pd.	Anggota
7.	H. M. Subhan, S.E.	Anggota

Badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan bukan Anggota. Badan kehormatan mempunyai tugas: (a). Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan terhadap moral, kode etik, dan/atau peraturan tata tertib DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka menjaga martabat,

kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD. (b). Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan terhadap peraturan tata tertib dan/atau kode etik DPRD Provinsi Sumatera Selatan. (c). Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klasifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dan/atau masyarakat. (d). Melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna DPRD Provinsi Sumatera Selatan. dan (e). Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Kehormatan dapat bantuan dari Tim Independen

Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Selatan besifat tetap dan dibentuk oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbantuknya pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, komisi, Badan anggaran, dan fraksi. Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan karena jabatannya adalah pimpinan badan musyawarah merangkap anggota. Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan karena jabatannya adalah sekretaris badan musyawarah bukan sebagai anggota. Penempatan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam badan musyawarah dan pimpinannya ke alat kelengkapan lainya berdasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.

Anggota Badan Musyawarah (Bamus) di DPRD Provinsi Sumatera Selatan masa jabatan tahun 2019-2024, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Hj. R.A. Anita Noeringhati, S.H., M.H.	Ketua Merangkap Anggota
2.	H. M. Giri Ramanda N. Kiemas, S.E., MM.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	Kartika Sandra Desi, S.H.	Wakil Ketua Merangkap Anggota

4.	H. Muchendi Mahzarekki, S.E.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
5.	H. Fatra Radezayansyah, S.T., MM.	Anggota
6.	Hj. Lindawati Syahropi, S.H., M,H.	Anggota
7.	Heru Prayogo, S.H.	Anggota
8.	Marzuki, S.E.	Anggota
9.	H. Medi Basri, S.Sos.	Anggota
10.	H. Rizal Kennedy, S.H., MM.	Anggota
11.	Hj. Sumiati, S.Pd.	Anggota
12.	Hj. Tina Malinda, S.E., M.Si.	Anggota
13.	Ike Mayasari, S.H., M.H.	Anggota
14.	Susy Imelda Frederika	Anggota
15.	Raden Gempita, S.H.	Anggota
16.	Prima Salam, S.H.	Anggota
17.	H. Saifudin Aswari Rivai, S.E.	Anggota
18.	Hj. Susilawati, S.H, M.Kn.	Anggota
19.	Lia Anggraini, S.H.	Anggota
20.	H. Ir. M. Kanovriyandi	Anggota
21.	Tamtama Tanjung	Anggota
22.	Dr. Hj. Nilawati	Anggota
23.	Hj. Nilawati, S.H.	Anggota
24.	H. Kartak SAS., S.E.	Anggota
25.	Hj. Dra. Nurhilyah	Anggota
26.	Fathan Qoribi, ST.	Anggota
27.	H. Sri Sutandi, S.E., MBA.	Anggota
28.	Herman	Anggota
29.	H. Novian Fauzi, S.H.	Anggota
30.	H.M. Subhan, S.E.	Anggota
31.	Firdaus, S.H.	Anggota
32.	Ahmad Toha, S.PdI., M.Si.	Anggota
33.	Muhammad Yaser, S.E.	Anggota
34.	Abusari H. Burlian, S.H., M.Si.	Anggota
35.	H. Ali Imron, S.E., M.Si.	Anggota
36.	H. Syahrudin, S,T., MM.	Anggota
37.	Iwan Hermawan, S.T.	Anggota
38.	Ramadhan S. Basyeban, S.H., M.H.	Sekretaris Bukan Anggota

Badan Musyawarah mempunyai tugas: (a). Menetapkan agenda DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk 1 (satu) tahun Sidang, 1(satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian Rancangan Peraturan Daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan Rapat Paripurna untuk merubahnya, (b). Memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan

wewenang DPRD Provinsi Sumatera Selatan. (c). Meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada Alat Kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing. (d). Menetapkan jadwal acara Rapat DPRD Provinsi Sumatera Selatan. (e). Memberi saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan. dan (f). Merekomendasikan tugas lain yang diserahkan oleh Rapat Paripurna kepada Badan Musyawarah.

Komisi-Komisi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Setiap anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan kecuali pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, wajib menjadi anggota salah satu komisi.

Komisi-komisi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan berjumlah 3 (tiga) komisi sebagai berikut: (a). Komisi I (Bidang Pemerintahan) (b). Komisi II (Bidang Perekonomian) dan (c). Komisi III (Bidang Keuangan) (d). Komisi IV (Bidang Pembangunan) (e). Komisi V (Bidang Kesejahteraan Rakyat)

Provinsi Sumatera Selatan periode 2019-2024. Anggota untuk tiap-tiap komisi tidak sama, sebagai berikut:

Koordinator Komisi I Hj. R.A. Anita Noeringhati, S.H., M.H. dengan 14 orang, yakni:

No	Nama	Jabatan
1.	Antoni Yuzar, S.H., M.H.	Ketua Merangkap Anggota
2.	Dedi Sipriyanto, S.Kom., MM.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	H. Chairul S. Matdiah, SH., M.H.	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Drs. Thamrin, M.Si.	Anggota
5.	H. Nawawi, S.H.	Anggota
6.	Hj. Sumiati, S.H., M.H.	Anggota
7.	H. Saifudin Aswari Rivai, S.E.	Anggota
8.	Dr. H. Budiarto Marsul, S.E., M.Si.	Anggota
9.	Lia Anggraini, S.H.	Anggota
10.	H. Kartak SAS., S.E.	Anggota
11.	Herman	Anggota
12.	Ahmad Toha, S.PdI., M.Si.	Anggota
13.	H. Juanda Hanafiah, S.H., MM.	Anggota
14.	Ahmad Firdaus Ishak, S.H., M.Si.	Anggota

Koordinator Komisi II H. M. Giri Ramanda N. Kiemas, S.E., MM.
dengan Komisi II 14 orang, yakni:

No	Nama	Jabatan
1.	Asgianto, S.T.	Ketua Merangkap Anggota
2.	Abusari H. Burlian, S.H., M.Si.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	Firdaus, S.H.	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Hj. Lindawati Syahropi, S.H., M,H.	Anggota
5.	Heru Prayogo, S.H.	Anggota
6.	Marzuki, S.E.	Anggota
7.	H. Ahmad Syarnubi, S.P., MM.	Anggota
8.	Susy Imelda Frederika	Anggota
9.	Hj. Susilawati, S.H, M.Kn.	Anggota
10.	Azmi Shofiq, S.R., S.IP.	Anggota
11.	Hj. Dra. Nurhilyah	Anggota
12.	Yenny Elita, S.Pd., MM.	Anggota
13.	H. Ali Imron, S.E., M.Si.	Anggota
14.	H. Syahrudin, S,T., MM.	Anggota

Koordinator Komisi III Kartika Sandra Desi, S.H. dengan Komisi
III: 11 orang, yakni:

No	Nama	Jabatan
1.	M. Yansuri, S.IP.	Ketua Merangkap Anggota
2.	H. Novian Fauzi, S.H.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	Ike Mayasari, S.H., M.H.	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Andie Dinaldie, S,E.	Anggota
5.	Hj. Tina Malinda, S.E., M.Si.	Anggota
6.	H. Ir. M. Kanovriyandi	Anggota
7.	Fathan Qoribi, ST.	Anggota
8.	H. M. Anwar Al Syadat, S.Si., M.Si.	Anggota
9.	Muhammad Yaser, S.E.	Anggota
10.	Alfrenzi Panggarbesi, S.Si.	Anggota
11.	Drs. H. Solehan Ismail	Anggota

Koordinator Komisi IV Hj. R.A. Anita Noeringhati, S.H., M.H.
dengan Komisi IV sebanyak 17 orang, yakni:

No	Nama	Jabatan
1.	Muhamad F. Ridho, S.T., M.T.	Ketua Merangkap Anggota
2.	H. Hasbi Asadiki, S.Sos, MM.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	Nasrul Halim, S.H.	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Nadia Basjir, S.E.	Anggota
5.	H. David Hadrianto Aljufri, S.H.	Anggota
6.	Ir. H. Zulfikri Kadir	Anggota
7.	Hj. Meli Mustika, S.E., MM.	Anggota
8.	Maliono, SH.	Anggota
9.	H. Efrans Effendi, S.H.	Anggota

10.	Hj. Ir. Holda, M.Si.	Anggota
11.	M. Oktafiansyah, S.T., MM.	Anggota
12.	Dr. Ir. H. Syamsul Bahri, MM.	Anggota
13.	H. Nopianto, S.Sos., MM.	Anggota
14.	H. M. Subhan, S.E.	Anggota
15.	H. Askweni, S.Pd.	Anggota
16.	Junaidi, S.E.	Anggota
17.	Rudi Hartono	Anggota

Koordinator Komisi II H. Muchendi Mahzarekki, S.E. dengan Komisi V sebanyak 15 orang, yakni:

No	Nama	Jabatan
1.	Susanto Adjis, S.H.	Ketua Merangkap Anggota
2.	Mgs. H. Syaiful Padli, S.T., MM.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	H. Fatra Radezayansyah, S.T., MM.	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Ersangkut, S.Pd.	Anggota
5.	H. Rizal Kennedy, S.H., MM.	Anggota
6.	Hj. Dra. Rita Suryani	Anggota
7.	Raden Gempita, S.H.	Anggota
8.	Prima Salam, S.H.	Anggota
9.	Tamtama Tanjung	Anggota
10.	Drs. H. A. Gani Subit, MM.	Anggota
11.	Dr. Hj. Nilawati	Anggota
12.	Meri, S.Pd.	Anggota
13.	H. Sri Sutandi, S.E., MBA.	Anggota
14.	H. Toyeb Rakembang, S.Ag.	Anggota
15.	Iwan Hermawan, S.T.	Anggota

Penempatan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam komisi dan perpindahan komisi lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran, penempatan anggota fraksi dalam komisi harus proporsional, jika jumlah utusan fraksi-fraksi yang ditetapkan dalam 1 (satu) komisi melebihi ketentuan jumlah anggota maksimal maka diutamakan anggota fraksi berdasarkan urutan besarnya jumlah anggota fraksi, Ketua, Wakil ketua dan sekretariat. Komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam saat rapat paripurna, masa jabatan Ketua, Wakil ketua dan Sekretariat Komisi ditetapkan paling lama 2½ (dua stengan) tahun.

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan pengganti antara waktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan. Komisi mempunyai tugas: (a). Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (b). Melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah, dan rancangan

keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan. (c). Melakukan pembahasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan bidang komisi masing-masing. (d). Membantu pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Kepala Daerah dan masyarakat kepada daerah dan masyarakat kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan. (e). Menerima, menampung dan membahas serta menindak lanjuti aspirasi masyarakat. (f). Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah Provinsi Sumatera Selatan. (g). Mengusulkan, memperjuangkan program pembangunan aspirasi masyarakat Provinsi Sumatera Selatan dan daerah pemilihannya masing-masing. (h). Melakukan kunjungan kerja komisi yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan. (i). Mengadakan rapat kerja dan dengar pendapat. (j). Mengajukan usul kepada pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komisi. dan (k). Memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Badan pembentukan peraturan daerah merupakan alat kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Jumlah anggota badan pembentukan peraturan daerah setara dengan anggota satu komisi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Komposisi anggota badan pembentukan peraturan daerah berdasarkan usulan Fraksi-fraksi secara proporsional. Pimpinan badan pembentukan peraturan daerah terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan pembentukan peraturan daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan karena jabatannya adalah sekretaris badan pembentukan peraturan daerah bukan anggota. Masa jabatan pimpinan badan pembentukan peraturan daerah dapat dirubah pada setiap tahun anggaran.

Anggota Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) di DPRD Provinsi Sumatera Selatan masa jabatan tahun 2019-2024, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	H. Toyeb Rakembang, S.Ag.	Ketua Merangkap Anggota
2.	H. Nopianto, S.Sos., MM.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	Drs. Tamrin, M.Si.	Anggota
4.	H. Nawawi, S.H.	Anggota
5.	H. David Hadrianto Aljufri, S.H.	Anggota
6.	Ike Mayasari, S.H., M.H.	Anggota
7.	Hj. Dra. Rita Suryani	Anggota
8.	Dedi Sipriyanto, S.Kom., MM.	Anggota
9.	H. Efrans Effendi, S.H.	Anggota
10.	Raden Gempita, S.H.	Anggota
11.	Drs. H. A. Gani Subit, MM.	Anggota
12.	H. Ir. M. Kanovriyandi	Anggota
13.	Antoni Yuzar, S.H., M.H.	Anggota
14.	Fathan Qoribi, ST.	Anggota
15.	Ahmad Toha, S.PdI., M.Si.	Anggota
16.	Ahmad Firdaus Ishak, S.H., M.Si.	Anggota
17.	Drs. H. Solehan Ismail	Anggota
18.	Ramadhan S. Basyeban, S.H., M.H.	Sekretaris Bukan Anggota

Badan Pembentukan Perda DPRD Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas: (a). Menyusun rancangan program pembentukan perda yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD Provinsi Sumatera Selatan. (b). Koordinasi untuk penyusunan program pembentukan peraturan daerah antara DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan. (c). Menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan. (d). Melakukan pengharmonisan, pembulatan, dan penatapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan. (e). Memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah di Provinsi Sumatera Selatan yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, diluar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau diluar prioritas rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program pembentukan perda di Provinsi Sumatera Selatan. (f). Mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus. (g). Memberikan

masukannya kepada pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh badan musyawarah. dan (h). Membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Badan anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Selatan bersifat tetap dibentuk oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada awal masa jabatan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Badan anggaran terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Susunan keanggotaan badan anggaran ditetapkan pada rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, komisi, badan anggaran, fraksi. Ketua dan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan karena jabatannya adalah pimpinan badan anggaran merangkap anggota. Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Selatan karena jabatannya adalah sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota. Penempatan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam badan anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.

Anggota Badan Anggaran di DPRD Provinsi Sumatera Selatan masa jabatan tahun 2019-2024, sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Hj. R.A. Anita Noeringhati, S.H., M.H.	Ketua Merangkap Anggota
2.	H. M. Giri Ramanda N. Kiemas, S.E., MM.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	Kartika Sandra Desi, S.H.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
4.	H. Muchendi Mahzarekki, S.E.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
5.	M. Yansuri, S.IP.	Anggota
6.	Nadia Basjir, S.E.	Anggota
7.	H. Hasbi Asadiki, S.Sos, MM.	Anggota
8.	H. David Hadrianto Aljufri, S.H.	Anggota
9.	Andie Dinaldie, S,E.	Anggota
10.	H. Nawawi, S.H.	Anggota

11.	Susanto Adjis, S.H.	Anggota
12.	Ir. H. Zulfikri Kadir	Anggota
13.	H. Ahmad Syarnubi, S.P., MM.	Anggota
14.	Hj. Meli Mustika, S.E., MM.	Anggota
15.	Dr. H. Budiarto Marsul, S.E., M.Si.	Anggota
16.	Maliono, S.H.	Anggota
17.	Asgianto, S.T.	Anggota
18.	H. Efrans Effendi, S.H.	Anggota
19.	Muhamad F. Ridho, S.T., M.T.	Anggota
20.	Azmi Shofiq, S.R., S.IP.	Anggota
21.	Hj. Ir. Holda, M.Si.	Anggota
22.	Drs. H. A. Gani Subit, MM.	Anggota
23.	Nasrul Halim, S.H.	Anggota
24.	M. Oktafiansyah, S.T., MM.	Anggota
25.	Antoni Yuzar, S.H., M.H.	Anggota
26.	Meri, S.Pd.	Anggota
27.	Dr. Ir. H. Syamsul Bahri, MM.	Anggota
28.	H. Nopianto, S.Sos., MM.	Anggota
29.	Yenny Elita, S.Pd., MM.	Anggota
30.	H. M. Anwar Al Syadat, S.Si., M.Si.	Anggota
31.	H. Askweni, S.Pd.	Anggota
32.	Mgs. H. Syaiful Padli, S.T., MM.	Anggota
33.	Junaidi, S.E.	Anggota
34.	H. Juanda Hanafiah, S.H., MM.	Anggota
35.	Ahmad Firdaus Ishak, S.H., M.Si.	Anggota
36.	Alfrenzi Panggarbesi, S.Si.	Anggota
37.	Rudi Hartono	Anggota
38.	Ramadhan S. Basyeban, S.H., M.H.	Sekretaris Bukan Anggota

Badan Anggaran mempunyai tugas: (a). Memberikan saran dan dapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Sumatera Selatan kepada Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD Provinsi Sumatera Selatan. Saran, pendapat serta usulan yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan merupakan aspirasi masyarakat untuk merubah kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara serta rancangan anggaran pendapatan daerah sampai ditetapkannya keputusan bersama. (b). Melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD Provinsi Sumatera Selatan serta prioritas dan plafon anggaran sementara. (c). Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Daerah

dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Provinsi Sumatera Selatan dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Selatan. (d). Melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD Provinsi Sumatera Selatan dan rancangan daerah tentang pertanggung jawab pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur Provinsi Sumatera Selatan bersama tim anggaran pemerintah daerah dan DPRD Provinsi Sumatera Selatan. (e). Hasil evaluasi sebagaimana poin d, disampaikan kembali ke DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk dilaporkan dan dibahas kembali. (f). Melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD Provinsi Sumatera Selatan serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Kepala Daerah Provinsi Sumatera Selatan. dan (g). Memberikan saran kepada pimpinan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam penyusunan anggaran belanja DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sumatera Selatan

Panitia khusus dibentuk oleh DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan merupakan alat kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang bersifat sementara. DPRD Provinsi Sumatera Selatan menetapkan susunan dan keanggotaan panitia khusus berdasarkan pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi. Panitia khusus bertugas melaksanakan tugas tertentu dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh rapat paripurna. Panitia khusus bertanggung jawab kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Panitia khusus dibubarkan oleh DPRD setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai. Rapat paripurna menetapkan tindak lanjut hasil kerja panitia khusus.

Fraksi-Fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Provinsi Sumatera Selatan, serta hak dan kewajiban anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dibentuk fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Setiap anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan harus menjadi anggota salah satu fraksi. Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPRD

Provinsi Sumatera Selatan. Fraksi mempunyai sekretariat. Sekretariat Dewan DPRD Provinsi Sumatera Selatan menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.

Fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Selatan masa jabatan tahun 2019-2024, sebagai berikut:

1. Fraksi Golongan Karya

No	Nama	Jabatan
1.	H. Fatra Radezayansyah, S.T., MM.	Ketua Merangkap Anggota
2.	Nadia Basjir, S.E.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	H. Hasbi Asadiki, S.Sos, MM.	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Hj. R.A. Anita Noeringhati, S.H., M.H.	Anggota
5.	M. Yansuri, S.IP.	Anggota
6.	H. Nawawi, S.H.	Anggota
7.	Hj. Lindawati Syahropi, S.H., M,H.	Anggota
8.	Heru Prayogo, S.H.	Anggota
9.	Andie Dinaldie, S,E.	Anggota
10.	H. Medi Basri, S.Sos.	Anggota
11.	H. David Hadrianto Aljufri, S.H.	Anggota
12.	Drs. Thamrin, M.Si.	Anggota
13.	Marzuki, S.E.	Anggota
14.	H. Rizal Kennedy, S.H., MM.	Anggota

2. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

No	Nama	Jabatan
1.	Susanto Adjis, S.H.	Ketua Merangkap Anggota
2.	Ir. H. Zulfikri Kadir	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	Dedi Sipriyanto, S.Kom., MM.	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Hj. Dra. Rita Suryani	Wakil Sekretaris Merangkap Anggota
5.	Susy Imelda Frederika	Bendahara Merangkap Anggota
6.	Hj. Tina Malinda, S.E., M.Si.	Anggota
7.	H. M. Giri Ramanda N. Kiemas, S.E., MM.	Anggota
8.	Hasbullah	Anggota
9.	Ike Mayasari, S.H., M.H.	Anggota
10.	H. Ahmad Syarnubi, S.P., MM.	Anggota
11.	Hj. Meli Mustika, S.E., MM.	Anggota

3. Fraksi Gerindra

No	Nama	Jabatan
1.	Maliono, SH.	Ketua Merangkap Anggota
2.	Prima Salam, S.H.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	Raden Gempita, S.H.	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Dr. H. Budiarto Marsul, S.E., M.Si.	Bendahara Merangkap Anggota
5.	Hj. Susilawati, S.H, M.Kn.	Anggota
6.	Asgianto, S.T.	Anggota

7.	H. Saifudin Aswari Rivai, S.E.	Anggota
8.	H. Burlian, S.Sos., MM.	Anggota
9.	Kartika Sandra Desi, S.H.	Anggota
10.	H. Efrans Effendi, S.H.	Anggota

4. Fraksi Demokrat

No	Nama	Jabatan
1.	Muhamad F. Ridho, S.T., M.T.	Ketua Merangkap Anggota
2.	Hj. Ir. Holda, M.Si.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	Azmi Shofiq, S.R., S.IP.	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	H. Muchendi Mahzarekki, S.E.	Anggota
5.	H. Chairul S. Matdiah, SH., M.H.	Anggota
6.	Lia Anggraini, S.H.	Anggota
7.	H. Ir. M. Kanovriyandi	Anggota
8.	Drs. H. A. Gani Subit, MM.	Anggota
9.	Tamtama Tanjung	Anggota

5. Fraksi Kebangkitan Bangsa

No	Nama	Jabatan
1.	Nasrul Halim, S.H.	Ketua Merangkap Anggota
2.	Dr. Hj. Nilawati	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	M. Oktafiansyah, S.T., MM.	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	H. Kartak SAS., S.E.	Anggota
5.	Antoni Yuzar, S.H., M.H.	Anggota
6.	Fathan Qoribi, ST.	Anggota
7.	Hj. Dra. Nurhilyah	Anggota
8.	Meri, S.Pd.	Anggota

6. Fraksi Nasdem

No	Nama	Jabatan
1.	Dr. Ir. H. Syamsul Bahri, MM.	Ketua Merangkap Anggota
2.	H. Nopianto, S.Sos., MM.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	Yenny Elita, S.Pd., MM.	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	H. Sri Sutandi, S.E., MBA.	Anggota
5.	H. Novian Fauzi, S.H.	Anggota
6.	Herman	Anggota

7. Fraksi Partai Keadilan Kesejahteraan

No	Nama	Jabatan
1.	H. Askweni, S.Pd.	Ketua Merangkap Anggota
2.	H. M. Anwar Al Syadat, S.Si., M.Si.	Sekretaris Merangkap Anggota
3.	Mgs. H. Syaiful Padli, S.T., MM.	Bendahara Merangkap Anggota
4.	Firdaus, S.H.	Anggota
5.	H. M. Subhan, S.E.	Anggota
6.	Ahmad Toha, S.PdI., M.Si.	Anggota

8. Fraksi Partai Amanat Nasional

No	Nama	Jabatan
1.	Junaidi, S.E.	Ketua Merangkap Anggota
2.	Abusari H. Burlian, S.H., M.Si.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	H. Juanda Hanafiah, S.H., MM.	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	H. Toyeb Rakembang, S.Ag.	Bendahara Merangkap Anggota
5.	Muhammad Yaser, S.E.	Anggota

9. Fraksi Hanura-Perindo

No	Nama	Jabatan
1.	H. Ali Imron, S.E., M.Si.	Ketua Merangkap Anggota
2.	Iwan Hermawan, S.T.	Wakil Ketua Merangkap Anggota
3.	H. Syahrudin, S.T., MM.	Sekretaris Merangkap Anggota
4.	Alfrenzi Panggarbesi, S.Si.	Anggota
5.	Ahmad Firdaus Ishak, S.H., M.Si.	Anggota
6.	Rudi Hartono	Anggota

Fraksi bertugas: (a). Merumuskan dan menyalurkan hal-hal yang menjadi kebijakan partai politiknya. (b). Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi. (c). Meningkatkan kualitas, kemampuan, disiplin, tanggung jawab, motivasi, kerja sama, efisiensi dan efektivitas kinerja bagi para anggota dalam menjalankan tugas yang tercermin di setiap kegiatan DPRD Provinsi Sumatera Selatan. (d). Menyampaikan pandangan umum fraksi dan pendapat fraksi pada setiap pembahasan rancangan peraturan daerah di Provinsi Sumatera Selatan. (e). Menempatkan setiap anggota dalam penguasaan alat kelengkapan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan panitia khusus. (f). Menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat di Provinsi Sumatera Selatan.

Lampiran 2

Para Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Masa ke Masa



W. A. Rachman
Periode 1950-1951



Ali Gathmyr
Periode 1951-1956



M. Siddieq Adiem
Periode 1950-1951



R. Soegiharto
Periode 1960-1965



M. Noerdin Pandji
Periode 1965-1966



Drs. Djaidan Djahuari
Periode 1967-1970



Aidil Fitri Syah, BA.
Periode 1970-1972



Syamsulbahri
Oemar
Periode 1972-1977



M. Umar RA
Periode 1977-1982



H. Zainal Abidin Ning
Periode 1982-1987



H. Zainal Abidin Ning
Periode 1987-1992



H. Soemarsono
Periode 1992-1997



H. M. Arub, S.H.
Periode 1997-1999



Prof. Dr. Adjis Saip.
Periode 1999-2003



Drs. H. Elianuddin
Periode 2003-2004



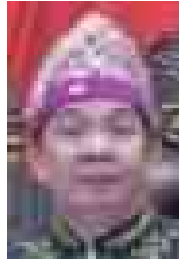
Drs. Zamzani
Achmad
Periode 2004-2009



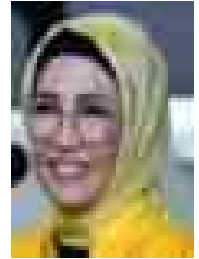
Ir. Wasista
Bambang Utoyo
Periode 2009-2014



H.M. Giri Ramanda N.
Kiemas, S.E., MM.
Periode 2014-2018



Ir. Aliandra P.
Gatanda, S.H.,
M.Hum.
Periode 2018-2019



Hj. R.A. Anita
Noeringhati, S.H.,
M.H.
Periode 2019-2024

Biodata Penulis



Dr. Dedi Irwanto, M.A. Kelahiran Pedamaran (OKI), 25 Mei 1973. Merupakan Dosen Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Unsri. Pendidikan SDN 8 Pedamaran (1981-1987), SMPN 1 Pedamaran (1987-1990), SMAN 1 Pedamaran (1990-1993). Sarjana Sastra Ilmu Sejarah di UGM Yogyakarta (1993-1998). S2 di Ilmu Sejarah FIB UGM Yogyakarta (1999) dan S3 di Ilmu Sejarah FIB UGM Yogyakarta (2021). Suami dari Dr. Agustina Bidarti, M.Si.

Memiliki empat anak, Bhagawan Fitriradjasa, Poedjangga Sastraradjasa, Choennienk Chierrannaratoeaoera dan Poetieh Chiennanntieratoeaoera. Giat dalam berbagai organisasi. Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Kota Palembang dan Direktur Puskass (Pusat Kajian Sejarah Sumatera Selatan). Tinggal di Griya Tiga Putri Blok CD-3 Jl. PDAM Tirta Musi, Bukit Lama, Palembang. Menulis berbagai buku, artikel di jurnal dan surat kabar. Giat melakukan berbagai penelitian lokal di Sumatera Selatan. No Hp. 081274225355.



Dudy Oskandar, S.H. Kelahiran di Palembang, 7 Januari 1976. Jurnalis sejarah dan budaya Sumatera Selatan. Bekerja di Harian Transparan Palembang (2002-2005). Saat ini bekerja di media Berita Pagi Palembang (sejak 2005) dan Rakyat Merdeka Online (RMol) Sumsel. Pendidikan SDN 406 Palembang (1986-1991), SMPN 27 Palembang (1991-1993), SMA YPI Tunas Bangsa Palembang (1993-1995).

Sarjana Hukum diselesaikan pada Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang (1996-2001). Suami dari Arina Fauziah, S.H. dan ayah dari Muhammad Khalid Kholilurahman (Lahir Palembang, 10

Februari 2007). Giat dalam berbagai organisasi. Selain sebagai Ketua Forum Jurnalis Parlemen (FJP) Sumatera Selatan dan Ketua Bidang Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Selatan. Aktif juga dalam Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Sumsel, Masyarakat Sejarawan Indonesia (MSI) Kota Palembang, Forum Pariwisata dan Budaya (Forwida) Provinsi Sumatera Selatan dan lain sebagainya. Saat ini tinggal di Jalan Musi V depan SMPN 33, RT004, Rw 007, Kelurahan Siring Agung, Kecamatan IB I, Palembang. No Hp. 081367716023. Menulis beberapa buku seperti Sejarah ORIDA (Oeang Repoeblik Daerah) Sumatera Selatan, Mencari Jejak Pers di Sumatera Selatan, Palembang di Tahun 1906-1942.